



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq, hidayah, dan pertolongan-Nya yang tak terhingga kepada kita semua sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2016 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penyampaian LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan implementasi dari pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Tujuannya adalah untuk memberikan keterangan kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu tahun anggaran 2016. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut, LKPJ ini lebih merupakan *progress report* (catatan atas capaian kemajuan) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama tahun 2016, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Pedoman yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti tercantum dalam peraturan tersebut mensyaratkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Target pendapatan yang direncanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 Rp. 1.329.903.835.400 dan berhasil terealisasi Rp. 1.286.277.017.400,86 atau 96,71 %. Sedangkan target belanja berjumlah Rp.1.322.742.696.400 dan terealisasi Rp. 1.245.200.058.946,64 atau 94,13% .

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPJ ini, belum merupakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tahun anggaran 2016 karena laporan keuangan daerah akan disampaikan setelah adanya hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam laporan ini juga disampaikan rincian dana Tugas Pembantuan tahun 2016 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Rp. 23.575.371.000 dan terealisasi Rp. 21.744.310.925 atau 92,23 %. Sedangkan untuk realisasi fisik mencapai 97,76 %.

Kemajuan dan keberhasilan telah dapat diraih berkat kerja keras dan dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum terselesaikan. Untuk itu, saran masukan dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap LKPJ ini menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb

Pangkalan Bun, April 2017

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. H. NURUL EDY, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Grafik	xiv
Daftar Diagram	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Dasar Hukum.....	I-2
1.2. Gambaran Umum Daerah	I-4
1.2.1 Kondisi Geografis Daerah	I-4
A. Letak Geografis.....	I-4
B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	I-4
C. Kondisi Topografi	I-5
D. Geologi.....	I-6
E. Hidrologi.....	I-9
F. Klimatologi.....	I-9
1.2.2 Gambaran Umum Demografi.....	I-11
A. Kependudukan	I-11
B. Ketenagakerjaan	I-14
1.2.3 Kondisi Perekonomian Daerah	I-15
A. Potensi Unggulan Daerah	I-15
B. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin	
Barat	I-20
a. Struktur Perekonomian	I-20
b. Pertumbuhan Ekonomi	I-23
c. PDRB Perkapita.....	I-25
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.....	II-1
2.1 Visi dan Misi	II-1
2.1.1 Visi	II-1
2.1.2 Misi	II-1
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	II-3
2.1.4 Agenda Pembangunan	II-5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-5
2.3 Prioritas Daerah	II-14

BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .	III-1
3.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-1
3.1.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-1
3.1.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III-3
3.1.3	Permasalahan dan Solusi	III-6
3.2	Pengelolaan Belanja Daerah	III-8
3.2.1	Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-8
3.2.2	Target dan Realisai Belanja	III-10
3.2.3	Permasalahan dan Solusi	III-12
BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	IV-1
4.1.1	Urusan Pendidikan	IV-2
4.1.2	Urusan Kesehatan	IV-16
4.1.3	Urusan Lingkungan Hidup	IV-49
4.1.4	Urusan Pekerjaan Umum	IV-65
4.1.5	Urusan Penataan Ruang	IV-80
4.1.6	Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-84
4.1.7	Urusan Perumahan	IV-95
4.1.8	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	IV-102
4.1.9	Urusan Penanaman Modal	IV-107
4.1.10	Urusan Koperasi dan UKM	IV-113
4.1.11	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-121
4.1.12	Urusan Ketenagakerjaan	IV-128
4.1.13	Urusan Ketahanan Pangan	IV-137
4.1.14	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-150
4.1.15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-160
4.1.16	Urusan Perhubungan	IV-167
4.1.17	Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-177
4.1.18	Urusan Pertanahan	IV-183
4.1.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik DN	IV-185
4.1.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IV-200
20.1	Sekretariat Daerah	IV-200

20.2	Sekretariat DPRD	IV-213
20.3	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	IV-219
20.4	Badan Kepegawaian Daerah	IV-230
20.5	Inspektorat Kabupaten	IV-240
20.6	Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan	IV-246
20.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	IV-252
20.8	Kantor Kecamatan	IV-258
8.a	Kecamatan Arut Selatan	IV-259
8.b	Kecamatan Kotawaringin Lama.....	IV-262
8.c	Kecamatan Kumai	IV-266
8.d	Kecamatan Pangkalan Banteng	IV-269
8.e	Kecamatan Pangkalan Lada	IV-273
8.f	Kecamatan Arut Utara	IV-276
4.1.21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV-281
4.1.22	Urusan Sosial	IV-290
4.1.23	Urusan Kebudayaan	IV-303
4.1.24	Urusan Statistik	IV-308
4.1.25	Urusan Kearsipan	IV-312
4.1.26	Urusan Perpustakaan.....	IV-317
4.2	Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	IV-322
4.2.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-322
4.2.2	Urusan Pertanian	IV-331
2.1	Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan	IV-331
2.2	Sub Sektor Perkebunan	IV-348
4.2.3	Urusan Kehutanan	IV-362
4.2.4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-369
4.2.5	Urusan Pariwisata	IV-374
4.2.6	Urusan Industri	IV-381
4.2.7	Urusan Perdagangan	IV-389
4.2.8	Urusan Ketransmigrasian	IV-396
BAB V	TUGAS PEMBANTUAN	V-1
5.1	Tugas Pembantuan yang diterima	V-2
5.1.1	Dinas Perkebunan	V-2
5.1.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	V-5
5.1.3	Dinas Pertanian dan Peternakan	V-7
5.1.4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	V-18

BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
6.1	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ke-tiga	VI-1
6.1.1	Dinas Kesehatan	VI-1
6.1.2	RSUD Sultan Imanuddin	VI-2
6.1.3	Inspektorat Kabupaten	VI-5
6.2	Koordinasi dengan Instansi Vertkal di Daerah	VI-7
6.2.1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	VI-7
6.2.2	Pemeliharaan Keamanan	VI-9
6.3	Pembinaan Batas Wilayah	VI-10
6.4	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-14
6.5	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-20
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan.....	I-4
Tabel 1.2	Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat	I-6
Tabel 1.3	Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat	I-8
Tabel 1.4	Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut	
	Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata	
	Kedalaman	I-9
Tabel 1.5	Suhu Udara Rata-rata, Maksimum/Minimum di Stasiun	
	Meteorologi Pangkalan Bun	I-10
Tabel 1.6	Kecepatan Angin Rata-rata di Pangkalan Bun	I-10
Tabel 1.7	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Pangkalan Bun .	I-11
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhannya	I-11
Tabel 1.9	Jumlah Penduduk Laki-Laki, Perempuan dan Rasio Jenis	
	Kelamin	I-12
Tabel 1.10	Penduduk Menurut Kelompok Umur	I-12
Tabel 1.11	Kepadatan Penduduk per Kecamatan	I-13
Tabel 1.12	Penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut Kegiatan	
	Utama.....	I-14
Tabel 1.13	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat .	I-14
Tabel 1.14	Persentase Penduduk berumur 15 tahun keatas yang	
	bekerja menurut Lapangan Usaha	I-15
Tabel 1.15	Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan	I-18
Tabel 1.16	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2015	I-21
Tabel 1.17	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga	
	Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015	I-21
Tabel 1.18	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga	
	Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015	I-22
Tabel 1.19	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	I-25
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten	
	Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016	III-3
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten	
	Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015	III-11
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan.....	IV-3
Tabel 4.2	Program/Kegiatan Urusan Pendidikan	IV-7
Tabel 4.3	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan	IV-17
Tabel 4.4	Program/Kegiatan Urusan Kesehatan.....	IV-22
Tabel 4.5	Jumlah Tempat Sampah	IV-55

Tabel 4.6	Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup	IV-56
Tabel 4.7	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Statusnya	IV-66
Tabel 4.8	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya	IV-67
Tabel 4.9	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya.....	IV-67
Tabel 4.10	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kelas Jalan.....	IV-67
Tabel 4.11	Klasifikasi Jembatan Berdasarkan Kondisi Fisiknya	IV-68
Tabel 4.12	Indikator Rasio Jaringan Irigasi	IV-69
Tabel 4.13	Jumlah Infrastruktur Air Limbah	IV-70
Tabel 4.14	Capaian Pembangunan Drainase	IV-71
Tabel 4.15	Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	IV-71
Tabel 4.16	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang.....	IV-82
Tabel 4.17	Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang	IV-83
Tabel 4.18	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perenc. Pembangunan....	IV-86
Tabel 4.19	Program/Kegiatan Urusan Perenc. Pembangunan	IV-87
Tabel 4.20	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan.....	IV-97
Tabel 4.21	Program/Kegiatan Urusan Perumahan	IV-98
Tabel 4.22	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemuda & Olahraga	IV-103
Tabel 4.23	Program/Kegiatan Urusan Pemuda & Olahraga	IV-104
Tabel 4.24	Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal	IV-108
Tabel 4.25	Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal	IV-111
Tabel 4.26	Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal.....	IV-112
Tabel 4.27	Jumlah Koperasi dan Statusnya.....	IV-114
Tabel 4.28	Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM	IV-114
Tabel 4.29	Penilaian Kondisi KSP/ USP	IV-115
Tabel 4.30	Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM.....	IV-115
Tabel 4.31	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-122
Tabel 4.32	Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catpil.....	IV-123
Tabel 4.33	Statistik Ketenagakerjaan Kab. Kotawaringin Barat	IV-129
Tabel 4.34	Kondisi Pasar Kerja di Kab. Kotawaringin Barat	IV-130
Tabel 4.35	Capaian Indikator Kinerja Ketenagakerjaan	IV-131
Tabel 4.36	Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan.....	IV-132
Tabel 4.37	Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan	IV-143
Tabel 4.38	Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-152
Tabel 4.39	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-163
Tabel 4.40	Jumlah Peserta KB Aktif	IV-163
Tabel 4.41	Program/ Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan	

	Keluarga Sejahtera	IV-164
Tabel 4.42	Jumlah Sistem Jaringan Transportasi	IV-168
Tabel 4.43	Jumlah Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas	IV-168
Tabel 4.44	Jumlah Kendaraan Yang Di Uji	IV-168
Tabel 4.45	Program/Kegiatan Urusan Perhubungan	IV-171
Tabel 4.46	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-178
Tabel 4.47	Program/ Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-179
Tabel 4.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan	IV-183
Tabel 4.49	Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	IV-184
Tabel 4.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-186
Tabel 4.51	Pelanggaran Perda di Kab. Kotawaringin Barat	IV-187
Tabel 4.52	Program/ Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-188
Tabel 4.53	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah	IV-201
Tabel 4.54	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD	IV-214
Tabel 4.55	Capaian Indikator Keuangan Daerah Kabupaten Kobar	IV-220
Tabel 4.56	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh DPKD	IV-223
Tabel 4.57	Usul dan Alokasi Formasi PNS	IV-231
Tabel 4.58	Komposisi Penerimaan PNS Menurut Golongan	IV-231
Tabel 4.59	Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS	IV-232
Tabel 4.60	Data Base Kepegawaian	IV-232
Tabel 4.61	Penanganan Kasus-Kasus PNS	IV-233
Tabel 4.62	Penghargaan PNS Berprestasi	IV-233
Tabel 4.63	Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IV-234
Tabel 4.64	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan	

	oleh Badan Kepegawaian	IV-234
Tabel 4.65	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten	IV-242
Tabel 4.66	Jenis dan Realisasi Perizinan di Kab. Ktw. Barat.....	IV-247
Tabel 4.67	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh KPTP	IV-249
Tabel 4.68	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh BPBD	IV-254
Tabel 4.69	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Selatan.....	IV-259
Tabel 4.70	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama.....	IV-263
Tabel 4.71	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kumai	IV-266
Tabel 4.72	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng	IV-270
Tabel 4.73	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Lada	IV-273
Tabel 4.74	Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Utara	IV-277

Tabel 4.75	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-282
Tabel 4.76	Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-282
Tabel 4.77	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Sosial	IV-293
Tabel 4.78	Program/ Kegiatan Urusan Sosial	IV-294
Tabel 4.79	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	IV-304
Tabel 4.80	Program/ Kegiatan Urusan Kebudayaan.....	IV-305
Tabel 4.81	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik	IV-309
Tabel 4.82	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	IV-313
Tabel 4.83	Program/ Kegiatan Urusan Kearsipan.....	IV-313
Tabel 4.84	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan	IV-319
Tabel 4.85	Program/ Kegiatan Urusan Perpustakaan.....	IV-320
Tabel 4.86	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-323
Tabel 4.87	Program/ Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	IV-326
Tabel 4.88	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan.....	IV-332
Tabel 4.89	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian Tanaman Pangan	IV-332
Tabel 4.90	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran	IV-333
Tabel 4.91	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan	IV-334
Tabel 4.92	Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-336
Tabel 4.93	Program/ Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan	IV-337
Tabel 4.94	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-346
Tabel 4.95	Potensi Lahan di Wilayah Kotawaringin Barat.....	IV-349
Tabel 4.96	Luas Areal Perkebunan Per Komoditi	IV-349
Tabel 4.97	Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kepemilikan	IV-350
Tabel 4.98	Produksi Perkebunan per Komoditi.....	IV-350
Tabel 4.99	Nama Perusahaan Perkebunan di Kotawaringin Barat	IV-351
Tabel 4.100	Pabrik CPO di Kab. di Kotawaringin Barat	IV-351
Tabel 4.101	Pabrik PKO di Kab. di Kotawaringin Barat	IV-352
Tabel 4.102	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan.....	IV-352
Tabel 4.103	Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada per Kecamatan.	IV-353

Tabel 4.104	Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren per Kecamatan. .	IV-354
Tabel 4.105	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Subsektor Perkebunan	IV-355
Tabel 4.106	Program/ Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan.....	IV-356
Tabel 4.107	Luas Potensi Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan SK MENHUT NO: SK.529/ Menhut- II/2012...	IV-363
Tabel 4.108	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	IV-363
Tabel 4.109	Jumlah Produksi Hasil Hutan	IV-364
Tabel 4.110	Program/ Kegiatan Urusan Kehutanan	IV-364
Tabel 4.111	Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan	IV-371
Tabel 4.112	Program/ Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-371
Tabel 4.113	Potensi Obyek Wisata di Kab. Kotawaringin Barat.....	IV-375
Tabel 4.114	Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata	IV-376
Tabel 4.115	Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian	IV-383
Tabel 4.116	Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian.....	IV-383
Tabel 4.117	Perkembangan Potensi Industri Kecil Menengah.....	IV-384
Tabel 4.118	Program/ Kegiatan Urusan Industri	IV-384
Tabel 4.119	Perkembangan Jumlah Industri di Ktw. Barat	IV-388
Tabel 4.120	Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan	IV-389
Tabel 4.121	Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan	IV-392
Tabel 4.122	Data Transmigran dan Penempatannya	IV-397
Tabel 4.123	Program/ Kegiatan Urusan Transmigrasi	IV-398
Tabel 5.1	Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan.....	V-4
Tabel 5.2	Daftar Nama Penerima Bantuan Karet	V-4
Tabel 5.3	Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.....	V-6
Tabel 5.4	Realisasi Program/ Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan	V-13
Tabel 5.5	Daftar Nama Penerima Bantuan Padi Organik dan Hazton ..	V-14
Tabel 5.6	Rekapitulasi Jumlah Bantuan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Padi, Budidaya Jagung, dan Kedelai per Kecamatan	V-14
Tabel 5.7	Kelompok Tani Penerima Bantuan Fasilitas Pendukung Indukan di Kobar	V-15
Tabel 5.8	Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kobar	V-15

Tabel 5.9	Kelompok Tani Penerima Bantuan Budidaya Ayam Lokal di Kabupaten Kobar	V-15
Tabel 5.10	Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Indukan Sapi Potong Melalui Kegiatan Integrasi Sapi-Sawit di Kabupaten Kobar	V-15
Tabel 5.11	Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kobar	V-19
Tabel 6.1	Daftar Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga RSUD Sultan Imanuddin	VI-3
Tabel 6.2	Hasil Kesepakatan Penetapan Batas Sementara Tata Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	VI-12
Tabel 6.3	Data Bencana Kebakaran	VI-15
Tabel 6.4	Data Bencana Alam Banjir di Kobar	VI-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat	I-5
Gambar 1.2	Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat	I-9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 - 2015.....	I-24

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	I-13
Diagram 1.2	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Th. 2010-2015..	I-26
Diagram 4.1	Persentase Wanita Kawin Pertama.....	IV-161
Diagram 4.2	Pencapaian Peserta KB Baru	IV-162
Diagram 4.3	Pencapaian Peserta KB Aktif	IV-162

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 sampai dengan pasal 74 telah mengamanatkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Penyusunan LKPJ dilakukan sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD saat ini merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan kemitraan juga bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Kedua lembaga diharapkan dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan menjadi lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

Begitu pula dalam penetapan anggaran yang dilakukan bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. LKPJ merupakan sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

LKPJ yang disusun memiliki makna yang sangat strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Melalui mekanisme ini, progress dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

1.1 DASAR HUKUM

Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 12).
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 5).
 - 14) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43).
 - 15) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 40).

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH**1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH****A. Letak Geografis**

Secara geografis, wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1°19' sampai dengan 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' sampai dengan 112°50° Bujur Timur (Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016).

B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dan memiliki Daerah Aliran Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau dengan ibukota Pangkalan Bun. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau sekitar 6,2 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai.

Tabel 1.1
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

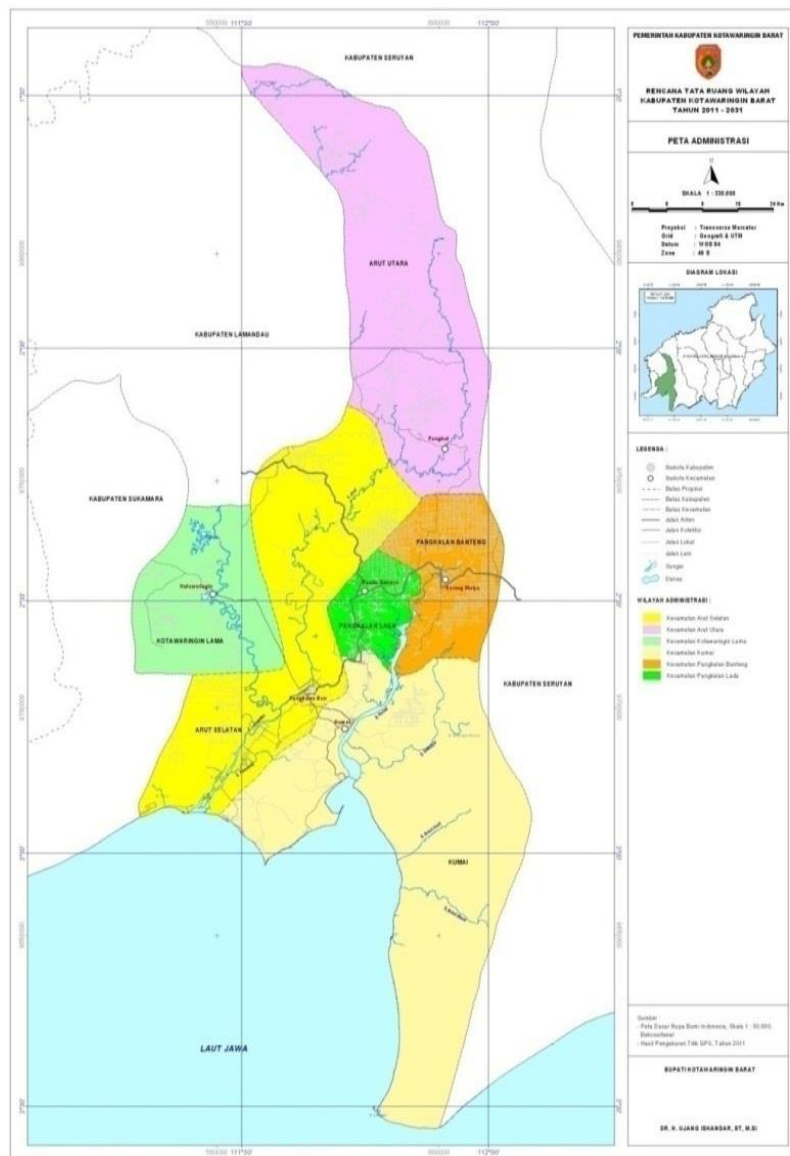
Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	10.759	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016

Secara administratif, letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Gambaran letak geografis dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara detail dapat dilihat pada **Gambar 1.1** sebagai berikut :



Gambar 1.1
Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat
(Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)

C. Kondisi Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;
3. Sebelah selatan adalah danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam

penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan pertanian dalam arti luas.

Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata $0,6^{\circ}$, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan $< 40\%$. Lahan yang mempunyai kemiringan $> 40\%$ termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40% penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Tabel 1.2
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	Jumlah
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah		462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%		46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

D. Geologi

Jenis tanah di daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Podsolik Merah Kuning, tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil terdapat di Kecamatan Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar di bagian timur Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran Sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.

Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksilik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.

Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 (sepuluh) formasi, yaitu :

1. Batuan Terobosan Sintang;
2. Granit Mandahan;
3. Granit Sukadana;
4. Batuan GA Berapi;
5. Tonalik Sepauk;
6. Formasi Dahor;
7. Endapan Rawa;
8. Batuan Gunung api;
9. Alluvium; dan
10. Formasi Laut.

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut ini :

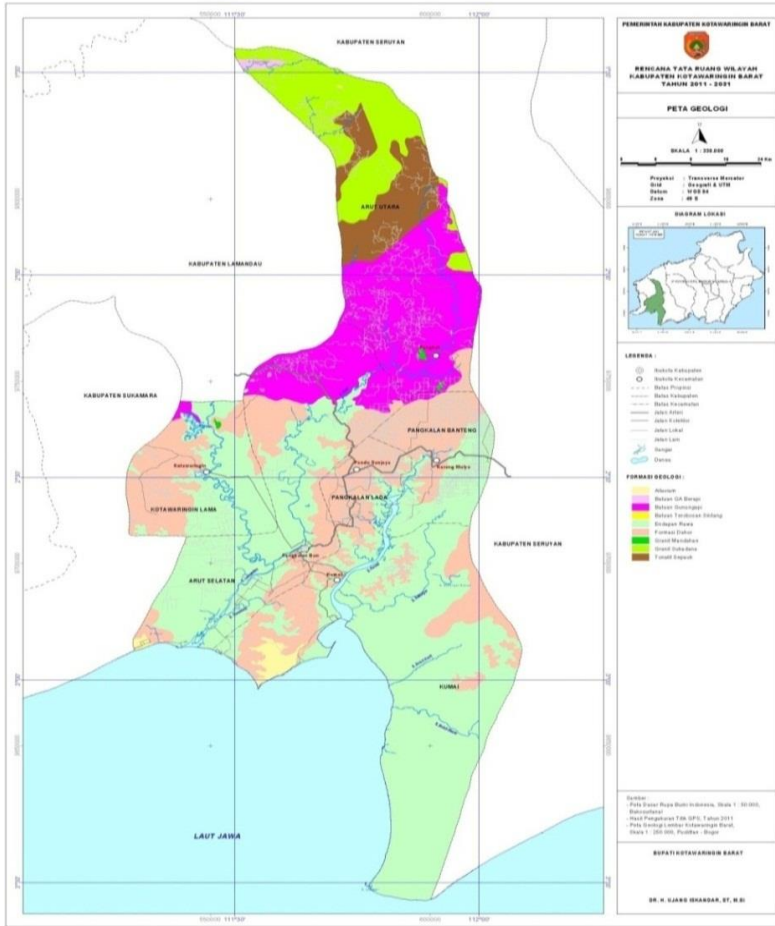
Tabel 1.3
Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	(%)
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai*	Arut Utara	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	Batuan GA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,03	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
8.	Batuan Gunung api	0	48.533,61	0	108.479,87	792,87	0	157.806,35	18,11
9.	Alluvium	0	129,33	6.912,01	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
JUMLAH		113.643,89	217.663,86	186.711,46	249.450,98	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100

Sumber : Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

* Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

Berdasarkan **Tabel 1.3** di atas terlihat bahwa formasi geologi terbanyak yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2
Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat

E. Hidrologi

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya.

Tabel 1.4
Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang
yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016

F. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab karena secara geografis masih terletak di sekitar garis khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar antara 30,7°C – 32,8°C dan suhu minimum antara 30,7°C - 32,8°C. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 Knot.

Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan sebanyak 202 hari. Curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah selatan hingga ke pedalaman semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir. Rincian kondisi suhu udara, kecepatan angin dan banyaknya curah hujan disajikan pada **Tabel 1.5**, **Tabel 1.6** dan **Tabel 1.7**.

Tabel 1.5
Suhu Udara Rata-rata, Maksimum/Minimum di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun Tahun 2012 – 2015

Bulan	Suhu Udara (°C)							
	2012		2013		2014		2015	
	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.
01. Januari	32,9	23,0	32,5	23,4	34,4	22,2	32,6	23,2
02. Pebruari	32,8	23,0	32,7	23,3	36,4	22,0	32,5	22,2
03. Maret	32,9	23,1	33,8	23,5	34,8	22,0	32,2	23,2
04. April	33,5	23,4	32,8	23,6	34,4	22,4	32,1	23,4
05. Mei	33,5	23,1	32,6	23,9	35,8	20,0	32,4	23,6
06. Juni	32,6	22,6	33,1	23,6	35,4	18,8	33,6	21,6
07. Juli	31,2	22,4	31,6	22,5	33,4	21,0	33,8	20,2
08. Agustus	32,2	21,2	31,5	22,5	33,8	21,3	34,8	19,8
09. September	33,0	22,0	32,1	23,0	35,5	21,0	35,2	20,2
10. Oktober	33,6	23,0	33,4	22,9	36,2	20,8	34,8	20,5
11. Nopember	33,0	23,3	32,5	23,0	35,4	22,0	35,2	22,0
12. Desember	32,3	23,2	31,9	23,4	35,0	22,2	35,9	22,0

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012-2016

Tabel 1.6
Kecepatan Angin Rata-rata di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun (Knot) Tahun 2012 – 2015

Bulan	Kecepatan Angin							
	2012		2013		2014		2015	
	Maks.	Rata-rata	Maks.	Rata-rata	Maks	Rata-rata	Maks	Rata-rata
01. Januari	13,0	7,6	15	2,5	19	3,1	15	2,6
02. Pebruari	14,0	7,8	11	2,1	11	2,5	15	2,8
03. Maret	15,0	8,0	15	2,2	16	2,2	15	1,8
04. April	12,0	7,6	16	2,3	12	1,6	12	1,6
05. Mei	33,5	7,5	16	2,2	13	2,4	15	2,4
06. Juni	16,0	9,2	21	2,1	18	2,4	13	2,8
07. Juli	18,0	10,4	16	2,4	14	2,9	12	3,4
08. Agustus	14,0	10,4	15	3,2	14	3,4	14	3,8
09. September	14,0	10,0	15	3,0	22	3,6	14	4,0
10. Oktober	12,0	8,6	15	2,8	16	3,3	14	2,7
11. Nopember	16,0	8,2	22	2,3	12	2,4	20	1,7
12. Desember	12,0	7,4	14	2,4	12	2,3	15	2,0

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2013-2016

Tabel 1.7
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Stasiun Meteorologi
Pangkalan Bun Tahun 2012 - 2015

Bulan	Jumlah Hari Hujan			Curah Hujan (mm)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01. Januari	19	12	29	152,5	139,2	219,8
02. Pebruari	19	16	15	180,9	208,4	325,8
03. Maret	25	24	24	233,2	423,8	263,6
04. April	24	27	18	326,0	193,6	353,3
05. Mei	22	23	17	236,2	321,7	239,8
06. Juni	15	19	17	229,0	229,1	97,5
07. Juli	18	10	11	224,3	38,6	56,4
08. Agustus	15	15	5	201,1	132,1	12,6
09. September	18	8	2	146,7	48,9	19,5
10. Oktober	12	10	4	139,2	62,7	66,7
11. Nopember	25	21	19	341,7	308,4	131
12. Desember	27	25	20	353,4	200,4	511
Jumlah	239	210	181	2 764,2	2 306,9	2 297,0

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2013-2016

1.2.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

A. Kependudukan

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan yang sejalan dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 278.141 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,14 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2.495.035 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk
Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2012 – 2015

No	Kecamatan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Laju Pertumb. 2014-2015	Rata-rata Laju Pertumb. 2012-2015
1	Kotawaringin Lama	17.777	18.232	18.695	19.157	2,47	2,52
2	Arut Selatan	105.176	108.378	111.658	114.952	2,95	3,01
3	Kumai	49.612	51.056	52.534	54.015	2,82	2,87
4	Pangkalan Banteng	33.890	35.525	37.231	38.993	4,73	4,79
5	Pangkalan Lada	29.804	30.686	31.589	32.494	2,86	2,92
6	Arut Utara	16.740	17.323	17.922	18.530	3,39	3,44
Kotawaringin Barat		253.000	261.200	269.629	278.141	3,16	3,21

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2013-2016

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah pada pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar merupakan faktor pengurang.

Pada pertengahan tahun 2015 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 %, dari 269.629 jiwa pada tahun 2014 menjadi 278.141 jiwa pada pertengahan tahun 2015. Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 1.9, Tabel 1.10 dan Tabel 1.11.**

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Laki-Laki, Perempuan, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kotawaringin Lama	10.147	9.010	19.157	113
2	Arut Selatan	59.910	55.042	114.952	109
3	Kumai	28.257	25.758	54.015	110
4	Pangkalan Banteng	21.032	17.961	38.993	117
5	Pangkalan Lada	17.297	15.197	32.494	114
6	Arut Utara	10.649	7.881	18.530	135
Jumlah 2015		147.292	130.849	278.141	113
2014		142.742	126.887	269.629	112,50

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2015 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 113 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 135. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 135 penduduk laki-laki.

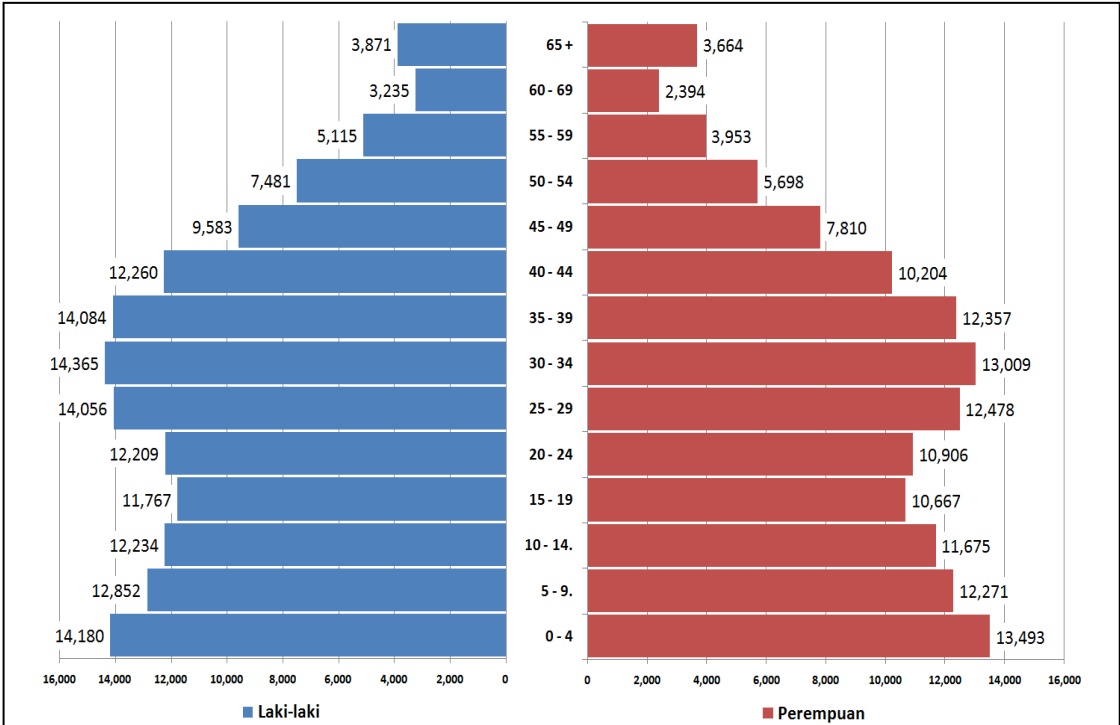
Tabel 1.10
Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Seks Rasio	% terhadap Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
0 – 4	14.180	13.493	27.673	105	9,95
5 – 9	12.852	12.271	25.123	105	9,03
10 – 14	12.234	11.675	23.909	105	8,60
15 – 19	11.767	10.667	22.434	110	8,07
20 – 24	12.209	10.906	23.115	112	8,31
25 – 29	14.056	12.748	26.804	110	9,64
30 – 34	14.365	13.009	27.374	110	9,84
35 – 39	14.084	12.357	26.441	114	9,51
40 – 44	12.260	10.204	22.464	120	8,08
45 – 49	9.583	7.810	17.393	123	6,25
50 – 54	7.481	5.698	13.179	131	4,74
55 – 59	5.115	3.953	9.068	129	3,26
60 – 64	3.235	2.394	5.629	135	2,02
65 +	3.871	3.664	7.535	106	2,71
Jumlah	147.292	130.849	278.141	113	100,00

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016

Tabel di atas memperlihatkan penduduk kelompok umur 0 - 4 tahun lebih banyak dibanding penduduk kelompok umur 5 - 9 tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat fertilitas pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2014.

Diagram 1.1
Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2015



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS) Tahun 2016

Dari piramida penduduk tersebut terlihat komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa, kemudian kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar dibanding penduduk perempuan di usia yang sama.

Tabel 1.11
Kepadatan Penduduk, Persentase jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Persentase jumlah Penduduk per Kecamatan (%)
1	Kotawaringin Lama	16	6,89
2	Arut Selatan	48	41,33
3	Kumai	18	19,42
4	Pangkalan Banteng	30	14,02
5	Pangkalan Lada	142	11,68
6	Arut Utara	7	6,66
Jumlah 2015		26	100
2014		25,06	

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2016

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2015 sebesar 26 jiwa per Km². Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada sebesar 142 jiwa per Km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 48 jiwa per Km², Kecamatan Pangkalan Banteng 30 jiwa per Km², Kecamatan Kumai 18 jiwa per Km², Kecamatan Kotawaringin Lama 16 jiwa per Km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 7 jiwa per Km².

B. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Kelompok penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 202.545 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.12
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2015

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
I	Angkatan Kerja	126.935	67,63	136.864	70,05	145.749	71,96
1.	Bekerja	122.307	65,16	133.222	68,19	141.011	69,62
2.	Pengangguran Terbuka	4.628	2,47	3.642	1,86	4.738	2,34
II	Bukan Angkatan Kerja	60.759	32,37	58.509	29,95	56.798	28,04
1.	Sekolah	15.141	8,07	17.465	8,94	14.855	7,33
2.	Mengurus Rumah Tangga	39.732	21,17	35.598	18,22	37.949	18,74
3.	Lainnya	5.886	3,14	5.446	2,79	3.992	1,97
Jumlah		187.694	100	195.373	100	202.545	100

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2016

Pada tahun 2015, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 202.545 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 71,96 % merupakan angkatan kerja, sedangkan 28,04 % bukan merupakan angkatan kerja. Dari 145.749 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 4.738 orang atau 2,34 %. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 2 %. Adapun data capaian indikator TPT dan indikator makro ekonomi lainnya untuk tahun 2016 belum diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPS Kobar).

Tabel 1.13
Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2008 – 2015

No.	Tahun	Angkatan Kerja/ AK (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) %	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
1.	2008	112.285	67,73	94,57	5,43
2.	2009	103.945	64,98	95,26	4,74
3.	2010	120.734	65,41	95,54	4,46
4.	2011	123.110	74,04	97,19	2,81
5.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
6.	2013	126.935	67,63	97,53	2,47
7.	2014	136.864	70,05	98,14	1,86
8.	2015	145.749	71,96	97,66	2,34

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 278.141 jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 145.749 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,96 %, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 97,66 % serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,34 %. Perkembangan tingkat pengangguran tujuh tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 5,43 % pada tahun 2008 menjadi 2,34 % pada tahun 2015.

Proporsi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2012 – 2015 berdasarkan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 1.14 berikut ini.

Tabel 1.14
Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2015

No.	Lapangan Pekerjaan	2013		2014		2015	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45.505	38,07	65.960	49,51	55.160	39,12
2	Pertambangan & Penggalian	13.662	11,43	3.724	2,80	2.595	1,84
3	Industri Pengolahan	9.848	8,24	6.049	4,54	8.891	6,30
4	Listrik, Gas & Air	513	0,43	240	0,18	0	0
5	Bangunan/ Konstruksi	8.628	7,22	8.801	6,61	9.824	6,97
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	21.040	17,60	25.925	19,46	34.228	24,27
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	6.469	5,41	6.983	5,24	8.225	5,83
8	Keuangan, Perbankan & Jasa Perusahaan	1.132	0,95	1.352	1,01	2.761	1,96
9	Jasa-jasa	12.736	10,65	14.188	10,65	19.327	13,70
JUMLAH		119.533	100	133.222	100	141.011	100

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2016

Sektor Pertanian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2015 yaitu sebesar 39,12 %, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 24,27 % dan sektor jasa sebesar 13,70 % yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia lapangan usaha sebesar 79,62 %.

1.2.3 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

A. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Dearah Kotawaringin Barat No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 dijelaskan bahwa aspek-aspek internal yang menjadi faktor kekuatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- Tingkat pendidikan dan wawasan aparat pemerintah yang semakin meningkat terhadap kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara tercermin diantara dari jumlah peserta pemilu yang meningkat.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi yaitu sebesar 68,39.
- Anggaran bidang pendidikan telah mencapai 23 %.
- Angka partisipasi pendidikan dasar sudah cukup tinggi hingga mencapai 92,23 %.
- Anggaran daerah untuk pendidikan telah mencapai 23 %.
- Pertumbuhan ekonomi berada diatas rata-rata provinsi.
- Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan makin meningkat.
- Pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat makin baik, antara lain tercermin dari keberhasilan daerah meraih adipura selama sepuluh tahun berturut-turut.
- Sektor pertanian komoditas jagung menunjukkan prospek yang cukup menggembirakan.
- Sektor perkebunan juga cukup baik pertumbuhannya, terutama untuk komoditas kelapa sawit.
- Potensi wilayah yang sangat mendukung untuk perkembangan pertanian lahan kering.
- Sektor pariwisata dan perikanan yang belum tergali secara optimal adalah sumber pendapatan yang potensial.

Sedangkan aspek-aspek eksternal yang menjadi faktor peluang bagi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- Semakin beragamnya media informasi yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan berbagai pedoman tentang demokrasi, berbangsa dan bernegara.
- Kondisi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional dapat mempengaruhi pelaksanaan kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara yang menunjang persatuan dan kesatuan.
- Kepedulian kalangan pihak swasta (usaha, industri) dan lembaga Perguruan Tinggi terhadap pengembangan pendidikan semakin besar terutama dalam bentuk kerjasama.
- Adanya organisasi profesi yang memiliki komitmen terhadap pendidikan.
- Meningkatnya kepedulian dan kerjasama dari pihak perguruan tinggi, industri obat-obatan, dan LSM Kesehatan Nasional dalam permasalahan kesehatan dan pengembangan kesehatan.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki posisi strategis karena terletak di tengah-tengah kepulauan Nusantara dan diapit dua Alur Laut Kepulauan Indonesia serta memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dipromosikan dan dijual ke pasar berskala regional maupun internasional. Potensi yang dimiliki meliputi sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat serta *eco-cultural tourism* yang didasarkan atas keunikan aneka ragam budaya-budaya lokal dan keanekaragaman hayati yang layak dikembangkan.

Potensi unggulan daerah ditentukan atas dasar pertimbangan dan kriteria :

- Komoditas yang diunggulkan merupakan motor penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Mencerminkan potensi sumber daya alam dan secara ekonomi;
- Memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor lainnya;
- Mampu menciptakan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- Memiliki keramahan lingkungan dan efek kerusakan yang kecil terhadap alam.

Berdasarkan kriteria di atas, dapat dirumuskan sektor unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

- (1) Pertanian dalam arti luas;
- (2) Perdagangan;
- (3) Industri pengolahan;
- (4) Jasa-jasa dan Pengangkutan; dan
- (5) Komunikasi.

Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang menjadi sektor basis. Sedangkan dari hasil analisa berbagai aspek internal yang menjadi faktor kekuatan dan aspek eksternal yang menjadi faktor peluang serta sektor-sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka ditetapkanlah Produk Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 520/06/Bapp-III/2016. Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

- (1) *Crude Palm Oil* (CPO)
- (2) Krupuk Amplang,
- (3) Ekowisata, dan
- (4) Daging sapi potong.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersebut diatas merupakan produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong untuk memasuki pasar global.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini selain terlihat dari potensi sumber daya alamnya yang melimpah, juga dibuktikan dengan pertumbuhan ekonominya yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut ditopang oleh beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan melalui komoditi/ produk/ jenis usaha unggulannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditetapkan sejumlah KPJU yang telah unggul dalam sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pertumbuhan ekonomi di masa datang, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.15
Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
Pertanian/ Tanaman Pangan			Pertambangan dan Bahan Galian		
1.	Padi Sawah	0,313	1.	Emas	0,324
2.	Jagung Manis	0,226	2.	Batu Gunung	0,213
3.	Kacang Tanah	0,216	3.	Pasir Zirkon	0,174
4.	Ubi Kayu	0,127	4.	Tanah Urug	0,157
5.	Ubi Jalar	0,118	5.	Pasir Batu	0,132
Pertanian/ Hortikultura			Industri Pengolahan		
1.	Sawi	0,405	1.	Amplang	0,344
2.	Pisang	0,201	2.	Roti	0,268
3.	Kacang Panjang	0,184	3.	Kue Jajanan	0,160
4.	Nangka	0,109	4.	Batako	0,122
5.	Rambutan	0,101	5.	Batu Bata	0,106
Pertanian/ Perkebunan			Perdagangan		
1.	Kelapa Sawit	0,358	1.	Pakaian Jadi	0,233
2.	Karet	0,320	2.	Ikan	0,232
3.	Kelapa (dalam)	0,132	3.	Toko Sembako	0,182
4.	Lada	0,126	4.	Emas	0,177
5.	Jabon	0,064	5.	Sayuran	0,176
Pertanian/ Peternakan			Pariwisata, Hotel dan Restoran		
1.	Sapi Pedaging	0,389		Warung Kopi	0,308
2.	Ayam Ras Pedaging	0,344		Hotel (melati)	0,231
3.	Ayam Buras	0,122		Wisata Alam	0,208
4.	Walet	0,088		Rumah Makan	0,156
5.	Entog (itik)	0,058		Losmen	0,097
Pertanian/ Perikanan			Transportasi		
1.	Ikan Nila (kolam)	0,258	1.	Angkutan Barang	0,306
2.	Ikan Mas (kolam)	0,220	2.	Angkutan Antar Kota	0,263
3.	Ikan Patin (kolam)	0,219	3.	Taksi	0,157
4.	Ikan Lela Dumbo (kolam)	0,158	4.	Angkutan Kota	0,145
5.	Kerang (tangkap)	0,145	5.	Speed Boat	0,129

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
	Kehutanan (non kayu)			Konstruksi dan Jasa Usaha	
1.	Rotan	0,321	1.	Tukang Batu	0,263
2.	Kayu Gembor	0,227	2.	Tukang Bangunan	0,245
3.	Nipah	0,202	3.	Bengkel Motor	0,225
4.	Gaharu	0,168	4.	Jasa Cuci Mobil	0,198
5.	Damar	0,081	5.	Buruh Harian	0,069

Sumber : Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan oleh Bank Indonesia Th.2013

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta titik kekuatan dan titik kritis terhadap KPJU unggulan maka telah direkomendasikan beberapa masukan sebagai berikut:

a. Padi Sawah

Rekomendasi bagi pelaku UMKM dengan menggunakan varietas atau bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam setempat sehingga hasil yang akan diperoleh akan lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Bagi instansi pemerintah terkait dapat memberikan bantuan modal dan teknologi modern serta dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam budidaya padi sawah.

b. Karet

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas dengan penggunaan bibit berkualitas dan proses pemeliharaan yang baik. Selain itu, membentuk klaster karet dan asosiasi petani karet. Kendala yang dihadapi selama ini adalah belum tersedianya pabrik pengolahan karet pada sentra perkebunan.

c. Kelapa Sawit

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk. Penting sekali bagi para petani memperhatikan bibit yang digunakan apakah berkualitas atau tidak. Bagi instansi pemerintah, berperan dalam menyediakan bibit unggul, pengembangan bibit unggul bersama pelaku UMKM secara mandiri, pengadaan pabrik pengolahan sawit di wilayah yang belum tersedia, dan peningkatan pelatihan teknik budidaya. Sedangkan bagi perbankan dapat memberikan kemudahan akses permodalan dan sosialisasi besaran kredit pembiayaan.

d. Sapi Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah mengembangkan agribisnis pembibitan sapi potong, pemanfaatan sumber daya lokal potensial yang ada di lokasi usaha yang tersedia dengan mudah dan harga murah, mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan budidaya. Bagi instansi pemerintah terkait adalah memfasilitasi dan advokasi terutama dalam dukungan modal, inovasi teknologi, pembinaan kepada petani terkait teknik pembibitan serta manajemen usaha, dan mendatangkan sapi betina untuk pembibitan sapi. Bagi perbankan dengan pemberian bantuan modal.

e. Ayam Ras Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah dengan pengadaan bibit dan pakan secara mandiri. Bagi instansi pemerintah terkait adalah dengan pembinaan dan pelatihan untuk pembibitan ayam potong dan pembuatan pakan yang baik, berkualitas, efektif dan efisien dalam pembiayaan. Bagi perbankan adalah mempermudah akses permodalan yaitu dengan membangun jaringan perbankan di lokasi-lokasi yang belum tersedia.

f. Ikan Patin (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk dan membangun pembibitan patin. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan penggunaan bibit unggul, efisiensi dalam proses budidaya, baik dalam pembuatan kolam, pengawasan kualitas air, proses pengiriman yang sesuai standar serta melakukan inovasi produk olahan dari ikan patin. Bagi instansi pemerintah terkait dengan memberikan pelatihan dan pembinaan dalam pembibitan ikan patin serta teknik budidaya yang baik, efisien dan berdaya hasil maksimal. Bagi perbankan dengan memberikan bantuan kredit syari'ah dalam pengembangan usaha budidaya maupun pembibitan patin.

g. Ikan Nila (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah menekan biaya produksi dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas. Hal tersebut dapat pula ditempuh dengan membuat pakan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Selain itu, dapat pula memasuki segmen pasar baru serta meningkatkan cakupan distribusinya, meningkatkan produk olahan yang bervariasi dan berdaya saing. Bagi instansi pemerintah terkait adalah dukungan modal dan inovasi teknologi terutama dalam pembuatan pakan ikan, pembinaan dan pelatihan kepada petani terkait teknik budidaya dan pengolahan pakan. Bagi perbankan dengan menyediakan fasilitas pinjaman tanpa bunga dapat menjadi solusi bagi petani ikan agar memudahkan mereka dalam pembudidayaan.

B. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

Struktur ekonomi yang dibangun oleh lapangan usaha produksi akan bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB (Nilai Tambah Bruto) terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi tersebut.

Struktur perekonomian Kotawaringin Barat didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, restoran dan hotel yang masing masing memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB sebesar 28,63 %, 25,28 % serta 11,82 %. Melihat besarnya kontribusi sektor-sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan bahwa ekonomi Kotawaringin Barat masih bergantung pada sumber daya alam.

Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada masyarakat Kotawaringin Barat dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke sektor ekonomi lainnya. Hal ini terlihat dari pergeseran besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kotawaringin Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan perlahan lahan menurun diiringi dengan kenaikan pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restoran dan hotel serta beberapa sektor lain yang mengalami penambahan kontribusi dari tahun ke tahun. Secara terperinci kontribusi masing-masing sektor dari tahun 2013 - 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.16
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2015

NO	SEKTOR	2013 (%)	2014* (%)	2015** (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,32	27,70	26,38
2	Pertambangan dan Penggalian	1,75	1,44	1,37
3	Industri Pengolahan	24,81	25,72	25,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09
6	Konstruksi	8,28	8,25	8,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,93	12,02	12,59
8	Transportasi dan Pergudangan	7,98	7,98	8,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	1,24	1,31
10	Informasi dan Komunikasi	0,97	0,99	0,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,88	5,13	5,31
12	Real Estate	1,83	1,73	1,84
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,22	3,19	3,21
15	Jasa Pendidikan	2,57	2,45	2,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,11	1,13
17	Jasa Lainnya	0,94	0,91	0,94
	TOTAL PDRB	100	100	100

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2016

*angka sementara

**angka sangat sementara

Tabel 1.17
PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2015
(Dalam juta rupiah)

NO	SEKTOR	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.918.476,2	3.261.355,0	3.449.449,6
2	Pertambangan dan Penggalian	180.262,9	169.228,7	179.041,2
3	Industri Pengolahan	2.557.543,4	3.028.657,3	3.324.772,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.545,1	4.204,9	6.322,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.350,2	10.009,4	11.492,4
6	Konstruksi	853.762,5	971.321,7	1.103.333,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.229.551,7	1.415.030,0	1.646.500,6
8	Transportasi dan Pergudangan	822.714,6	939.272,8	1.096.937,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	132.236,8	145.588,9	171.901,2
10	Informasi dan Komunikasi	99.599,0	116.329,3	128.076,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	502.906,9	604.010,7	694.010,0
12	Real Estate	188.299,8	203.163,3	240.223,9
13	Jasa Perusahaan	4.877,2	5.732,5	6.432,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	331.890,5	375.914,0	419.649,9
15	Jasa Pendidikan	265.091,5	288.035,6	326.455,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111.058,5	130.909,9	148.270,3
17	Jasa Lainnya	96.714,7	106.819,2	122.369,4
	TOTAL PDRB	10.306.881,5	11.755.583,1	13.075.238,4

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2016

Tabel 1.18
PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2015
(Dalam juta rupiah)

NO	SEKTOR	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.430.133,1	2.593.036,2	2.745.466,5
2	Pertambangan dan Penggalian	151.113,2	131.436,5	133.371,6
3	Industri Pengolahan	2.217.996,9	2.391.937,9	2.558.264,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.239,3	4.673,0	5.447,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.505,5	8.221,6	8.896,0
6	Konstruksi	763.670,2	815.094,6	885.898,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.080.903,7	1.132.837,9	1.232.135,6
8	Transportasi dan Pergudangan	737.655,2	775.545,3	829.053,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107.934,4	118.108,0	128.855,8
10	Informasi dan Komunikasi	94.447,0	102.192,5	110.037,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	404.316,9	468.437,7	515.071,9
12	Real Estate	156.668,6	170.990,5	186.011,3
13	Jasa Perusahaan	4.036,3	4.357,3	4.662,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	259.908,4	287.129,9	315.723,4
15	Jasa Pendidikan	219.004,2	234.213,2	252.615,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96.579,9	101.046,6	110.359,1
17	Jasa Lainnya	78.971,2	84.579,1	90.308,9
	TOTAL PDRB	8.815.083,8	9.423.837,7	10.111.883,8

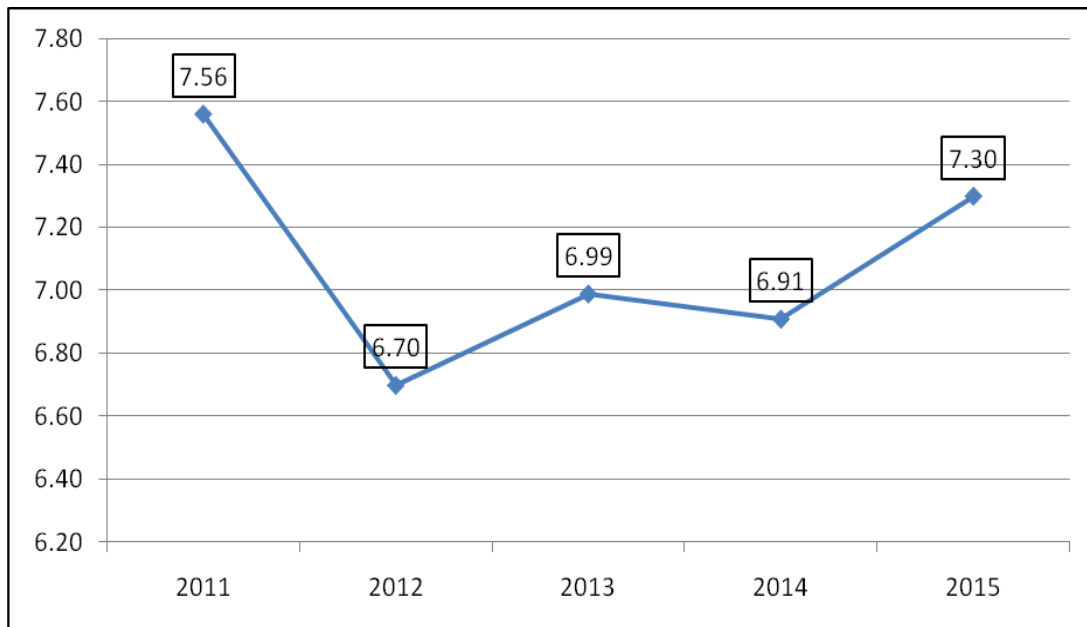
Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2016

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake holder, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat . Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan melalui penyajian grafik di bawah ini.

**Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat
2011 - 2015**



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2015.

Perekonomian Kotawaringin Barat pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kotawaringin Barat tahun 2015 mencapai 7,30 %. Sedangkan pada tahun 2014 hanya mencapai 6,91 %. Peningkatan ini menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi secara umum dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 16,58 % disusul oleh kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,96 %. Pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai kategori dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Kotawaringin Barat tumbuh 5,88 %. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang positif tak terkecuali kategori pertambangan dan penggalian yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai konsekuensi dari kebijakan penertiban penambangan liar yang dilakukan masyarakat.

Tabel 1.19
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
2013 - 2015

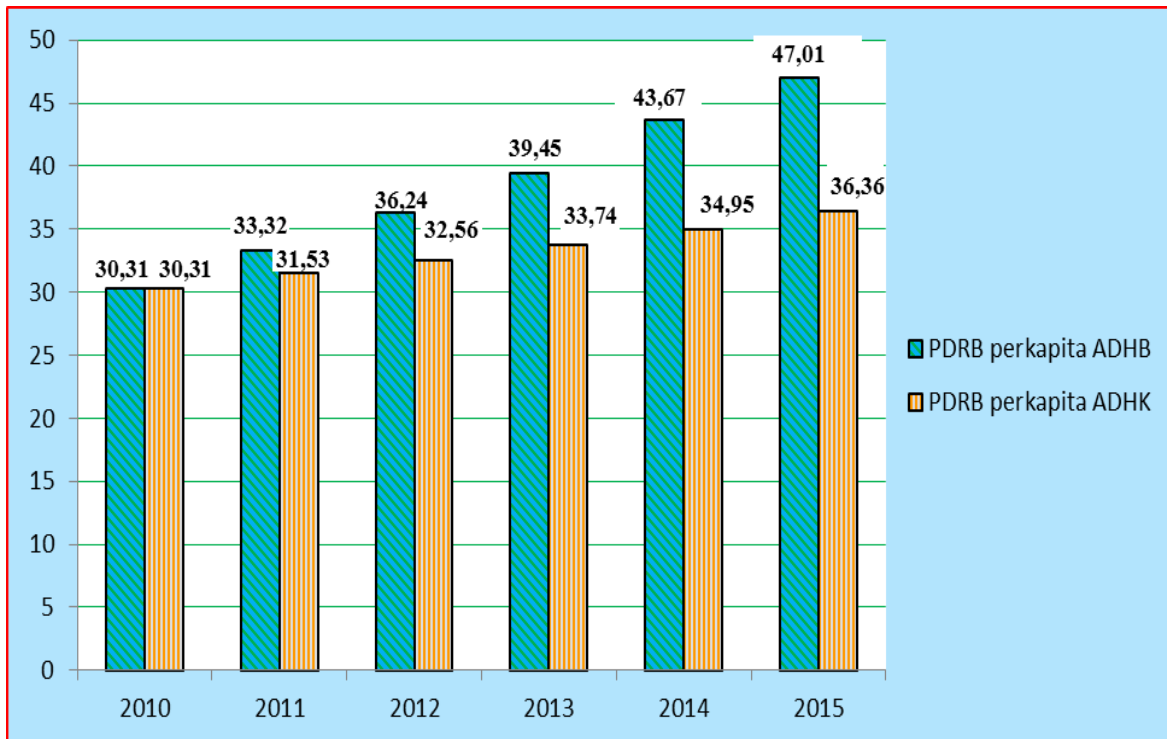
NO	SEKTOR	2013 (%)	2014* (%)	2015**(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,17	6,70	5,88
2	Pertambangan dan Penggalian	7,18	-13,02	1,47
3	Industri Pengolahan	7,60	7,84	6,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,86	10,23	16,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	9,54	8,20
6	Konstruksi	9,44	6,73	8,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,24	4,80	8,77
8	Transportasi dan Pergudangan	14,02	5,14	6,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,04	9,43	8,85
10	Informasi dan Komunikasi	6,39	8,20	7,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,03	15,86	9,96
12	Real Estate	9,37	9,14	8,78
13	Jasa Perusahaan	9,90	7,95	7,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,02	10,47	9,96
15	Jasa Pendidikan	6,51	6,94	7,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,77	4,62	9,22
17	Jasa Lainnya	5,56	7,10	6,77
	TOTAL PDRB	6,99	6,91	7,30

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2016

c. PDRB Perkapita

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Besarnya pendapatan masyarakat ini didekati dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk.

**Diagram 1.2 PDRB perkapita menurut Lapangan Usaha
(Dalam juta Rupiah) 2010 - 2015**



ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku

ADHK = Atas Dasar Harga Konstan

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2016

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan, baik PDRB perkapita ADHB maupun PDRB perkapita ADHK. Besarnya PDRB perkapita ADHB tahun 2015 sebesar 47,01 juta rupiah sedangkan PDRB perkapita ADHK sebesar 36,36 juta rupiah. Hal ini memberikan gambaran bahwa rata-rata pendapatan satu orang penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 47,01 juta rupiah setahun bila menggunakan standar harga pada tahun tersebut. Namun apabila menggunakan standar harga tahun 2010 (sebagai tahun dasar) maka rata-rata pendapatan satu orang penduduk pada tahun 2015 adalah sebesar 36,36 juta rupiah setahun.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016 menyatakan bahwa setiap perencanaan strategis harus memiliki visi sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Visi merupakan keadaan “ideal” yang memberikan inspirasi dan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2016, dicanangkan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yakni **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN JAYA”**.

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan akan tercapai:

1. **Kesejahteraan Rakyat**, terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. **Keadilan**, terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia;
3. **Jaya**, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

2.1.2 MISI

Adapun misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi 3 (tiga) poin meliputi:

1. **Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan**

Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2006–2010 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan dengan Masyarakatnya yang Maju, Aman, Damai, Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” harus terus dilanjutkan. Hakekat visi tersebut adalah terwujudnya

masyarakat Kotawaringin Barat yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat mengesankan tumbuh rata-rata 6,56 % selama periode tahun 2005–2009 harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat terwujud. Tuntutan perbaikan kesejahteraan tidak sekedar dengan menciptakan lapangan kerja. Namun, harus mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tujuan ini hanya dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi dibangun berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan berkeadilan.

2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan adil dan merata yang dinikmati oleh seluruh komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, meminimalkan gangguan keamanan dan potensi konflik sosial dalam mewujudkan Kotawaringin Barat yang sejahtera, adil, dan kaya.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Keberpihakan pemerintah harus senantiasa menjadi prioritas dalam mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat sehingga mampu mengurangi ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain. Untuk itu, perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya.

Pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja. Pada kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna serta pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling menguntungkan. Selain itu, perlu peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi;

pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam semata dan bisa melakukan intervensi harga serta kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian terutama dalam penentuan harga dan upah.

Adapun pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini ditempuh melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan perundangan-undangan, pendanaan, serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat

Kebijakan pemerintah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan keunggulan spesifik daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Seluruh potensi Kabupaten Kotawaringin Barat baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, kekayaan budaya, nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat harus dapat menjadi sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kejayaan masyarakat.

Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan unsur penting proses demokrasi. Dalam lima tahun terakhir ini, proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa, ditandai dengan keberhasilan pemilihan Presiden, DPR, DPD, Bupati, DPRD, secara langsung oleh rakyat. Dalam era reformasi saat ini, penataan proses politik dititikberatkan pada peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik.

Pengembangan budaya politik perlu terus diupayakan melalui pembinaan dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana, media dan dialog bagi peningkatan kesadaran untuk memelihara persatuan bangsa.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi akan selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi pun akan bertambah banyak, sementara kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Untuk itu, pemerintah harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah harus realistis dan harus menghindari diri dari janji-janji publik yang sulit untuk direalisasikan.

Disadari bahwa banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian suatu rencana pembangunan. Keberadaan faktor eksogen bisa mempermudah atau sebaliknya malah menghambat pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

Tidak ada yang akan mampu memperkirakan kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut. Walaupun demikian, beberapa perubahan eksogen ini dapat dikendalikan. Sebagian dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat. Upaya keras dan langkah antisipasi yang tepat akan menjadi tekad pemerintah yang akan datang untuk mencapai sasaran yang disebutkan di bawah ini.

1. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Pemerintah daerah bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama 5 (lima) tahun ke depan. Diharapkan dengan momentum pertumbuhan ekonomi 5 (lima) tahun terakhir rata-rata 6,56 % dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga di sekitar 2 (dua) % pada akhir tahun 2016. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 2 % pada akhir 2016.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan meliputi: (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; (b) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemantapan rintisan program belajar pendidikan lanjutan 12 (dua belas) tahun; dan (c) berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2016 yang ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa: (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan; (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan; (c) meningkatnya produksi beras dan komoditas pangan utama lainnya; (d) menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah; dan (e) menjaga nilai tukar agar petani dapat menikmati kemakmuran.

Dalam bidang energi, sasaran lebih ditujukan untuk pengembangan energi listrik di kecamatan dan pedesaan terpencil. Lingkungan hidup yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting lingkungan

hidup. Di Bidang infrastruktur adalah dengan meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, dan air bersih.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis di bidang pengembangan produk, pemasaran, pelaksanaan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dan menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

2. Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Penegakan pilar demokrasi dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik.

Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan semakin berkualitas dan akuntabel. Sasaran di bidang ini juga untuk menjamin setiap 5 (lima) tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi asas-asas demokrasi yang baik yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak pilihannya secara bebas dan bertanggung jawab.

3. Program Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem demokrasi yang berkualitas dan iklim usaha yang kondusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.

2.1.4 AGENDA PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan 2012-2016, ditetapkan 4 (empat) agenda utama pembangunan tahun 2012-2016, yaitu:

1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan;
3. Agenda ketiga, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;
4. Agenda empat, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012–2016 adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah pengembangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.
3. Arah kebijakan umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan sumber daya aparatur yang profesional memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa, negara dan masyarakat. Percepatan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat 2012–2016, maka disusunlah 4 (empat) agenda pembangunan. Selanjutnya, di bawah ini diuraikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dari masing-masing agenda pembangunan dimaksud.

AGENDA I

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu agenda terpenting dalam pemerintahan daerah Kotawaringin Barat periode Tahun 2012-2016. Hal ini mengingat bahwa sampai saat ini pencapaian kesejahteraan ekonomi belum sepenuhnya mampu mewujudkan hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keinginan meningkatkan perekonomian daerah yang dilandasi pada keunggulan potensi SDA dan SDM daerah belum teraktualisasi secara konkrit.

Dilandasi oleh pemikiran tersebut, agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat meliputi upaya-upaya sebagai berikut: (1) Menumbuhkembangkan pertanian agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan dengan keterkaitan yang kuat antara pertanian dan industri serta perdagangan; (2) Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pengembangan perekonomian; (3) Rehabilitasi dan peningkatan pembangunan infrastruktur pada jalur strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi; dan (4) Peningkatan investasi non-fisik

melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di setiap bidang perekonomian unggulan daerah.

Pembangunan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran global yang semakin meningkat terhadap integrasi antara roda pembangunan dengan preservasi dan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup agar terwujud keseimbangan, keselarasan dan keberlanjutan sistem penyangga ekosistem kehidupan. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu kawasan lingkungan hidup dalam suatu sistem meliputi fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang secara otomatis dan alami merupakan subsistem lingkungan regional, nasional, dan dunia.

Oleh karenanya adalah sangat krusial dalam pembangunan daerah periode 2012-2016 untuk senantiasa melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti : peningkatan kualitas fungsi kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa); konservasi kawasan budidaya; dan AMDAL untuk setiap pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan pengembangan produksi, pemukiman dan penggunaan lainnya, areal transmigrasi, rencana areal transmigrasi, kawasan khusus, danau, dan sungai).

Untuk melaksanakan Agenda I maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan *Specific, Measurable, Acceptable, Reasonable, Time Bounding (SMART)* dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

- Meningkatkan PDRB dan *income* perkapita;
- Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi;
- Meningkatkan daya saing ekonomi;
- Mengembangkan infrastruktur perekonomian;

Sasaran

- Meningkatnya sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB;
- Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah;
- Meningkatnya kemampuan teknis, manajerial dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- Meningkatnya kerjasama antar pelaku usaha;
- Keberpihakan pada usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk lokal;
- Meningkatnya promosi dan pemasaran produk lokal;
- Penataan pedagang kaki lima (PKL);
- Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;

- Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Strategi

- Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- Adanya komitmen untuk berpihak pada usaha ekonomi mikro kecil dan menengah;
- Memfasilitasi promosi dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal;
- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana ekonomi;
- Meningkatkan pemberdayaan potensi SDA dan SDM lokal berorientasi pasar secara berkelanjutan.

Kebijakan

- Peningkatan pelayanan perijinan usaha;
- Pengembangan pertanian berwawasan agribis;
- Menumbuhkembangkan koperasi dan asosiasi-asosiasi usaha;
- Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha;
- Penguatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi;
- Pendirian BUMD bidang perbankan/perkreditan;
- Mendorong peningkatan mutu produk;
- Mendorong legalitas lembaga dan sertifikasi produk lokal;
- Peningkatan promosi produk unggulan daerah;
- Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya;
- Penataan PKL;
- Peningkatan penguasaan dan apresiasi masyarakat terhadap IPTEK dan jiwa kewirausahaan;
- Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah, dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional;
- Mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan;
- Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya;
- Pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil, dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan;
- Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik penunjang sektor-sektor perekonomian kerakyatan.

PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan terus dilaksanakan di seluruh lembaga pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh.

Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dan pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan Agenda II maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan baik.

Sasaran:

- Meningkatnya tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Meningkatnya kedisiplinan, profesionalisme, dan produktivitas aparatur;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Strategi:

- Peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
- Peningkatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja;
- Terwujudnya pelayanan prima;
- Pengembangan paradigma pembangunan dan partisipatif dan berkelanjutan.

Kebijakan:

- Meningkatkan tertib administrasi dan kearsipan;
- Meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, dan produktifitas aparatur;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- Menata dan mengembangkan wilayah administratif melalui pemekaran wilayah;
- Meningkatkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- Mengupayakan peningkatan anggaran pendapatan daerah;
- Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran belanja daerah.

AGENDA III

PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Pelaksanaan pembangunan pada periode 2006-2010 telah meletakkan pondasi keadilan. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam *Millenium Development Goals (MDG's)*. Penyelenggaraan program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan dilaksanakan seiring dengan upaya pemerataan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Peningkatan pendidikan ditujukan pada upaya perluasan cakupan partisipasi anak didik, perbaikan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana penunjang pendidikan, kerjasama dengan pendidikan tinggi dan optimalisasi peran sekolah kejuruan sebagai basis pembentukan tenaga-tenaga terampil siap kerja yang dibekali dengan kemampuan mengoptimalkan potensi daerah Kotawaringin Barat.

Adapun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*).

Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Proses perencanaan yang bersifat *bottom-up* dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Di sini pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankannya dan sekaligus mendapatkan manfaat dari program tersebut. Perluasan cakupan program PNPM diharapkan meningkatkan

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Diharapkan modal sosial masyarakat ini meningkatkan mutu proses perencanaan partisipatif di Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan Agenda III maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

- Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia;
- Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
- Meningkatkan ketahanan pangan;
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
- Meningkatkan moralitas dan kepedulian sosial;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengarusutamaan gender.

Sasaran

- Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, murah, dan merata;
- Meningkatnya kesehatan lingkungan;
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
- Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia;
- Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, murah, dan merata;
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
- Menurunnya jumlah penduduk miskin;
- Menurunnya jumlah pengangguran usia produktif;
- Stabilitas ketersediaan pangan masyarakat;
- Meningkatnya moralitas masyarakat;
- Meningkatnya kepedulian sosial;
- Terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Strategi

- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan;
- Meningkatkan minat dan budaya baca;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan akseptor KB;
- Peningkatan keimanan, ketakwaan, dan kesalehan sosial;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;

- Pengarusutamaan gender secara proporsional.

Kebijakan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan;
- Meningkatkan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat untuk keluarga miskin;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- Meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan;
- Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Mensinergikan berbagai program pengentasan kemiskinan;
- Mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah;
- Menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat;
- Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan kesalehan sosial;
- Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- Meningkatkan keterwakilan dan peran serta perempuan dalam sektor publik;
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Mengembangkan seni budaya, olahraga, peranan pemuda, dan wanita.

AGENDA IV

PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM

Wujud dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya *checks and balances*, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

Konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta menjaga berjalannya proses *checks and balances*. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum.

Demokrasi harus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang *egaliter*. Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi

diarahkan untuk mencapai tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan sebelum melangkah menuju demokrasi substansial.

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "*rule of law*." Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian.

Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan Agenda IV maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

- Menciptakan suasana yang kondusif bagi stabilitas keamanan, politik dan pemerintahan.

Sasaran:

- Menurunnya kriminalitas dan konflik di masyarakat;
- Terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan;
- Berjalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah.

Strategi:

- Penciptaan suasana kondusif;
- Penegakan supremasi hukum dan HAM.

Kebijakan:

- Penataan peraturan hukum ;
- Perlindungan HAM;
- Konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik;
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- Menekan angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat;
- Menjaga angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;

- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat;
- Meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.

2.3 PRIORITAS DAERAH

Program pembangunan daerah disusun berdasarkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, selanjutnya dirumuskan kedalam program prioritas yang merupakan langkah-langkah strategis paling penting dalam rangka mencapai visi misi Bupati Kotawaringin Barat terpilih. Program yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

PRIORITAS 1 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai jika kualitas dan akses pendidikan meningkat. Pengalaman sejarah menunjukkan peningkatan akses pendidikan seluas-luasnya merupakan cara yang efektif untuk memperkecil kesenjangan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Fokus Program aksi Pendidikan adalah:

1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika;
2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 % dari APBD, pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau sampai dengan pendidikan 12 (dua belas) tahun pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA;
3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras;
4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Diupayakan sebelum 2016 seluruh guru telah berpendidikan S1;
5. Memperluas penerapan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan;
6. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan;
7. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal;
8. Meningkatkan peran pendidikan kejuruan.

PRIORITAS 2 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan merupakan komponen penting dalam investasi sumber daya manusia. Tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau akan mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, fokus utama program bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memantapkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, maupun penataan administrasi yang transparan dan bersih;
2. Peningkatan pembudayaan pola hidup sehat;
3. Menyediakan obat dalam kuantitas yang memadai;
4. Meneruskan dan meningkatkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanudin;
5. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti *Depteri Pertusis Tetanus (DPT)* dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, semua anak sudah mendapatkan vaksin DPT dan campak sehingga tingkat kematian bayi dan balita lebih cepat dari sasaran dalam MDG's;
6. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan *Tuberculosis (TBC)*;
7. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita menjadi di bawah 15 % pada tahun 2016;
8. Revitalisasi program keluarga berencana, pengendalian pertumbuhan penduduk ini diharapkan mengubah paradigma kuantitas menjadi kualitas dalam keluarga;
9. Pengembangan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika profesi dan perlindungan masyarakat;
11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara pencegahannya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.

PRIORITAS 3 : PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, disamping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah perlu terus dilakukan.

Kebijakan diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup terpenuhinya **10 (sepuluh) hak dasar** bagi

penduduk dalam menjalankan kehidupannya, meliputi: (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses dan mutu layanan kesehatan, (3) akses dan mutu layanan pendidikan, (4) akses layanan air bersih, (5) kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (6) akses layanan perumahan dan sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) jaminan rasa aman; dan (10) partisipasi dalam kebijakan publik.

Dengan demikian, maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut :

1. Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai inti dari program penanggulangan kemiskinan yang bercirikan program yang memberdayakan masyarakat, terdesentralisasi dan implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan perencanaan yang bersifat *bottom-up* pada tingkat akar;
2. Mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa-desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan yang semakin luas, melalui sektor-sektor pembangunan utama, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal;
3. Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi dapat dihindari;
4. Pemantapan dan penyempurnaan Program Jagung Hibrida yang difasilitasi pemerintah daerah meliputi penyediaan akses modal, bimbingan teknis pertanian, pengolahan hasil, sampai dengan pemasaran;
5. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan;
6. Melaksanakan dan memperkuat program nasional seperti: Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM, dan Beras Sejahtera (Rastra) yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat;
7. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan penguatan peran dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

PRIORITAS 4 : PROGRAM PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Empat masalah utama dalam pasar yaitu: (1) persentase sektor informal yang relatif tinggi; (2) adanya kesenjangan upah sektor formal informal; (3) penurunan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur; dan (4) kecenderungan peningkatan pengangguran terbuka pada kelompok umur muda.

Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 2 % pada akhir tahun 2016, maka program ketenagakerjaan akan menekankan pada:

1. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas, dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda, dengan mengintegrasikan program prioritas ini dengan program prioritas bidang pendidikan;
2. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta;
3. Perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja;
4. Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA) untuk berinvestasi;
5. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian rakyat.

PRIORITAS 5 : PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan pada :

1. Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan;
3. Melanjutkan pengembangan pelabuhan *multipurposes*, pelabuhan *Roll On–Roll Off* (*ro-ro*), dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah;
4. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonomian daerah;
5. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan;
6. Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
7. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

PRIORITAS 6 : PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan produksi pangan beras dan bahan pangan lainnya, serta diversifikasi konsumsi pangan. Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain:

1. Memperbaiki infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan perbaikan irigasi, saluran air, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar;

2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga;
3. Menjamin pelaksanaan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak;
4. Peningkatan dan penyempurnaan program Jagung Hibrida agar petani memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
5. Penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak, dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah;
6. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian melalui Badan Usaha Milik Daerah Agrotama Mandiri yang telah dibentuk;
7. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan petani melalui program peningkatan penyuluh pertanian.

PRIORITAS 7 : PROGRAM ENERGI

Program dalam sektor energi diarahkan pada upaya peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga masyarakat mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya. Perhatian lebih besar ditujukan untuk menyediakan energi listrik bagi desa tertinggal.

PRIORITAS 8 : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi dilakukan melalui antara lain:

1. Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah;
2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan prestasi (*merit based*), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sipil;
3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (*business process*), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan, dan penegakan aturan;
4. Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan Standar Pelayanan Minimal;
6. Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.

PRIORITAS 9 : PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi, yaitu reformasi penegakan hukum (*rule of law*) dan penegakan ketertiban umum.

PRIORITAS 10 : PROGRAM PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan baik di antara kelompok masyarakat dan kelompok penghasilan, antar daerah, dan antar jender. Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi:

1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam mengakses modal. Penguatan Bank Perkreditan Rakyat untuk membantu usaha mikro, penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha dan *enterpreneur* baru kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan, dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat. Menciptakan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil menengah baik dalam kebijakan produksi, distribusi, dan penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk aktivitas BUMD;
2. Mengurangi kesenjangan antar desa dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa;
3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil;
4. Mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan.

PRIORITAS 11 : PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP

Program di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat. Program aksi lingkungan hidup meliputi:

1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai;
2. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan

dampak perubahan iklim global khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian;

3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PRIORITAS 12 : PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA

Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global:

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan;
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial;
3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional serta modern dan tradisional.

PRIORITAS 13 : PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS AGROPOLITAN

Latar belakang pelaksanaan program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan adalah bersumber dari beberapa permasalahan sistem agribisnis, yakni: (1) belum terintegrasi dan berkembang optimalnya sistem agribisnis; (2) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem agribisnis; dan (3) kurang sesuainya model agribisnis yang dikembangkan dengan karakter masing-masing daerah pertanian akibat keterbatasan partisipasi petani dalam perencanaan model agribisnis, sisa-sisa pola pengembangan yang bersifat *top-down* yang masih dipertahankan; serta generalisasi model yang kurang tepat.

Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sektor utama jika dilihat dari produktivitas pertaniannya yang cukup besar dan kontribusinya terhadap PDRB. Langkah dari program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan:

1. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi komoditas pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun untuk komoditas ekspor;
2. Mensinergikan potensi dari setiap sistem usaha agribisnis mulai dari sub-sistem hulu, *off-farm*, *on-farm*, hilir, pemasaran, dan usaha penunjangnya, secara maju, berkelanjutan, dan terdesentralisasi, melalui pengembangan agropolitan yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah;
3. Menetapkan pusat agribisnis dan unit-unit kawasan pengembangannya yang terintegrasi dalam bentuk keterkaitan antar wilayah (pergerakan barang, modal, dan manusia);
4. Menyediakan infrastruktur pendukung.

PRIORITAS 14 : PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Meski demikian, masih banyak sektor lain yang tidak kalah potensial untuk dikembangkan dan membutuhkan dukungan investasi dalam rangka pengembangan potensi daerah.

Salah satu kendala investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk menarik para investor. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik berupa ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

PRIORITAS 15 : PROGRAM PENATAAN RUANG WILAYAH

Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah.

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tersebut dapat direduksi secara lebih khusus dalam bidang pendapatan.

Visi yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Adapun misi yang diemban adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah berbasis potensi lokal, mewujudkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan melakukan pelayanan publik di bidang pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan pengelolaan pendapatan adalah menyediakan dana bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

3.1.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan masalah yang kompleks karena akan berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi. Sejauh ini, pemerintah daerah masih berfokus pada masalah klasik yakni bagaimana mengoptimalkan penerimaan/pendapatan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan pendapatan masih minim sehingga pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengelola penerimaannya. Sumber penerimaan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Memperhatikan beberapa komponen penerimaan daerah di atas, maka penting untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah apabila mampu digali dan dikelola secara optimal tanpa mengabaikan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa pos penerimaan meliputi :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari PAD maupun melalui alokasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk itu, pemerintah daerah telah merumuskan sejumlah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi penerimaan pajak daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan sektor formal maupun informal;
- b. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu upaya peningkatan penerimaan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah di berbagai sektor formal maupun informal;
- c. Membangun dan mengembangkan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa;
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan;
- f. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan aset daerah;
- g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme aparatur dan lain-lain.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah hendaknya tidak menambah beban masyarakat yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka pilihan yang terbaik adalah melakukan penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan, dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli dan hasil usaha daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Perimbangan dari Pusat merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat. Penganggaran dana perimbangan bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyusunan APBD, dan mengurangi/memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pusat kepada daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber selain dari PAD, Dana Perimbangan dari Pusat. Memperhatikan beberapa hal di atas intensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi pendataan dari subyek dan objek pendapatan yang potensial, namun belum tergarap dengan optimal serta memperbaiki kinerja pemungutan, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu atau SDM pegawai serta penyempurnaan peraturan yang menjadi dasar pemungutan.

Ekstensifikasi pendapatan dilakukan dengan memperluas subjek dan objek pendapatan daerah serta penyesuaian terhadap besaran pendapatan atau tarif yang telah ada.

3.1.2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Dari Target Anggaran Pendapatan yang direncanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 1.329.903.835.400** telah berhasil terealisasi sebesar **Rp. 1.286.277.017.400,86** atau **96,71 %**. Secara umum pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar **96,33 %** dan Dana Perimbangan terealisasi sebesar **97,49 %**, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi **92,01 %** sebagaimana tergambar pada **tabel 3.1** berikut ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
(Untuk Periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi*)	(Rp)	%
1.	PENDAPATAN	1.329.903.835.400	1.286.277.017.400,86	(43.626.817.999,13)	96,71
1.1	Pendapatan Asli Daerah	148.818.066.600	143.361.990.112,55	(5.456.076.487,45)	96,33
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.351.000.000	33.357.833.244,60	(4.993.166.755,40)	86,98
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.014.206.000	14.117.209.689	103.003.689	100,73
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.050.925.000	7.050.925.491,34	491,34	100
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.401.935.600	88.836.021.687,61	(565.913.912,38)	99,36

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi*)	(Rp)	%
1.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	1.025.225.429.400	999.504.184.473	(25.721.244.927)	97,49
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	68.077.342.000	75.757.165.453	7.679.823.453	111,28
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	46.284.436.000	55.399.544.376	9.115.108.376	119,69
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	21.792.906.000	20.357.621.077	(1.435.284.923)	93,41
1.2.2	Dana Alokasi Umum	662.249.343.000	662.249.343.000	0	100
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	294.898.744.400	261.497.676.020	(33.401.068.380)	88,67
1.2.3.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	218.217.396.000	196.769.189.910	(21.448.206.090)	90,17
1.2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	76.681.348.400	64.728.486.110	(11.952.862.290)	84,41
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	155.860.339.400	143.410.842.815,31	(12.449.496.584,69)	92,01
1.3.1	Hibah	4.900.000.000	4.983.000.000	83.000.000	101,69
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	78.525.571.400	64.476.297.693,31	(14.049.273.706,69)	82,10
1.2.3	Dana Penyesuaian	58.634.768.000	58.634.768.000	0	100
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga	13.800.000.000	15.316.777.122	1.516.777.122	110,99
JUMLAH		1.329.903.835.400	1.286.277.017.400,86	(43.626.817.999,13)	96,71

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kab. Kotawaringin Barat, untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

*) *Unaudited*

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 sebesar **Rp.143.361.990.112,55** atau **96,33 %** dari target sebesar **Rp.148.818.066.600**. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terbagi atas :

1) *Pajak Daerah.*

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah adalah sebesar **Rp. 33.357.833.244,60** atau **88,98 %** dari target sebesar **Rp. 38.351.000.000**.

2) *Retribusi Daerah.*

Realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah sebesar **Rp. 14.117.209.689** atau **100,73 %** dari target sebesar **Rp.14.014.206.000**.

3) *Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.*

Realisasi Pendapatan dari pos ini adalah sebesar **Rp. 7.050.925.491,34** atau **100 %** dari target sebesar **Rp.7.050.925.000**.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi penerimaan dari pos ini adalah sebesar **Rp. 88.836.021.687,61** atau **99,36 %** dari target sebesar **Rp. 89.401.935.600.**

b. Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 999.504.184.473** atau **97,49 %** dari target sebesar **Rp. 1.025.225.429.400**

Adapun realisasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi untuk pos ini adalah sebesar **Rp. 55.399.544.376** atau **119,69 %** dari target sebesar **Rp. 46.284.436.000**

1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Realisasi untuk pos ini adalah sebesar **Rp. 20.357.621.077** atau **93,41 %** dari target sebesar **Rp. 21.792.906.000**

1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar **Rp. 662.249.343.000** atau **100 %** dari target sebesar **Rp.662.249.343.000**

1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar **Rp. 261.497.676.020** atau **88,67 %** dari target sebesar **Rp.294.898.744.400**

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain Yang Sah untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 143.410.842.815,31** atau **92,01 %** dari target sebesar **Rp.155.860.339.400** yang bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah.

Realisasi dari Pendapatan Hibah **Rp. 4.983.000.000** atau **101,69 %** dari target sebesar **Rp. 4.900.000.000**

b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **Rp. 64.476.297.693,31** atau **82,10 %** dari target sebesar **Rp. 78.525.571.400**

c. Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Realisasi dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus **Rp. 58.634.768.000** atau **100 %** dari target sebesar **Rp.58.634.768.000**

d. Sumbangan dari Pihak Ketiga

Realisasi dari Sumbangan dari Pihak Ketiga adalah sebesar **Rp. 15.316.777.122** atau **110,99 %** dari target sebesar **Rp.13.800.000.000**

3.1.3 PERMASALAHAN

Dari kondisi umum Pendapatan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 di atas secara keseluruhan tidak mampu mencapai target yang direncanakan, terdapat sejumlah sumber penerimaan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 secara keseluruhan sebesar **96,33 %**.

a.1. Pajak Daerah

Target penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah **Rp. 38.351.000.000** dengan realisasi untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 sebesar **86,98 %** atau **Rp. 33.357.833.244,60**.

Komponen yang perlu mendapat perhatian adalah :

a.1.1. Pajak Hotel

Realisasi penerimaan Pajak Hotel untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar **Rp. 2.764.142.333,70** atau **92,13 %** dari target sebesar **Rp. 3.000.000.000**. Tidak tercapainya target ini disebabkan masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

a.1.2. Pajak Hiburan

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 sebesar **Rp.288.286.559** atau **77,70 %** dari target sebesar **Rp. 371.000.000**. Tidak tercapainya target ini disebabkan kurangnya kegiatan hiburan pada Tahun 2016.

a.1.3. Pajak Reklame

Realisasi penerimaan Pajak Reklame untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar **Rp. 663.021.493,19** atau **73,66 %** dari target sebesar **Rp.900.000.000**.

a.1.4. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar **Rp. 11.707.389.932** atau **93,65 %** dari target sebesar **Rp. 12.500.000.000.**

a.1.5. Pajak Parkir

Realisasi penerimaan Pajak Parkir untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar **Rp.174.835.400** atau **72,84 %** dari target sebesar **Rp.240.000.000.**

a.1.6. Pajak Air Tanah

Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar **Rp. 3.857.080** atau **9,64 %** dari target sebesar **Rp.40.000.000.**

a.1.7. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar **Rp.373.908.000** atau **37,39 %** dari target sebesar **Rp.1.000.000.000.**

a.1.8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar **Rp. 5.150.607.711,20** atau **76,87 %** dari target sebesar **Rp.6.700.000.000.**

a.1.8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi penerimaan BPHTB untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar **Rp. 3.436.907.776,50** atau **57,28 %** dari target sebesar **Rp. 6.000.000.000.**

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang tidak mencapai target adalah Penerimaan dari DAK. Realisasi penerimaan DAK Fisik untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar Rp. 196.769.189.910 atau 90,17 % dari alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp. 218.217.396.000. Sedangkan Realisasi DAK Non Fisik untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 hanya sebesar Rp. 64.728.486.110 atau 84,41 % dari alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp. 76.681.348.400 Hal ini dikarenakan tidak diterimanya transfer dana Triwulan IV yang disebabkan oleh keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap terlambatnya pelaporan penyerapan dana yang diterima pada tahap sebelumnya.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang tidak mencapai target adalah dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, dari target sebesar Rp. 78.525.571.400 hanya terealisasi sebesar Rp. 64.476.297.693,31 atau 82,10 % hal ini dikarenakan dari alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi tidak seluruhnya ditransfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan rincian uraian tersebut di atas masih perlu adanya penambahan aparatur yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan agar target yang ditetapkan dapat tercapai serta melakukan pembinaan dan pengawasan pemungutan secara optimal.

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah keseluruhan pengeluaran untuk membiayai operasional pemerintahan maupun untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Penganggaran belanja daerah secara keseluruhan harus juga didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan. Ini bermakna bahwa daerah sebaiknya menghindari anggaran defisit yang melebihi cadangan yang tersedia sehingga terhindar dari penciptaan utang daerah.

3.2.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2015 serta prakiraan dinamika kondisi Tahun 2016, kebijakan yang ditempuh yaitu :

Kebijakan belanja

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk membiayai pogram kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dengan tetap mengalokasikan anggaran sebesar 20 % untuk urusan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 % anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif dan 2/3 untuk upaya preventif;

3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta penambahan alokasi dana desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin.

II. Aspek Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan prospektif dan mendukung percepatan kawasan/kluster industri berbasis pertanian.

III. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/interisolasi, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan Ro-Ro, dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;
4. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang

- transparansi dan akuntabilitas dapat menuju *good governance* dengan efektif;
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM;
 6. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat dan lain-lain dan menggantikannya ke dalam skema penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan;
 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dalam upaya penyediaan kegiatan berskala kecil/desa;
 8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif;
 9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk investasi bidang pendidikan.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2016 disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Oleh karena itu, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tanpa meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang disediakan dalam APBD 2016 dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 01 Januari 2016 -31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 1.245.200.058.946,64** atau **94,13 %** dari anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 1.322.742.696.400**. Realisasi belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung sebesar **Rp. 667.485.042.307,64** atau sebesar **94,30 %** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 577.715.016.639** atau sebesar **93,94 %** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
(Untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi *)	(Rp)	%
2	BELANJA DAERAH	1.322.742.696.400	1.245.200.058.946,64	(77.542.637.453,36)	94,13
2.1	Belanja Tidak Langsung	614.924.788.000	577.715.016.639	(37.209.771.361)	93,94
2.1.1	Belanja Pegawai	458.657.202.900	429.310.503.848	(29.346.699.052)	93,60
2.1.2	Belanja Bunga		858.680.569	(431)	99,99
2.1.4	Belanja Hibah	20.540.600.000	19.840.520.000	(700.080.000)	96,59
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	440.000.000	354.550.000	(85.450.000)	80,57
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	5.236.520.600	1.980.543.000	(3.255.977.600)	37,82
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	128.691.783.500	125.252.605.309	(3.439.178.191)	97,32
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	117.613.913	(382.386.087)	23,52
2.2	Belanja Langsung	707.817.908.400	667.485.042.307,64	(40.332.866.092,36)	94,30
2.2.1	Belanja Pegawai	84.934.851.610	81.474.081.069	(3.460.770.541)	95,92
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.790.499.301,60	207.295.739.532,56	(18.494.759.769,04)	91,80
2.2.3	Belanja Modal	397.092.557.488,40	378.715.221.706,08	(18.377.335.782,32)	95,37
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.322.742.696.400	1.245.200.058.946,64	(77.542.637.453,36)	94,13

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kab. Ktw. Barat, untuk periode 01 Januari 2016-31 Desember 2016

*) Realisasi Anggaran Unaudited

Kabupaten Kotawaringin Barat telah menggelar pemilihan bupati-wakil bupati periode 2017-2022 pada tanggal 15 Februari 2017. Adapun tahapan pilkada sudah dimulai sejak tahun 2016 dan Pemerintah Kabupaten Kobar berkewajiban menyalurkan dana untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kobar telah menyalurkan dana hibah bagi lembaga/organisasi dengan total anggaran Rp. 11.600.000.000, disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp.10.000.000.000 dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebesar Rp. 1.600.000.000.

1. Pengelolaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 99.424.595.732,03** atau **100,18 %** dari target yang dianggarkan yaitu sebesar **Rp. 99.243.410.506,03** yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) sebelumnya (Tahun Anggaran 2015) sebesar **Rp. 99.100.732.450,03** dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar **Rp. 323.863.282**

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp. 40.498.000.000** dari anggaran sebesar **Rp. 40.500.000.000** yang dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar **Rp. 10.498.000.000** serta untuk pembayaran pokok utang sebesar **Rp. 30.000.000.000**

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto untuk periode 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 58.926.595.732,03** atau **100,31 %** dari anggaran sebesar **Rp. 58.743.410.506,03**

3.2.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dalam pencapaian target realisasi belanja adalah kegiatan menumpuk diakhir tahun anggaran sehingga mempengaruhi target serapan belanja yang telah ditetapkan dan berimbas pada terhadap sektor riil.

Solusi permasalahan diatas perlu dilakukan langkah-langkah dalam percepatan penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten dan SKPD serta melaksanakan rapat evaluasi bulanan dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 14 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu;

A. Urusan Wajib, meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan hidup;
4. Pekerjaan umum;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan olahraga;
9. Penanaman modal;
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. Kependudukan dan catatan sipil;
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan pangan;
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

22. Sosial;
 23. Kebudayaan;
 24. Statistik;
 25. Kearsipan; dan
 26. Perpustakaan.
- B. Urusan Pilihan, meliputi :
1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pertanian;
 3. Kehutanan;
 4. Energi dan sumber daya mineral;
 5. Pariwisata;
 6. Industri;
 7. Perdagangan;
 8. Ketransmigrasian.

Belanja Langsung dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 707.817.908.400 dengan realisasi anggaran Rp.667.485.042.308 atau sebesar 94,30 %.

Selengkapnya berkenaan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

a) Kondisi Umum

Masyarakat yang maju ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya yang tinggi serta jumlah dan kualitas tenaga ahli serta tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Upaya untuk mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang maju memerlukan peran serta segenap pemangku kepentingan dalam menciptakan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel dengan dukungan sumber daya manusia yang handal.

Mengingat bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum sekaligus sebagai bagian

dari sistem pendidikan nasional, maka diperlukan pemahaman secara komprehensif terhadap visi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2016 khususnya pada bidang pendidikan ditandai dengan tercapainya 27 indikator Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar. Hal ini ditandai dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap desa telah terlayani pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan sarana pendidikan SMP yang ada telah mencapai 59 satuan pendidikan. Artinya bahwa penyediaan sarana pendidikan dasar telah dapat mengakomodir jumlah anak usia sekolah.

Begitu pula dengan peningkatan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditandai dengan peningkatan jumlah Satuan PAUD (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 142 Satuan PAUD. Pada tahun 2016, jumlah Desa/Kelurahan yang sudah tersedia Satuan PAUD sebanyak 58 Desa/Kelurahan dari 94 Desa/Kelurahan yang ada, atau sebesar 61%.

Keberadaan sarana pendidikan SMA dan SMK mencapai 27 sekolah dengan jumlah murid yang bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas.

Sedangkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berstatus PNS belum terpenuhi terutama pada tingkat sekolah dasar yang salah satu penyebabnya karena kebijakan moratorium penerimaan PNS dari pemerintah pusat.

Urusan wajib bidang pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat. Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dicermati dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016 seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015-2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016	
				Target	Realisasi
1	Angka Melek Huruf	%	97	98	97,05
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,80	8,95	8,05
3	Angka Partisipasi Kasar				
	a. PAUD	%	30,03	30,10	30,03

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016	
				Target	Realisasi
	b. SD/MI	%	118,14	118,35	118,20
	c. SMP	%	98,88	99	98,90
	d. SMA/SMK	%	87,59	87,65	87,60
4	Angka Partisipasi Murni				
	a. PAUD	%	27,78	27	20,13
	b. SD/MI	%	98,79	98,82	98,80
	c. SMP	%	86,60	86,70	86,65
	d. SMA/SMK	%	75,06	75,25	75,10
5	Angka Kelulusan				
	a. SD/MI	%	100	100	98,92
	b. SMP	%	100	100	99,98
	c. SMA/SMK	%	99,09	100	98,88
6	Angka melanjutkan				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP	%	99,75	99,90	99,75
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	%	99,66	99,80	96,99
7	Angka Putus Sekolah				
	a. SD/MI	%	0,20	0,14	0,14
	b. SMP	%	0,40	0,54	0,70
	c. SMA/SMK	%	1,10	0,70	0,70
8	Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional				
	a. SD/MI	siswa	2	2	-
	b. SMP	siswa	19	19	-
	c. SMA/SMK	siswa	15	15	-
9	Jumlah sekolah standar nasional				
	a. SD/MI	sekolah	-	-	-
	b. SMP	sekolah	-	-	-
	c. SMA/SMK	sekolah	-	-	-
10	Prestasi Olah raga siswa Tingkat Nasional				
	a. PON	siswa	1	-	-
	b. POPNAS	siswa	4	-	-
	c. POSPENAS	siswa	3	-	-
11	Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah (Jumlah penduduk usia sekolah/ Jumlah sekolah)				
	a. SD/MI		162,09	196,68	162,15
	b. SMP		123	332,19	332,19
	c. SMA/SMK		326	326,15	326,01
12	Rasio jumlah guru/murid				
	a. SD/MI		1:21	1:21	1.17.28
	b. SMP		1:19	1:19	1.14.90
	c. SMA/SMK		1:14	1:14	1.18.26
13	Persentase sekolah yang memiliki ruang kelas sesuai SPM				
	a. SD/MI		33,05	33,15	33,10
	b. SMP		52,78	52,81	52,80

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016	
				Target	Realisasi
	c. SMA/SMK		88	88,15	88,10
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV				
	a.Guru SD/SDLB		97,08	97,08	98
	b.Guru SMP/SMPLB		95,56	98,45	98,50
	c.Guru SMA/SMALB/SMK		95,56	98	99

Sumber : Disdikpora Kab. Kotawaringin Barat

Dalam pelaksanaan urusan di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan sejumlah 14 indikator kinerja. Salah satu indikator kinerja pada upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari besaran angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2016 sebesar 30,03%, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2016 sebesar 20,13%. Kondisi ini menggambarkan dari 100 anak usia PAUD di Kotawaringin Barat, sebanyak 20,13% anak telah bersekolah PAUD. APK pada tahun 2016 terlihat tetap dibandingkan APK tahun 2015 dan APM pada Tahun 2016 menurun dibandingkan APM tahun 2015. Hal ini disebabkan karena dalam proses penghitungan Angka APK dan APM pada tahun 2015 dengan memasukan seluruh satuan PAUD sedangkan pada tahun 2016 satuan PAUD yang digunakan sebagai dasar perhitungan hanya PAUD yang terdaftar dalam DAPODIK PAUD (telah memiliki izin operasional).

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2015 sebesar 118,14%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 118,20%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2015 sebesar 98,79% dan pada tahun 2016 sebesar 98,80%.

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP pada tahun 2015 sebesar 98,88%, dan di tahun 2016 sebesar 98,90%. APM SMP di tahun 2015 sebesar 86,60%. dan di tahun 2016 menjadi 86,65%. Menurut catatan, angka putus sekolah SMP saat ini sebesar 0,40%. Angka ini sedikit lebih besar dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 0,54%.

Kondisi APK Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) pada tahun 2015 menunjukkan angka sebesar 87,59%, sedangkan tahun 2016 sebesar 87,60%. APM SMA/SMK tahun 2015 sebesar 75,06% dan mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 75,10%. Rasio siswa SMA terhadap SMK adalah 1:0,83.

Artinya, siswa SMA lebih besar jumlahnya dibanding siswa SMK. Hal ini menunjukkan keberadaan SMK di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitas daya tampung maupun kualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan minat yang tinggi atas SMK serta penyiapan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Dengan melihat kebutuhan daerah, terutama dari sektor ekonomi, maka perlu dikembangkan SMK kelompok/bidang pariwisata, pertanian dan perkebunan. Selain SMK Teknik, SMK Akuntansi, SMK Kesehatan, SMK Perikanan, dan SMK Pertanian, perlu juga dikembangkan sekolah yang berbasis keagamaan.

Angka Kelulusan pada tingkat SD/MI Tahun 2016 sebesar 98,92%, untuk tingkat SMP sebesar 99,98% serta ditingkat SMA/SMK angka kelulusan sebesar 98,88%. Angka kelulusan tersebut dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berhasil lulus dibandingkan dengan jumlah siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian. Sedangkan apabila Angka Kelulusan dihitung berdasarkan siswa yang berhasil lulus dibandingkan dengan siswa yang mengikuti ujian maka diperoleh Angka Kelulusan mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan.

Berdasarkan data, angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2016 sebesar 0,14%. Pada umumnya yang melatarbelakangi alasan putus sekolah lebih pada kondisi budaya, yaitu adanya pemahaman lama yang beranggapan bahwa anak bisa baca tulis sudah cukup dan faktor geografis jarak sekolah di beberapa wilayah yang relatif masih cukup jauh serta domisili orang tua yang tidak menetap karena faktor pekerjaan. Untuk menekan angka putus sekolah dilakukan dengan penambahan jumlah SD, jumlah ruang kelas, adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah.

Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kotawaringin Barat pada tahun 2016 berjumlah 142 sekolah. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2015 berjumlah 188 sekolah dan tahun 2016 tetap berjumlah 188 sekolah yang merata di seluruh desa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2015 sama dengan tahun 2016 yakni berjumlah 15 sekolah dan hanya terdapat di beberapa desa. Sedangkan SDLB sampai saat ini hanya berjumlah 1 sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP tahun 2015 berjumlah 59 sekolah dan di tahun 2016 tetap berjumlah 59 sekolah. Untuk SMPLB 1 sekolah. Pada jenjang

pendidikan SMA tahun 2016 berjumlah 13 sekolah sama dengan jumlah pada tahun 2015 dan SMK pada tahun 2016 berjumlah 14 sekolah.

Indikator kinerja lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah rasio siswa per-guru. Rasio siswa per-guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru untuk jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di jenjang pendidikan tersebut.

Rasio siswa per-guru untuk tahun 2016 pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2016 adalah 1:17, untuk jenjang SD/MI adalah 1:17,28, untuk jenjang pendidikan SMP adalah 1:14,90, untuk jenjang pendidikan SMA adalah 1:18,26 sedangkan untuk SMK adalah 1:13,69. Norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah SD/MI sebesar 1:32 ; SMP sebesar 1:36; dan SMA sebesar 1:20, serta SMK sebesar 1:15. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut dapat dikatakan bahwa rasio siswa per-guru SD/MI, SMP, dan SMA/SMK di Kotawaringin Barat telah sesuai dan berada pada standar nasional yang ditetapkan.

Apabila dicermati dari ketersediaan ruang belajar, rata-rata kepadatan ruang belajar di SD/MI adalah 24 siswa/kelas, SMP adalah 28 siswa/kelas, dan SMA/SMK/MA sebesar 32 siswa/kelas, sebenarnya hal ini menunjukkan ketersediaan ruang belajar telah memenuhi standar sesuai SPM pendidikan dasar yaitu untuk SD maksimal 32 siswa/kelas dan SMP maksimal 36 siswa/kelas, sedangkan SMA/SMK maksimal 36 siswa/kelas menurut standar sarana dan prasarana SMA/SMK. Namun demikian apabila dicermati berdasarkan jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel) pada tiap satuan pendidikan, maka terdapat kesenjangan jumlah siswa dalam rombel antara wilayah perkotaan/yang padat penduduk dibandingkan wilayah pedesaan/yang jarang penduduk. Satuan Pendidikan pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi sebagian besar jumlah siswa dalam rombel melampaui standar sesuai SPM pendidikan dasar untuk jenjang SD dan SMP serta standar sarana dan prasarana SMA/SMK untuk jenjang SMA/SMK. Sehingga masih perlu adanya penambahan fasilitas ruang belajar pada tiap jenjang satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan dasar/standar sarana dan prasarana SMA/SMK, serta memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 37.084.652.400 dan terealisasi sebesar Rp. 34.199.544.326 atau 92,22%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.2.
Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Disdikpora	37.084.652.400	34.199.544.326	92,22	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.866.197.155	1.614.493.051	86,51	100	Cakupan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.713.000	-	-	100	Terlaksananya penyediaan perangko untuk surat menyurat pada Dinas Dikpora dan jaringannya			lbr
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	272.640.000	160.861.746	59	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Dikpora dan jaringannya	9	9	rek.
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ops.	8.150.000	6.110.900	74,98	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional	45	45	unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	452.800.250	417.476.400	92,20	100	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan dan petugas keamanan di lingkungan Dinas Dikpora	12	12	OB
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	107.009.600	100.454.100	93,87	100	Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan kantor	2	2	org
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	32.130.000	19.850.000	61,78	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Dinas Dikpora dan iaringannya	68	68	unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
g.	Penyediaan alat tulis kantor	151.174.000	151.044.000	99,91	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	8	8	pkt
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	116.950.000	106.672.000	91,21	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan, spanduk dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya	1	1	pkt
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	24.065.000	23.950.000	99,52	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Dinas Dikpora dan jaringannya	8	8	pkt
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	159.700.000	153.800.000	96,31	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa papan nama, mesin penghancur kertas, notebook, printer, proyektor dan sound system	59	59	unit
k.	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.915.000	12.380.000	95,86	100				
l.	Penyediaan makanan dan minuman	215.250.000	160.670.000	74,64	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai di lingkungan Dinas Dikpora	2	2	pkt
m.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	308.700.305	301.223.905	97,58	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.073.450.000	2.563.451.473,80	83,41	85,35	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.
a.	Pembangunan rumah dinas	150.800.000	150.375.000	99,72	100	Terlaksananya pembangunan gedung kantor baru Dinas Dikpora	4	4	pek
b.	Pembangunan Gedung Kantor	1.368.750.000	966.701.273,80	70,63	67,32	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	2	2	pkt
c.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	410.000.000	406.900.000	99,24	99,27				
d.	Pengadaan perlengkapan	222.900.000	219.200.000	98,34	100				

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	gedung kantor								
e.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	160.160.000	146.859.000	91,70	100	Terlaksananya pengecatan rutin gedung kantor pada kantor Dinas Dikpora dan jaringannya	10	10	pek
f.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	386.100.000	305.994.700	79,25	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas	45	45	unit
g.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27.000.000	20.586.000	76,24	100				
h.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	347.740.000	346.835.500	99,74	100	Terlaksananya peralatan gedung kantor pada kantor Dinas Dikpora dan jaringannya	1	1	thn / keg.
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	87.750.000	86.850.000	98,97	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	87.750.000	86.850.000	98,97	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya			stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	140.980.000	91.588.653	64,97	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	16.980.000	15.630.000	92,05	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan.			
b.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	124.000.000	75.958.653	61,26	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan			
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.780.000	14.184.000	41,99	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	940.000	784.000	83,40	100	Terlaksananya peny. lap. capaian kinerja dan ikhtisar	1	1	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	ikhtisar realisasi kinerja SKPD					realisasi kinerja SKPD			
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	32.840.000	13.400.000	40,80	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	keg.
6.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.469.030.000	1.436.443.000	97,78	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini	3	3	keg.
a.	Pembangunan gedung sekolah	525.960.000	520.118.000	98,89	100	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah di Kec.Pangkalan Banteng Kec.Pangkalan Lada Kec.Arut Selatan			
b.	Pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	99.840.000	99.490.000	99,65	100	Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir di Kec. Kumai			
c.	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	49.150.000	49.150.000	100	100				
d.	Pengadaan mebeluer sekolah	24.575.000	24.575.000	100	100				
e.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	573.080.000	571.407.000	99,71	100	Kec.Arut Selatan Kec.Pangkalan Lada Kec.Kumai Mendawai	100	100	
f.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	138.225.000	113.503.000	82,11	100				
7.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	22.404.062.718	21.714.151.268	96,92	98,87	Terlaksananya kegiatan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21	21	keg.
a.	Pembangunan gedung sekolah	704.183.600	527.783.600	74,94	100	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah di Kec. Arsel dan Kotawaingin Lama	2	2	Unit
b.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	372.946.059	372.946.059	100	100		7	7	Unit
c.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.218.060.000	1.214.289.500	99,69	100		115	15	Unit
d.	Pembangunan taman,lapangan upacara,dan fasilitas parkir	3.276.226.000	3.263.469.000	99,61	100		2	2	Pek
e.	Pembangunan Perpus sekolah	399.360.000	399.360.000	100	100		14	14	Unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
f.	Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary	259.336.800	259.336.800	100	100		7	7	Unit
g.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.465.500.000	1.377.180.000	93,97	100		1	1	Keg
h.	Pengadaan meubeluer sekolah	337.350.000	337.250.000	99,97	100		2	2	Pkt
i.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	578.640.000	578.612.000	99,97	100				
j.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	804.287.659	802.601.659	99,79	100		7	7	Pkt
k.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	2.997.115.600	2.987.297.600	99,67	100		14	14	Unit
l.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	9.060.012.000	8.767.789.550	96,77	100		1	1	Keg
m.	Penyelenggara an Pkt A setara SD	20.000.000	20.000.000	100	100		1	1	Keg
n.	Penyelenggara an Pkt B setara SMP	20.000.000	20.000.000	100	100		1	1	Keg
o.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	33.797.000	24.056.700	100	100				Keg
p.	Pembinaan minat,bakat, dan kreativitas siswa	261.573.000	197.693.300	75,57	100		10	10	Keg
q.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasii pendidikan dasar	27.000.000	26.075.000	96,57	100		1	1	Keg

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
r.	Penyelenggara an akreditasi sekolah dasar	11.100.000	10.250.000	92,34	100		1	1	Keg
s.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	83.025.000	54.275.000	65,37	100		100	100	%
t.	Penyediaan beasiswa berprestasi	276.100.000	276.050.000	99,98	100		100	100	%
u.	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	198.450.000	197.835.500	99,69	100		9	9	Pek
8	Program Pendidikan Menengah	4.413.726.727	3.903.643.797	88,44	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Menengah	16	16	keg.
a.	Pembangunan gedung sekolah	713.459.727	713.459.727	100	100	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas			M2
b.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	150.120.000	149.688.000	99,71	100	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah SMKN 4 P. Bun			unit
c.	Penambahan ruang kelas sekolah	149.100.000	148.648.000	99,70	99,92	Terlaksananya penyediaan alat praktek dan peraga siswa			Pkt
d.	Pembangunan Taman, Lapangan upacara, dan fasilitas parkir	868.661.000	865.576.000	99,64	100	Terkaksananya penyediaan meubeluer sekolah SMKN 1 Pangkalan Banteng, SMKN 4 Pangkalan Bun, SMKN 1 Pangkalan Bun, SMKN 1 Kotawaringin Lama, SMAN 2 P. Bun			
e.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	549.800.000	545.800.000	99,27	100	Terlaksananya penyediaan ATK, alat listrik dan elektronik, telepon, listrik , penggandaan, pemeliharaan mesin tik dan pemeliharaan komputer/PC			
f.	Pengadaan Mebeleur sekolah	49.150.000	49.000.000	99,69	100	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Sekolah dalam rangka menuju Sekolah Adiwiyata Nasional/ Adiwiyata Mandiri SMAN 1 P. bun dan SMAN 3 P. Bun			
g.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	354.606.000	333.252.469	93,98	100	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Kumai, SMAN 1 P. Bun, SMAN 1 P.			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						Banteng, SMAN 1 Aruta, SMKN 4 dan SMAN 2 P. Bun			
h.	Rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah	150.000.000	150.000.000	100	100	Terlaksananya rehabilitasi Lab. IPA SMAN 2 P. Bun, rehab sedang RPS SMKN 1 P. Bun, rehab sedang Lab. SMAN 3 P. Bun			
i.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	189.280.000	188.531.000	99,60	100	Terlaksananya rehabilitasi rehab sedang perpustakaan SMAN 2 P. Bun			
j.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	197.800.000	57.305.500	28,97	100	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum untuk SMA, SMK dan MA di Kab. Kotawaringin Barat			keg.
k.	Pembangunan gedung sekolah	4.413.726.727	3.903.643.797	88,44	100	Terlaksananya bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) sekolah model (SMAN 1 Pangkalan Bun)			
l.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	713.459.727	713.459.727	100	100	Terlaksananya Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah			
m.	Penambahan ruang kelas sekolah	150.120.000	149.688.000	99,71	100	Terlaksananya Pembangunan ruang kelas			
n.	Pembangunan Taman, Lapangan upacara, dan fasilitas parkir	149.100.000	148.648.000	99,70	100				
o.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	868.661.000	865.576.000	99,64	100				
p	Pengadaan Mebeleur sekolah	549.800.000	545.800.000	99,27	100				
q	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	49.150.000	49.000.000	99,69	100				
r	Rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah	354.606.000	333.252.469	93,98	100				
s	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	150.000.000	150.000.000	100	100				
t	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	189.280.000	188.531.000	99,60	100				
u	Penyelenggara	20.000.000	20.000.000	100	100	Terlaksananva			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	an pkt C setara SMU					penyelenggaraan Pkt C setara SMU di Kabupaten Kotawaringin Barat			
v	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	37.850.000	34.809.750	91,97	100				
w	Penyelenggara an akreditasi sekolah menengah	11.100.000	3.800.000	34,23	100				
x.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000	9.946.000	66,31	100	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan			
y.	Pembinaan minat bakat dan kreativitas sekolah	656.700.000	332.727.351	50,67	100	Terlaksananya pembinaan untuk siswa berprestasi pada pendidikan menengah			
z	Penyediaan beasiswa berprestasi	301.100.000	301.100.000	100	100	Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi sekolah menengah			
9.	Program Pendidikan Non Formal	1.620.337.000	1.345.843.501	83,05	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal	2	2	keg.
a.	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	22.507.000	20.000.000	88,86	100	Terlaksananya pendataan untuk semua PAUD di Kab. Kotawaringin Barat	1	1	keg.
b.	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	1.597.830.000	1.325.843.501	82,98	100	Terlaksananya kegiatan Non Formal untuk meningkatkan kecakapan siswa siswi melalui Paskibra, O2SN dan LPI	10	10	keg.
10.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.514.473.200	1.307.494.581	86,33	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4	4	keg.
a.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	142.500.000	98.775.000	69,32	100	Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru melalui kegiatan KKG SD, KKS SD, MGMP SMP, KTSP SMA, KTSP SMP, MGMP SMA, MKKS SMP, MKKS SMA, MKKKS dan MKPS.	9	9	keg.
b.	Pengembangan mutu dan kualitas	87.600.000	87.300.000	99,66	100	Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu	4	4	keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan					dan kualitas tenaga pendidik dan pengawas sekolah, serta kompetensi guru			
c.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan profesi pendidik	1.284.373.200	1.121.419.581	87,31	100	Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan & perlindungan profesi pendidik (guru kontrak & guru TK Non PNS)	352	352	guru
11.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	460.865.600	121.401.001	26,34	41	Terlaksananya kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4	4	keg.
a.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	6.000.000	0	-	-	Terlaksananya penyusunan dokumen data pokok pendidikan	5	5	dok.
b.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan	64.015.000	10.599.800	16,55	100	Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler dan tes psikologi bagi siswa pada sekolah yang menerapkan muatan lokal lalu lintas	1	1	keg.
c.	Pembinaan Dewan Pendidikan	48.350.000	22.156.701	42,00	100	Terlaksananya kegiatan dewan pendidikan selama setahun	100	100	%
d.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	342.500.600	88.644.500	25,88	22,36	Terlaksananya sistem informasi manajemen pendidikan (NISN dan ICT Disdikpora)	1	1	keg.

Sumber : Disdikpora

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal dan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang disebabkan:
 - a. Belum tersebar dan meratanya tenaga pendidik dan kependidikan, terutama di daerah terpencil;
 - b. Belum terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan empat standar kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial;

- c. Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan disekeliling sekolah sehingga menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar;
 - d. Terbatasnya jumlah SDM/pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasi ketatausahaan di sekolah (terutama SD).
2. Belum optimalnya koordinasi pengawas dan penilik yang ada di kecamatan, dengan SKPD. Atas permasalahan tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja urusan pendidikan perlu diupayakan perbaikan sebagai berikut :
 1. Melaksanakan redistribusi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga secara bertahap dan berkelanjutan;
 2. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM (terutama pengawas sekolah dan penilik) yang ada, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis lainnya;
 3. Melaksanakan pembangunan sarana pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan skala prioritas;
 4. Mengefektifkan peran dan fungsi UPTD, pengawas sekolah dan penilik.

4.1.2. URUSAN KESEHATAN

a) Kondisi Umum

Tujuan dari pembangunan kesehatan menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada: 1) perikemanusiaan; 2) pemberdayaan dan kemandirian; 3) adil dan merata; serta 4) pengutamakan dan manfaat. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka derajat kesehatan masyarakat secara umum. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk telah dilakukan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1 unit rumah sakit pemerintah, 1 unit rumah sakit swasta, 2 rumah bersalin swasta, 1 klinik pengobatan swasta, 18 unit puskesmas, 75 unit puskesmas pembantu, 57 unit Poskesdes dan didukung 742 orang tenaga kesehatan.

Beberapa hal yang menjadi isu mendasar pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah peningkatan jaminan pemeliharaan semesta, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan/pelatihan kesehatan. Perlu disadari bahwa kesehatan dan permasalahannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi semua pihak di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti dunia usaha, LSM, dunia pendidikan, dan masyarakat sendiri. Hal ini karena permasalahan kesehatan terkait dengan faktor seperti keadaan geografis dan lingkungan, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya.

Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2014-2016

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
		2015	2016	2015	2016	
A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR					

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
		2015	2016	2015	2016	
1	Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4)	95%	95%	87,4%	87.35%	Tidak memenuhi target dan turun di banding tahun 2015
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	95%	62 %	80%	Tidak memenuhi target namun naik dibanding tahun 2015
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93%	90%	87 %	88%	Naik dari tahun 2015 tapi tidak mencapai target tahun 2016
4	Cakupan pelayanan nifas	90%	90%	87,7 %	88.7%	Tidak sesuai target namun melebihi capaian 2015
5	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	80%	54 %	74.22%	Tidak sesuai target namun melebihi capaian 2015
6	Cakupan Kunjungan Bayi	90%	98%	92,6%	91.83%	Turun dari 2015 dan tidak mencapai target
7	Cakupan desa / kelurahan UCI (<i>universal child immunization</i>)	100%	100%	91,5 %	86.1%	Tidak sesuai dengan target turun dari tahun 2015
8	Cakupan pelayanan anak balita	85%	100%	92,4%	93.71%	Tidak sesuai dengan terget naik dari tahun 2015
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan)	100%	100%	100%	100%	Tercapai
10	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	3%	Tidak memenuhi target, turun dari 2015
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	96,3%	100%	Tercapai
12	Cakupan peserta KB aktif	75%	95%	130,4 %	138%	Tercapai dan melebihi target
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit <i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP) per 1000 penduduk < 15 tahun	$\geq 2,0$ per 100.000 pddk ≤ 15 tahun tiap tahunnya	0	0%	0%	
14	Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	100%	100%	100 %	100%	
15	Cakupapan penemuan dan penanganan penderita baru TB BTA positif	90%	90%	98,46%	72%	Tidak tercapai turun dari 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
		2015	2016	2015	2016	
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	100%	100%	90 %	81.2%	Tidak tercapai, turun dari 2015
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	
B	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN					
19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	Tercapai
20	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kab / Kota	100%	100%	100%	100%	Tercapai
C	PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB					
21	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	0%	Tidak tercapai dan turun dari 2015
D	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
22	Cakupan desa siaga	80%	80%	80%	81.9%	Tercapai dan melebihi target
E	RASIO FASILITAS KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN DAN UMUR HARAPAN HIDUP					
23	Rasio rumah sakit per satuan penduduk.(Rasio tempat tidur / jumlah penduduk).	1:1000	1:1000	1:963	1:963	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
24	Rasio dokter Spesialis Per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:4348	1:11589	Belum Tercapai
25	Rasio dokter umum per satuan penduduk (1:2083)	1:2083	1:2083	1:2857	1:3863	Belum tercapai
26	Rasio dokter gigi per satuan penduduk (1:9090)	1:9090	1:9090	1:10000	1:15452	Belum tercapai
27	Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk bidan (1:1.333)	1:1.333	1:1.333	1:454	1:1082	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
28	Rasio tenaga Perawat per satuan penduduk (1:632)	1:632	1:632	1:326	1:753	Belum tercapai
29	Rasio tenaga Apoteker per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:16000	1:46356	Belum Tercapai
30	Rasio tenaga SKM per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:3127	1:7726	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
		2015	2016	2015	2016	
31	Rasio tenaga Perawat gigi per satuan penduduk (1:6250)	1:6250	1:6250	1:6750	1:15452	Belum Tercapai
32	Rasio tenaga Gizi per satuan penduduk (1:4166)	1:4166	1:4166	1:4000	1:4000	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
33	Rasio tenaga Sanitarian per satuan penduduk (1:6666)	1:6666	1:6666	1:6666	1:16361	Belum tercapai target
34	Umur Harapan Hidup	72	72	72	72	Tercapai target

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian derajat kesehatan (Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan) Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata secara nasional. Capaian usia harapan hidup di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya diwilayah tersebut.

Sebagaimana disajikan dalam tabel, untuk data angka harapan hidup yang tersedia adalah data kondisi tahun 2016 dimana umur harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 72. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kotawaringin Barat yang lahir pada tahun 2016 akan hidup hingga mencapai umur 72 tahun.

Meningkatnya pelayanan kesehatan, dan naiknya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik yang memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Capaian Umur Harapan Hidup yang tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

Capaian Indikator kesehatan lainnya, seperti Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Bayi, serta gizi masyarakat menunjukkan tren positif. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari 92 per-100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2015 menjadi 194 per-100.000 Kelahiran hidup pada tahun 2016. Angka tersebut masih di

bawah Angka Kematian Ibu nasional sebesar 228 per-100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 adalah 7,0 per-1000 Kelahiran Hidup lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2015 adalah 9,64 per-1000 Kelahiran Hidup. Angka tersebut jauh di bawah angka nasional sebesar 43 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007). Sedangkan Angka Kematian Bayi, pada tahun 2016 ini tercatat 7,0 per-1000 Kelahiran Hidup lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 9,27 per-1000 kelahiran hidup. Angka tersebut di bawah angka nasional sebesar 34 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007).

Pola penyakit menular yang selalu menjadi sepuluh besar penyakit (puskesmas) selama beberapa tahun terakhir adalah influenza, diare, pneumonia, typhus perut klinis, diare berdarah (disentri), tersangka TB paru, campak dan TBC dengan BTA (+). Sementara untuk balita, pola penyakit masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, problem penyakit tidak menular pun cenderung meningkat. Beberapa penyakit tersebut di antaranya penyakit jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), *hipertensi*, *stroke*, *diabetes mellitus*, *kanker*, hingga gangguan jiwa.

Prevalensi balita dengan gizi buruk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Kobar pada tahun 2016 sebesar 0,03 % atau hampir tidak ada pergeseran jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,02 %, dari target sebesar 5 %. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus-kasus gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak terpantau.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, birokrat dan swasta diharapkan tetap waspada serta dapat bersama sama meningkatkan komitmennya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk, atau minimal mempertahankan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2016

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Untuk alokasi anggaran urusan kesehatan tahun 2016 sebesar Rp. 175.499.609.000 dan terealisasi

sebesar

Rp. 166.757.877.425 atau 95,02%.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut telah berhasil dipenuhinya target penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dasar.

Program prioritas lainnya adalah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu yang tidak memiliki Jaminan Asuransi Kesehatan tahun 2016 sebanyak 36.747 jiwa dengan premi 23.000/ jiwa/ bulan lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 35.150 jiwa dengan premi sebesar Rp.19.225/jiwa/bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Entry poin program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan melalui desa siaga, dengan telah dimilikinya 39 ambulans desa yang bersumber dari masyarakat, stimulan pemerintah daerah dan bantuan lainnya (CSR) yang tidak mengikat. Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.4
Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS KESEHATAN		48.521.040.000	45.230.932.165,72	93,21	96.30				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.757.577.892	1.635.541.217	93.32	97.68	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	365.500	60.92	80.00	Pengiriman surat- menyurat	20	20	Pkt

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	359.655.000	305.278.491	84.88	93.00	- Tersedianya jasa domain +hosting (Dinas Kesehatan, 18 Puskesmas dan Lab) - Terbayarnya Jasa telepon dan faksimile 6 line. - Terbayarnya internet speedy. - Terbayarnya rekening air. - Terbayarnya Jasa Listrik. - Tersedianya surat kabar 4 terbitan. - Tersedianya Majalah Makanan dan Kesehatan. - Berlangganan tambahan internet dedicated KantorDinas Kesehatan (untuk kebutuhan sikda dan kekurangan akses rutin).	19 72 12 12 108 48 12 12	19 72 12 12 108 48 12 12	Dom/ thn Rek/ Bln Line/ bln rek/ Bln rek SK/ Bln eks/ Bln line/ Bln
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	16.650.000	8.306.500	49.89	90.00	Terbayarnya pajak kendaraan R2 dan R4	15	15	Unit/ Thn
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	561.453.000	534.595.650	95.22	98.75	- Buku Cek - Terbayarnya uang lembur dan Jasa Bank - Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS - Materai 3000 dan Materai 6000	4 12 12 12	4 12 12 12	Buah Bulan Bulan Bulan
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	97.909.500	91.677.000	93.63	97.92	- Alat kebersihan dan bahan pembersih - Terbayarnya honor tenaga kebersihan	2 3	23 5	Macam Org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.880.000	18.815.000	82.23	96.56	- Komputer, Note Book dan Printer terpelihara - Baterai notebook - Jaringan Sikda Generik terpelihara	14 2 1	14 2 1	Unit Buah set
g.	Penyediaan alat tulis kantor	124.416.200	123.636.450	99.37	100	- Alat tulis kantor rutin dan program - Terbayarnya Honor PPTK	12 1	12 1	Bulan Org
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.442.500	99.835.250	99.40	100	- Cetak ID Card Pegawai dan Map - Cetak NCR - Cetak Amplop - Penggandaan - Penjilidan - Cetak Kop Surat - Cetak Kartu Disposisi	50 1015 40 237370 10 50	130 1015 40 237370 10 50	Lbr Rim Pack Lbr Buku Rim buku
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12.441.000	12.430.000	99,91	100	- Tersedianya Lampu, Stopkontak , jack Listrik, dan Battery Alkaline - Tersedianya Kabel Listrik	154 200	154 200	Buah Meter
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.800.000	57.700.000	94.90	98.31	- Tersedianya hardisk eksternal dan DVD room eksternal - Tersedianya printer Sikda - Tersediaanya komputer dekstop SIKDA - Tersedianya peralatan jaringan komputer	6 2 10 7	2 2 1 1	Unit Unit Unit Pkt
k.	Penyediaan peralatan rumah tangga	300.000	300.000	100	100	- Tersedianya baki - Tersedianya box air minum plastik - Tersedianya sendok makan	2 1 1	2 1 1	Buah Buah Lusin
l.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan					Tersedianya buku perundang-undangan	10	0	judul
m.	Penyediaan makanan dan minuman	122.000.000	114.590.000	93.92	100	Tersedianya minum tenaga kontrak	12	12	Bulan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
n.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	273.030.692	271.489.377,00	99,43	99.00	- Terselenggaranya konsultasi pengelola keuangan - Terselenggaranya konsultasi teknis kefarmasian, jaminan sarana dan prasarana - Terselenggaranya konsultasi teknis pelayanan kesehatan - Rapat koordinasi, konsultasi, pertemuan ke propinsi, pusat, luar daerah lain	6 9 5 26	6 9 5 26	Kali Kali Kali Kali
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.085.250.500	2.014.745.382	96.61	99.49				
a.	Pembangunan gedung kantor	714.750.000	689.320.525	96.44	98.50	- Terlaksananya rehab pagar Dinkes - Terpasangnya KM Air PDAM Puskesmas Semanggang - Terlaksananya penataan perpipaan air dan pengadaan tandon puskesmas Semanggang - Penambahan daya UGD Puskesmas Kolam - Pembuatan sumur Puskesmas Runtu - Pembangunan Tower Jatingan SIKDA (Riam Durian, Teluk Bogam, Kolam dan Karang Mulya)	1 1 1 1 1 4	1 1 1 1 1 4	Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
b.	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	276.000.000	248.235.000	89.94	100	- Tersedianya lemari narkotika - Tersedianya Lemari Arsip /Rak Arsip	8 16 10	8 16 10	Buah Buah Buah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						- Tersedianya Lemari Besi - Tersedianya AC 2 PK dan 1 PK - Tersedianya generator set 20 KVA - Tersedianya Generator Set untuk Pustu dan Polindes	13 1 10	13 1 10	Buah Set Set
c.	Pengadaan Meubeleur	914.424.000	898.204.750	98.23	100	- Terbayarnya honor PPTK - Tersedianya Kursi Lipat - Tersedianya kursi tunggu - Tersedianya Meja Partisi Apotik Puskesmas - Tersedianya Meja Partisi Dinkes - Tersedianya meja Partisi Perawatan - Tersedianya Ranjang Periksa - Tersediannya Kasur	1 464 30 18 40 50 50	1 464 30 18 40 50 50	Orang Buah Buah Set Buah Set Buah
d.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42.270.000	41.479.000	98.13	100	- Pengecatan gedung kantor Dinkes/Instalasi Farmasi / Labkesda - Terpeliharanya atap gedung kantor Dinas Kesehatan/Instalasi Farmasi / Labkesda - Pengecatan Sling dan Grounding sikda Dinas Kesehatan - Terpeliharanya mesin pompa air	826 100 1 3	826 100 1 3	M2 M2 Pkt Unit
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.600.000	127.446.107	99,88	100	- Bahan Bakar Mobil Operasional - Bahan Bakar eselon II R 2 - Bahan Bakar kendaraan dinas roda 2 - Suku cadang dan perbaikan kendaraan R 2 - Suku cadang kendaraan R 4	7 1 5 5 8	7 1 5 5 8	Unt Unit Unit Unit Unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
f.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.206.500	10.060.000	98.56	100	- Tersedianya BBM Generator set - Terlaksananya pemeliharaan AC Kantor - Tersedianya BBM mesin potong rumput (Non subsidi) - Tersedianya Olie 2T mesin potong rumput - Terpeliharanya mesin potong rumput	190 12 140 10 2	190 12 140 10 2	Liter unit/ thn liter liter Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	59.850.000	59.850.000	100	100				
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	59.850.000	59.850.000	100	100	- Tersedianya pakaian dinas pegawai	126	126	Stel
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	6.000.000	6.000.000	100	100				
a.	Pemulangan pegawai yang pensiun	6.000.000	6.000.000	100	100	- Terlaksananya bantuan pemulangan pegawai pensiun	1	1	Org
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	318.612.000	259.541.905	81.46	95.40				
a.	Pendidikan dan pelatihan formal	171.921.000	170.099.100	98.94	100	- Terlaksananya Pengiriman Diklat Teknis/ Fungsional - Terlaksananya Pengiriman Diklat Tim Pendamping Akreditasi - Terselenggaranya Diklat Kefarmasian	5 12 3	3 12 3	Org Org Org
b.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	146.700.000	89.442.805	60.96	100	- Tersedianya Setoran biaya diklat teknis - Terbayarnya transport, uang harian dan penginapan dan diklat teknis - Tersedianya Setoran Partisipasi - Terlaksananya	3 6 1 8	3 6 1 8	OK OK Keg OK

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						bimtek aparatur Pengelola Keuangan SKPD (DID) - Terlaksananya Kontribusi Bimtek	8	8	OK
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.009.250	1.995.250	99.30	99.69	-			
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	600.000	600.000	100	100	- Terlaksananya Jilid Laporan - Terlaksananya Penggandaan Laporan	24 1440	24 1440	Buku lbr
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	410.000	410.000	100	100	- Terlaksananya Fotocopy Laporan keuangan semesteran - Terlaksananya Penjilidan Laporan keuangan semesteran	640 25	640 25	Lbr Buku
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	999.250	985.250	98.59	99.37	- Terlaksananya penggandaan laporan keuangan - Terbayarnya uang lembur PNS	750 12	750 12	Lbr Bln
7.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.396.249.000	3.378.384.685	99.47	99.91	-			
a.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.281.905.000,00	3.271.063.901	99,66	96.95	- Terbayarnya honor PPTK - Terealisasinya pengadaan obat sesuai formularium nasional, untuk pelayanan kesehatan dasar - Tersedianya bahan laboratorium operasional medis - Tersedianya obat dan pembekalan kesehatan untuk pelayanan kefarmasian	12 18 18 18	12 18 18 18	Bln Bln Bln Pkm

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
b.	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	109.344.000	102.320.784	93.57	97.13	- Terealisasi distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas dan jaringannya	86	86	Kali
c.	Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan	5.000.000	5.000.000	100	100	- Terpeliharanya kulkas Penyimpanan Obat - Terpeliharanya AC Instalasi Farmasi	1 15	1 15	Unit Unit
8.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.028.093.688	12.002.210.322	92.12	95.83	-			
a.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	141.348.000	128.711.600	91.06	96.95	- Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin	18	18	PKM
b.	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	34.402.500	32.908.502	95.65	99.30	- Terlaksananya Pertemuan SIPNAP - Terlaksananya workshop farmasi klinik	40 75	40 75	Org Org
c.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	4.650.659.200	4.273.446.958	91.88	94.62	- Tersedianya Tenaga Kontrak daerah - Terlaksananya Rapat Kerja Lingkup seksi kesehatan rujukan dan seksi kesehatan khusus - Terlaksananya Evaluasi Workshop SIKDA Generik - Magang Poned - Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi Puskesmas Poned - Terlaksananya Pembinaan dilingkup seksi kesehatan khusus ke puskesmas dan Jaringannnya - Terlaksananya Monev pada kesehatan Rujukan	203 5 1 3 4 18 18 1	203 5 1 3 4 18 18 1	Org Kali Kali PKM Kali PKM PKM Kali

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						- Terlaksananya pertemuan Evaluasi kegiatan Operasional Puskesmas - Terlaksananya kajian teknis kesehatan khusus dan kesehatan rujukan - Tersedianya spanduk Promkes dilingkup kerja seksi kesehatan khusus - Tersedianya Buku KMS - Tersusunnya Buku Pegangan kader Posyandu Lansia - Terlaksananya pembinaan ke klinik perusahaan - Terlayannya kesehatan Jemaah Haji dalam seluruh rangkaian keg.	2 10 2500 1 9 100	2 10 2500 1 9 100	Kali Lbr Buku Buku Klinik %
d.	Peningkatan Pelayanan dan Penggulangan Masalah Kesehatan	256.941.750	247.102.351	96.17	98.75	- Terlaksananya Audit Maternal Perinatal - Terlaksananya Monev ke Puskesmas, Pustu, & Polindes - Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lapangan (P3K) - Tersedianya Buku KIA bumil - Tersedianya Kohirt/Register Puskesmas - Tersedianya Poster Tanda-tanda bahaya pada kehamilan dan 18 penapisan kebidanan untukmencegah AKI dan AKB	28 1 1 2520 250 250	28 1 1 2520 250 250	Org Thn Thn Buah Buah Buah
e.	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	7.944.742.238	7.320.040.911	92.13	96.40	- Beroperasio nalnya Puskesmas	18	18	PKM

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
9.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	267.683.666	265.208.302	99.07	99.95				
a.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	61.115.000	60.005.588	98.18	99.80	- Produk yang beredar di wilayah kab. Kotawaringin Barat aman dan layak di konsumsi - Terlaksananya penyuluhan keamanan kosmetik - Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi pengusaha IRTP	100 90 45	100 90 45	% Org Org
b.	Peningkatan kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	206.568.666	205.202.714	99.33	100	- Terbayarnya Honor PPTK - Tersedianya alat Labotarium Kesehatan (vein viewer, Laminar Air Flow, Conductivity electrode) - Tersedianya Lemari es suhu 2-8 °C	1 3 1	1 3 1	Org Unit Unit
10.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	37.645.000	36.590.918	97.19	99.73	-			
a.	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	37.645.000	36.590.918	97.19	99.73	- Pengusaha jamu gendong dan jamu rajangan memahami cara pengolahan dan pemilihan tanaman obat yang baik sesuai standar - Terlaksananya program toga di puskesmas	30 3	30 3	Orang PKM
11.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	461.460.000	444.727.601	96.37	98.61	-			
a.	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat	277.200.000	369.566.044	97.24	99.19	- Terlaksananya iklan layanan Promosi Kesehatan Masyarakat melalui koran dan televisi - Terlaksananya Survey	5 15	5 15	Bulan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | IV - 45

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						Kegiatan Diklat ke Palangka Raya - Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Mahasiswa Tubel	3	3	kali
12.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	371.497.500	346.920.600	93.38	97.87	-			
a.	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	271.637.500	247.061.600	90.95	97.08	- Terpenuhiya pemberian tambahan makanan dan vitamin yang efektif dan efisien guna perbaikan gizi masyarakat - Terlaksananya penyelidikan epidemiologi (PE) pada kasus gizi buruk/kurang - Tersedianya biaya pengiriman MP-ASI dari Kabupaten Puskesmas - Tersedianya Pengadaan administrasi PMT - Terpenuhiya pemberian tambahan makanan dan vitamin yang efektif guna perbaikan gizi masyarakat	100 10 18 1 100	100 10 18 1 100	% Kasus PKM Thn %
b.	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.	99.860.000	99.859.000	99,99	100	- Terlaksananya wokshop perencanaan dan evaluasi program gizi puskesmas - Terlaksananya monev program gizi ke puskesmas - Tersedianya register posyandu untuk semua posyandu - Tersedianya balok SKDN untuk semua posyandu - Tersedianya biaya	36 18 200 400 1	45 18 400 430 1	Org Pkm Buah Buah Thn

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						pengadaan administrasi program gizi perencanaan dan evaluasi - Termonitornya hasil kerja program gizi di puskesmas	100	100	%
13.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	736.631.300	704.140.200	95.58	97.81	-			
a.	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	561.575.800	532.120.200	94.75	97.48	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemantauan jentik - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat - Terlaksananya pemucuan dan pemantauan STBM - Terlaksananya monitoring program penyehatan lingkungan - Terlaksananya deklarasi ODF - Terlaksananya verifikasi ODF - Terlaksananya pemusnahan limbah medis puskesmas dan jaringannya - Peningkatan peran masyarakat	230 200 18 18 49 13 18 18	230 200 18 18 49 13 18 18	Org Org PKM PKM Desa Desa PKM PKM
b.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	107.275.500	105.025.000	97.90	98.37	- Terselenggara nya penyuluhan pengelolaan / pengusaha DAM - Terselenggara nya kegiatan refreshing kader kesling - Terselenggara nya kegiatan refreshing kader jumantik - Tersedianya stimulan STBM di sekolah dan rumah tangga - Terselenggara	30 210 230 3 19	30 210 230 3 19	Org Org Org Unit Kali

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						nya penyuluhan CTPS di desa dan sekolah - Meningkatnya pengetahuan pengelola/pengusaha DAM kader kesling.	470	470	Org
c.	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat	67.780.000	66.995.000	98.84	99.65	- Sosialisasi dan jejaring STBM lintas sektor - Monitoring dan evaluasi STBM - Terlaksananya sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta jejaring STBM Kabupaten Kotawaringin Barat	200 50 200	200 50 200	Org Org Org
14.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.096.633.600	1.051.712.343	95,90	97.22	-			
a.	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	124.989.000	124.359.000	99.49	100	- Semua daerah yang endemis DBD terlaksana fogging sarang nyamuk - Menurunkan angka kesakitan DBD pada daerah endemis dengan IR DBD 51 Per 100.000 penduduk	100 100	80 100	% %
b.	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan – bahan Fogging	62.000.000	61.600.000	99.35	100	- Tersedia abate untuk penanggulan DBD - Menurunnya angka kesakitan DBD untuk mencapai indikator IR DBD 51 per 100.000	400 100	400 100	Kg %
c.	Pelayanan Pencegahan dan Penang gulangan Penyakit Menular	614.222.000	578.231.400	94.14	98.41	- Terlaksananya pertemuan evaluasi program PMK 18 peserta - Terselaksana nya sosialisasi TAS Filariasis18 Peserta - Terlaksananya Sosialisasi PMTCT 18 peserta - Terlaksananya pengadaan barang pengadaan	100 100 100 100	100 100 100 100	% % % %

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						- Penurunan bermakna kesakitan dan kematian akibat penyakit menular & tidak menular	70	70	%
d.	Peningkatan Imunisasi	166.270.600	160.715.843	96.65	97.92	- Terlaksananya pertemuan monev imunisasi 54 Orang	100	100	%
						- Terlaksananya sosialisasi PIN 54 Orang	100	100	%
						- Terlaksananya sosialisasi cras program campak 54 campak	100	100	%
						- Terlaksananya rapat lintas program 20 peserta	100	100	%
						- Terlaksananya kegiatan sweeping UCI	100	100	%
						- Terujutnya desa Universal child imunization (UCI)	100	100	%
e.	Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	129.152.000	126.806.100	98.18	99.41	- Terselenggara nya fogging massal peningkatan kasus / KLB penyakit DBD/ chikungunya	18	18	PKM
						- Terlaksananya surveillance epidemiologi penyakit potensial KLB	18	18	PKM
						- Terlaksananya bimbingan teknis SKD KLB bagi petugas	18	18	PKM
						- Terselenggara nya komunikasi KLB	18	18	PKM
						- Terlindunginya kelompok rentan dari bencana kabut asap	18	18	PKM
						- Terlindungnya penderita gigitan hewan penyakit menular rabies	18	18	PKM
						- Terlaksananya surveillance epidemiologi KLB,SKD,KLB, penanganan	18	18	PKM

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						KLB < 24 jam mitigasi faktor resiko KLB			
15.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.255.976.000	1.084.302.976	86.33	97.22	-			
a.	Penyusunan standar kesehatan	766.764.000	637.522.577	83.14	99.00	- Jumlah puskesmas yang di samping dalam implementasi akreditasi (penyusunan Dokumen implementasi dokumen dan pra survey/ pre assessment survey akreditasi) - Jumlah puskesmas rintisan akreditasi(peng galangan komitmen pemahaman standar/ kriteria self assesment / penyusunan POA dan tahap penyusunan dokumen) - Tercapainya tahapan implementasi akreditasi sampai tahap pra survey/pre assessment survey, penilaian pada 6 puskesmas dan tahapan produk dokumen pada 9 puskesmas rintisan akreditasi	6 9 100	6 9 100	% % %
b.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	130.920.000	130.070.000	99.35	99.47	- Terlaksananya kegiatan upaya peningkatan pelayanan kesehatan menuju puskesmas berprestasi dan akreditasi - Terlaksananya penilaian puskesmas, pustu, dan poskesdes	12 12	12 12	Bulan Bulan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						berprestasi	12	12	Bulan
						- Tersedianya honor tim penilai puskesmas berprestasi	5	5	PKM
						- Jumlah Puskesmas yang disediakan ATK,sertifikat, plakat, dan hadiah	5	5	PKM
						- Jumlah puskesmas yang disediakan bahan cetak dan pengadaan untuk penilaian puskesmas berprestasi dan akreditasi	5	5	PKM
						- Jumlah puskesmas yang disediakan belanja makan dan snack untuk pembinaan / sosialisasi ke puskesmas berpestasi	5	5	PKM
						- Terakreditasi nya pelayanan kesehatan puskesmas	100	100	%
c.	Pembangunan dan Pemutahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	67.775.000	59.431.299	87.68	96.53	- Terselenggara nya pembuatan profil puskesmas tahun 2015	18	18	PKM
						- Terselenggara nya pemutakhiran data tahun 2015	12	12	Bulan
						- Terselenggara nya kegiatan monitoring evaluasi, pengawasan dan pembinaan pada pelayanan kesehatan swasta	30	30	Sara na
						- Terselenggara nya pembuatan profil kesehatan kabupaten	1	1	Kab
							1	1	Kali

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						2015 - Terselenggaranya pertemuan pemutakhiran data - Meningkatnya standar pelayanan kesehatan	100	100	%
d.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	290.517.000	257.279.100	88.55	91.67	- Terlaksananya pertemuan rapat evaluasi program kesehatan - Terlaksananya fasilitas monitoring terpadu program kesehatan - Terlaksananya nya fasilitas perencanaan di puskesmas - Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan program kesehatan agar meningkatnya standar pelayanan kesehatan yang lebih optimal	34 18 18 100	34 18 18 100	Org PKM PKM %
16.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8.543.227.500	8.110.432.078	94.93	97.36	-			
a.	Pembangunan Puskesmas	2.976.825.000	2.966.664.947	99.65	100	- Terselenggaranya survey, monitoring dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana ke Puskesmas di wilayah Kab. Kotawaringin Barat - Terbangunnya sarana kesehatan di puskesmas dan jaringannya	12 12	12 12	Bulan Unit
b.	Pembangunan Puskesmas pembantu	1.134.100.000	1.112.120.000	98.06	99.71	- Terselenggaranya survey, monitoring dan	12	12	Bulan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						pengawasan pembangunan sarana prasarana ke pustu, polindes/pos kesdes di wilayah Kobar - Terlaksananya pemagaran, penataan halaman dan papan nama pustu	8	8	Pkt
c.	Pengadaan Puskesmas keliling	845.450.000	841.150.000	99.49	100	- Terpenuhinya pengadaan Ambulance Puskesmas Arut Utara dan Ipuh Bangun Jaya	2	2	Unit
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	781.418.500	622.664.631	79.68	90.86	- Tersedianya Sterilisator - Tersedianya Sentrifuge	2 1	2 1	Unit Unit
e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	54.615.000	52.640.000	96.38	100	- Tersedianya sarana dan prasarana posyandu	3	3	Desa
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas	57.250.000	26.600.000	46.46	79.52	- Terselenggara nya pemeliharaan dan kalibrasi alat kedokteran umum	20	20	Alat Kese hatan
g.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas Pembantu	30.350.000	12.005.000	39.55	75.00	- Terlaksananya perbaikan alat kesehatan di Puskesmas Pembantu - Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas Pembantu	20 20	20 20	Alat Kese hatan Alat Kese hatan
h.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	30.000.000	30.000.000	100	100	- Penggantian suku cadang mobil ambulance puskesmas keliling terpenuhi	1	1	Unit
i.	Rehabilitasi sedang/Berat Puskesmas pembantu	2.633.219.000	2.446.587.500	92.91	95.00	- Terlaksananya survey, monitoring, rehab, dan pengawasan pembangunan sarana prasarana ke pustu, polindes/ poskesdes - Terlaksananya rehab sedang/ berat	12 4	12 4	Bulan Pkt

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						puskesmas/ puskesmas pembantu			
17.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	300.000.000	295.427.000	98.47	100	-			
a.	Pembangunan rumah sakit	300.000.000	295.427.000	98.47	100	- Gambar rencana, RAB, KAK	1	1	Pkt
18.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	13.695.297.504	12.960.944.291	94.63	96.94	-			
a.	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	13.695.297.504	12.960.944.291	94.63	96.94	- Masyarakat peserta asuransi kesehatan mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan	90	90	%
19.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	124.236.800	122.464.802	98.57	100	-			
a.	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	124.236.800	122.464.802	98.57	100	- Terselenggara nya sosialisasi Lomba Balita Indonesia - Terselenggaranya workshop evaluasi program KIA	36 36	36 36	Org Org
20.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	47.958.750	46.978.000	97.95	100	-			
a.	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	47.958.750	46.978.000	97.95	100	- Terlaksananya rangkaian Kegiatan Senam Bersama Lansia - Tersedianya PMT Penyuluhan di Posbindu - Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lansia - Tersalurkannya	1 72 18 1	1 72 18 1	Kali Pos bindu Pkm kali

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar Get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						Bantuan Untuk Posbindu Lansia			
21.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	934.150.050	399.336.292	42.74	78.25	-			
a.	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil	934.150.050	399.336.292	42.74	78.25	- Jumlah peserta Sosialisasi Jampersal yang dilaksanakan - Jumlah kunjungan Ibu Nifas Risti - Jumlah kunjungan Bumil Risti	80 350 30	80 350 30	OK OK OK

Sumber : Dinas Kesehatan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
RSUD SULTAN IMANUDDIN		126.978.569.000	121.667.618.550,56	95,81	98,77	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.518.422.500	2.370.081.650	94,10	98,67	Terlaksananya kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran	5	5	Keg.
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	179.200.000	146.053.230	81,50	84,07	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi melalui telepon dan internet	12	12	Bln
b.	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	177.740.000	170.500.000	95,92	97,22	-Terbayarnya honor pengelola keuangan dan pejabat pemegang kegiatan	122	122	Org
c.	Penyediaan ATK	201.200.000	198.000.500	98,40	100	- Tersedianya ATK RSUD SI	24	24	Jenis
d.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	392.112.500	373.800.000	95,32	100	- AC 2 PK - Komputer PC - Laptop - Printer dotmatrix - Printer inkjet - UPS - Wireless AP - Print scanner	8 10 11 11 10 5 5 2	8 10 11 11 10 5 5 2	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
e.	Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.468.170.000	1.385.477.500	94,36	100	Tersedianya makan dan minuman harian untuk pegawai RSUD, Dokter,	117.000	117.000	OH

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						Paramedis dan Non Paramedis			
f.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	100.000.000	96.250.420	96,25	100	Perjalanan Dinas Rapat Kordinasi	10	10	Org
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	481.400.000	471.394.500	97,92	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	3	Keg.
a.	Pembangunan rumah dinas	217.400.000	215.926.000	99,32	100	- Tersedianya rumah dinas dokter spesialis yang memadai	1	1	Unit
b.	Pengadaan Kendaraan dinas operasional	150.000.000	143.963.500	95,97	100	- Tersedianya kendaraan dinas roda 4 untuk dokter spesialis	1	1	Unit
c.	Pengadaan Meubeler	114.000.000	111.505.000	97,81	100	- Terpenuhinya kebutuhan mebeleur untuk ruangan perawatan dan ruang pertemuan	65	65	Unit
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200.950.000	200.475.000	99,76	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	200.950.000	2.475.000	99,76	100	Tersedianya pakaian dinas pegawai RSUD Sultan Imnuddin	435	435	Stel
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	221.574.000	217.612.823	98,21	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg
a.	Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	221.574.000	217.612.823	98,21	100	- Terlatihnya pegawai RS tentang teknis implementasi PERPU - Terlaksananya Ujian dinas karyawan gol. II dan gol. III	18 23	18 23	Org Org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
5.	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.000.000	2.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	2	Lap.
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan LAKIP	6	6	Bh
b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6	6	Bh
6.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	905.720.000	555.074.900	61,28	68,02	Terlaksananya kegiatan pada program standarisasi pelayanan kesehatan	2	2	Keg.
a.	Penyusunan Standar Kesehatan	435.020.000	124.894.900	28,71	33,42	Terlaksananya kegiatan bimbingan, survey, dan penilaian akreditasi	3	1	Keg.
b.	Pembangu nan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Plyn. Kesehatan	470.700.000	430.180.000	91,39	100	Tersedianya software, website, jaringan RS dan kegiatan survey kepuasan pelanggan	6	6	Pkt
7.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	43.211.271.500	40.672.280.911,92	94,12	97,69	Terlaksananya kegiatan pada program standarisasi pelayanan kesehatan	4	4	Keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
a.	Pembangunan Rumah Sakit	7.568.649.500	6.554.752.152	86,60	95,42	- Dokumen UPL/UKL - Jaringan air bersih/hydrant - Pembuatan sentra septic tank - Penambahan daya listrik - Pembangunan ruang tunggu - Perencanaan teknis gedung VIP - Pagar dan atap tangki BBM - Atap antar gedung IPSRS dan gizi - Gazebo	1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - 1 1 1 1 1 1 1	Dok. Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
b.	Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit	34.872.372.000	33.447.307.787	95,91	99,11	Tersedianya alat-alat kesehatan/ alat-alat kedokteran di RSUD SI	17	17	Pkt
c.	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	295.200.000	251.175.000	85,08	88,48	Penyediaan obat, kantong darah dan pengiriman sampel	672	672	kant ong
d.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	475.050.000	419.046.000	88,21	90,53	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih habis pakai dan peralatan/perleng kapan dapur	1	1	Pkt
8.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	146.431.000	146.233.400	99,86	100	Terlaksananya kegiatan program pemeliharaan sarana dan prasarana RS	1	1	Keg
a.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit	146.431.000	146.233.400	99,86	100	Terpeliharanya AC, TV dan kendaraan dinas dokter	3	3	Pkt
9.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	540.800.000	486.095.486	89,88	93,30	Terlaksananya kegiatan pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	3	3	Keg.
a.	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	140.000.000	113.348.320	80,96	85,71	Terlaksananya pelatihan bagi tenaga medis, paramedis dan non paramedis	14	14	Org
b.	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	80.000.000	74.688.838	93,36	98,44	Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan	8	8	Org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						(tenaga medis dan paramedis)			
c.	Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu	320.800.000	298.058.328	92,91	95,32	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan bagi pasien terlantar dan pasien kurang mampu	12	12	Bulan
10.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	78.750.000.000	76.613.621.856	97,20	100	Terlaksananya kegiatan BLUD RSSI pada program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	Thn
a.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	78.750.000.000	76.613.621.856	97,20	100	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD	100	100	%

Sumber : RSUD Sultan Imanuddin

Penerimaan Penghargaan Oleh Menteri Kesehatan RI,
Juara 1 Tingkat Nasional Puskesmas Berprestasi Kategori Terpencil Tahun
2016
Diraih Puskesmas Arut Utara



Penerimaan Penghargaan Oleh Menteri Kesehatan RI,
Juara 1 Puskesmas Akreditasi Paripurna Dengan Nilai UKM Terbaik Tahun
2016

Diraih Puskesmas Pangkalan Lada



Menghadiri Penyerahan Penghargaan Menteri Kesehatan RI
Terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2016



Capaian keberhasilan Urusan Kesehatan berdasarkan kinerja Output dan Outcome yang mendukung pencapaian keberhasilan di bidang kesehatan adalah:

1. Selama tahun 2016 kunjungan RSUD Sultan Imanuddin sebanyak 100.297 orang atau meningkat sebesar 3,31% dibandingkan tahun 2015 dengan total kunjungan sebanyak 97.081 orang;
2. Pendapatan RSUD Sultan Imanuddin melalui retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 74.241.438.924 kurang dari target yang telah ditetapkan Rp.75.250.000.000 (98,66%).

3. Pada tahun 2016 dilaksanakan survey kepuasan masyarakat / pelanggan RSUD Sultan Imanuddin terhadap 600 responden yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dengan hasil survey kepuasan 99,83% menyatakan puas (92,83% menyatakan puas, 7% menyatakan sangat puas) dan 0,17% menyatakan kurang puas;
4. Ketersediaan tenaga dokter umum sebanyak 13 orang, dokter spesialis sebanyak 27 orang, yaitu terdiri dari 23 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak, serta 2 orang tenaga mitra, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dokter spesialis bedah : 2 orang (PNS);
 2. Dokter spesialis kandungan : 3 orang (PNS);
 3. Dokter spesialis anak : 2 orang PNS (1 orang tenaga kontrak);
 4. Dokter spesialis penyakit dalam : 3 orang (PNS);
 5. Dokter spesialis Syaraf : 2 orang (PNS);
 6. Dokter spesialis THT-KL : 1 orang (PNS);
 7. Dokter spesialis Mata : 1 orang (PNS);
 8. Dokter spesialis Anastesi : 2 orang (1 orang PNS dan 1 orang tenaga mitra);
 9. Dokter spesialis Radiologi : 1 orang (PNS);
 10. Dokter spesialis Patologi Klinik : 3 orang (PNS);
 11. Dokter spesialis Jiwa : 1 orang (tenaga kontrak);
 12. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 1 orang (PNS);
 13. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik : 1 orang (PNS);
 14. Dokter Gigi Spesialis Orthodontis : 1 orang (PNS)
 15. Dokter Spesialis Orthopedic : 1 orang (tenaga kontrak).
 16. Dokter Spesialis Konservasi Gigi : 1 orang (tenaga kontrak).
5. Tingkat mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin berdasarkan SPM sebanyak 172 indikator dan yang mencapai target sebanyak 148 indikator (86,04%);
6. Pencapaian Indikator tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit sebagai berikut :
 - a. *Bed Occupancy Rate (BOR)* : 77,27% (ideal 60-85%);
 - b. *Average Length of Stay (Av LOS)* : 3,52 hari (ideal 6-9 hari);
 - c. *Bed Turn Over (BTO)* : 80,29 kali (ideal 40-50 kali);
 - d. *Turn Over Interval (TOI)* : 1,04 hari (ideal 1-3 hari);

- e. *Net Death Rate (NDR)* : 2,33% (nilai yang masih ditolerir 25 per seribu);
- f. *Gross Death Rate (GDR)* : 3,50% (seyogyanya tidak lebih dari 45 per seribu).

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi terkait dengan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya dokter spesialis lainnya seperti dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis patologi anatomi, dan spesialis bedah anak;
2. Terbatasnya alokasi anggaran, khususnya anggaran belanja modal/investasi untuk meningkatkan dan melengkapi fasilitas dan sarana untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit;
4. Meningkatnya jumlah pasien RSUD Sultan Imanuddin yang belum disertai dengan peningkatan alokasi biaya operasional rumah sakit, sehingga biaya untuk obat-obatan, alat/bahan habis pakai setiap tahunnya tidak pernah mencukupi;
5. Terbatasnya alokasi biaya untuk meningkatkan kualitas dokter dan paramedis melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Belum terpenuhinya sarana prasarana RSUD Sultan Imanuddin sesuai dengan Master Plan RS Kelas B Pendidikan.

Atas permasalahan tersebut maka solusi yang diupayakan adalah :

1. Perlunya perekrutan tenaga dokter spesialis lainnya dan tenaga paramedis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan insentif bagi dokter spesialis;
2. Perlunya penambahan anggaran peningkatan fasilitas dan sarana;
3. Perlunya pembiayaan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit yang bersumber dari anggaran selain APBD Kabupaten;

4. Perlunya penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas dokter dan paramedis melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Perlunya pembiayaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit yang bersumber dari anggaran selain APBD Kabupaten;
6. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia secara bertahap sesuai standar RS kelas B Pendidikan.

4.1.3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a) Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk mencegah hal tersebut, maka upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif, perlu terus dilaksanakan. Mengingat persoalan lingkungan merupakan persoalan yang bersifat lintas wilayah administrasi, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, maka tingkat capaian kondisi kualitas lingkungan pada dasarnya merupakan akumulasi dari tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara umum. kabupaten/kota, maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Konsistensi partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat, merupakan kunci penting bagi keberhasilan penanganan urusan lingkungan hidup.

Adapun realisasi kinerja urusan lingkungan hidup atau pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2016 sebagai berikut.

1) Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air

a. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara Ambien

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2016 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar 200,74 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 128,79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 84,71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar 119,87 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 93,93 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 80,18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dari ketiga lokasi tersebut pada tahun 2016 semester I dan II mengalami peningkatan kualitas udara karena hasil pengukuran berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara untuk konsentrasi parameter Karbon Monoksida (CO) pada tahun 2016 semester I dilokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar 95,25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar 129,85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Bundaran Pancasila sebesar 83,96 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan realisasi semester II untuk parameter CO di lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar 86,02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai konsentrasisebesar 114,69 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi sebesar 86,22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami peningkatan kualitas udara dimana pada semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari memiliki konsentrasi CO sebesar 95,25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar 86,02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, semester I pada lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai konsentrasi sebesar 129,85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar 114,69 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sehingga hasil pengukuran berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 30.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Sedangkan untuk lokasi Bundaran Pancasila mengalami penurunan kualitas udara karena konsentrasi CO meningkat pada semester I sebesar 83,96 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ menjadi 86,22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pada semester II, namun nilai ini masih berada di bawah baku mutu yaitu sebesar 30.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
3. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2016 untuk konsentrasi parameter Sulfur Dioksida (SO_2) semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar 68 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,

lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $8,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan lokasi Bundaran Pancasila sebesar $8,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester II untuk konsentrasi parameter tersebut pada Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar $8,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $10,64 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dan lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi Sulfur Dioksida (SO_2) sebesar $8,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami peningkatan kualitas udara karena lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari mengalami penurunan kadar SO_2 dari $68 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (semester I) dan $8,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (semester II). Nilai pada lokasi ini masih berada di bawah baku mutu yaitu $900 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sedangkan dua tempat lainnya yaitu lokasi Simpang Tiga Terminal pada semester I sebesar $8,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$, semester II sebesar $10,64 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sedangkan di lokasi Bundaran Pancasila pada semester I sebesar $8,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $8,84 \mu\text{g}/\text{m}$ mengalami penurunan kualitas lingkungan karena adanya peningkatan konsentrasi SO_2 . Akan tetapi hasil pengukuran masih berada di bawah baku mutu yaitu sebesar $900 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

4. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara untuk parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) pada tahun 2016 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari adalah sebesar $63,69 \mu\text{g}/\text{m}^3$, Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $88,82 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dan lokasi Bundaran Pancasila sebesar $71,33 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester II untuk parameter tersebut di lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari sebesar $3,55 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar $3,57 \mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Bundaran Pancasila sebesar $1,13 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami peningkatan kualitas udara dimana konsentrasi parameter NO_2 sebesar $63,69 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $3,55 \mu\text{g}/\text{m}^3$, semester I pada lokasi Simpang Tiga Terminal sebesar $88,82 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $3,57 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan untuk lokasi Bundaran Pancasila pada semester I sebesar $71,33 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar $1,13 \mu\text{g}/\text{m}$. Dari semua titik lokasi diketahui bahwa hasil pengukuran masih berada di bawah baku mutu yaitu sebesar $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
5. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2016 untuk parameter Oksidan (O_3) semester I lokasi Simpang Empat

Pasar Indra Sari sebesar 62,30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar 34,45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila sebesar 59,30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari sebesar 107,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal Kumai sebesar 217,73 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila sebesar 226,13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Realisasi konsentrasi O_3 semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami penurunan kualitas udara yaitu lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari sebesar 62,30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (semester I) dan 107,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (semester II), semester I pada lokasi Simpang Tiga Terminal sebesar 34,45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar 217,37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sedangkan pada semester I pada lokasi Bundaran Pancasila sebesar 84,71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II meningkat menjadi 226,13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sehingga diketiga lokasi pengamatan diketahui mengalami penurunan kualitas udara karena terjadinya peningkatan konsentrasi Oksidan (O_3). Akan tetapi nilai-nilai tersebut masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu sebesar 235 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

b. Tingkat Penurunan Pencemaran Air Sungai Arut dan Sungai Kumai

Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah *Biological Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Suspended Solid (TSS)* dan *Demand Oxygen (DO)*. Objek pemantauan ada dua yaitu Sungai Arut dan Sungai Kumai.

1. Parameter Residu Terlarut (TDS)

Hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 110 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 132 mg/l, Lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 72 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 94 mg/l. Keempat lokasi tersebut masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 1.000 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Sedangkan di lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 17.016 mg/l berada di atas baku mutu yang persyaratkan atau mengalami penurunan kualitas air sungai. Tingginya kadar Residu Terlarut (TDS) disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan

lahan perkebunan. Adapun hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Kumai di sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 17.016 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 5.420 mg/l. Kualitas air sungai pada kedua titik tersebut melampaui ambang batas apabila dibandingkan dengan baku mutu air kelas II sebesar 2.000 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan serta aktivitas perindustrian. Untuk lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 29 mg/l dan masih berada dibawah baku mutu kelas II menurut PP 82 Tahun 2001.

2. Parameter padatan Tersuspensi (TSS)

Hasil pengukuran total padatan tersuspensi (TSS) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 48 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 43 mg/l, (A.3) sebesar 40 mg/l, Lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 45 mg/l, Lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 50 mg/l nilai TSS pada kelima titik ini masih dibawah baku mutu kelas II sebesar 50 mg/l menurut PP 82 tahun 2001. Hasil pengukuran total padatan Tersuspensi (TSS) Sungai Kumai di lokasi Kelurahan Kumai Hulu sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 49 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 41 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 28 mg/l, nilai padatan Tersuspensi (TSS) berada dibawah baku mutu dengan baku mutu air kelas II sebesar 50 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

3. Parameter BOD

Hasil pengukuran BOD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 2,9 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 2,8 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 2,5 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 1,3 mg/l dan Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 1,5 mg/l. Kadar BOD di kelima lokasi tersebut berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 3 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Adapun hasil pengukuran BOD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hilir (K.1) sebesar 2,8 mg/l, Desa Sekonyer (K.2) sebesar 2,5 mg/l dan Kumai Hulu (K.3) sebesar 2,8 mg/l. Kadar BOD di ketiga lokasi tersebut berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 3 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001.

4. Parameter COD

Hasil pengukuran COD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 24 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 25 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 24 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 9 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 10,3 mg/l berada di bawah baku mutu kelas II seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001, pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai. Hasil pengukuran COD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 25 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 23 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 25 mg/l berada dibawah baku mutu kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai.

5. Parameter DO

Hasil pengukuran parameter DO Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 4,6 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 4,4 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 4,5 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 5,0 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 4,5 mg/l. Kadar DO melebihi baku mutu air kelas II (jumlah minimal) yaitu sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa di perairan Sungai Arut, kadar oksigennya masih dalam batas aman. Adapun hasil pengukuran DO Sungai Kumai di lokasi sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 4,4 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 4,3 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 4,5 mg/l. Kadar DO melebihi baku mutu air kelas II (jumlah minimal) sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

2) Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani

Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani tahun 2016 target yang ditentukan sebanyak 14 unit usaha, dan terealisasi 100%. Sumber pencemar yang tertangani tersebar di wilayah Pangkalan Bun. Umumnya merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri yang potensial menimbulkan pencemaran air sungai akibat buangan

limbah cair yang sebagian dari para pelaku usaha belum mengelola limbahnya dengan baik, begitu juga pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya.

3) Penurunan Luas Kerusakan Lahan

Tahun 2016 dilaksanakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau berupa pengadaan pupuk kompos dengan spesifikasi teknis: pupuk kompos hasil pengolahan sampah bahan - bahan organik, mengandung unsur hara N, K, Ca, Mg, P dan S. Sasaran kegiatan yaitu Perumahan Beringin Rindang (RT.06 dan RT.08 Desa Pasir Panjang).

Adapun maksud dan tujuannya adalah :

1. Guna mendukung sosialisasi pola hidup bersih dan sehat serta mempertahankan kota Pangkalan Bun sebagai kota adipura.
2. Salah satu upaya pencegahan terjadinya pemanasan global, banjir dan longsor.
3. Edukasi kepada masyarakat akan manfaat pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik mandiri yang secara tidak langsung dapat mendukung program ketahanan pangan dan penghijauan di lingkungan masyarakat tersebut.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 12 (dua belas) Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 126.139,21 m² dengan prosentase dari luas RTH perkotaan sebesar 13,25 % dan prosentase luar RTH administrasi kota sebesar 22,13 %. Sedangkan luas hutan kota sebesar 787,75 Ha atau 7,3 % dari luas Kabupaten Kotawaringin Barat.

4) Pengelolaan Persampahan.

Pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Sistem pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas area 30 Ha, pada saat ini menggunakan system Sanitary Landfill. TPA dilengkapi fasilitas fisik pendukung berupa kantor, mushola, rumah tinggal penjaga, sarana MCK, garasi alat berat, tempat pencucian dump truck sampah, rumah timbang, pos jaga, garasi mobil, sumur pantau dan

kolam lindi. Jarak TPA dengan permukiman terdekat adalah 2 Km, jarak TPA dengan sungai atau badan air terdekat 5,2 Km dan jarak TPA dengan pantai 40 Km.

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA digunakan alat angkut berupa dump truck dan pick up dengan ritasi 2 kali/hari. Jumlah dump truck dan pick up yang beroperasi per hari sebanyak 14 unit dengan kapasitas 8 m³ sebanyak 8 Unit, 6 m³ sebanyak 2 Unit dan kapasitas 3 m³ sebanyak 4 unit. Pengangkutan menggunakan dump truck melayani wilayah kota Pangkalan Bun dan Kumai. Khusus gerobak sampah dioperasikan pada masing-masing RT lingkungan permukiman, fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran dengan membentuk lembaga pengelola sampah dan menunjuk petugas untuk mengoperasikan pengambilan sampah dari setiap lingkungan.

Cakupan pelayanan di TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sampah yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas area pelayanan tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 1.186 km². Sampah yang diperbolehkan dibuang di TPA Sampah adalah sampah rumah tangga (sampah padat yang berasal dari aktifitas rumah tangga) dan sampah sejenis rumah tangga (sampah padat yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas komersial). Tahun 2016 jumlah sampah yang masuk ke TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 269.935 m³/tahun dari total timbulan 334.080 m³/tahun atau 80,80 %. Untuk retribusi kebersihan tahun 2016 realisasi sebesar Rp. 80.542.000 atau 134,24 % dari target sebesar Rp. 60.000.000.

Guna mendukung terjalannya pengelolaan sampah yang baik dari sumber sampai dengan proses akhir, ketersediaan sarana dan prasarana dari pemerintah sangat diperlukan disamping swadaya dari masyarakat. Oleh karena itu pengadaan kotak sampah akan dilakukan setiap tahun untuk mencukupi kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada fasilitas umum seperti Rukun Tetangga (RT), Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar dan Rumah Ibadah. Diharapkan dengan adanya ketersediaan kotak sampah dapat mencegah pencemaran sampah dan dapat mengurangi vektor penyakit yang di akibatkan tumpukan sampah.

Tabel 4.5
Jumlah Tempat Sampah Tahun 2011 s/d 2016

No.	Tahun	Spesifikasi	Jumlah kotak sampah	Jumlah Total	Volume sampah tertampung
1.	2011	HDPE, 0.24 m3	282	282	67.68 m3
2.	2012	HDPE, 0.24 m3	110	392	94.08 m3
3.	2013	HDPE, 0.24 m3	137	529	126.96 m3
4.	2014	HDPE, 0.12 m3	210	739	134,16 m3
5.	2014	HDPE, 0.24 m3	90	829	155,76 m3
6.	2014	HDPE, 0.66 m3	40	869	182,16 m3
7.	2015	HDPE, 0.12 m3	180	1049	203,76 m3
8.	2015	HDPE, 0.24 m3	70	1119	220,56 m3
9.	2016	HDPE, 0.12 m3	120	1239	234,96 m3
10.	2016	HDPE, 0.24 m3	40	1279	244,56 m3

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

Dari tabel dapat dilihat jumlah kapasitas timbulan sampah yang dapat tertampung dari total sarana kotak sampah sampai pada tahun 2016 adalah 244,56 m3.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 24.743.328.580 dan terealisasi sebesar Rp. 24.426.336.131 atau 98,71 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel. 4.6
Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.853.829.000	2.574.324.381	90,20	97,88	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	603.196.150	571.899.066	94,81	95	-			
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	69.830	27,93	27,93	Pengiriman paket/surat	10	3	Pkt
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	76.900.000	62.030.235	80,66	100	Pembayaran rekening telepon, listrik kantor dan laboratorium lingkungan, surat kabar, internet dan website BLH	1	1	Thn
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.050.000	1.211.500	29,91	29,91	Perpanjangan STNK Kendaraan dinas/ operasional	10	4	Unit

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	123.955.800	122.150.600	98,54	99,90	Penyelesaian administrasi keuangan	1	1	Thn
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.688.750	51.522.700	97,78	100	- Terpenuhi hinya ruangan kantor yang bersih - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 1	1 1	Thn Pkt
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.300.000	21.300.000	100	100	- Pemeliharaan Komputer/ Notebook - Pemeliharaan Printer	15 15	15 15	Unit Unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	35.109.600	35.105.250	99,98	100	Alat Tulis Kantor (ATK)	1	1	Tahun
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.150.000	17.096.000	99,68	100	- Blanko Disposisi - Amplop Berkop - Stopmap Cetak BLH - Fotocopy	6 21 500 50000	6 21 500 50000	Buku Pack Buah Lembar
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.122.000	3.086.000	98,84	100	- Bolam SL - Bolam Taman - Bolam Seri - Kabel Listrik - Terminal untuk Listrik - Jek Listrik - Battery 9 V	30 8 2 2 6 6 16	30 8 2 2 6 6 16	Buah Buah Pkt Rol Buah Buah Buah
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46.350.000	45.500.000	98,16	100	- Komputer Notebook - Printer - Scanner - Proyektor - Hab Acces point - Stapler Tembak	1 5 1 1 1 1	1 5 1 1 1 1	Buah Buah Buah Unit Buah Buah
k.	Penyediaan makanan dan minuman	22.320.000	21.608.000	96,81	100	Minuman untuk : - Petugas jaga malam BLH - Petugas kebersihan kantor BLH - Petugas kebersihan laboratorium LH - Tenaga analis laboratorium LH - Tenaga administrasi	2 2 1 2 1	2 2 1 2 1	Org Org Org Org Org
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	191.218.951	95,60	95,61	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bidang lingkungan hidup	1	1	Thn

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	161.700.000	161.372.850	99,79	100	-			
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.000.000	13.975.000	99,82	100	- Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 PK - Pengadaan Air Conditioner (AC) 2 PK	1 1	1 1	Unit Unit
b.	Pengadaan Mebeleur	5.000.000	5.000.000	100	100	Rak Piala	1	1	Buah
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	43.650.000	43.430.000	99,49	100	- Pemeliharaan bangunan kantor/lab. BLH - Pemeliharaan taman kantor BLH	270 900	270 900	M2 M2
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	94.500.000	94.425.350	99,92	100	- BBM dan pelumas kendaraan dinas/ operasional - Service kendaraan dinas/ operasional - Penggantian suku cadang kendaraan dinas/ operasional	10 10 10	10 10 10	Unit Unit Unit
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	4.550.000	4.542.500	99,83	100	- Perbaikan Air Conditioner (AC) - Perbaikan mesin potong rumput	5 3	5 3	Unit Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	45.000.000	45.000.000	100	100	-			
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45.000.000	45.000.000	100	100	- Pakaian Dinas Harian (PDH) - Pakaian Dinas (Putih Hitam)	45 45	45 45	Stel Stel
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	20.000.000	20.000.000	100	100	-			
a.	Pemulangan pegawai yang pensiun	20.000.000	20.000.000	100	100	Pegawai BLH yang pensiun	1	1	Org
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	109.954.000	91.899.863	83,58	100	-			
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	109.954.000	91.899.863	83,58	83,58	Peserta Bimtek	10	12	Org

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.600.000	2.000.000	76,92	100	-			
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100	100	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	6	Lap.
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	600.000	-	-	100	Laporan Keuangan Semesteran	6	6	Lap.
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	1.000.000	100	100	Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	6	Lap.
7.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	888.630.000	857.416.000	96,48	100	-			
a.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	348.700.000	348.200.000	99,85	100	Pengadaan alat pembuatan tali rafia	1	1	Buah
b.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	539.930.000	509.216.000	94,31	97,96	- Peserta Bimtek Bank Sampah - Petugas Bersih Ratik - Kaos untuk Petugas Bersih Ratik	600 24 48/2	600 24 48/2	Orang Orang Lembar/ Macam
8.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	782.182.600	689.421.350	88,14	100	-			
a.	Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	148.640.000	142.249.950	95,70	99,48	- Rumusan Hasil Rapat Koordin. Tim Adipura - Laporan Data Non Fisik Adipura - Penayangan Iklan Adipura - Iklan Media Cetak (Koran) - Iklan Kampanye Lingkungan - Baliho Adipura	5 12 1 1 1 4	5 12 1 1 1 4	Laporan Pkt Pkt Pkt Pkt Buah
b.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	64.250.000	58.550.000	91,12	100	Tindakan preventif dan kuratif terhadap obyek/kegiatan dalam pengelolaan	14	14	Perusa haan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						lingkungan			
c.	Pengelolaan B3 dan limbah B3	47.011.000	31.935.000	67,93	100	Laporan hasil P. Dinas terkait Limbah B3	5	5	Lap.
d.	Pengkajian dampak lingkungan	265.516.600	254.198.000	95,73	96,47	- Alumunium cell test - Phospat test - Sulfat test - KCL solution 3 mol/l - UV-VIS Standar for the absorbance (UV) - Amonia - Spektrofotome ter - Obat-obatan untuk Lab. LH - Uji Profesiensi - Kalibrasi alat	1 1 2 3 1 1 1 2 1	1 1 2 3 1 1 1 - 1	Pack Pack Pack Pack Pack Unit Pkt Pkt Pkt
e.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	10.105.000	2.905.000	28,74	41,12	Jumlah perusahaan yang dinilai memenuhi standar administrasi dan teknis	8	8	Perusa haan
f.	Koordinasi penyusunan AMDAL	73.250.000	44.973.400	61,39	61,40	Dokumen kelayakan lingkungan	3	3	Dok.
g.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	173.410.000	154.610.000	89,15	94,55	- Peringatan hari-hari penting LH - Lomba kebersihan tingkat SD, SLTP, SLTA - Lomba kebersihan tingkat RT - Lomba kebersihan tingkat Kecamatan - Lomba kebersihan tingkat SKPD se-Ktw. Barat - Lomba kreasi baju daur ulang tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA se-Ktw. Barat	2 9 3 6 3 12	2 9 3 6 3 12	Keg. Sekolah RT Kec. SKPD Sekolah
9	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	14.000.000	14.000.000	100	100	-			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	14.000.000	14.000.000	100	100	Baliho Kampanye Pencegahan Kerusakan Hutan dan Lahan	7	7	Buah
10.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	129.616.250	48.340.252	37,29	55,32	-			
a.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	108.265.000	42.969.002	39,68	40,06	- Peserta Sosialisasi Adiwiyata - Buku Panduan Adiwiyata - Rapat Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten - Pengiriman Duta Lingkungan	50 50 2 2	50 50 - 2	Org Buku Kali Org
b.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	2.551.250	2.551.250	100	100	- Laporan SLHD Kab. Ktw. Barat - Buku Data SLHD Kab. Ktw. Barat	7 7	7 7	Buku Buku
c.	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	18.800.000	2.820.000	15	15	Data/Informasi Lingkungan Hidup di Website BLH	1	1	Pkt
11.	Program peningkatan pengendalian polusi	61.950.000	38.850.000	62,71	80	-			
a.	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	20.650.000	18.410.000	89,15	100	Hasil pengujian kualitas udara oleh laboratorium udara sebanyak 2 kali	6	6	Titik
b.	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	41.300.000	20.440.000	49,49	49,49	Laporan Kualitas Air Sungai Arut dan Sungai Kumai	5	5	Lap.
12.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	35.000.000	34.125.000	97,5	100	-			
a.	Pemeliharaan RTH	35.000.000	34.125.000	97,50	100	Pupuk Kompos	8750	8750	Kg.

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS PEKERJAAN UMUM		21.889.499.580	21.852.011.750	99.82	100	-			
1.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	12.166.101.330	12.147.729.030	99.84	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2	2	keg.
a.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.781.252.750	1.778.840.250	99.86	100	Pembangunan fasilitas infrastruktur TPABaru Trans LIK	11	11	pkt
b.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	10.384.848.580	10.368.888.780	99.84	100	Tersedianya sarana pembersihan dan pengangkutan sampah kota	1	1	tahun
2.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	9.723.398.250	9.704.282.720	99.80	100	Tercapainya sasaran keg. pada Prog. pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2	2	keg.
a.	Penataan ruang terbuka hijau (RTH)	6.995.867.750	6.992.813.350	99,95	100	Pembangunan dan penataan taman, bundaran dan pedestrian	5	5	pkt
b.	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.727.530.500	2.711.469.370	99.41	100	Terlaksananya pemeliharaan plankson/media jalan, lampu taman dan pohon peneduh	7	7	Pkt

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

KEGIATAN PENATAAN RTH
Penataan Taman Depan Tuğu Lapangan Pesawat



Capaian keberhasilan urusan lingkungan hidup Tahun 2016 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Adipura ke 10 (Adipura Buana).
2. Terlaksananya PROPER ke sejumlah perusahaan. Pada tahun 2016 ada 3 perusahaan yang mendapat peringkat hijau tingkat nasional. Adapun Peringkat Hijau pada Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2016 yaitu :
 - PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (Sawit).
 - PT. Surya Indah Nusantara Pagi (Sawit).
 - PT. Gunung Sejahtera Dua Indah (Sawit).
3. Terlaksananya pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup pada 14 perusahaan (tindakan preventif dan kuratif terhadap obyek/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan).
4. Terlaksananya pengawasan/pembinaan kepada perusahaan/pelaku usaha kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B 3).
5. Tahun 2016 tersusun dokumen Amdal terdiri dari Dokumen UKL-UPL sebanyak 26 dokumen, dan Dokumen SPPL sebanyak 191 dokumen.
6. Tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Buku Data SLHD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.
7. Terlaksananya kegiatan :
 - Sosialisasi Adiwiyata.
 - Bimtek/Sosialisasi pengelolaan persampahan di tingkat kecamatan.
 - Pengomposan di titik pantau Adipura.
 - Peringatan hari-hari penting lingkungan hidup.
 - Lomba Kebersihan Lingkungan Tingkat RT, Sekolah, Kantor dan Kecamatan Se- Kabupaten Kotawaringin Barat
 - Lomba Kreasi Baju Daur Ulang Tingkat TK, SD, SLTP & SLTA Se- Kabupaten Kotawaringin Barat
 - Pengelolaan sampah melalui petugas barosih ratik
 - Rapat Amdal dan masalah lingkungan hidup lainnya.
8. Tersedianya data dan terlaksananya uji kualitas air di Sungai Arut dan Sungai Kumai.
9. Tersedianya data dan terlaksananya uji kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 6 titik dalam kota Pangkalan Bun.
10. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan juga dilakukan dengan meningkatkan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar

titik pantau Adipura, sebagai upaya mempercantik dan memperindah kota serta menambah keasrian kota.

11. Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 melakukan kegiatan kampanye lingkungan melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, 7 Baliho Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta 4 Baliho Adipura sebagai media informasi perlindungan sumberdaya air untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak membuang sampah disembarang tempat khususnya ke badan sungai atau pantai/wilayah pesisir.
12. Pada tahun 2016 dilakukan inventarisir melalui kegiatan pembuatan sistem manajemen Adipura (nonfisik Adipura) berupa pemutakhiran data pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai upaya mendukung Program Adipura kota Pangkalan Bun.
13. Salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan, Tahun 2016 BLH Kabupaten Kotawaringin Barat dengan sumber DAK LH melakukan pengadaan :
 - Kotak sampah volume 120 liter sebanyak 120 buah.
 - Kotak sampah volume 240 liter sebanyak 40 buah.Kotak sampah di distribusikan kepada seluruh titik pantau adipura dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
14. Di Kabupaten Kotawaringin Barat juga terdapat Bank Sampah sehingga penanganan dalam pemanfaatan sampah-sampah bisa lebih maksimal dilakukan. Daur ulang sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Tahun 2016 pengadaan alat pembuatan tali rafia sebagai upaya pemanfaatan sampah plastik.
15. Tahun 2016 dilakukan pengadaan bahan-bahan dan alat-alat laboratorium guna mendukung pelaksanaan kerja di laboratorium lingkungan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk;
2. Masih minimnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan;

3. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan;
4. Terbatasnya kemampuan SDM dibidang Lingkungan;
5. Masih terjadi tingkat pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup.
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat umum dalam menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau (RTH) khususnya di lingkungan kota;
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat umum dalam menjaga lingkungan tempat tinggal khususnya dalam hal pengelolaan sampah.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan;
2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat/dunia usaha dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Meningkatkan komitmen dalam penegakan hukum lingkungan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia dibidang lingkungan hidup;
5. Pengawasan secara berjenjang sampai lini terbawah untuk menurunkan prosentase pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
7. Pengendalian eksploitasi ekosistem dan sumber daya alam;
8. Meningkatkan data base informasi lingkungan hidup;
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas regulasi bidang lingkungan hidup;
10. Meningkatkan sosialisasi dan program-program serta kegiatan-kegiatan melalui perangkat-perangkat pemerintah daerah yang berbasis masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara Ruang terbuka Hijau (RTH) khususnya di lingkungan kota;
11. Meningkatkan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat untuk ikut serta dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan.

4.1.4 URUSAN PEKERJAAN UMUM**a) Kondisi Umum**

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur terutama jalan yang merupakan salah satu sarana penunjang transportasi.

Dengan adanya jalan, maka akses terhadap suatu wilayah akan lebih mudah sehingga pembangunan terhadap segala aspek kehidupan, baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi dapat lebih mudah dilakukan. Pembangunan di bidang pengembangan fasilitas transportasi meliputi prasarana perhubungan yang menyangkut prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan untuk membuka keterisolasian dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan.

Bina Marga

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Adapun hasil yang dicapai pada tahun 2016 diantaranya :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 16,26 km berupa peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran badan jalan, Pembangunan Jembatan 38 buah, Peningkatan Jalan sepanjang 67,75 km (peningkatan struktur jalan), Pemeliharaan jalan sepanjang 1,39 Km dan swakelola sepanjang 307,07 km, pemeliharaan jembatan 17 buah, serta tersusunnya data base jalan dan data base jembatan Tahun 2016;
2. Terbukanya daerah terisolir, program sampai saat ini daerah pesisir Kubu-Sungai Bakau - Teluk Bogam - Keraya - Sebuai telah fungsional dan pada tahun 2016 melalui dana DAK dilakukan peningkatan struktur jalan berupa aspal di ruas jalan Kubu-Sungai Bakau-Teluk Bogam, serta pembangunan Jembatan Type Box Culvert sebanyak 2 (buah) pada ruas Teluk Bogam-Keraya-Sebuai Timur –Sebuai- Batas Tanjung Putri ;
3. Terbukanya jalan lingkar selatan meliputi Pangkalan Bun-Kumpai Batu-Tanjung Putri-Sebuai;

4. Terbukanya jalan lingkaran dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Kalimantan yang menghubungkan daerah luar melalui pelabuhan Tanjung Kalap-Pelabuhan Ro-Ro Panglima Utar, diantaranya lanjutan pembangunan Jembatan Sungai Kakap Tahap II berupa pemancangan tiang pancang dan *abutment*. Pada tahun 2017 ini dilanjutkan pembangunan Sungai Kakap tahap III serta pembangunan Sungai Nyirih tahap I berupa pemancangan tiang pancang dan pembangunan Jembatan Sungai Nyirih Tahap II;
5. Terbukanya jalan menuju lokasi Bandara Baru di Sebuai berupa perbaikan tanah dengan pelebaran, penimbunan dan pemasangan bronjong pada ruas jalan tersebut;
6. Terbukanya jalan menuju *hinterland* Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Sukamara, Lamandau dan Manis Mata (Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) melalui pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin dengan penimbunan geotextile dan peningkatan struktur jalan berupa aspal;
7. Peningkatan skala pelayanan kota dengan peningkatan jalan kota Pangkalan Bun seperti jalan DAH Hamzah dan peningkatan jalan dalam kota Kumai seperti Jalan Pemuda dan jalan Kumai Hilir – Sungai Kapitan;

Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.7
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Statusnya Tahun 2014 – 2016

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan negara	148,66	6,02	156,96	6,36	156,96	6,36
2	Jalan Prov.	63,70	2,58	55,40	2,24	55,40	2,24
3	Jalan Kab.	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51
4	Jalan desa	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89
Jumlah		2.469,75	100	2.469,75	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 4.8
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2014 - 2016

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%

1	Jalan Aspal	1.018,41	41,24	1.022,36	41,40	1.039,46	42,09
2	Jalan Batu/kerikil	102,38	4,15	100,65	4,08	92,03	3,73
3	Jalan Tanah	1.098,68	44,49	1082,92	43,85	1.074,44	43,5
4	Tidak dirinci :						
	• Beton	125	5,06	137,81	5,58	137,81	5,58
	• Titian	29,11	1,18	29,85	1,21	29,85	1,21
	• Lainnya	96,16	3,89	96,16	3,89	96,16	3,89
Jumlah		2.469,75	100	2.469,75	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2016 adalah 2.469,75 Km. Untuk jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten tidak mengalami perubahan panjang, dimana pada tahun 2016 fokus pekerjaan bukan pada penambahan panjang jalan tetapi lebih kepada peningkatan struktur dan kemantapan jalan.

Tabel. 4.9
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2014 - 2016

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Baik	846,07	34,26	890,50	36,06	897,27	36,33
2	Jalan Sedang	784,19	31,75	761,46	30,83	772,31	31,27
3	Jalan Rusak Ringan	620,51	25,12	608	24,62	610,18	24,71
4	Jalan Rusak Berat	218,98	8,87	209,79	8,49	189,99	7,69
Jumlah		2.469,75	100	2.469,75	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disampaikan bahwa kinerja proporsi panjang jalan menurut kondisinya sebagai berikut : Jalan kondisi baik meningkat sebesar 0,27 %, jalan kondisi sedang mengalami kenaikan sebesar 0,44 %, jalan rusak ringan mengalami kenaikan 0,09 %, jalan rusak berat mengalami penurunan 0,8 %.

Tabel. 4.10
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2014 - 2016

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Kelas I	-	-	-	-	-	-
2	Kelas II	-	-	-	-	-	-
3	Kelas III	-	-	-	-	-	-
4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-
5	Kelas III B	212,36	8,60	212,36	8,60	212,36	8,60
6	Kelas III C	456,12	18,47	465,90	18,86	465,90	18,86
7	Kelas Tidak dirinci	1.81,27	72,93	1.791,49	72,54	1.791,49	72,54
Jumlah		2.469,75	100	2.469,75	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai akhir tahun 2016 dapat dilihat dari berikut ini :

Tabel. 4.11
 Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat
 Berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2014 - 2016

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Jembatan Baik	141	74,60	148	78,31	149	69,30
2	Jembatan Sedang	30	15,87	26	13,76	23	10,70
3	Jembatan Rusak	16	8,47	14	7,41	35	16,28
4	Jembatan Rusak Berat	2	1,06	1	0,53	8	3,72
	Jumlah	189	100	189	100	215	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Berbagai macam wujud perairan permukaan terdapat di Indonesia, seperti: sungai, danau dan rawa. Semua wujud perairan permukaan mempunyai manfaat, seperti untuk irigasi, pelayaran, perikanan, pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, objek wisata serta digunakan untuk air baku guna mencukupi kebutuhan air minum. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air.

Pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi dan daerah rawa bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air dan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Pada tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air telah dilaksanakan pembuatan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 32.110 m, peningkatan saluran dengan pasangan batu sepanjang 1.836 m. Guna kemudahan akses menuju lahan pertanian dibuat jembatan layanan sebanyak 17 buah dan peningkatan jalan inspeksi dengan timbunan sepanjang 12.722 m. Untuk pemeliharaan sistem irigasi yang telah dibangun dilaksanakan dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan melaksanakan rehab saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 10.900 m dan dengan melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 151.100 m. Agar terpenuhinya fungsi bangunan air sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi/rawa di lahan pertanian dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan pintu air. Adapun pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembuatan dan rehabilitasi pintu air sebanyak 10 buah.

Capaian indikator kinerja rasio jaringan irigasi pada tahun 2015 sebesar 102,74% mengalami penurunan sebesar 14,13% sehingga rasio jaringan irigasi ditahun 2016 menjadi 88,61%. Hal itu disebabkan bertambahnya areal irigasi/rawa yang belum diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasaran sistim irigasi/rawa.

Tabel 4.12
Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2015-2016

Indikator	2015		2016		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Rasio Jaringan Irigasi	0,73	0,75	0,79	0,70	88,61

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Pengelolaan sumber daya air dalam upaya untuk pengendalian banjir dilaksanakan dalam kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, normalisasi/pemeliharaan saluran sungai. Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai bertujuan untuk mengurangi titik-titik daerah banjir baik dari hujan lokal maupun sungai yang melintas di dalam kota. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan peningkatan saluran induk pengendali banjir dengan pasangan batu sepanjang 450 m dan dengan cor beton saluran induk pengendali banjir sepanjang 486 m. Untuk pemeliharaan saluran induk dilaksanakan normalisasi saluran induk pengendali banjir sepanjang 12.270 m dan pemeliharaan saluran induk pengendali banjir 23.250 m. Kegiatan normalisasi/pemeliharaan saluran sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai dan membentuk profil sungai. Adapun pada tahun 2016 telah dilaksanakan normalisasi saluran sungai sepanjang 11.850 m. Untuk pemeliharaan sungai telah dilaksanakan sepanjang 53.490 m.

Dalam upaya mengendalikan tingkat abrasi pantai dan erosi tebing sungai pada daerah pantai dan sungai dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai dan pembangunan turap/talud/bronjong. Pembangunan prasarana pengaman pantai sendiri mempunyai tujuan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi dengan membangun bangunan pemecah ombak (*breakwater*) dan *groin*. Pada tahun 2016 telah dibangun bangunan pemecah ombak sepanjang 234 m. Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong bertujuan untuk mencegah erosi dan longsor, konstruksi yang dibangun berupa pasangan batu sepanjang 780 m.

Untuk menjaga ketersediaan air baku guna mencukupi kebutuhan air sehari-hari bagi masyarakat dan sebagai konservasi air telah dilaksanakan kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya pada tahun 2016 ini, dan telah dibangun embung sebanyak 4 buah meliputi Desa Kubu Kecamatan Kumai, Desa Arga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada dan kolam retensi di Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai.

Bidang Cipta Karya

Air Limbah

Pengolahan air limbah pemukiman secara umum di kabupaten kotawaringin barat ditangani melalui sistem setempat (on-site) ataupun sistem terpusat (off site). Air limbah domestik secara umum diolah secara on site dengan menggunakan tangki septik. Untuk daerah pemukiman yang berada disekitar bantaran sungai air limbah yang dihasilkan langsung ke sungai.

Tabel 4.13
Jumlah Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Tahun				Total Infrastruktur 2013 – 2016
		2013	2014	2015	2016	
1.	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	-	1	-	-	1 Unit
2.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	-	-	-	1	1 Unit
3.	MCK Komunal	3	2	-	3	8 Unit
4.	Sambungan Rumah (SR) IPAL	-	1	-	-	1 Pkt

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum telah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah di 2 (dua) kecamatan yaitu Arut Selatan dan Kumai, masing-masing 1 Unit IPLT, 1 Paket SR IPAL Kecamatan Arut Selatan dan 2 Unit MCK Komunal di Kecamatan Kumai yang merupakan area beresiko tinggi sanitasi dengan tujuan agar kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Pada tahun 2015, kegiatan yang mendukung sistem pengolahan air limbah tidak terealisasi sehubungan dengan rasionalisasi anggaran. Pada tahun 2016 telah direalisasikan pembangunan 1 Unit IPAL di Kecamatan Kumai, 2 Unit MCK di Kecamatan Kumai dan 1 Unit MCK di Kecamatan Arut Selatan.

Drainase

Sistem drainase kabupaten kotawaringin barat sebagian besar berada di sepanjang jaringan jalan utama dan kawasan permukiman. Sedangkan di daerah yang berada diluar pusat kota sebagian besar masih berupa jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa saluran tanah dan masih mengandalkan sistem gravitasi. Potensi gerusan tanah oleh air atau erosi sangat besar terutama di daerah yang mempunyai kemiringan lereng sedang sampai dengan tinggi. Daerah yang berbukit dan banyaknya daerah-daerah cekungan merupakan kendala di dalam mengatasi aliran air sehingga masih banyak daerah-daerah yang tergenang air atau banjir pada saat turun hujan deras.

Dengan intensitas curah hujan yang besar dan ketersediaan drainase relatif kecil maka rawan terjadinya luapan air akibat daya tampung saluran yang kurang mencukupi. Dalam masterplan drainase yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat semua sistem saluran drainase bermuara di Sungai Arut, Sungai Buun, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau.

Tabel 4.14
Capaian Pembangunan Drainase Tahun 2014 - 2016

No	Tahun	Panjang Drainase (m)	Rasio Pembangunan (%)
1.	2014	34.337	20
2.	2015	25.493	15
3.	2016	8.500	5

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat rasio pembangunan saluran drainase dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dikarenakan rasionalisasi anggaran. Total panjang saluran drainase terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2016 sebesar 168.233 meter, tersebar di 6 kecamatan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terbagi dalam 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi serta Sekretariat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 304.906.757.705 dan terealisasi sebesar Rp. 303.128.050.407 atau 99,42 %. Adapun realisasi anggaran program

dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel. 4.15
Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS PEKERJAAN UMUM		278.022.905.795	276.481.731.847	99,44	99,62				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.611.313.189	2.381.556.146	91,20	100	Kelancaran informasi, komunikasi dan pelayanan publik	11	11	keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	305.955.000	191.882.648	62,71	100	Rekening Jasa Telepon, Air, Listrik, Internet, dan Surat Kabar	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	77.598.250	40.103.100	51,68	100	Kendaraan dinas layak jalan	KIR 30 STNK 46	KIR 30 STNK 46	unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	782.824.300	772.561.350	98,68	100	Terbayarnya honorarium dan uang lembur	48	48	Org
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.535.000	4.850.000	87,62	100	Tersedianya peralatan kebersihan	1	1	Thn
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.060.000	21.090.000	80,92	100	Terpeliharanya peralatan kerja	1	1	Thn
f.	Penyediaan alat tulis kantor	154.693.100	154.693.100	100	100	Tersedianya alat tulis kantor	1	1	Thn
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.250.000	42.038.750	97,19	100	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1	1	Thn
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.670.000	1.670.000	100	100	Tersedianya komponen listrik	46	46	buah
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	327.322.000	266.321.659	81,36	100	- Komputer Desktop, Notebook/Laptop, Printer, UPS - Software/ Sistem Aplikasi	19 7	19 7	unit pack/unit
j.	Penyediaan	232.020.000	231.960.000	99,97	100	Minuman	93	93	Org

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	makanan dan minuman					pegawai			
k.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	654.385.539	654.385.539	100	100	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarpras aparatur	457.109.000	376.623.918	82,39	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	4	keg.
a.	Pengadaan perlengkapan gedung ktr.	26.600.000	22.100.000	83,08	100	- Umbul-umbul - tiang umbul-umbul - Bendera telisir - Lemari arsip - AC	10 10 55 1 2	10 10 55 1 2	buah buah m buah unit
b.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	331.509.000	303.509.000	91,55	100	Pemeliharaan rutin dan berkala gedung/aula, Pemeliharaan halaman	2690	2690	m2
c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	93.000.000	45.164.918	48,56	100	Perawatan kendaraan bermotor	8	8	unit
d.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000	5.850.000	97,50	100	Pemeliharaan : - AC - sound system	10 1	10 1	unit Thn
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	92.000.000	91.586.000	99,55	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya	92.000.000	91.586.000	99,55	100	Pakaian dinas	184	184	stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	160.660.000	130.636.873	81,31	100	Terwujudnya peningkatan kelancaran kerja dalam pelayanan publik	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	160.660.000	130.636.873	81,31	100	Bimbingan teknis	1	1	Thn
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	2.987.500	2.740.000	91,72	100	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar	3	3	keg.

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	capaian kinerja dan keuangan					realisasi kinerja SKPD			
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	587.500	510.000	86,80	100	Penyusunan laporan kinerja	1	1	set
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.200.000	1.111.000	92,58	100	Laporan keuangan semesteran	1	1	set
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.200.000	1.119.000	93,25	100	Laporan keuangan akhir tahun	1	1	set
6.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	217.165.622.286	216.471.989.610	99,68	100	Terbangunnya jalan dan jembatan	4	4	keg
a.	Pembangunan jalan	11.173.586.850	11.161.999.850	99,89	100	Pembagunan jalan	24	24	pkt
b.	Pembangu nan jembatan	12.528.404.148	11.968.654.850	95,53	95,7	Pembangunan jembatan	20	20	pkt
c.	Peningkatan jalan	173.388.375.888	173.302.192.210	99,95	100	Peningkatan jalan	41,89	41,89	Km
d.	Peningkatan jalan lingkungan pemukiman	20.075.255.400	20.039.142.700	99,82	100	Terbangunnya jalan dan jembatan kelurahan	110	110	pkt
7.	Program Pembangun an saluran drainase/gorong-gorong	6.148.637.450	6.126.412.450	99,63	100	Tertanganinya Air Limbah dan Air Kotor	1	1	keg.
a.	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	6.148.637.450	6.126.412.450	99,63	100	Pembangunan Drainase/ Gorong-Gorong	44	44	Pkt
8.	Program Pembangunan turap/talud/ brojong	878.764.500	873.290.800	99,37	100	Tertanganinya erosi tebing sungai dan jalan	1	1	keg.
a.	Pembangunan turap/talud/ bronjong	878.764.500	873.290.800	99,37	100	Pengaman tebing	6	6	Pkt
9.	Program rehabilitasi/ pemelihara an Jalan dan Jembatan	2.745.512.350	2.738.635.250	99,74	100	Terlaksananya pemeliharaan jalan sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan	2	2	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	2.127.862.350	2.124.684.250	99,85	100	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	3	3	Pkt
b.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	617.650.000	613.951.000	99,40	100	Pemeliharaan jembatan	6	6	Pkt
10.	Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	146.098.000	145.178.000	99,37	100	Tersedianya data base jalan dan jembatan (sistem informasi/ data base jalan dan jembatan)	2	2	keg.
a.	Penyusunan sistem informasi/ data base jalan	73.498.000	73.458.000	99,94	100	Tersedianya data jalan	1	1	Pkt
b.	Penyusunan sistem informasi/ data base jembatan	72.600.000	71.720.000	98,78	100	Tersedianya data jembatan	1	1	Pkt
11.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebina margaan	778.548.350	755.142.050	96,99	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	3	3	keg.
a.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebina margaan	278.584.800	267.966.700	96,18	100	Tersedianya bahan dan alat laboratorium kebinamargaan	7	7	jenis
b.	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat	474.063.550	462.304.350	97,51	100	Tersedianya suku cadang alat berat	8	8	unit
c.	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebina margaan	25.900.000	24.871.000	96,02	100	Terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	16	16	unit
12.	Program pengem bangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	20.230.942.150	20.083.861.150	99,27	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengem bangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	7	7	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	100.620.000	100.620.000	100	100	Dokumen inventarisasi jaringan irigasi dan reklamasi rawa	1	1	Pkt
b.	Pembangunan pintu air	2.522.482.600	2.521.282.600	99,95	100	~ Pembuatan bangunan air ~ Rehab bangunan air	6 4	6 4	Pkt Pkt
c.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	4.218.212.800	4.218.212.800	100	100	~ Pemeliharaan saluran irigasi/rawa ~ Rehabilitasi saluran irigasi/rawa	154800 13550	154800 13550	m m
d.	Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai	2.275.809.950	2.274.425.950	99,93	100	~ Normalisasi sungai ~ Pemeliharaan sungai	119509 58000	119509 58000	m m
e.	Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	311.142.000	311.142.000	100	100	Penyeleng garaan komisi irigasi ~ PEDA ~ Pelaksanaan Rapat Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2 1	2 1	Kali rapat
f.	Pembangunan jaringan irigasi	4.249.588.600	4.239.988.600	99,77	100	~ Pembuatan Saluran ~ Jembatan Layanan Usaha Tani	29850 16	29850 16	m buah
g.	Peningkatan jaringan irigasi	6.553.086.200	6.418.189.200	97,96	92,1	- Peningkatan jalan inspeksi - Peningkatan saluran proteksi	10620 500	10620 500	m m
13.	Program pengembangan, pengelolaan &konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	555.416.000	554.884.000	99,90	100	Terbangunnya embung dan tersedianya cadangan air	1	1	keg.
a.	Pembangu nan embung dan bangunan penampung air lainnva	555.416.000	554.884.000	99,90	100	Terbangunnya embung kolam retensi	3 1	3 1	buah buah

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
14.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	11.206.044.420	11.175.216.100	99,72	100	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Bertambah	2	2	keg.
a.	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	2.081.106.920	2.055.123.150	98,75	100	Tersedianya instalasi air kotor	1	1	pkt
b.	Pengembangan distribusi air minum	9.124.937.500	9.120.092.950	99,94	100	Tersedianya jaringan air minum	5	5	Pkt
15.	Program pengendalian banjir	6.620.519.200	6.404.720.250	96,74	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengendalian Banjir	2	2	keg.
a.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	3.836.379.400	3.829.726.400	99,82	100	Bangunan pengendali banjir: ~ Cor beton ~ Pasangan batu ~ Pemeliharaan saluran ~ normalisasi saluran induk ~ peningkatan saluran induk	211215995 24600 24600 1	2112159959 24600 24600 1	m m m m pkt
b.	Pembangunan prasarana pengaman pantai	2.784.139.800	2.574.993.850	92,48	95,7	~ Bangunan pemecah ombak berupa balok beton (armor)	7	7	Pkt
16.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.373.662.000	1.356.182.650	98,72	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2	2	keg.
a.	Perencanaan pengembangan infrastruktur	872.025.000	872.025.000	100	100	Tersedianya Data Base Bidang Cipta Karya	4	4	Pkt
b.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	501.637.000	484.157.650	96,51	94,3	Bangunan strategis	2	2	Pkt
17.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	6.849.069.400	6.811.826.600	99,45	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembangunan	3	3	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						infrastruktur perdesaan			
a.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	249.571.500	238.190.500	95,43		Jaringan air minum	11	11	Pkt
b.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	2.184.434.000	2.177.825.000	99,69		Terpeliharanya jalan dan jembatan	8	8	Pkt
c.	Peningkatan jalan perdesaan	4.415.063.900	4.395.811.100	99,56		Terbangunnya jalan dan jembatan perdesaan	18	18	Pkt

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
Jembatan Tipe Komposit Sungai Kemanu Tahap 2 (Aruta)



KEGIATAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI
Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Sabuai Kec. Kumai



KEGIATAN PEMBANGUNAN PINTU AIR
Rehabilitasi Bangunan Air DIR Sakalading Kec. Kumai



c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keterhubungan infrastruktur antar desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional (panjang jalan kabupaten 1.222 km, 56,08 % aspal dan 43,92 % jalan tanah dan lainnya, jumlah desa yang belum terakses dengan aspal 60 desa dari 94 desa dan kelurahan;
2. Belum kuatnya sinergi antara pemanfaatan infrastruktur pengairan, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian sehingga menyulitkan optimalisasi outcome pertanian;
3. tingginya erosi dan abrasi pantai serta perlunya penanganan yang terintegrasi dan mencakup wilayah yang luas.
4. Kerusakan jalan dan jembatan akibat beban berlebih dari angkutan baik angkutan barang, perkebunan, pertambangan, industri dan angkutan lainnya;
5. Terbatasnya dana pemerintah khususnya dana APBD Kabupaten bila dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang harus dibangun sehingga kegiatan pembangunan belum dapat merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang perlu diupayakan :

1. Meningkatkan keterhubungan infrastruktur antar desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional melalui pengaspalan dan fungsionalisasi semua jalan kabupaten;

2. Mengoptimalkan sinergi antara pemanfaatan infrastruktur pengairan, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisir lokasi-lokasi yang tingkat abrasi dan erosinya cukup tinggi untuk dapat segera dilakukan upaya penanganan secara teknis sedangkan upaya preventifnya yaitu dengan melakukan koordinasi lintas sektor yaitu dengan Dinas Kehutanan melalui upaya penanaman tanaman mangrove penahan abrasi;
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam hal ini dengan Dinas Perhubungan yaitu dengan memperketat pengaturan penggunaan jalan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung kelas jalan yang ada;
5. Mengajukan usulan kegiatan melalui sumber dana APBD Propinsi maupun APBN.

4.1.5. URUSAN PENATAAN RUANG

a) Kondisi Umum

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan Undang - Undang No. 26 Tahun 2007, pengertian penataan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kehidupannya. Asas penataan ruang (Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007) diantaranya :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilan;
- e. Keteraturan;
- f. Kebersamaan dan Kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Penataan ruang dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai salah satu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Berdasarkan pasal 26 UU No 26 Tahun 2007, rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayah yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang baik, ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disentif serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Program urusan tata ruang adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pendukungnya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi.

Tabel 4.16
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015 – 2016

Indikator	2015		2016		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Target
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,12	0,082	0,14	0,096	68,57

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 antara lain dapat dilihat pada Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, yang menunjukkan adanya kenaikan dari yang semula sebesar 0,082 pada tahun 2015 menjadi 0,096 pada tahun 2016. Meskipun menunjukkan kenaikan namun apabila dilihat dari capaiannya di tahun 2016 yang hanya sebesar 68,57 % mengindikasikan bahwa sebagian besar bangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum dilengkapi dengan IMB. Hal ini disebabkan karena :

1. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mendirikan bangunan sangat rendah;
2. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait;
3. Kurang tegasnya instansi terkait dalam memberikan teguran dan sanksi terhadap pelanggaran;

4. Prosedur perizinan di birokrasi masih rumit sehingga masyarakat enggan untuk mengurusnya.

Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten mengingat IMB merupakan salah satu penyumbang potensial dalam penerimaan PAD.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.143.848.000 dan terealisasi sebesar Rp. 141.246.250 atau 98,19 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel. 4.17
Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS PEKERJAAN UMUM		143.848.000	141.246.250	98,19	100				
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	143.848.000	141.246.250	98,19	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perencanaan Tata Ruang	1	1	keg.
a.	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	143.848.000	141.246.250	98,19	100	Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan	1	1	Pkt

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

c) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah :

- 1) Masih lemahnya peranan Tata Ruang dalam perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Masih banyaknya aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha menyalahi fungsi rencana tata ruang wilayah;
- 3) Personil yang menangani urusan penataan ruang daerah dirasa masih kurang memadai;
- 4) Masih belum disahkannya RTRW Provinsi yang berpengaruh terhadap RTRW Kabupaten.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dalam penataan ruang daerah yang didukung anggaran yang memadai dengan melakukan rapat koordinasi teknis dan koordinasi lapangan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai, dengan membuat instrumen sosialisasi seperti informasi dipapan pengumuman umum, leaflet, baliho dan website;
- 3) Penambahan personil dan mengirim personil untuk mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;

- 4) Setiap kebijakan yang diambil di bidang penataan ruang agar selalu dikoordinasikan dengan pihak provinsi dan pusat sehingga tidak menimbulkan permasalahan dimasa mendatang.

4.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a) Kondisi Umum

Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Pengelolaan pembangunan yang baik menunjuk pada terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, sebagai buah dari analisis, formulasi, implementasi dan evaluasi dari kebijakan pembangunan yang terencana, terintegrasi dan sistematis. Perencanaan adalah basis dalam mencapai suatu tujuan karena perencanaan merupakan arahan dan pedoman kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwasanya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah mengamanatkan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, selain itu mengemban juga dua misi utama di dalamnya. *Pertama*, terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang partisipatif. *Kedua*, Pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan ada 5 (lima) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yakni meliputi :

1. *Pendekatan politik*, yaitu memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih dan menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. *Pendekatan teknokratik*, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. *Pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dimana proses partisipatif ini akan tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang diharapkan mampu mengakomodir dan memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk diagendakan dalam pembangunan daerah yang sedang dan akan berlangsung.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan ;
5. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Maka berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat), dan substansial (jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat), sehingga dalam mekanisme dari bawah seperti ini, sesungguhnya merupakan proses agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya.

Konsep perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan

mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta kesepakatan pada semua tahapan. Proses ini juga memberi dampak positif yaitu Pertama, masyarakat akan berperan aktif di dalam proses pembangunan, kedua, mendorong kemandirian di tingkat desa, ketiga, menjalin koordinasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan struktur pemerintah di bawahnya serta pemerintah kabupaten dengan masyarakat, keempat, menghasilkan sebuah pembangunan di tingkat kabupaten yang menjadi kehendak semua publik.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai dokumen perencanaan yang terdiri atas perencanaan jangka panjang (RPJPD) untuk perencanaan 20 tahunan dan perencanaan jangka menengah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan. Masing-masing dokumen perencanaan tersebut telah berketetapan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2016 dan berakhir di tahun ini.

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan RPJMD pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 tahun serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

Tabel 4.18
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016

No.	Indikator	2015	2016		
			Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telahdi tetapkan dengan PERDA	ada	1	1	100 %

2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	1	1	100 %
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	1	1	100 %
4.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	ada	156	156	100 %

Sumber : Bappeda Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.766.967.650 dan terealisasi sebesar Rp. 4.328.086.773 atau 90,79 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.19
Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
BAPPEDA		3.579.215.000	3.177.294.107	88,77	91,71				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	946.038.400	872.291.579	92,20	96,43	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	199.075	66,35	100	Terlaksananya surat-menysurat kantor Bappeda	1	1	Thn
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	219.000.000	197.027.792	89,96	94,76	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Bappeda	1	1	Thn
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.300.000	3.624.000	57,52	57,52	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	2 18	2 18	Lbr Lbr
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	146.726.900	142.001.550	96,77	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Bappeda ~ Tenaga administrasi ~ Petugas keamanan/ penjaga malam	1 2	1 2	Org Org
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	82.958.400	77.874.000	93,87	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor ~ Honor petugas kebersihan ~ Peralatan kebersihan	4 1	4 1	Org Pkt
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	46.640.000	38.245.000	82	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan BAPPEDA berupa : ~ Komputer Dekstop ~ Note Book ~ Printer ~ Proyektor ~ Mesin Cetak (Ploter) ~ Pemeliharaan server	16 11 12 5 1 1	16 11 12 5 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	56.006.500	55.405.125	98,92	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Thn

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.130.000	60.130.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop surat berkop ~ Bupati ~ Setda ~ Bappeda ~ Stopmap Bappeda ~ Penggandaan/ Fotocopy	6 6 6 10 79000	6 6 6 10 79000	Pak Pak Pak Pak Lbr
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.172.000	8.172.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Bappeda	7	7	jenis
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28.850.000	25.934.561	89,89	98,27	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Printer ~ Mesin Fax ~ Mesin Ketik ~ Flash Disk ~ Keyboard ~ USB Port ~ Mouse ~ Staples Besar	6 1 1 10 3 5 10 1	6 1 1 10 3 5 10 1	Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah
k.	Penyediaan makanan dan minuman	34.420.000	26.200.000	76,11	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	10	8	Org
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	256.534.600	237.478.476	92,57	92,57	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	283.200.000	274.926.750	97,07	97,08	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.
a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32.000.000	31.920.000	99,75	100	Terlaksannnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ~ Pengadaan AC ruangan	4	4	Unit
b.	Pengadaan Mebeleur	30.000.000	30.000.000	100	100	Tersediannya lemari arsip Bappeda ~ Pengadaan Almari rak	10	10	Unit
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	55.000.000	47.618.000	86,57	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa : ~ Perbaikan lantai dan toilet kantor ~ Rehab ruang makan	1 1	1 1	Pkt Pkt
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan	146.000.000	145.253.950	99,48	100	Terlaksananya service dan pervediaan BBM			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
	dinas/ operasional					kendaraan dinas operasional - Kendaraan R 4 - Kendaraan R 2	18 2	18 2	Unit unit
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	20.200.000	20.134.800	99,67	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ~ AC ~ mesin potong rumput ~ Speaker sound system	21 2 6	21 2 6	unit unit buah
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	22.500.000	22.500.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.500.000	22.500.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Bappeda	45	45	stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	115.000.000	97.490.012	84,77	84,77	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	115.000.000	97.490.012	84,77	84,77	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	18	15	Org
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.839.000	2.567.000	90,41	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.275.000	1.063.000	83,37	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Lakip Bappeda - RKA Bappeda - DPA Bappeda	1 1 1	1 1 1	Eks Eks eks
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	230.000,	230.000	100	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3	3	eks
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.334.000	1.274.000	95,50	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5	5	eks
6.	Program pengembangan data informasi	269.613.950	252.657.855	93,71	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan data informasi	1	1	keg.
a.	Penyusunan dan	269.613.950	252.657.855	93,71	100	Terlaksananya kegiatan :			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
	pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan					- Rapat Koordinasi regional PDRB se-kalteng - dokumen SIPD Kobar	1 50	1 50	Keg. buku
7.	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	116.670.000	86.257.001	73,93	73,93	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	1	keg.
a.	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kotawaringin Barat	116.670.000	86.257.001	73,93	73,93	Terlaksananya rapat koordinasi BKPRD dan pengendalian pemanfaatan ruang - Rapat BKPRD - Dokumen perda RTRW Kab.	5 88	4 0	Kali eks
8.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.023.579.500	906.874.009	88,59	95,84	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan daerah	6	6	keg.
a.	Penyusunan rancangan RPJMD	237.045.000	179.425.509	75,69	100	Tersusunnya rancangan teknokratis RPJMD	50	50	eks
b.	Penyusunan rancangan RKPD	37.205.000	32.705.000	87,90	87,90	Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD	50	50	eks
c.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	165.379.000	161.840.000	97,86	100	Terselenggaranya fasilitasi musrenbangcam, Forum gabungan SKPD dan musrenbang RKPD	3	3	keg.
d.	Penetapan RKPD	57.464.500	53.840.500	93,69	96,08	Terlaksananya penetapan RKPD yang memuat hasil dari musrenbang	2	2	dok.
e.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	131.596.000	118.082.000	89,73	93,16	Terlaksananya penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahunan dan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	2	2	dok.
f.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	254.890.000	245.701.000	96,39	98,95	Terlaksananya pengendalian terhadap program dan kegiatan pembangunan	2	2	Keg
g.	Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah	140.000.000	115.280.000	82,34	82,71	Terlaksananya penyediaan infrastruktur pendukung dalam rangka menunjang pengembangan sistem informasi perencanaan daerah berupa :			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						- Pengembangan aplikasi siporda - Software windows server standar 2012 R2,OVL+CAL	1 1	1 1	Aplikasi Unit
9.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	511.443.400	423.646.901	82,83	84,27	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan pembangunan ekonomi	3	3	keg.
a.	Penyusunan Masteplan Pembangunan Ekonomi Daerah	211.502.500	185.216.901	87,57	88,93	Tersusunnya dokumen Minapolitan Budaya Perairan Umum	1	1	dok
b.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	213.701.900	187.566.000	87,76	89,88	Tersusunnya dokumen panduan pengembangan ekonomi masyarakat	1	1	dok
c.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	86.239.000	50.846.000	58,98	58,98	Terlaksananya rapat koordinasi SKPD lingkup bidang ekonomi, tim pengendali inflasi daerah dan penanaman modal	10	3	Rapat
10.	Program perencanaan sosial budaya	155.834.000	136.564.300	87,63	96,68	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan sosial budaya	2	2	keg.
a.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	95.125.000	88.915.300	93,47	95,15	Tersusunnya : ~ RAD dalam penanggulangan kemiskinan ~ RAD PM2L	1 1	1 1	dok. dok.
b.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.709.000	47.649.000	78,48	99,08	Tersedianya : ~ Data/ laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan Data/ laporan hasil pelaksanaan pelaksanaan PM2L ~ Pelatihan peningkatan kapasitas TKPKD	2 1	2 1	dok. Keg
11.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	56.133.000	39.699.950	70,72	72,60	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	1	keg.
a.	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	56.133.000	39.699.950	70,72	72,60	Terlaksananya rapat koordinasi	5	5	Rapat
12.	Program perencanaan pengembangan kota-kota	76.363.750	61.818.750	80,95	87,23	Terlaksanya koordinasi perencanaan bidang sanitasi.	1	1	Keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
	menengah dan besar					drainase dan air minum skala kabupaten			
a.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	76.363.750	61.818.750	80,95	87,23	Terlaksananya koordinasi meliputi - Monitoring dan evaluasi keg. Dokumen MPS - Monitoring dan evaluasi keg. Dokumen RAD AMPL - Monitoring dan evaluasi kegiatan Pamsimas II	1 1 1	1 1 1	Keg Keg Keg

Sumber : Bappeda 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	CapaianKinerja Program/ KegiatanKinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
SEKRETARIAT DAERAH		1.187.752.650	1.109.046.842	93,37	100				
1.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	166.375.000	123.773.300	74,39	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan wilayah perbatasan	2	2	keg.
a.	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	78.175.000	62.974.200	80,56	100	Terpenuhinya : ~ Berita Acara Kesepakatan Tata Batas ~ Peta batas adminis trasi desa, kel., kec. dan kab.	10 10	10 10	dok. peta
b.	Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	88.200.000	60.799.100	68,93	100	Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3	3	Fasili tasi
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	894.555.400	861.578.892	96,31	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	keg.
a.	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	31.625.000	30.796.600	97,38	100	Terlaksananya penyusunan laporan LPPD Tahun 2016 dalam bentuk buku dan CD	10 40	10 40	Buku CD
b.	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	69.225.000	63.526.000	91,76	100	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam : ~ Dokumen perencanaan Setda ~ Laporan RFK & Monev Online ~ Laporan monev kegiatan ~ Rapat evaluasi program kerja dan pembangunan ~ Data SDDKN	72 132 1 1 2	72 132 1 1 2	Eks. Eks. Dok. Kali Eks.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
c.	Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	793.705.400	767.256.292	96,66	100	~ Terlaksananya proses pengadaan barang/ jasa melalui ULP beserta laporannya ~ Bimtek pengadaan barang dan jasa ~ Asistensi pengadaan barang/ jasa desa ~ Rakor/evaluasi pengadaan barang/jasa ~ Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/jasa dan Pelaporan	252 12 2 6 6 1	252 12 2 6 3 1	Pkt Lapo-Ran Kali Keg Kali pkt
3.	Program Pengembangan data/informasi	126.822.250	123.694.650	97,53	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan data/informasi	1	1	keg.
	Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE)	126.822.250	123.694.650	97,53	100	~ Terlaksananya pengadaan/ pelelangan secara elektronik (LPSE) ~ Terlaksananya penyusunan Laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ~ Terlaksananya Bimtek Layanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik ~ Pelatihan admin LPSE	252 2 1 1	252 2 1 -	Pkt kali Kali kali

Sumber : Setda 2016

Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2016 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan baik, yang merupakan suatu rangkaian implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- 2) Tersedianya pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan daerah;
- 3) Terlaksananya penerapan Sisrenbangda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan hasil dari tahapan perencanaan “bottom up” dan “partisipatif” yang dilaksanakan

selama ini, dengan penganggaran dan evaluasi. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan akan dapat lebih menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;

- 4) Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan antar satker/ sektor bidang sarana prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
- 5) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016;
- 6) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015;
- 7) Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se-Kalimantan Tengah Tahun 2016 yang diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif;
2. Masih lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait;
3. Masih adanya inkonsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Masih rendahnya kepercayaan dan peran aktif para stakeholders terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari manajemen pembangunan daerah;
6. Kurangnya produktivitas SDM dalam memahami pengelolaan data yang berwawasan teknologi informasi;
7. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data informasi khususnya terkait data kestatistikan;
8. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *uptodate* guna bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah mengingat terdapat leg (kekosongan ketersediaan data terbaru) dalam buku publikasi Kotawaringin Barat;

9. Belum adanya persepsi yang sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data yang valid guna bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan;
10. Lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan penyediaan serta pengelolaan data statistik daerah;
11. Masih belum sinkronnya antara hasil kajian maupun dokumen perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan penyusunan perencanaan makro pembangunan dan perencanaan sektoral, sehingga hasil kajian tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan terhadap penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan;

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Perlu penyempurnaan dan dioptimalkannya lagi pelaksanaan sistem pengelolaan data yang berbasis teknologi informasi dan keruangan;
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi antar satuan kerja terkait dengan dilakukannya berbagai rapat secara terprogram dan berkesinambungan;
3. Perlu dilakukan upaya penyamaan komitmen antar SKPD terkait dan para stakeholders terkait perlunya payung hukum berupa perda untuk mengawal berbagai usulan kegiatan pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbang/ Forum SKPD;
4. Meningkatkan kepercayaan dan peran aktif stakeholder melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara baik dan benar;
5. Meningkatkan Sinergitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan daerah;
6. Mengirim personil untuk mengikuti pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM;
7. Perlu dilakukan pemutakhiran data yang dievaluasi secara berkala di lingkup masing-masing SKPD;
8. Mengikutsertakan aparatur dalam berbagai diklat dan bimtek terutama di bidang perencanaan pembangunan dan kestatistikan;

9. Melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data dengan melakukan rapat-rapat teknis dengan SKPD terkait;
10. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak penyedia data (BPS dan SKPD terkait) serta mengoptimalkan sistem data informasi yang berbasis *web-site*;
11. Kajian - kajian yang disusun agar benar-benar dapat memberikan manfaat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga hasil dari kajian-kajian tersebut dapat teraplikasi sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang berkualitas.

4.1.7. URUSAN PERUMAHAN

a) Kondisi Umum

Rumah (papan) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makan). Berbagai kondisi fasilitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air minum, jamban dan lain-lain merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan untuk mengamati tingkat kesejahteraan rakyat. Rumah yang baik serta lingkungan yang sehat diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Tempat tinggal yang nyaman dan sehat sepatutnya memiliki tempat buang air besar. Di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 3,01 % rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Walaupun jumlahnya kecil namun hal tersebut masih harus menjadi perhatian pemerintah, karena fasilitas pembuangan air besar mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang bersangkutan.

Fasilitas pembuangan air besar yang paling dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah fasilitas pembuangan air besar yang digunakan sendiri oleh tiap-tiap rumah tangga yaitu 78,34 %. sementara untuk fasilitas yang digunakan bersama-sama dan umum cukup kecil yaitu 11,12 % dan 7,53%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2016 tentang %tase rumah tangga yang bersanitasi, maka kondisi Kotawaringin Barat untuk tahun 2016 ini belum mencapai target yang diinginkan. Dimana target yang dipatok adalah sebesar 97,79% dan kondisi Kotawaringin Barat saat ini adalah 77,96%.

Selain dari segi penggunaan fasilitas pembuangan air besar, sanitasi yang baik juga harus ditinjau dari indikator mengenai penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah.

Penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah akan mencegah limbah yang dibuang oleh rumah tangga merusak lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan.

Kabupaten Kotawaringin Barat dilalui beberapa sungai besar, antara lain Sungai Arut, Sungai Lamandau, dan Sungai Kumai. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kebiasaan masyarakat khususnya terhadap pemilikan septik tank. Pada 2016, baru 77,96 % rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir limbah (tinja), sungai/danau/laut 10,25 %, lubang tanah 8,92 % dan pantai/tanah lapang/kebun 2,87 %. Dari kondisi tersebut, masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama yang tinggal di daerah sempadan sungai dan di pedesaan masih perlu diberikan penyuluhan tentang budaya pentingnya fasilitas tempat buang air besar, mengingat sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Didasari pentingnya fungsi air ini, maka salah satu perhatian pemerintah adalah penyediaan fasilitas air bersih. Sumber air bersih oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari air ledeng (berlangganan PDAM), air sumur gali, air sumur bor, air sungai, mata air, mata air tak terlindung dan air hujan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum menjadi hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri. Rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak memiliki fasilitas air minum yaitu sekitar 1,86 %. sementara rumah tangga dengan fasilitas air minum sendiri memiliki persentase paling besar yaitu 51,91 %. Hal tersebut menggambarkan kondisi yang cukup baik dimana setiap rumah tangga, sekitar 98,14 % sudah memiliki fasilitas air minum.

Sebagian besar sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah air isi ulang yaitu sebesar 34,5 % dan sumur terlindung sebesar 24,5 %. Sementara sumber air minum yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga di Kotawaringin Barat adalah air hujan yang hanya sebesar 0,74 %.

Penduduk Kotawaringin Barat yang tinggal di daerah bantaran sungai sudah mulai meninggalkan penggunaan air sungai sebagai sumber air minum dan beralih ke penggunaan air isi ulang sebagai

sumber air minum utama. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan PDAM mengakibatkan masih ada rumah tangga yang mengkonsumsi air yang diduga kurang bersih, seperti air sungai, air hujan, sumur gali (jika tercemar), dan mata air tak terlindung.

Begitu pula dengan air minum, sebagian warga memilih menggunakan air minum isi ulang yang mungkin kebersihannya kurang terjaga, dengan alasan harganya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan air isi ulang bermerek. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satu indikator dalam urusan perumahan ini juga yaitu mengenai rasio tempat pemakaman umum. Luas pemakaman di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 445.170 m² dengan rincian Luas Tempat Pemakaman Umum 374.170 m², Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum 26.00 m², Luas Tempat Pemakaman Khusus 25.000 m² dan Luas Taman Makam Pahlawan 20.000 m². Daya tampung tempat pemakaman sebanyak 144.681 Unit dengan rincian Tempat Pemakaman Umum 121.606 Unit, Tempat Pemakaman Bukan Umum 8.450 unit, Tempat Pemakaman Khusus 8.125 unit dan Taman Makam Pahlawan 6.500 Unit.

Tabel 4.20
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2015-2016

No.	Indikator	2015		2016		
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	% Terhadap Target
1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	23	70,55	25	72	282,20
2.	Rumah Tangga Bersanitasi	96,78	75,49	97,79	77,96	79,73
3.	Rumah Layak Huni	64	64	65	65	100
4.	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	77,18	77,18	77,18	77,18	100
5.	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	6,2	2,2	7,5	1,26	16,80

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Pada tahun 2016 sebagaimana tabel diatas menunjukan gambaran yaitu indikator rumah tangga pengguna air bersih dimana pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan 1,45 %. Untuk rumah tangga bersanitasi dalam dua tahun terakhir belum mencapai target maksimal dengan persentase capaian di tahun 2016 hanya

sebesar 79,73 %. Sedangkan indikator lainnya yaitu rasio rumah layak huni dan rasio tempat pemakaman umum tidak mengalami perubahan sesuai capaian 100 % dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Adapun indikator rasio tempat pembuangan sampah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 0,94 %.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Urusan Perumahan dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.455.210.625 dan terealisasi sebesar Rp. 2.315.432.350 atau sebesar 94,31 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perumahan berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.21
Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2016*

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS PEKERJAAN UMUM		1.671.722.625	1.573.930.000	94,15	100				
1.	Program pengembangan perumahan	592.230.625	494.438.000	83,48	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan perumahan	1	1	keg .
a.	Perencanaan perumahan dan pemukiman	592.230.625	494.438.000	83,48	100	Data Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kec. Arut Selatan dan Kumai	1	1	Pkt
2.	Program pengelolaan areal pemakaman	1.079.492.000	1.079.492.000	100	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengelolaan areal pemakaman	1	1	keg .
a.	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1.079.492.000	1.079.492.000	100	100	Pembangunan sarana dan prasarana taman pemakaman umum	7	7	Pkt

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

No.	Program/ Kegiatan	Input		Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)
		Pagu	Keuangan		

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

		Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
SEKRETARIAT DAERAH		285.380.000	274.946.000	96,34	100				
1.	Program pengelolaan areal pemakaman	285.380.000	274.946.000	96,34	100	Prosentase pengelolaan areal pemakaman	100	100	%
b.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	285.380.000	274.946.000	96,34	100	Honorarium pembersih makam, pemeliharaan makam	1	1	Pkt

Sumber : Sekretariat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		498.108.000	466.556.350	93,66	100				
1.	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	498.108.000	466.556.350	93,66	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	2	2	keg.
a.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	182.108.000	150.625.000	82,71	100	- Premi Asuransi Damkar - Pos Damkar - Nozel Gun Gambut - Slang Rubber	32 1 2 5	32 1 2 5	Orang Pkt Unit unit
b.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	316.000.000	315.931.350	99,97	100	- Mobil damkar yang terpelihara - Truck Damkar yang terpelihara - Tersedia BBM untuk Penanggula ngan Bencana - Pompa Damkar yang terpelihara	6 6 1 8	6 6 1 8	Unit Unit Thn Unit

Sumber : BPBD 2016

PENGEMBANGAN DISTRIBUSI AIR MINUM

Peningkatan Kapasitas IKK Pangkalan Banteng Desa Karang Mulya (IPA 25 lt/dt)



c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan perumahan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan;
2. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung;
3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Masih belum idealnya lokasi areal pemakaman yang sesuai dengan master plan tata ruang daerah;
5. Masih terbatasnya tanah aset daerah yang dapat digunakan sebagai areal pemakaman umum;
6. Terbatasnya dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
7. Masih adanya fasilitas sarana dan prasarana pemakaman yang belum terpenuhi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Peningkatan peran kapasitas pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat di bidang perumahan. Bersama-sama dengan pemerintah, para pemangku kepentingan akan mengatasi permasalahan penyediaan perumahan, terutama rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan;

3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Lebih mengoptimalkan lagi program kegiatan bedah rumah yang selama ini telah dilaksanakan baik dari peningkatan jumlah anggarannya maupun jumlah sasaran pada tiap-tiap desa;
5. Perlu dipikirkan wacana untuk memindahkan areal permakaman yang berada dilokasi tengah kota atau daerah pemukiman;
6. Perlu ketersediaan anggaran yang memadai untuk pembebasan tanah bagi areal permakaman umum;
7. Mengusulkan penyediaan anggaran dana yang memadai untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
8. Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman yang belum terpenuhi.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2016 adalah masih kurangnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat akan arti penting pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi upaya tindak lanjut yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

4.1.8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

a) *Kondisi Umum*

Penerapan kebijakan kepemudaan dilakukan dengan memberikan iklim yang kondusif bagi pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minatnya melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta mengembangkan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif itu mencakup :

1. Pemberian kesempatan dan kebebasan kepada pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prioritas, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat;

2. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri;
3. Perlindungan terhadap generasi muda dari hal-hal destruktif terutama penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif lainnya (NAPZA) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba;
4. Pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda guna memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
5. Kegiatan mempersiapkan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan untuk pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung, dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang berkeadilan, beradab, dan demokratis, dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa;
6. Pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Sedangkan pembangunan di bidang olahraga dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya adalah dengan :

1. Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan pemerintah di bidang keolahragaan;
2. Melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahragawan usia dini;
3. Memetakan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal di bidang olahraga;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga;
5. Membina dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga;
6. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan.

Dalam usaha memberikan bekal kewirausahaan, dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai, namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat kabupaten. Bibit-bibit berprestasi akan terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung bidang kepemudaan dan olahraga diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.22
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015 - 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	%
1.	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional		12	14	14	100
	a. POPNAS	Peringkat	4	10	7	70
	b. POSPENAS	Peringkat	3	5	3	60
2.	Jumlah organisasi pemuda	buah	105	235	235	100
3.	Jumlah organisasi olah raga	buah	77	62	124	200
4.	Gedung olah raga/balai remaja (selain milik swasta)	buah	7	8	8	100
5.	Lapangan olahraga	buah	150	150	150	100

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kegiatan kepemudaan dan olah raga diukur dengan jumlah organisasi pemuda, jumlah grup olah raga, serta ketersediaan gedung dan lapangan olah raga sebagai wadah bagi warga untuk beraktifitas. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 8 buah gedung olah raga, 150 buah lapangan olah raga, 124 klub olah raga dan 235 buah organisasi pemuda. Lapangan olah raga yang dimaksud disini adalah jumlah seluruh lapangan olah raga yang ada di suatu kecamatan, termasuk lapangan milik sekolah. Klub olah raga yang terdapat di tiap

kecamatan umumnya adalah klub sepak bola, bola voli, catur, karate, pencak silat, futsal, renang dan bulutangkis.

Sedangkan organisasi kepemudaan adalah organisasi Karang Taruna, yang diasumsikan terdapat di setiap desa dan kelurahan. Secara umum kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, namun perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Sekretariat Daerah (Setda) dengan total alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.123.131.750 dan terealisasi sebesar Rp. **3.549.158.375** atau **86,07 %**. Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan Kepemudaan dan Olah Raga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	CapaianKinerja Program/KegiatanKinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DISDIKPORA		3.594.751.000	3.024.201.375	84,12	100				
1.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	739.446.000	549.953.466	74,37	99,59	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	1	keg.
a.	Pembinaan organisasi kepemudaan	215.190.000	178.618.965	83,00	100	Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan	1	1	keg
b.	Bakti Sosial Kepemudaaan	524.256.000	371.334.500	70,83	99,43		1	1	keg
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	2.855.305.000	2.474.247.910	86,65	100	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1	1	keg
a	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	2.835.305.000	2.454.287.910	86,56	100	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	1	1	keg
b	Peningkatan sarana prasarana olahraga daerah	20.000.000	19.960.000	99,80	100	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di	1	1	Keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	CapaianKinerja Program/KegiatanKinerja (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						tingkat daerah			

Sumber : Disdikpora

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
SEKRETARIAT DAERAH		528.380.750	524.957.000	99,35	100				
1.	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	528.380.750	524.957.000	99,35	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	1	1	keg
a.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	528.380.750	524.957.000	99,35	100	Tersedianya fasilitas sarana prasarana olah raga berupa : ~ Pembuatan bangku cadangan pemain lapangan bola sport center ~ Rehabilitasi tribun lapangan Karya Jaya Kec. Kotawaringin Lama ~ Renovasi lapangan tenis Pasir Panjang	1 1 1	1 1 1	Pkt Pkt Pkt

Sumber : Setda

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

- 1. Kurangnya Pengetahuan Generasi Muda, Orang Tua, serta Masyarakat tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS;
- 2. Terbatasnya Dana untuk Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara rutin setiap tahun;
- 3. Masih adanya Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang tertangkap oleh aparat hukum setiap tahunnya;

4. Kurangnya pembinaan secara kontinyu serta terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan kepemudaan dan kemajuan olah raga;
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepemudaan dan olah raga;
6. Terbatasnya sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan;
7. Terbatasnya ketersediaan sarana latihan para atlet yang memadai;
8. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi keolahragaan;
9. Masih rendahnya sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet.
10. Kurangnya sentra pembinaan prestasi atlet pemula dan kurangnya wahana sebagai tempat pemusatan latihan.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Mengintensifkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba untuk memberikan Pengetahuan kepada Generasi Muda, Orang Tua, dan Masyarakat tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS;
2. Pengalokasian Dana yang cukup bagi instansi terkait untuk melakukan Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda di 6 (enam) Kecamatan tiap tahunnya;
3. Memperkuat peran dan koordinasi antar Pihak terkait terutama POLRI dan BNK Kotawaringin Barat dalam melakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
4. Mengoptimalkan pembinaan atlet usia dini serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan kepemudaan dan kemajuan olah raga;
5. Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mendukung kemajuan kepemudaan dan olah raga;
6. Pemberian sarana dan prasarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda, khususnya dalam hal kewirausahaan, semisal penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan berwirausaha, dan pembinaan bagi para pemuda yang memiliki inovasi-inovasi dalam pengembangan bisnis secara mandiri;
7. Pemberian penghargaan bagi para pemuda berprestasi dan penyelenggaraan pameran hasil karya pemuda;

8. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat;
9. Pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan;
10. Pencarian atlet olahraga berbakat;
11. Pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi atlet berprestasi;
12. Pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub-klub olahraga prestasi.
13. Memberikan kesempatan dan akses berupa kemudahan untuk mengikuti diklat tenaga pelatih olahraga ke luar daerah;
14. Mengirim atlet berprestasi di daerah untuk mengikuti diklat dan atau pemusatan latihan di klub-klub olahraga ternama;
15. Memanfaatkan IPTEK untuk pembinaan prestasi olahraga di daerah.

4.1.9. URUSAN PENANAMAN MODAL

a) Kondisi Umum

Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sementara di sisi lain kebutuhan peningkatan pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan dalam upaya pemerintah daerah mendorong kegiatan ekonominya seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kab. Kotawaringin Barat masih memerlukan sejumlah tambahan dana dalam bentuk investasi swasta, baik yang berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing.

Kegiatan penanaman modal di Kab. Kotawaringin Barat menyimpan beberapa peluang seperti spesifikasi keunggulan lokal Kab. Kotawaringin Barat di bidang pariwisata dan budaya, komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal Kab. Kotawaringin Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan investasi di Kab. Kotawaringin Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan), regulasi yang mantap dalam

fasilitasi investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian, masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah. Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Selain itu juga masih belum disahkannya RTRW Provinsi dan Kabupaten juga menjadi kendala utama dalam upaya menarik investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru.Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

Tabel 4.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016

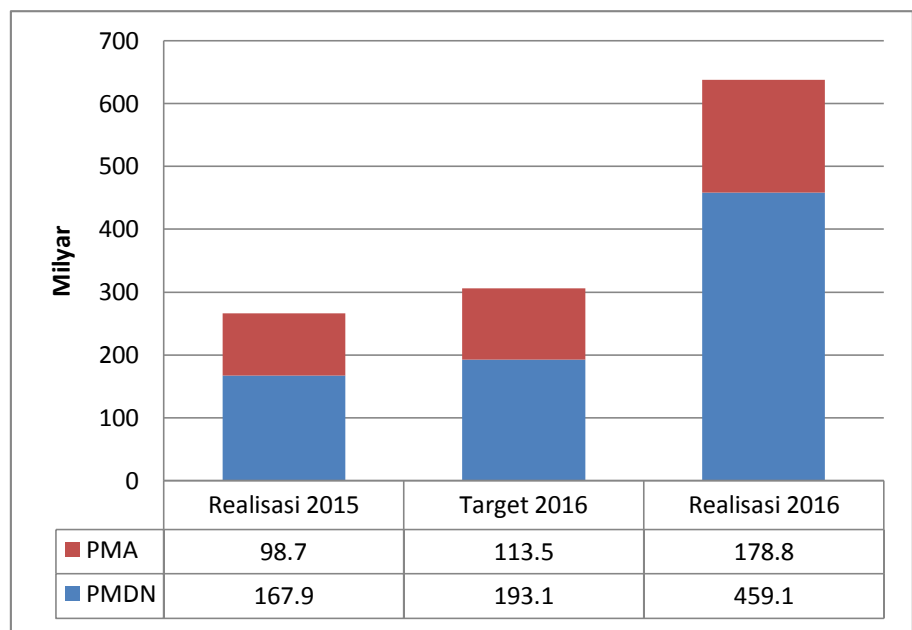
No.	Indikator	Satuan	2016		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal (PMDN/PMA)	Milyar (Rp)	306,6	637,9	208,1
2	Rasio Realisasi PMDN	%	63 (Rp 193,1 milyar)	72 (Rp 459,1 milyar)	114

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat

Penjelasan dari capaian masing-masing indikator kinerja tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

- a. Nilai Realisasi Penanaman Modal

Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2016 dengan target tahun 2016 dan realisasi investasi tahun 2015



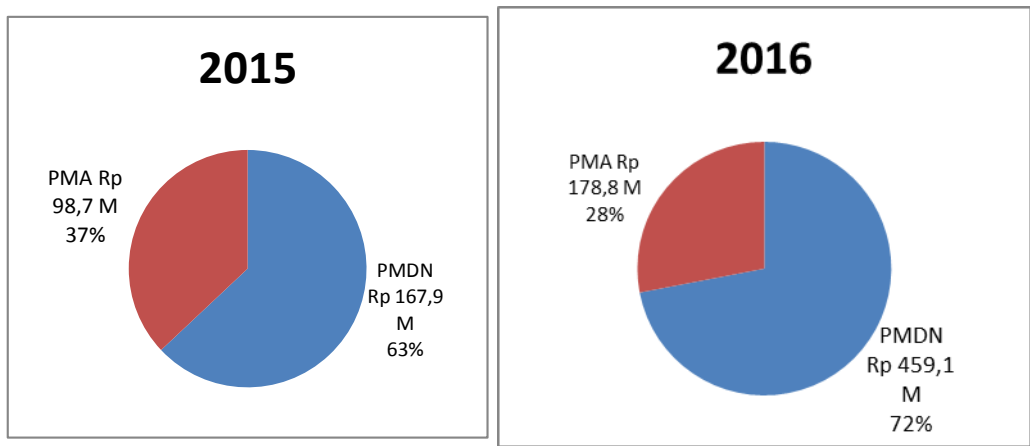
PMA = Penanaman Modal Asing
 PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri
 Nilai investasi dalam Rp Milyar (M) dan kurs US\$ 1 = Rp 13.900 sesuai dengan APBN 2016.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian target nilai realisasi penanaman modal tahun 2016 yaitu sebesar Rp 637,9 milyar atau 208 % dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 306,6 milyar yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp 193,1 milyar dan realisasi PMA sebesar Rp. 113,5 milyar. Nilai realisasi investasi tahun 2016 ini meningkat 139 % di banding realisasi investasi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 266,6 milyar.

b. Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri

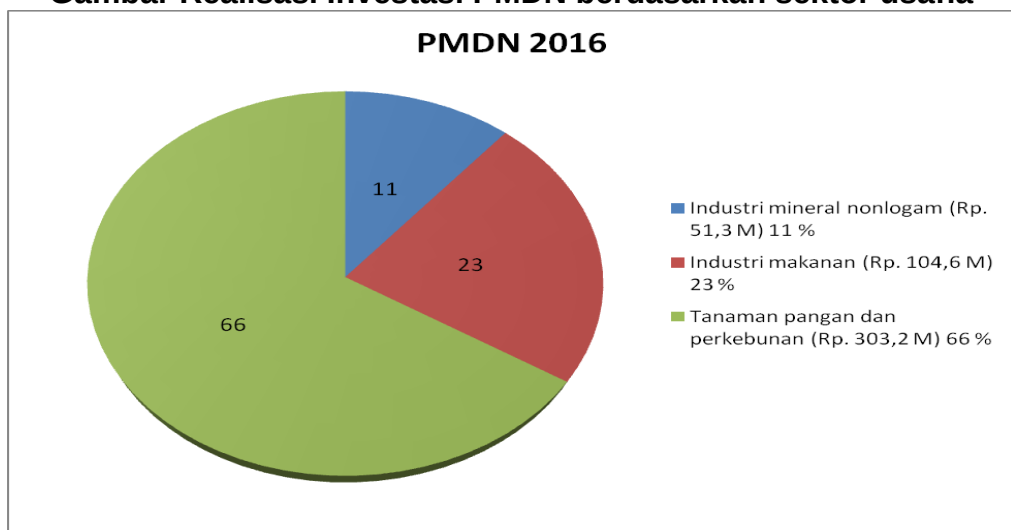
Rasio penanaman modal dalam negeri menggambarkan perbandingan antara nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dibandingkan dengan nilai realisasi penanaman modal secara total di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2016. Capaian nilai rasio penanaman modal dalam negeri untuk tahun 2016 dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar perbandingan realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015 dan 2016

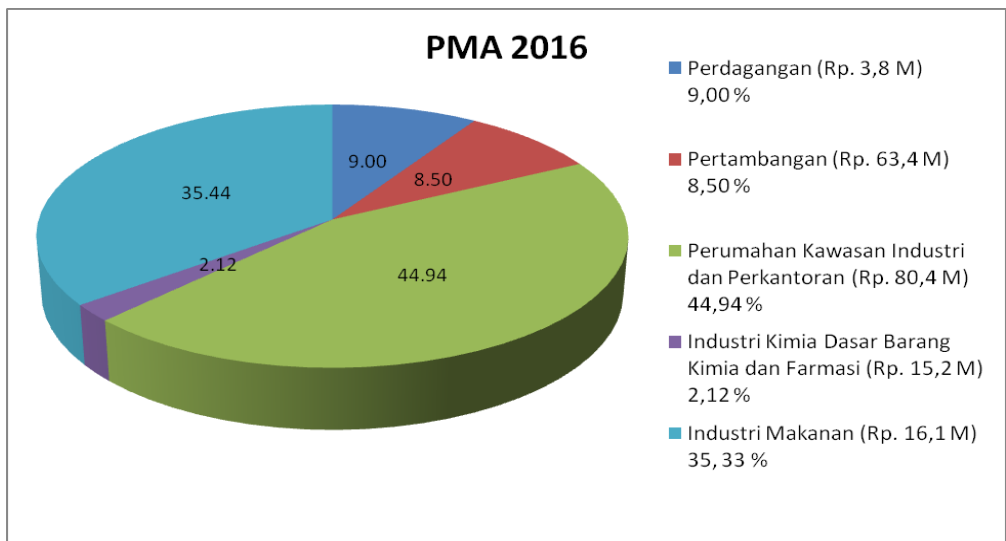


Berdasarkan gambar di atas rasio realisasi PMDN tahun 2016 adalah sebesar 72 % dari total nilai realisasi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dibandingkan dengan target rasio investasi tahun 2016 sebesar 62,9 % maka capaian tersebut berada di kategori sangat baik (114 %) dan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 capaian rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 9 % dari capaian 63 %.

Gambar Realisasi Investasi PMDN berdasarkan sektor usaha



Gambar Realisasi Investasi PMA berdasarkan sektor usaha



Pada tahun 2016, capaian realisasi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat melampaui target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan antara lain meningkatnya investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Dalam perkembangannya, perusahaan PMDN menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, yakni pada perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar. Sedangkan pada perusahaan PMA sektor pertambangan dan industri pengolahan minyak kasar, sebagaimana tahun sebelumnya masih memberikan nilai pertumbuhan yang signifikan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 163.575.000 dan terealisasi sebesar Rp. 157.660.200 atau 96,38%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Penanaman Modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.25
Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
DISPERINDAG		163.575.000	157.660.200	96,38	100				
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	142.235.000	138.157.200	97,13	100	Terjalinnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah			
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama	23.526.000	23.526.000	100	100	Terlaksananya fasilitasi kerjasama strategis antar	2	2	kali

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah					usaha besa rdan usaha kecil menengah			
	Pengembangan potensi unggulan daerah	9.300.000	9.100.000	97,84	100	Data potensi dan peluang investasi Kab. Ktw. Barat	6	6	kec
	pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	15.745.000	15.495.000	98,41	100	Terlaksannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	25	25	lokasi
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	93.664.000	90.036.200	96,12	100	Keikutsertaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada pameran invesda tingkat nasional	1	1	kali
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	21.340.000	19.503.000	91,39	100				
	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman moda	21.340.000	19.503.000	91,39	100	Sosialisasidanp elatihanpenana man modal	1	1	kali

Sumber : Disperindag

Capaian keberhasilan Urusan Penanaman Modal Tahun 2016 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masuk sebesar 43 proyek.
- 2) Terciptanya hubungan baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan perusahaan PMDN/PMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 3) Tersebarluasnya informasi potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada even pameran invesda di Jogjakarta.
- 4) Adanya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah.

c) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.26
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
Urusan Penanaman Modal

No	Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	- Keterbatasan sumber daya manusia/ aparatur sesuai keahliannya dalam menangani bidang penanaman modal - Belum padu serasinya kelembagaan yang menangani urusan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat - Peralatan yang digunakan belum mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal khususnya SPIPISE(Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) - Belum optimalnya jaringan kerjasama dalam pengembangan investasi - Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha besar terhadap kegiatan/produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah	- Perlu peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM/Aparatur melalui Diklat, Kursus dan studi banding - Perlu dibentuk BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kotawaringin Barat - Peningkatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku usaha yang mempunyai keunggulan kompetitif. - Temu usaha perlu dilaksanakan secara berkesinambungan
2	Pengembangan potensi unggulan daerah	- Produk unggulan daerah belum dikelola secara baik karena keterbatasan SDM - Belum optimalnya pengelolaan system informasi potensi unggulan daerah sebagai bahan promosi kepada investor	- Perlu peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM/Aparatur melalui Diklat, Kursus dan studi banding - Optimalisasi pengelolaan system informasi potensi unggulan daerah yang berwawasan teknologi informasi
3	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	- Pengelolaan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) belum maksimal karena Disperindag belum mendapat hak akses secara online ke SPIPISE - Peralatan yang digunakan belum mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal khususnya SPIPISE(Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik)	Syarat mendapat hak akses ke SPIPISE harus memiliki nomenklatur penanaman modal
4	Penyelenggaraan pameran investasi	- Lemahnya daya saing produk dan pelaku usaha local terhadap produk dan pelaku usaha dari luar daerah - Rendahnya minat pelaku usaha berkontribusi pada pameran investasi	Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha

5	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	- Keterbatasan sumber daya manusia/ aparatur sesuai keahliannya dalam menangani bidang penanaman modal - Masih rendahnya minat aparatur daerah dan pelaku usaha mengikuti kegiatan bimbingan teknis berkaitan penanaman modal	- Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang menangani urusan penanaman modal m - Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkesinambungan

Sumber : Disperindag

4.1.10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

a) Kondisi Umum

Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Koperasi dan UMKM diarahkan untuk memantapkan perekonomian daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM. Kontribusi Koperasi dan UMKM sangat signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kelompokakar rumput sehingga lebih merata dan berkeadilan. Dalam memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM disinergikan dengan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui fasilitasi dalam mendapatkan akses bantuan permodalan ke lembaga-lembaga keuangan, sosialisasi program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan Pelaku Koperasi dan UMKM baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, memfasilitasi Pelaku Koperasi dan UMKM dalam mengikuti pameran baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru (WUB), peningkatan kelembagaan koperasi, meningkatkan sumber daya manusiapara Pelaku Koperasi dengan mengadakan pelatihan, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen usaha-usaha UMKM, dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak *multiplier* yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 menegaskan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Kotawaringin Barat

mengimplementasikannya dengan memberikan porsi yang besar untuk Koperasi dan UMKM agar dapat maju dan berkembang.

Hal ini terlihat dengan antusiasnya permohonan pembuatan Badan Hukum Koperasi baru, Perkembangan usaha dan jumlah anggota Koperasi yang semakin meningkat, dan semakin besarnya SHU (siswa hasil usaha), serta terus bertambahnya jumlah UMKM. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 254 buah koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang jenisnya meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Petani Plasma, Koperasi Nelayan, Koperasi Pegawai, Koperasi Guru, dan lain sebagainya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015.

*Tabel 4.27
Jumlah Koperasi dan Statusnya
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2015 – 2016*

Koperasi	Tahun 2015 (unit)	Tahun 2016 (unit)	+/(-)
Aktif	206	213	7
Tidak Aktif	48	48	-
Primer	254	261	7
KUD	25	25	-
Non KUD	229	236	7

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2016

Berangkat dari perkembangan Koperasi dan UMKM yang semakin baik dan pengaruh signifikannya pada roda perekonomian masyarakat, tentu menjadi hal yang membanggakan dan menjadikan motivasi segenap stakholder untuk terus menciptakan iklim serta progres pencapaian maksimal. Sedangkan untuk jumlah UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

*Tabel 4.28
Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2015 – 2016*

Jenis UMKM	Tahun 2015 (unit)	Tahun 2016 (unit)	+/(-)
Aneka Jasa	1738	1738	-
Perdagangan	5046	5046	-
Industri Pertanian	1613	1613	-
Industri Non Pertanian	1394	1394	-
Pertanian	1558	1558	-
Jumlah	11.349	11.349	-

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2016

Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih

membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan dalam menampung bertambahnya penggunaan tenaga kerja.

Selanjutnya peningkatan secara umum penilaian KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4.29
Penilaian Kondisi KSP/ USP
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

Koperasi	Tahun 2015 (unit)	Tahun 2016 (unit)	+/(-)
Sehat	49	51	2
Cukup Sehat	37	42	5
Kurang Sehat	16	14	-2
Tidak Sehat	1	1	0
Jumlah	103	108	5

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2016

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.346.796.500 dengan realisasi sebesar Rp 2.196.273.496 atau 93,58 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.30
Program/Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	Diskop, UMKM & Pasar	2.346.796.500	2.196.273.496	93,58	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.416.224.500	1.345.086.910	94,97	100	Pelaksanaan Program pelayanan administrasi perkantoran mendukung Tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kedinasan	15	15	keg.
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	750.000	293.000	39,06	100	Proses surat menyurat dan pengiriman pkt berjalan dengan baik dan lancar	50 20	50 20	Lbr Pkt
b.	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	167.362.000	161.813.348	96.68	100	Berfungsinya komunikasi, sumberdaya air, listrik, internet dan surat khabar	12	12	Bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
c.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	163.564.100	163.564.100	100	100	Bangunan pasar dapat jaminan asuransi	13	13	unit
d.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	2.565.000	2.084.000	81,24	100	Kendaraan operasional dinas terpenuhinya kelengkapan surat menyuratnya	17 1	17 1	Mtr Mbl
e.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	179.809.850	138.143.400	76.82	100	Administrasi bank, buku cek, Honorarium PNS, non Pns Pembyaran administrasi keuangan, materai dan benda pos.	12 5 4250	12 5 4250	Bln Buku Imr
f.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.704.600	24.433.500	95.05	100	Pembayaran honor petugas kebersihan dan penyediaan peralatan kebersihan kantor	1 1	1 1	Thn org
g.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.760.000	26.340.000	98.43	100	Pemeliharaan jaringan internet, website, perbaikan Komputer, mesin faximili, note book dan printer	1	1	Thn
h.	Penyediaan alat tulis kantor	69.973.350	69.973.350	100	100	penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	Bln
i.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.222.500	47.722.500	95.02	100	Penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja	12 125000	12 125000	Bln lbr
j.	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	13.794.362	13.794.362	100	100	Penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor	1	1	Thn
k.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95.458.000	93.812.000	98,28	100	Peralatan dan perlengkapan kantor mendukung kinerja SKPD	1	1	Pkt
l.	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.562.500	10.562.500	100	100	Peralatan dan perlengkapan kantor mendukung kinerja SKPD	1	1	Pkt
m	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2.750.000	-	-	-	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan mendukung kinerja SKPD	10	10	JB
n.	Penyediaan makanan dan minuman	306.030.000	300.625.000	98.23	100	penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	1	1	Thn
o.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	303.668.238	291.925.850	96.13	100	perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	372.944.500	347.648.250	93.21	100	Menunjang pelaksanaan kegiatan	6	6	Keg .
a.	Pembangunan gedung kantor	136.575.000	135.333.100	99.09	100	Pembangunan Gedung Kantor	1	1	Pkt
b.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.000.000	8.000.000	100	100	Perlengkapan Gedung kantor mendukung pelaksanaan kegiatan	1	1	Thn
c.	Pengadaan mebeleur	63.450.000	63.450.000	100	100	Penyimpan Dokumen kantor	9	9	Buah
d.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.295.000	1.254.000	96.83	100	Pengecatan gedung kantor	518	518	m2
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	157.400.000	133.514.950	84.82	100	Service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	17 1	17 1	unit
f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.224.500	6.096.200	97.93	100	Terpeliharanya Peralatan gedung dan kantor	8	8	unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	103.300.000	92.850.000	89,88	100	Aparatur disiplin dalam berpakaian	2	2	keg
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	64.900.000	54.450.000	83.89	100	ID card dan papan Nama serta pakaian dinas harian pegawai	55 110	55 110	Set Stel
b.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	38.400.000	38.400.000	100	100	Tenaga kontrak berpakaian seragam	1	1	Pkt
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.550.000	88.261.400	87,77	100	Pengetahuan, wawasan, kompetensi dan kapasitas aparatur meningkat	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.550.000	88.261.4000	87,77	100	Aparatur ikut serta dalam Bimbina teknis, pendidikan dan latihan	1	1	Thn
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.995.000	1.991.000	99,79	100	Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu	2	2	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	992.500	988.500	99,59	100	Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu	3	3	buku
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.002.500	1.002.500	100	100	Laporan semakin baik dan selesai tepat waktu tahun	4	4	buku

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
6	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	48.462.500	44.832.100	92,50	100	Menumbuhkan Wirausaha baru	4	4	keg.
a.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	14.632.500	13.456.500	91.96	88.51	Mensosialisasikan sertifikasi hak atas tanah, dan perkembangan KUR	1	1	keg.
b.	Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	15.107.500	14.610.000	96.70	100	Pendataan wirausaha baru dan perkembangan UMKM	1	1	Thn
c.	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	13.222.500	12.840.000	97.10	100	Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM	1	1	keg.
d.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.500.000	3.925.600	71.37	100	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keg. Bid.UMKM	6	6	kec
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	136.787.500	134.046.000	97,99	100	Terbukanya akses pasar bagi koperasi baik dikabupaten,provinsi dan nasional sehingga pemasaran dari produk yang dihasilkan semakin luas	3	3	keg
a.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	27.917.500	27.700.000	99,22	87.31	Sosialisasi program kemitraan UKM	30	30	org
b.	Peningkatan Kerjasama di Bidang HAKI	7.175.000	6.960.000	97	100	Tersedianya sarana promosi pelaku UKM Adanya akses pasar pelaku UMKM dalam rangka memasarkan Produk	3	3	keg
c.	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	101.695.000	99.386.000	97,72	100	Terwujudnya Penyelenggran pelatihan kewirausahaan	3	3	Keg
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	22.637.500	16.380.500	72,36	100	Koperasi/LKM menggunakan dana Pemerintah dengan tepat dan cermat	1	1	keg
a	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	22.637.500	16.380.500	72,36	100	Penggunaan dana pemerintah sesuai dengan peruntukannya	1	1	keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolak Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	bagi Usaha Mikro Kecil Menengah								
9.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	143.895.000	125.177.336	86,99	78,74	Nilai manfaat koperasi bertambah baik dan berdaya saing bagi anggota maupun masyarakat sekitar	6	6	keg
a.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	14.577.500	14.577.500	100	100	Keterampilan , pengetahuan,wawasan sertasumberdaya manusia koperasi semakin kompeten menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang.	2	2	keg
b.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	19.687.500	19.687.500	100	100	Masyarakat mendapat informasi, pengetahuan, wawasan mengenai perkoperasian beserta regulasinya	2	2	keg
c.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	9.332.500	8.617.500	92,33	100	Meningkatkan jumlah koperasi berprestasi	12	6	Kop
d.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	59.235.000	53.782.336	90,79	100	Terbukanya akses pasar bagi koperasi dikab. provinsi dan nasional sehingga pemasaran dari produk yang dihasilkan semakin luas.	1	1	keg
e.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	13.562.500	1.750.000	12,90	12,90	Kualitas koperasi semakin meningkat,sehat dan berprestasi	20	20	Kop
f.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	27.500.000	26.762.500	97,31	97,31	Mendapatkan data permasalahan yang dihadapi pelaku Koperasi	6	6	Kec

Sumber : Diskop UMKM dan Pasar

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. Sebagian koperasi masih belum mengerti tentang penyusunan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawasan Koperasi kepada anggotanya pada saat akhir tahun;

2. Masih banyak koperasi yang belum melengkapi izin simpan pinjam;
3. Terdapat permasalahan pelaksanaan kemitraan kebun kelapa sawit antara koperasi dengan perusahaan swasta tentang keanggotaan Koperasi dengan keanggotaan plasma dan terdapat Sisa Hasil Kebun (SHK) yang masih rendah serta banyak masyarakat setempat yang memperoleh plasma kebun sawit yang menjual kepada pihak luar;
4. Sumber daya manusia (pegawai) dalam pembinaan masih terbatas dan kurang menguasai terutama tentang pengetahuan laporan keuangan koperasi mengingat dimasyarakat pembentukan koperasi terus bertambah;
5. Pada saat pergantian kepengurusan koperasi masih terdapatnya sebagian koperasi tentang serah terima aset belum dapat diterima oleh kepengurusan baru terpilih;
6. Masih terdapatnya pengelola koperasi menyalahgunakan keuangan koperasi.
7. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses permodalan dan Pangsa Pasar.
8. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses Kemitraan dan pengembangan Usaha.
9. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan penguasaan dan Pemanfaatan teknologi serta pengembangan Manajemen.
10. Kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat pada umumnya dan pelaku UKM pada Khususnya terkait dengan mental berusaha dan inovasi produk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya adalah :

1. Telah dilaksanakan pelatihan tentang penyusunan pembuatan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas sebanyak 20 koperasi yang masing-masing koperasi diwakili 2 orang yang telah disampaikan surat himbauan kepada pengurus untuk dapat melaksanakan RAT dengan anggota karena RAT wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan usaha dan keuangan selama 1 tahun buku dan untuk membahas rencana kerja (RK) dan rencana

anggaran pendaptan belanja koperasi pada tahun 2016 yang harus disetujui oleh anggota.

2. Telah dilaksanakan pemberitahuan secara resmi maupun saat pembinaan dilapangan kepada seluruh koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam agar mengurus izin tersebut dan koperasi yang telah melengkapi persyaratan masih relatif kecil.
3. Telah dilakukan pertemuan maupun pembinaan kepada pengurus induk maupun pengurus tempat pelayanan dan anggotanya baik dilapangan maupun di Dinas Koperasi untuk menertibkan administrasi keanggotaan Koperasi dan telah diberikan buku daftar anggota kepada pengurus.
4. Sebagian pembina telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah walaupun waktu dan peserta relatif singkat.
5. Kepengurusan yang lama dianjurkan membuat berita acara serah terima asset koperasi kepada kepengurusan baru dan telah difasilitasi oleh Dinas Koperasi agar kepengurusan baru dapat melanjutkan asset tersebut sehingga kepengurusan baru lebih mudah untuk melanjutkan kegiatan usaha maupun keuangan yang ada sehingga administrasi dan pembukuan tidak terputus.
6. Telah dibantu dan difasilitasi oleh Dinas Koperasi antara pengelola dengan pengurus melalui surat resmi untuk mendapat keterangan untuk memeriksa dan dimusyawarahkan bersama, dihimbau hasil fasilitasi oleh dinas dikembalikan kembali kepada kedua belah pihak untuk dilanjutkan dan keputusannya harus disetujui oleh anggota.
7. Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dilakukan melalui pengembangan di bidang Produksi Pengolahan, Pemasaran, Peningkatan SDM, Pengembangan Desain dan teknologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek pendanaan.
8. Pemenuhan Sarana Prasarana, Informasi Usaha, perijinan usaha, fasilitas program kemitraan, membuka akses kemampuan berusaha, promosi dan dukungan kelembagaan.
9. Perlu Diklat Kewirausahaan bagi pelaku UKM dan juga masyarakat yang komperhasif dan berkelanjutan agar terbentuk

mental berusaha yang baik bagi para pelaku UKM dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi dalam pengembangan produknya.

4.1.11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a) *Kondisi Umum*

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Masalah kependudukan memiliki posisi yang sangat penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program.

Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif. Perencanaan diberbagai bidang pembangunan tentunya membutuhkan data kependudukan yang akurat dan valid.

Informasi administrasi kependudukan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan di sektor-sektor yang lain, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mensukseskan program elektronik KTP (KTP-el), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Berikut ini dapat disampaikan mengenai perkembangan capaian indikator kinerja utama bidang kependudukan.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2016 berjumlah **89.870 Kepala Keluarga = (99.783) jiwa.**

*Tabel 4.31
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil*

Indikator	Realisasi Tahun 2015	s/d Tahun 2016		%
		Target	Realisasi	
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	91,95	-	100	
Kepemilikan Kartu Keluarga Nasional	88.082	115.000	89.870	78,37%
Kepemilikan KTP Nasional	-			
Perekaman KTP-el	172.604	191.774	158.546	82,67%
Kepemilikan KTP-el	172.604	191.774	158.546	82,67%
Penduduk Pindah dari Kabupaten Kotawaringin Barat ke luar Daerah	8.789	-	4.589	
Penduduk datang dari luar Daerah ke Kabupaten Kotawaringin Barat	8.121	-	4.868	
Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil :				
• Kepemilikan Akta Kelahiran	165.327	269.872	171.896	63,70%
• Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim)	1.664	1.500	1.431	95,40%
• Kepemilikan Akta Kematian	1.437	-	1.801	
• Kepemilikan Akta Perceraian (Non Muslim)	42	-	44	
• Kepemilikan Akta Perubahan Nama	17	-	41	
• Kepemilikan Akta Pengesahan anak	19	-	47	
• Kepemilikan Akta Pengangkatan anak	3	-	6	
• Kepemilikan Akta Perubahan Kewarganegaraan	1	-	0	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Ktw. Barat tahun 2016

Keterangan :

1. Tingkat Kepemilikan KK Nasional masih rendah karena belum semua desa terjangkau pelayanan;
2. Kepemilikan dan perekaman KTP-el mengalami penurunan kerana adanya konsolidasi data dengan pusat/penghapusan terhadap identitas penduduk yang ganda;
3. Kepemilikan akta kelahiran masih rendah karena untuk akta yang terbit sebelum adanya aplikasi SIAK belum terdata dalam data SIAK serta pelayanan belum mampu menjangkau semua desa;
4. Akta perkawinan belum mencapai target karena belum adanya kesadaran kesadaran warga melaporkan perkawinan terutama di desa-desa.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.898.772.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.839.219.605 atau 96,86 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.32
Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun Anggaran 2016*

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
Disdukcapil		1.898.772.000	1.839.219.605	96,86	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	515.439.500	488.130.607	94,70	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	10	keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	91.440.000	78.249.717	85,57	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12	12	bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.951.000	2.951.000	100	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	11 2	11 2	unit unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	119.467.000	112.223.500	93,93	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2 12	2 12	Org bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.913.400	40.129.800	91,38	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor berupa : - Honor Petugas - Peralatan Kebersihan	2 1	2 1	Org Pkt

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.930.000	9.320.000	93,86	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa : ~ Komputer Deskop ~ Notebook ~ Printer	5 6 5	5 6 5	Unit Unit unit
f.	Penyediaan alat tulis kantor	40.901.300	40.901.300	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Thn
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.550.000	11.550.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa ~ Fofoto copy ~ Cetak Spanduk	25200 15	25200 15	Lembar Lembar
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.475.000	3.475.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik berupa : ~ lampu neon TL dan SL ~ Piting Lampu ~ Kabel ~ Terminal Jek ~ MCB 3 Phase	25 10 1 10 3	25 10 1 10 3	Buah Buah Rol Buah Buah
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.188.000	35.186.000	99,99	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ AC ~ Printer	6 1	6 1	Unit Unit
j.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156.623.800	154.144.290	98,41	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.094.834.900	1.083.079.235	98,92	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	4	keg.
a.	Pembangunan Gedung Kantor	879.599.900	879.247.075	99,95	100	Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan Kependudukan lantai 2 berupa : ~ Gedung pelayanan lantai 2 ~ Pengaspalan ~ IMB ~ perbaikan genteng dan	1 1 1 1	1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						plafon			
b.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	63.505.000	63.505.000	100	100	Terlaksananya penyediaan: ~ Gorden ~ Umbul-umbul ~ Kulkas ~ Kursi Kerja ~ Pliser ~ Bendera Merah Putih	70 16 1 6 104 2	70 16 1 6 104 2	Meter Lbr Unit Unit Meter Lbr
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	143.400.000	134.527.160	93,81	100	Terlaksananya penggantian suku cadang dan service serta penyediaan BBM kendaraan dinas roda 4 dan 2	13	13	unit
d.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.330.000	5.800.000	69,62	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : ~ AC split ~ Genset	11 1	11 1	Unit Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	27.385.600	27.385.600	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.385.600	27.385.600	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian: ~ Pakaian Dinas ~ Tanda Pengenal	41 37	41 37	Stel set
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60.000.000	54.066.313	90,11	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	60.000.000	54.066.313	90,11	100	Terlaksananya keikut sertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	1	tahun
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.180.000	2.054.000	94,22	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.
a.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	275.000	275.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	15	15	Buku
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.905.000	1.779.000	93,38	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	Buku

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
6.	Program penataan administrasi kependudukan	198.932.000	184.503.850	92,74	100	Terlaksananya kegiatan pada Program penataan administrasi kependudukan	4	4	keg.
a.	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	119.194.000	113.285.850	95,04	100	Terlaksananya belanja cetak blanko-blanko dan pengentrian data adm Kependudukan dalam rangka mendukung pengoperasian SIAK berupa : ~ cetak blanko ~ pelayanan KK, KTPel	1 1	1 1	Pkt Thn
b.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	4.350.000	4.350.000	100	100	Tersedianya data kependudukan berupa buku profil kependudukan	50	50	Buku
c.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	15.688.000	15.378.000	98,02	100	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta capil	1	1	thn
d.	Sosialisasi kebijakan kependudukan	59.700.000	51.490.000	86,24	100	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan	4	4	keg

Sumber : Disdukcapil 2016

Capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tabel kinerja output dan outcome adalah :

- 1) Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, dilakukan pembersihan dataganda antara data SIAK kabupaten/kota dan perekaman biometrik KTP-elektronik untuk mendapatkan data akurat pemilih untuk Pemilukada 2017;
- 2) Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan melalui :
 - a. Melalui media cetak dengan penyebaran leaflet;
 - b. Melalui media elektronik yaitu siaran radio yang disiarkan secara berkala pada Radio Primadona dan Radio Pakuba serta Talk Show di SBTV.;

- c. Melalui penyuluhan/sosialisasi langsung ke masyarakat di desa-desa
- 3) Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan dilaksanakannyarat koordinasi, dengan keputusan perlunya memperkuat mekanisme pencatatan peristiwa penting danpencatatan sipil agar kualitas database kependudukan (SIAK)semakin baik.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Roda 2 untuk operasional belum mencukupi;
2. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan belum memadai.
 - b. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih kurang.
 - c. Jumlah pegawai untuk pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan masih kurang dan.
 - d. Pencatat buku register akta Pencatatan Sipil masih kurang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki;
4. Upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK;
5. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil terutama akta kelahiran sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi data;
6. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan;

7. Kelengkapan sarana dan prasarana (Perangkat KTP-el), dan Jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Kabupaten belum optimal, sehingga menghambat pencapaian perekaman KTP-el kepada masyarakat dan Jaringan komunikasi data dari kecamatan ke kabupaten;
8. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukan (akta capil) pada seluruh desa, karena keterbatasan pagu indikatif yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap tahunnya.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki strategi pemecahan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kendaraan dinas yang ada untuk kegiatan operasinal Dinas;
2. Memanfaatkan tenaga yang ada secara maksimal, serta mengikut sertakan dalam bimbingan teknis keuangan dan Diklat/Pelatihan mengenai administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan sosialisasi akan pelayanan dokumen kependudukan ke Kecamatan, Desa/Kelurahan, agar cakupan layanan masyarakat meluas;
4. Berusaha mengusulkan penambahan personil melalui instansi yang berwenang serta terus berkoordinasi dengan kecamatan agar tidak memindahkan tenaga pengelola SIAK (operator kecamatan) yang sudah pernah mengikuti pelatihan SIAK;
5. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada aparat desa/kelurahan dan kecamatan yang menangani administrasi kependudukan dan pemutakhiran data base kependudukan untuk berbagai kepentingan;
6. Mempergunakan sarana dan prasarana pendukung SIAK yang ada semaksimal mungkin baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten;
7. Memanfaatkan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada.

4.1.12 URUSAN KETENAGAKERJAAN

a) Kondisi Umum

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar 69% berada dalam usia kerja (15 tahun ke atas). Rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengalami penurunan dari 70,75 % menjadi 67,13 %.

*Tabel. 4.33
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012 - 2016*

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	170.468	184.860	195.373	202.545	209.717
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	120.613	124.101	136.864	145.749	155.605
3.	Bekerja (jiwa)	117.762	119.533	133.222	141.011	150.689
4.	Menganggur (jiwa)	2.851	4.568	3.642	4.738	4.916
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,75 %	67,13 %	70,05%	71,96%	74,19%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,36	3,68	2,66	3,25	3,16
7.	Tingkat Kesempatan Kerja	97,64	96,32	97,33	96,75	96,84
8.	Bukan Angkatan Kerja	49.855	60.759	58.509	56.796	54.112
9.	Sekolah	11.158	15.141	17.465	18.135	18.981
10.	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.598	33.405	29.336
11.	Lainnya	3.421	5.886	5.446	5.256	5.765

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat

TPAK dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi dimulai dari 2012 sebesar 70,75%, untuk kemudian menurun di tahun 2013 sebesar 67,13%, sedangkan trend dari 2014-2016 TPAK Kabupaten Kotawaringin Barat naik dari 70,05% di tahun 2014, TPAK 2015 sebesar 71,96% dan kenaikan paling banyak di Tahun 2016 sebesar 74,19%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia

kerja (penduduk yang berusia diatas 15 tahun), semakin banyak jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan menganggur), maka akan besar pula TPAK, hal yang sama juga berlaku untuk sebaliknya.

Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai 2016 fluktuatif (naik turun). Untuk tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,36%, sedangkan untuk 2013 TPT sebesar 3,68%, 2014 TPT sebesar 2,66 % dan naik sebesar 3,25% untuk tahun 2015 dan turun menjadi 3,16 % untuk tahun 2016.

Berbagai faktor yang turut mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, diantaranya kenaikan jumlah penduduk usia kerja dan faktor perekonomian, terutama kaitannya dengan pengurangan tenaga kerja di perusahaan perkebunan, karena menurunnya harga komoditas perkebunan.

Tabel. 4.34
Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2013 - 2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Upah Minimum Regional (UMK) /Rp.	1.538.244	1.789.066	2.003.745	2.391.470
Kondisi Pasar Kerja					
2.	Pendaftaran	2.063	2.379	2.669	876
3.	Permintaan	367	522	346	177
4.	Pengiriman	261	510	210	92
5.	Penempatan	207	510	176	78

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2016

Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya %tase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya mencapai lebih dari 96,84 % untuk tahun 2016. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 3,25 % di tahun 2015 menjadi 3,16 % di tahun 2016. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan, agar target RPJMD untuk angka pengangguran sebesar 2 % pada tahun 2016 dapat tercapai.

Indikator kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat terlihat dari tabel 4.35 di bawah ini :

Tabel. 4.35
 Capaian Indikator Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2016

URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
Ketenaga kerjaan	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja buruh	$\frac{\text{Jlh pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif (42.698)}}{\text{Jlh pekerja/buruh (47.350)}} \times 100 \%$	90,18 %
	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (78)}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar (876)}} \times 100 \%$	8,90. %

Sumber : Dinas Nakertrans

Dari Tabel 4.33 terlihat bahwa untuk capaian dalam bidang ketenagakerjaan pelayanan kepesertaan jamsostek bagi pekerja buruh, terlihat bahwa jumlah buruh di Kab. Kotawaringin Barat yang mengikuti program jamsostek, sebesar 90,18 %.

Sedangkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan (data dari pengurusan kartu A.K.1/ pencari kerja yang tercatat). Dari 876 pencari kerja yang terdaftar, yang ditempatkan hanya 78 orang atau hanya 8,90 %.

Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya %tase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya mencapai lebih dari 96,84 % untuk tahun 2016. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 3,25 % di tahun 2015 menjadi 3,16 % di tahun 2016. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan, agar target RPJMD untuk angka pengangguran sebesar 2 % pada tahun 2016 dapat tercapai.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yang sebesar Rp.3.455.774.000 dengan realisasi sebesar Rp.3.327.058.808 atau 96,27 %. Adapun realisasi anggaran program

kegiatan Urusan Ketenagakerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.36
Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016*

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
Disnakertrans		3.455.774.000	3.327.058.808	96,27					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	736.012.950	696.169.238	94,58	99,83	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14		keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.043.660	86,96	100	Terlaksananya penyediaan perangkat untuk surat menyurat dan pengiriman pkt pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	310 50	310 35	Lbr Pkt
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	97.800.000	93.661.287	95,76	96,27	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 60	12 60	bln terbitan
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.000.000	5.851.100	97,51	98	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional	14 14	14 14	unit lbr.
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	196.578.800	191.968.250	97,65	100	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan dan petugas keamanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	12	bln
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.855.900	51.506.150	93,89	100	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor	12	12	bln
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.290.000	15.265.000	99,83	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31	31	unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	54.855.900	51.506.150	98,73	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	bln

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.119.750	45.079.750	99,91	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan, spanduk dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kerja administrasi dan tugas lainnya	12	12	bln
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12.750.000	12.750.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	pkt
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.700.000	25.405.000	98,85	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : - Komputer note book - printer	3 3	3 3	Unit unit
k.	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.015.000	4.015.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor - Dispenser - Jam - piring	2 1 3	2 1 3	Unit Unit Unit
l.	Penyediaan makanan dan minuman	30.180.000	24.635.000	81,62	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Makan minum tenaga kontrak - Snack rapat	1152 150	1152 150	OH/ Kotak Kotak
m	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	185.447.000	164.958.541	88,95	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	864.643.000,40	833.435.000	96,39	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	8	keg.
a.	Pembangunan gedung kantor	311.510.000,40	298.265.000	95,74	100	Terlaksananya penambahan daya listrik kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	Pkt
b.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	17.193.000	16.568.000	96,36	100	Tersedianya kendaraan operasional dinas: - Roda dua	2	2	unit

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
c.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	32.050.000	30.135.000	94,02	100	Tersedianya sapras gedung kantor: - Umbul-umbul - AC	70 1	70 1	m ² unit
d.	Pengadaan meubeleur	123.750.000	116.853.000	94,42	100	Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor	72	72	Buah
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	26.500.000	26.400.000	99,62	100	Terlaksananya pemeliharaan halaman kantor yang meliputi rehab kastin dan pemasangan paving	700 1	700 1	m ² pkt
f.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115.200.000	106.987.000	92,87	92,87	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	14	14	unit
g.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.920.000	6.920.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)	14	14	unit
h.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	231.520.000	231.307.000	99,90	100	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3 62	3 62	Pkt m ²
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	50.760.000	50.369.000	99,22	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50.760.000	50.369.000	99,22	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110	104	stel
4	Program fasilitas pindah/purnatugas PNS	5.000.000	0	0	0				
a	Pemulangan pegawai yang pensiun	5.000.000	0	0	0				
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	71.359.365	68.746.165	96,33	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1		keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	71.359.365	68.746.165	96,33	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	19	12	Keg.
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.044.000	3.004.000	98,68	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	3	2	keg.

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						dan keuangan			
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.492.000	1.488.000	99,73	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	buku
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	130.000	130.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	-	buku
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.422.000	1.386.000	97,46	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	buku
7.	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	993.934.000	981.315.250	98,73	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	3	3	keg.
a.	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	504.456.000	502.181.000	99,54	100	Terlaksananya penyediaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berupa : - Mesin jahit, mesin obras - Mesin molen, mesinpres batako,mesin pres - Peralatan pengrajin batako	1 1 1	1 1 1	pkt unit pkt
b.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	475.608.000	466.289.250	98,04	100	Terlaksananya pendikan pelatihan : - Bengkel Spd motor - Menjahit - Operator komputer - Processing - Salon - Security - Tata rias - Teknisi hp - Teknisi komputer	32 16 16 40 16 36 16 16 16	32 16 16 40 16 36 16 16 16	orang orang orang orang orang orang orang orang orang
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana LLK	13.870.000	12.845.000	92,60	100	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana LLK	1	1	thn.
8.	Program peningkatan kesempatan kerja	456.440.800	431.156.850	94,46	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kesempatan kerja	2	2	keg.
a.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	101.384.800	81.106.850	79,99	100	Terlaksananya penyusunan data informasi bursa kerja dan data base ketenaga kerjaan	100	100	%

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
b.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	355.056.000	350.050.000	98,59	100	Terlaksananya kegiatan padat karya produktif di pedesaan berupa pembuatan kolam ikan dan pelatihan tenaga kerja mandiri	2 20	2 20	TTG orang
9.	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	274.579.884,60	262.863.305	95,73	98,27	Terlaksananya kegiatan pada Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	4	4	keg.
a.	Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan	100.465.000	92.080.000	91,65	100	Terlaksananya penetapan upah minimum kabupaten	100	100	%
b.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	50.351.550	47.816.300	94,96	100	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan	100		%
c.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	93.518.000	93.124.505	99,57	100	Terlaksananya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan	100	100	%
d.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.245.334,60	29.842.500	98,66	100	Terlaksananya penyusunan laporan data obyek pengawasan ketenagakerjaan	100	100	%

Sumber : Dinas Nakertrans, 2016

C) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan;
2. Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang cukup signifikan tidak mampu diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia;

3. Produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah;
4. Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
5. Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (*community development*) maupun tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal.

Solusi

1. Mengupayakan peningkatan kualitas/kompetensi melalui pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan kerja Pemerintah (Loka Latihan Kerja/LLK) dan Swasta (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/LPKS), melalui perbaikan dan revitalisasi dengan sungguh sungguh kualitas LLK. Hal ini perlu dilakukan agar lulusan pelatihan LLK lebih berdaya saing. Selain itu, pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk akreditasi LPK, dilakukan secara berkelanjutan, agar terjadi sinergi antara pemerintah dan swasta dalam penanganan pengangguran khususnya dalam hal peningkatan kualitas ketrampilan pencari kerja. Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pasar kerja, telah ditempuh beberapa upaya, yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sertifikasi Uji Kompetensi dan penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
2. Secara berkelanjutan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuka perluasan kesempatan kerja serta pelatihan kewirausahaan;
3. Memantau atau mengukur produktivitas kerja dan terus mengupayakan pelatihan peningkatan produktivitas;
4. Perlu sosialisasi, implementasi dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan;
5. Mengembangkan jejaring pemagangan agar semakin banyak perusahaan dapat menerima peserta magang yang nantinya dapat berlanjut pada ikatan kerja permanen, atau setidaknya para peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang

sangat berharga yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar kerja.

4.1.13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

a) Kondisi Umum

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterjangkauan dan konsumsi pangan. Ketersediaan mengandung arti ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berasal dari pangan lokal, impor dan stok masyarakat. Distribusi pangan mengandung arti pangan tersedia bagi setiap rumah tangga sepanjang waktu dan di mana saja.

Keterjangkauan mengandung arti kemampuan fisik akses terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis. Sedangkan konsumsi pangan mengandung arti penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang, sehat, aman. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2012-2016, ketahanan pangan merupakan salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Upaya peningkatan ketahanan pangan yang dibangun dari peningkatan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sangatlah kompleks dan multi disiplin, sehingga menuntut peran serta pemerintah, masyarakat, dan segenap pemangku kepentingan.

Keberhasilan ketahanan pangan di suatu wilayah menjadi tolok ukur dan sumbangan bagi keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya memacu pembangunan ketahanan

pangan melalui program dan kegiatan yang benar-benar mampu memperkuat perwujudan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersediaanya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai *wage good*), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra/beras untuk keluarga sejahtera) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Rastra.

Keberhasilan Program Rastra ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Rastra Pusat. Pelaksanaan penyaluran Rastra oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Rastra dari Titik Distribusi (TD) sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari Titik Distribusi (TD) sampai ke RTS.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sasaran program Rastra tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kumai. Dengan jumlah RTS sebanyak 7.421 RTS, dengan harga Rp. 1.600 per kg netto di TD (titik distribusi).

Produksi padi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 22.178,04 ton. Produksi Padi tersebut bila dikonversi dalam bentuk beras dengan asumsi 1 kg padi menghasilkan 0,63 kg beras, maka produksi beras Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 14.016,54 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan, maka produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan beras seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dengan asumsi kebutuhan beras per kapita per tahun sebesar 121,76 kg dan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 286.699 jiwa (naik 3 % dari tahun 2015 sebesar 298.338 jiwa) maka kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 34.908,47 ton, masih kekurangan sebesar 20.891,93 (59,84 %). Upaya menekan defisit beras tersebut dengan peningkatan produksi tentunya menjadi pilihan utama.

Peningkatan produksi ini diupayakan melalui peningkatan luas areal tanam dan panen, peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas tanaman. Disamping itu juga perlu ada gerakan, kampanye maupun sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan dan substitusi pangan beras menjadi pangan non-beras seperti jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Ketiga komoditi ini sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian luas panen dan produksi jagung Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 1207 ha dan 4.771,01 ton, luas panen dan produksi ubi jalar sebesar 85 ha dan 780,54 ton, sedangkan luas panen dan produksi ubi kayu mencapai 358 ha dan 5.375,99 ton..

Produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 mencapai 2.192,27 ton, yang berasal dari daging sapi sebesar 625,86 ton, daging kambing/domba sebesar 10,04 ton, daging babi sebesar 86,53 ton dan daging unggas sebesar 1.469,84 ton. Berdasarkan angka produksi daging, apabila dikaitkan dengan kebutuhannya sebesar 6.278,71 ton (kebutuhan daging per kapita per tahun sebesar 21,90 kg), maka produksi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Apabila kebutuhan daging hanya dipenuhi dari daging sapi maka kekurangan daging tahun 2016 relatif besar yaitu sebesar 5.652,85 ton. Apabila kebutuhan daging tersebut disubstitusi dari ternak lainnya maka kekurangan dagingnya akan lebih kecil. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging, salah satunya dengan penggalakan kegiatan pengembangan peternakan sapi yang diintegrasikan dengan kebun kelapa sawit.

Dari kebun kelapa sawit dapat diambil daun dan limbah solidnya sebagai pakan sapi, sedangkan dari sapi bisa dihasilkan tenaga untuk mengangkut hasil sawit serta kotoran sapi bisa digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit. Beberapa perusahaan perkebunan besar dan kelompok tani telah merintis program integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi.

Kebutuhan telur sebagai sumber protein bagi masyarakat dapat dipenuhi dari telur ayam buras, telur ayam ras dan telur itik. Pada 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terdapat tiga pengusaha / investor yang mengembangkan peternakan ayam ras petelur, sehingga terdapat populasi ternak sebesar 50.794 ekor dengan produksi telur mencapai 466,88 ton.

Untuk telur ayam bukan ras dan telur itik dalam skala kecil sudah diusahakan sendiri oleh peternak di daerah. Produksi telur ayam buras dan itik di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 mencapai 491,07 ton. Dengan asumsi kebutuhan telur per kapita

per tahun sebesar 7,30 kg, maka kebutuhan produksi telur mencapai 2.092,91 ton. Sehingga produksi telur yang dihasilkan di daerah (957,95 ton) belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Upaya memenuhi kebutuhan telur tersebut, perlu menarik investor agar menanamkan investasi dalam bidang peternakan baik dalam budidaya maupun penyediaan sarana dan prasarannya seperti pembibitan, penyediaan pakan maupun usaha pengolahan dan pemasarannya. Selain daging dan telur, ikan juga merupakan salah satu sumber pangan hewani yang kaya akan protein.

Ikan dapat diperoleh dari penangkapan maupun budidaya. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 156 km sehingga potensi penangkapan ikan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga terdapat sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya.

Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua Kecamatan. Produksi perikanan pada tahun 2016 di Kabupaten kotawaringin Barat sebesar 14.792,7 ton. Apabila kebutuhan ikan per kapita per tahun sebesar 40,58 kg (Susenas 2012), maka secara total kebutuhan ikan (sebesar 11.634,25 ton) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 286.699 jiwa, sudah terpenuhi, bahkan mengalami surplus sebesar 3.158,45 ton.

Berdasarkan sistem ketersediaan pangan, produksi pangan di daerah berupa beras, daging dan telur, masih terjadi defisit atau tergantung dari luar daerah. Ditinjau dari sistem distribusi pangan, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana terdapat pelabuhan dan bandara yang memperlancar arus keluar masuk barang dan penumpang.

Arus barang dari Pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui pelabuhan “Panglima Utar” di Kecamatan Kumai, yang selanjutnya didistribusikan secara lancar ke kecamatan sampai tingkat desa. Namun, faktor cuaca buruk seringkali menghambat distribusi

pangan dari luar pulau. Arus bongkar muat dari Pelabuhan Pangkalan Bun dan Kumai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan barang pangan Kabupaten Kotawaringin Barat melainkan juga untuk kabupaten tetangga seperti Lamandau, Sukamara dan sebagian Seruyan.

Harga barang ditingkat rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif terjangkau sampai diseluruh pelosok wilayah kecamatan dan desa-desa. Terkait dengan stabilitas harga dan pasokan barang, harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal. Pasokan pangan di suatu wilayah masih dinyatakan dalam kondisi stabil jika terjadi penurunan pasokan pangan kurang dari 40%. Umumnya gejolak harga dan pasokan pangan biasa terjadi pada saat menjelang hari besar keagamaan dan cuaca ekstrim, dimana komoditi pangan yang harganya seringkali meningkat (mendorong inflasi) adalah daging ayam, cabe dan bawang merah.

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2016 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk. Hanya saja terjadi sedikit peningkatan pada kondisi tertentu yaitu pada saat memasuki bulan Ramadhan atau pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Untuk mengatur pasokan bahan pangan ke dalam suatu daerah/wilayah dapat berjalan normal, fungsi distribusi, transportasi, dan efisiensi distribusi perlu dikendalikan, sehingga mobilitas pasokan, baik keluar maupun masuk ke suatu daerah/wilayah, dapat berjalan normal dan terjadi keseimbangan antara produksi setempat dan pasokan bahan pangan dari luar.

Kemudian terkait dengan kondisi rawan pangan berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada satupun dari desa di wilayah Kotawaringin Barat yang masuk dalam kategori desa rawan pangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan.

Penentuan desa rawan pangan mendasarkan pada tiga indikator, yaitu Kurang Energi dan Protein, Kemiskinan, dan Produksi Pertanian/Pangan. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan

kelembagaan yang mantap, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Keragaman sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 102 orang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP), Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.446.097.160 dan terealisasi sebesar Rp 6.367.210.718 atau 85,51 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketahanan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.37
Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real · Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		1.218.652.000	873.486.548	71,67	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	533.119.400	477.037.329	89,48	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perangkat dan pengiriman paket untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran	30	24	pkt
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	52.800.000	33.229.106	62,93	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	1	1	thn
c.	Penyediaan jasa	1.000.000	899.000	89,90	100	Terlaksananya jasa pengurusan			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional					perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 4	1	1	unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	122.063.500	114.838.150	94,08	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta materai	1	1	thn
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.567.500	23.229.500	94,55	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1	1	thn
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	29.640.000	26.515.000	89,45	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan KP2KP berupa : ~ PC Komputer ~ Laptop/ notebook ~ printer ~ Wifi	14 14 15 1	14 14 15 1	unit unit unit unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	90.963.900	86.915.000	95,54	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	thn
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.262.500	61.975.000	93,52	100	Terlaksananya penyediaan berupa: ~ Barang cetakan ~ Fotocopy ~ Penjilidan	75 234.550 225	75 234.55 225 225	Buku Lbr Buku
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.750.000	2.750.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa : ~ Lampu neon ~ Stop kontak kabel sambung	40 7	40 7	buah buah
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.000.000	15.566.863	97,29	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Laptop	1	1	unit
k.	Penyediaan peralatan rumah tangga	11.500.000	11.500.000	100	100	Terlaksananya penyediaan berupa : ~ Bendera ~ Plister ~ Umbul-umbul	10 27 23	10 27 23	Buah Meter Buah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						Tiang			
l.	Penyediaan makanan dan minuman	32.990.000	23.410.000	70,96	100	Terlaksananya penyediaan berupa: ~ Uang makan & minum THL ~ Snack rapat	5 700	5 330	org Kotak
m.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	82.082.000	75.709.710	92,23	100	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke pusat, provinsi dan kabupaten	37	35	Org
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	152.110.000	113.071.367	74,33	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	3	keg.
a.	Pembangunan gedung kantor	11.500.000	11.336.350	98,57	100	Terlaksananya penambahan bahan daya listrik	1	1	Pkt
b.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	140.000.000	101.125.017	72,23	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 4 ~ Roda 2	1 18	1 18	unit unit
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	610.000	610.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ~ AC	1	1	unit.
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	133.000.000	133.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	66.500.000	66.500.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai dilingkungan kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan	133	133	stel
b.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	66.500.000	66.500.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian khusus di lingkungan kantor penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan	133	133	stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	61.000.000	56.826.200	93,15	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	61.000.000	56.826.200	93,15	100	Terlaksananya keikutsertaan aparaturnya untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	7	7	org
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.650.000	2.875.000	61,82	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.300.000	1.900.000	82,60	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	lap.
b.	Penyusunan pelaporan keuangan Semester	1.175.000	-	-	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semester	2	2	lap.
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.175.000	975.000	82,97	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	lap.
6.	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	334.772.600	90.676.651,95	27,08	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	5	5	keg.
a.	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	65.985.000	26.614.851,95	40,33	100	Terlaksananya fasilitasi rapat dewan ketahanan pangan dan rapat kelompok kerja DKP untuk menyusun laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	2 1	0 1	kali buku
b.	Pengembang an cadangan pangan daerah	143.930.000	11.927.000	8,28	100	Terlaksananya penyediaan cadangan pangan setara beras digudang	61.392	61.392	ton
c.	Pengembang an desa mandiri pangan	72.000.000	30.014.800	41,68	100	Terlaksananya kegiatan pelatihan LKD, Pertemuan tim pangan desa, pertemuan P2KP lama, sosialisasi & rapat	1	1	thn
d.	Pengembang an mutu & keamanan pangan	41.450.000	18.620.000	44,92	100	Terlaksananya sosialisasi & promosi keamanan pangan pertanian/ perkebunan	8	8	Kec.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
e.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.407.600	3.500.000	30,68	100	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	1	1	Buku lap.

Sumber : KP2KP

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DISTANAK (Urusan Ketahanan Pangan)									
VII .	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	2.515.755.050	1.869.955.900	74,33	82,76	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	4	4	keg.
1.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	138.000.000	111.202.000	80,58	81,05	Terlaksananya : ~ Terbinanya penanganan panen dan pasca panen ~ Pembinaan kelompok pengolahan hasil pertanian ~ Syukuran panen ~ Terlaksananya pameran produk pertanian dan peternakan ~ Pelayanan informasi harga pasar ~ pertemuan pelaku usaha pengolahan hasil tanaman pangan	6 6 3 2 12 1	6 6 3 2 12 1	Kec. Kec lokasi Kali bln kali
2.	Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija	991.082.400	986.162.750	99,50	100	Terlaksananya : ~ Pengembangan padi sawah ~ Pengembangan padi ladang ~ Pengembangan Ubi Kayu ~ Pendampingan pengembangan padi ~ Pendampingan pengembangan jagung ~ Pendampingan pengembangan kedelai ~ Monitoring dan pengumpulan data TPH Tk. Kec. dan Kab ~ Sosialisasi pengembangan tanaman pangan ~ Penyediaan Leaflet Tanaman Pangan	800 400 2 4.070 2.500 200 12 6 1.000	800 400 2 4.070 2.500 200 12 6 1.000	ha ha ha ha ha ha bln kec ekslpr

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
3.	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	1.310.469.950	707.364.650	53,97	50	Terlaksananya : ~ Penangkaran benih padi unggul di BB-TP ~ Pemurnian varietas padi unggul lokal ~ Pertemuan penangkar benih padi ~ Tersedianya BB Hortikultura ~ Terlaksananya pembangunan kantor dan sarana pengairan BB Hortikultura	20 2 1 10 2	20 2 1 - -	ha ha kali ha pkt
4.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	76.202.700	65.226.500	85,59	100	~ Terlaksananya pelaporan program/ kegiatan Dinas ~ Termonitor dan terkendalnya program/ kegiatan Dinas	1 1	1 1	thn thn

Sumber : Distanak

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DISBUN (Urusan Ketahanan Pangan)									
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	3.711.690.110	3.623.768.270	97,63	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	7	7	keg
a.	Penyusunan Data Base Potensi produk pangan	133.075.000	125.943.703	94,64	100	Terlaksananya : ~ Pengumpulan data statistik perkebunan ~ Monev SAI dan SIMAK BMN & pengumpulan target SPK sektor perkebunan	1 1	1 1	thn thn
b.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	52.173.000	52.074.800	99,81	100	Terlaksananya sosialisasipenangan pasca panen sawit	75	75	org
c.	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	54.925.000	50.901.905	92,67	100	Terlaksananya : ~ Sosialisasi integrasi sawit sapi ke PBS	100	100	%
d.	Pengembangan Pertanian pada lahan kering	3.069.910.000	3.055.488.000	99,54	100	Terlaksananya pemb./ peningkatan jalan usaha tani kawasan perkebunan	17	17	pkt
e.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	48.680.500	42.801.062	87,92	100	Terlaksananya sosialisasi Bahan Olah Karet yang ber SNI dalam rangka peningkatan mutu produk perkebunan	3 (75 org)	3 (75 org)	desa (75 org)
f.	Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	322.375.610	271.568.800	84,23	100	Terlaksananya perluasan kebun kelapa sawit rakyat	30	30	ha
g.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	30.551.000	24.990.000	81,79	100	Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	6	6	lap

Sumber : Disbun

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu segera mendapat perhatian pada ketahanan pangan adalah :

1. Berkurangnya luas lahan untuk pengembangan pangan akibat alih fungsi lahan;

2. Pertumbuhan produksi pangan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk menjadi tidak sebanding sehingga mengakibatkan sulit tercapainya swasembada pangan;
3. Keterbatasan SDM yang menangani bidang Ketahanan Pangan akibat status kelembagaan yang tidak sesuai dengan undang-undang;
4. Masih sulitnya mengubah kebiasaan pola tanam dan ketergantungan pola konsumsi pangan yang bertumpu pada pangan beras saja;
5. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat masih sangat tergantung dari luar.
6. Distribusi Rastra di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan lancar sebagaimana mestinya, hanya sebagian kecil di beberapa desa pada musim hujan agak terlambat pendistribusian akibat jalan sulit dilewati.
7. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan karena setiap tahun data selalu berubah;
8. Kualitas Rastra di beberapa desa masih kurang baik;
9. Terdapat beberapa kecamatan yang masih mengalami tunggakan pembayaran Rastra.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Menetapkan regulasi dibidang alih fungsi lahan sehingga terlindungi lahan produktif (khususnya lahan pangan);
2. Meningkatkan status kelembagaan Ketahanan Pangan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
3. Melanjutkan usaha diversifikasi dengan menyediakan alokasi dana APBD;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan diversifikasi tanaman pangan dengan pemanfaatan pekarangan untuk dijadikan sumber pangan (*buffer stock*) di musim paceklik.
5. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD agar menganggarkan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rastra ke wilayah desa dan kecamatan agar permasalahan tunggakan, data RTS yang tidak sesuai dapat terselesaikan;

6. Menginventarisasi data RTS yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

4.1.14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a) Kondisi Umum

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005 – 2025 dan dijabarkan didalam RPJMN 2015 – 2019 dihadapkan pada tiga isu strategis yaitu : (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Oleh sebab itu, isu strategis dalam Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah membangun kualitas manusia yang merupakan sasaran yang dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin, agar laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan aspirasi, pengalaman dan kebutuhan masing-masing sehingga mendapatkan keadilan dan kesetaraan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indek Pembangunan Gender (IPG), Indek Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperlukan, sedangkan IPG mengukur hal sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan.

IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2014 meningkat dari 69,51 menjadi 70,14 sedangkan IPG Kotawaringin Barat Tahun 2013-2014 meningkat dari 86,67 menjadi 90,04, pada tahun 2014 Kalimantan Tengah tercatat sebagai Propinsi dengan IDG tertinggi dengan capaian 77,90 sedangkan Kotawaringin Barat IDG

Tahun 2014 mencapai sebesar 64,48. Keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh peningkatan semua komponen IDG terutama peran perempuan dalam parlemen yang naik dari 15,56 % menjadi 26,67 %.

Tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik akses maupun layanan terhadap Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan, pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya. Berikut ini adalah tabel capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 4.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2016

No	Indikator	Capaian 2015	2016		
			Tar get	Realisasi	% Realisasi terhadap target
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	33	53.288	2.398	4,50
4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	1,30	53.288	9.624	18,06
5.	Rasio KDRT	22,22	34	34	100
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	86,01	60	34	56,67

Sumber : BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.

3.355.946.300 dan terealisasi sebesar Rp 2.995.724.303 atau 89,26 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.38
Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
BPPKB		2.714.470.250	2.388.012.410	87,97	100				
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	614.183.150	497.638.823	81,02	97,86	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Penyediaan jasa surat menyurar	500.000	249.000	49,80	60	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	10	6	Pkt
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	26.592.000	22.053.187	82,93	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	Pkt
c.	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	3.900.000	2.019.700	51,78	86,85	Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional - Roda 2 - Roda 4	19 2	14 2	Unit Unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129.428.150	118.092.650	91,24	100	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan - materai - buku cek - Tenaga Kontrak - Pengelola Keuangan	450 2 4 5	450 2 4 5	Lbr Buku org org
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.229.700	48.642.000	93,13	100	Terjaminnya kebersihan dan keindahan kantor - pegawai clening servis dan - bahan pembersih	3 1	3 1	Org Pkt

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.560.000	10.450.000	98,96	100	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dilingkungan BPPKB berupa : - Printer yang terpelihara - Note Book yang terpeliharaan - Komputer yang terpeliharaan	5 5 7	5 5 7	Unit Unit Unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	28.878.300	28.877.600	99,99	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Pkt
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.420.000	24.420.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penjilidan - Foto Copy - Cetak Blangko Pendataan dan Laporan KB - Cetak Amplop	30 83750 4.800 35	30 77.91 4.800 35	Exemp. lembar Lmbr Pak
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	750.000	750.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan Kantor - Piting Lampu - Lampu Pijar - Lampu Hias/Taman - Kabel Rool Terminal	5 15 3 2	5 15 3 2	Buah Buah Unit Unit
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	111.024.900	40.300.000	36,29	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa : - Printer - Proyektor - Komputer PC	4 1 2	4 1 2	Unit Unit Unit
k.	Penyediaan makanan dan minuman	35.900.000	17.955.000	50,01	62,84	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat - Mkn, minum Cleaning Servis - Mkn dan Mnum Jg Malam	792 356 350	792 356 350	OH OH Kotak

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						- Kudapan (Snack) - Mkn dan Minum Sopir	264	264	OH
I.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190.000.100	183.829.686	96,75	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	Bln
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	745.647.300	679.925.856	91.18	100	Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai			
a.	Pembangunan Gedung Kantor	328.500.000	322.419.000	98,14	100	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana aparatur - Penyelesaian Pembangunan Aula - Penambahan Ruangan - Penambahan daya Listrik Dari 5.500 Ke 13.200 Watt - Pemasangan Jaringan Inst. Listrik Aula.	1 1 1 1	1 1 1 1	Pkt Pkt Pkt Pkt
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	180.000.000 (DAK KB)	178.750.000	99,30	100	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal - Roda 2	10	10	Unit
c.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	68.875.000	68.453.000	99,38	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : - Bendera Merah Putih - Lemari Arsip - Filing Kabinet - Meja Kerja - Kursi Kerja s III - Kursi Rapat - AC	2 2 1 7 1 45 1	2 2 1 7 1 45 1	Buah Unit Unit Buah Buah Buah Unit
d.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72.522.300	45.375.000	62,56	100	Terlaksananya pemeliharaan Gedung dan Pagar Kantor serta kenyamanan suasana kerja - Pengecatan gedung kantor - Pengecatan pagar kantor	260 160	260 160	M2 M2
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	92.750.000	62.428.856	67,30	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						operasional: - BBM R.4 - BBM R.2 - Suku Cadang R.2 - Suku Cadang R.4 - Jasa Service R.2 - Jasa Service R.4	2 19 10 2 15 2	2 19 10 2 15 2	Unit Unit Unit Unit Unit Unit
f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000	2.500.000	83,33	83,34	Terlaksananya Peralatan gedung kantor: -AC	6	5	Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	62.850.000	59.673.000	94,94	100	Tercapainya kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	62.850.000	59.673.000	94,94	100	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan kantor BPPKB	67	64	Stel
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.000.000	37.554.400	79,90	100	Tercapainya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur	1	1	Keg
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	47.000.000	37.554.400	79,90	100	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur : - Bintek Pengelolaan Keuangan - Bintek Peningkatan SDA	6 3	5 0	org org
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2.000.000	1.834.000	91,70	100	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	4	4	Buku
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	920.000	92	100	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	2	2	Buku
b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.000.000	914.000	91,40	100	Terlaksananya pembuatan laporan Keuangan akhir tahun	2	2	Buku
6.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender	431.804.900	389.555.350	90,21	100	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender	2	2	Keg

[illegible]

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	dan Pendampingan Korban KDRT					SDM. Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT			
b.	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	45.290.000	40.980.000	90,48	100	Terlaksananya: - seminar KDRT dan sosialisasi sistem - pencatatan dan pelaporan KDRT	50 75	50 75	Org Org
8.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	735.694.900	654.650.981	88,98	100	Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			
a.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	599.282.400	544.792.583	90,90	100	Terlaksananya Pelatihan Bagi Organisasi Perempuan : - Operasional dan Program kerja GOW - Operasional Program Kerja DWP - Seminar Perempuan - Pelatihan Etika kepribadian - Hari Perempuan	12 12 100 35 1	12 12 100 35 1	Bln Bln Org Org Pkt
b.	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	136.412.500	109.858.398	80,53	100	Terlaksananya kegiatan: - TOT bagi fasilitator PPRD - Pelatihan PPRD bagi tim Teknis ARG dan Vocalpion SKPD - Pembentukan Forum Perempuan	25 60 1	25 60 1	Org Org Pkt

Sumber : BPPKB

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Realisasi	(%)
			Realisasi	(%)					
BPMD		641.476.050	607.711.893	94,73	100				
1.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	641.476.050	607.711.893	94,73	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1	1	keg.
a.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	641.476.050	607.711.893	94,73	100	Terlaksananya pelatihan bagi organisasi perempuan	5	5	Keg

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan berkaitan dengan pengarusutamaan gender masih pada tahap sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi *stakeholder* terkait khususnya bagi aparat perencana pada tingkat SKPD.

Selanjutnya guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan *trafficking* telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Jumlah kasus KDRT yang sudah tertangani baik yang berkaitan dengan perempuan maupun anak sampai saat ini mencapai 31 kasus yang tersebar pada 6 Kecamatan.

c) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang perlu mendapat penanganan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pengertian Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender
2. Kurangnya pemahaman dan komitmen Pejabat Daerah mengenai PUG dan PPRG sehingga kelembagaan yang menangani PUG lebih bersifat formalitas dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
3. Masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak terkait dengan masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak;
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksanaan PPRG sebagian SKPD masih kurang memadai.
5. Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
6. Belum semua SKPD mempunyai data terpilah sebagai data pendukung penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).

7. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah.
8. Tidak maksimalnya pembinaan organisasi-organisasi perempuan
9. Kabupaten Kotawaringin Barat belum maksimal mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kotawaringin Barat menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).
10. Belum Optimalnya dan Fungsi Peran Lembaga P2TP2A.
11. Belum tersusun Profil Perempuan, Data gender dan data terpilah Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Perlu penyusunan grand design Peran Perempuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Belum Optimalnya sosialisasi dan penyuluhan tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesejahteraan gender, menggiatkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat;
2. Perlu Sosialisasi peraturan-peraturan /Undang-undang Kota Layak Anak (KLA), Forum Anak Daerah (FAD), Konvensi Hak Anak Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak ,Partisipasi Anak dalam Pembangunan
3. Sosialisasi yang berkelanjutan tentang undang-undang KDRT dan undang-undang perlindungan anak dan perempuan, kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dan perempuan serta mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap anak dan perempuan;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG diseluruh SKPD dengan mengikuti antara lain Bintek, Diklat dan sebagainya mengingat PUG harus di Implementasikan disetiap sektor pembangunan Daerah
5. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi secara terus menerus tentang implementasi PUG kepada semua pihak dan perlu disusun peraturan bupati tentang pedoman PPRG

6. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor untuk menangani korban kekerasan dan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencegah KDRT
7. Dilakukan pembinaan organisasi dalam bentuk kegiatan bintek kepemimpinan perempuan, diklat kader perempuan, bintek berorganisasi perempuan, bintek peran perempuan dalam pembangunan dan kegiatan Dharma Wanita
8. Optimalisasi peran lembaga didukung dengan tim terpadu, adanya Mou dengan lembaga terkait, disediakan biaya operasional P2TP2A dan dana untuk tenaga pendamping korban KDRT
9. Pembuatan Buku Profil Perempuan, Buku Data gender dan Buku Data terpilah Kab Kobar
10. Kajian Grand Design peran perempuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan penanganan KDRT dan Perlindungan di semua wilayah Kab Kobar
12. Penguatan Kota Layak Anak Kabupaten (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa Layak Ramah Anak (DELANA).

4.1.15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a) Kondisi Umum

Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu keuntungan bagi pembangunan, dimana tersedianya sumberdaya manusia yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pembangunan. Namun jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak terkontrol serta tidak disertai dengan kualitas SDM yang baik hanya akan menambah beban bagi pemerintah. Oleh karena itu diperlukannya tindakan pencegahan dan pengontrolan terhadap jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang tepat dilakukan adalah dengan mengontrol jumlah kelahiran penduduk dan jumlah migrasi. Pengontrolan terhadap jumlah kelahiran dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan program keluarga berencana

(KB). Dengan program ini diharapkan tercipta penduduk dengan jumlah dan kualitas yang ideal bagi pembangunan.

Program KB yang dulu pernah dinyatakan berhasil kini digalakkan kembali dengan mengusung slogan lama, yakni dua anak cukup. Program KB adalah salah satu program penting dalam upaya mencapai keluarga sejahtera yang memiliki sasara untuk mengendalikan lalu pertumbuhan penduduk dengan cara mengendalikan angka kelahiran. Tujuan akhirnya bermuara pada mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Lahirnya program KB terutama dilatarbelakangi tingginya angka kelahiran. Program KB sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan efektif dan berhasil maksimal karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk.

Aspek yang harus dipantau dalam proses pengontrolan terhadap jumlah kelahiran adalah aspek usia perkawinan dan aspek penggunaan alat kontrasepsi. Pada aspek usia perkawinan, yang perlu diperhatikan adalah usia perkawinan dari perempuan. Semakin muda seorang perempuan kawin maka semakin besar pula peluang mereka untuk menghasilkan lebih banyak anak.

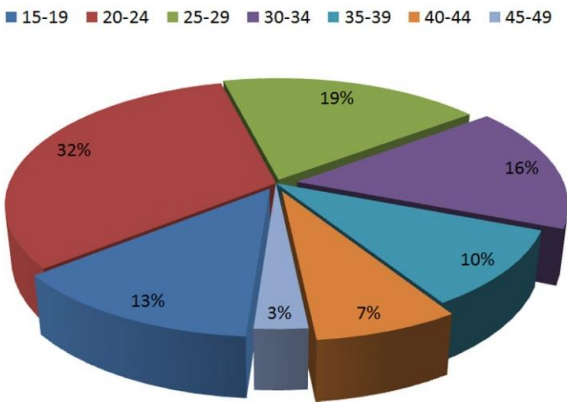
Akseptor KB Baru Kabupaten Kotawaringin Barat bulan januari – Desember 2016 sebesar 7.532 atau 72,25% dari target sebesar 10.425 akseptor. Hal ini tidak tercapai karena target di tetapkan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Tengan Terlalu tinggi, tidak sesuai dengan sisa Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru yang belum ber-KB. Sedangkan untuk akseptor KB aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat (angka CPR) adalah sebesar 65% dari Pasangan Usia Subur sebesar 45.852 telah menunjukan CPR Kabupaten Kotawaringin Barat lebih tinggi dari pada target RPJMN yaitu sebesar 65% Untuk angka TFR Kabupaten Kotawaringin Barat masih Berkisar 2,8 dari target nasional sebesar 2.15

Sementara itu, jika ditilik dari usia dari usia perkawinan pertama untuk perkawinan umur 19 tahun keatas menunjukan kondisi yang cukup baik, ternyata perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung Untuk Menikah Pada umur 15-19 tahun yaitu sebesar

12,99, umur 20-24 tahun = 32,02, umur 25-29 tahun = 18,51, umur 30-34 tahun = 16,35, umur 35-39 tahun = 10,09, umur 40-44 tahun = 7,3. umur 45-47 tahun keatas = 2,73. Akan tetapi perlu di perhatikan juga masih terdapat 4,84% wanita usia kurang dari 15 tahun yang menikah untuk pertama kali. Padahal semakin muda umur saat perkawinan, maka peluang untuk terjadinya kematian ibu dan bayi juga semakin besar di sebabkan masih belum siap dan matangnya si ibu untuk melahirkan anak.

Untuk lebih jelasnya, persentase usia kawin pertama di kabupaten Kotawaringin Barat dapat terlihat seperti diagram dibawah ini :

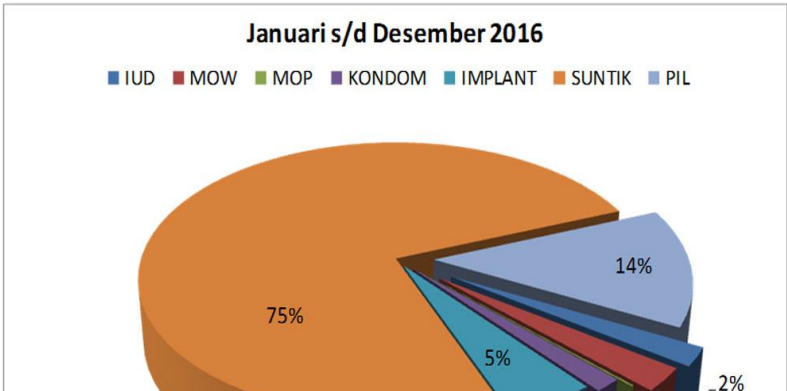
Diagram 4.1
PERSENTASE USIA WANITA KAWIN PERTAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2016



Sumber : Hasil Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Dari pelaksanaan Pelayanan KB selama tahun 2016 seperti tersebut diatas maka secara keseluruhan dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2016 dapat disampaikan perolehan peserta KB Baru sebanyak 7.532 Peserta atau 72,25 % dari Target sebesar 10.425 Peserta. Untuk lebih jelasnya Pencapaian KB baru Per Mix Kontrasepsi dapat dilihat seperti dalam diagram di bawah ini :

Diagram 4.2
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
Januari s/d Desember 2016

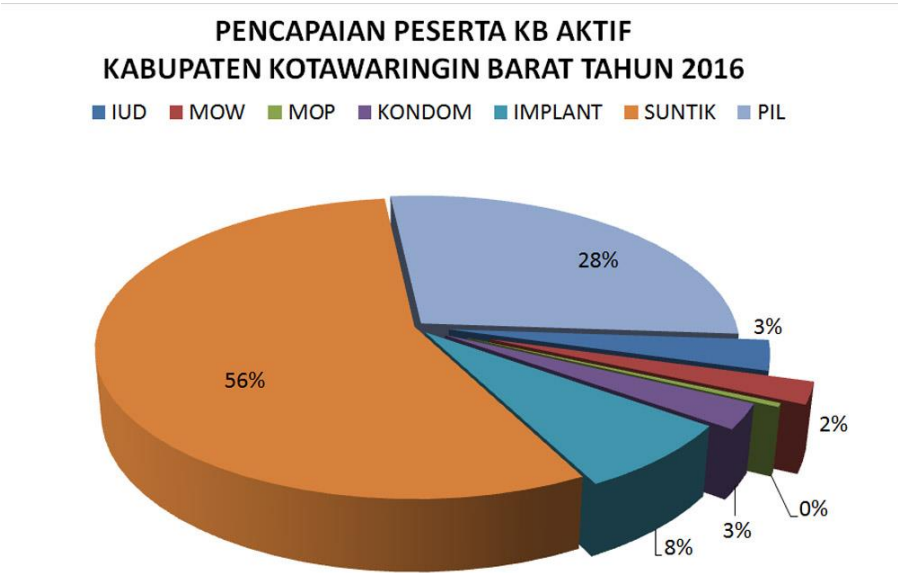


Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan untuk kesertaan KB Aktif sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 32.643 KB aktif atau 96,10 % dari Pasangan Usia Subur sebanyak 45.852. Untuk lebih jelasnya pencapaian peserta KB aktif per mix kontrasepsi sampai dengan Desember Tahun 2016 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Ket : di Kec. Arut Utara tidak ada petugas PKB. Sejak April 2016 petugas PLKB atas nama Suraya, Mansur SH, dan Asmiril SH, ditarik Pemda ke tenaga struktural untuk laporan kesertaan KB aktif Wilayah Arut Utara tidak ada yang melaporkan.

Diagram 4.3



Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Meski demikian, untuk menyukseskan program KB perlu dilakukan sedikit upaya evaluasi untuk dapat menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) jumlah satu keluarga dari 2,8 anak menjadi 2,1 sesuai dengan slogan program KB.pada tahun 2016 2 (dua) Anak Cukup.

Tabel 4.39
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2016

No	Indikator	Capaian 2015	2016		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3	100%
2.	Rasio akseptor KB	84%	80,6	71,19	74.70
3.	Cakupan peserta KB aktif (orang)		34.011	32.643	95,98
4.	Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I	100%	33.951	32.643	96,15
5	Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II		6 % 30,5 % 63,5 %	4.226 18.452 23.991	9,06 39,54 51,41

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kobar

Berdasarkan pendataan sampai dengan bulan Desember 2016, jumlah peserta KB aktif sebanyak **33.916 atau 68,41%** dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah **49.578**.

Tabel 4.40
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2015-2016

No	Peserta KB Aktif	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	IUD	638	1.015	159,09	530	1.054	198,9
2	MOP	128	140	109,38	83	134	161,4
3	MOW	1.110	758	68,2	933	762	81,7
4	IMPLANT	1.739	3.175	182,5	2.581	2.463	95,4
5	SUNTIK	21.738	19.175	88,20	20.748	18.261	88
6	PIL	8.399	8.610	102,51	8.449	9.085	107,5
7	KONDOM	515	1.044	202,7	627	884	141
	Jumlah PA	33.916	33.916	98,71	33.951	32.643	96,10
	Jumlah PUS	48.505	48.505		45.852	45.852	100
	% PA/PUS	69,92	69,91	68,40		71,19	

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 750.491.750 dengan realisasi sebesar Rp. 499.330.750 atau 66,53%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.41
Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
BPPKB		750.491.750	499.330.750	66,53	87,89				
1	Program pelayanan kontrasepsi	451.495.000	274.488.000	60,79	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pelayanan kontrasepsi - Pelayanan KB Gratis - Pelayanan KB Perusahaan - PelayanannKB TNI - Pelayanan KB hari Perempuan - Pelayanan KB Ikiawan - Evaluasi Program KB - Deklarasi Perang Terhadap Narkoba - Pemahaman Tentang Reproduksi Usia Dini Perkawinan - Pertemuan Pembentukan Kualisi Kependudukan - Kegiatan KIE KB Kreatif	7 6 3 2 6 1 120 60 50 1	7 6 3 2 6 1 120 60 50 1	Desa Perusahaan Keg. Keg. Keg. Keg. Org. Org. Org. Keg
a.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	451.495.000	274.488.000	60,79	100	Telaksananya Pemasangan Kontrasepsi - Pelayanan KB Gratis - Pelayanan KB Perusahaan - PelayanannKB TNI - Pelayanan KB hari Perempuan - Pelayanan KB Ikiawan - Evaluasi Program KB - Deklarasi Perang Terhadap Narkoba - Pemahaman Tentang Reproduksi Usia Dini Perkawinan - Pertemuan Pembentukan Kualisi Kependudukan - Kegiatan KIE KB	7 6 3 2 6 1 120 60 50 1	7 6 3 2 6 1 120 60 50 1	Desa Perusahaan Keg. Keg. Keg. Keg. Org. Org. Org. Keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						Kreatif			
2.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	195.311.750	158.832.750	81,32	80	Terwujudnya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat			
a.	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	195.311.750	158.832.750	81,32	80	Terlaksananya Promosi Khiba : - Pembinaan / Sosialisasi GSI - Pembinaan PIK remaja - Lomba Pik remaja di sekolah - Pengadaan BKB KIT - pameran Pembangunan	20 75 18 5 1	20 75 - 5 1	Ong. Org. Kel. Pkt. Pkt.
3.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	103.685.000	66.010.000	63,66	50	Tercapainya sasaran kegiatan pada program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga			
a.	Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	103.685.000	66.010.000	63,66	100	Terlaksananya kegiatan pada program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga - Pelatihan Kelompok Tribina tingkat Kecamatan - Seminar Parenting	120 100	120 100	Org. Org.

Sumber : BPPKB

c) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terjadi pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

1. Terbatasnya tenaga yang menangani urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dibandingkan dengan luas cakupan pelayanan;
2. Menurunnya komitmen dan dukungan berbagai pihak dalam mensukseskan pelaksanaan program KB;
3. Peran serta dari kader dalam pengelolaan KB masih sebatas tingkat kelurahan/ desa, sesuai dengan dukungan dana dari APBD yang masih sangat terbatas, sedangkan dana dari pusat sudah dihentikan sehingga menghambat program keluarga berencana;

4. Masih rendahnya pengetahuan remaja akan pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja;
5. Kurangnya advokasi dan promosi program keluarga berencana;
6. Meningkatnya kasus HIV dan AIDS di kalangan remaja dan ibu rumah tangga;
7. Meningkatnya kasus remaja (Kehamilan yang tidak diinginkan, HIV dan AIDS, Kekerasan dalam pacaran, Napza, Gizi remaja, Aborsi tidak aman, Pernikahan dibawah umur;
8. Jabatan fungsional teknis PKB/PLKB tidak memenuhi SPM 1 desa 2 PKB/PLKB untuk Kabupaten Kotawaringin Barat baru ada 27 orang PKB/PLKB untuk menangani 94 desa/kelurahan, sehingga kekurangan PKB/PLKB minimal 19 orang;
9. Jangkauan pembinaan KB sangat luas sedangkan untuk kegiatan pelayanan tidak tersedia kendaraan khusus KB(NUYAN)
10. Setiap tahun BPPKB selalu menerima dropping alat kesehatan, obat dan kontrasepsi dari APBN melalui BKKBN Propinsi, sedangkan tempat penyimpanan khusus tidak ada;
11. PKB/PLKB tidak maksimal melaksanakan tugas pembinaan di wilayah desa binaan karena jangkauan desa yang jauh dan terpencar;
12. PKBLKB, PPKBD, Klinik KB memerlukan pemantauan dan pembinaan berkala dari BPPKB;
13. Kurangnya pembinaan terhadap PIK Remaja/Mahasiswa (PIK R/M);
14. Kurangnya promosi program KKBPK
15. Tidak terpantaunya dengan baik UPPKS;
16. Masih kurangnya maksimal informasi HIV/AIDS kepada kelompok remaja reproduksi;

Atas permasalahan tersebut solusi yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah tenaga penyuluh KB agar program KKBPK disosialisasi sampai seluruh desa di Kotawaringin Barat;
2. Membangun dan menguatkan kembali komitmen bersama dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan program KB melalui kegiatan Pembangunan Kampung KB serta penguatan Kelompok Masyarakat Peduli KB;

3. Publikasi program keluarga berencana melalui media cetak dan elektronik;
4. Sosialisasi HIV dan AIDS, promosi PMTCT, pemberdayaan keluarga dan Kesehatan Reproduksi Remaja
5. Peningkatan advokasi dan KIE KRR, pelatihan *peer educator* PIK KRR serta fasilitasi FKPKRR;
6. Pemberdayaan bidan desa sebagai tenaga lapangan program KB dengan menyediakan anggaran operasional;
7. Pengadaan Mobil Pelayanan (MUYAN)/mobil pengangkut akseptor KB;
8. Pembangunan gedung penyimpanan obat (ALKON) KB;
9. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Roda 2 untuk PKB/PLKB;
10. Pembinaan berkala terhadap PKB/PLB, PPKBD dan klinik KB, penilaian/lomba prestasi PKB/PLB, PPKBD dan klinik KB tingkat Kabupaten, Tribina ,UPPKS dan pengiriman untuk lomba TK provinsi dan pusat
11. Evaluasi PIK R/M yang sudah ada, pembentukan PIK R/M Baru, mengadakan lomba-lomba PIK R/M unggulan tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, Pemilihan Duta Mahasiswa Genre tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, Sosialisasi Pendewasaan Usia perkawinan;

4.1.16. URUSAN PERHUBUNGAN

a) Kondisi Umum

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, karena sektor perhubungan merupakan mata rantai tatanan transportasi nasional, regional dan lokal yang merupakan pendukung dan penggerak mobilitas orang, barang dan jasa dalam menunjang dinamika pembangunan perekonomian.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat serius dalam membangun sektor perhubungan. Pembangunan sektor perhubungan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah, membuka keterisoliran suatu wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi oleh sungai, moda

transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah transportasi angkutan darat dan angkutan sungai.

Sedangkan untuk menghubungkan antar pulau dilayani dengan transportasi laut dan udara. Mengingat Kotawaringin Barat merupakan daerah yang sedang berkembang maka semua moda transportasi tersebut sangat memungkinkan untuk dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa indikator pembangunan dibidang perhubungan sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.42
Jumlah Sistem JaringanTransportasi Tahun 2015 - 2016

No	Uraian	Capaian 2015	Tahun 2016 (Akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Jumlah Bandara (Buah)	1	1	1	100
2	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	3	4	4	100
3	Terminal	4	4	4	100
4	Halte	12	12	12	100
5	Jaringan Trayek AKDP	0	0	0	0
6	Jaringan Trayek Perdesaaan	9	9	9	100
7	Dermaga LLASDP	19	22	22	100
8	Trayek LLASDP	4	4	4	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.43
Jumlah sarana pendukung keselamatan lalu lintas

No	Uraian	Capaian 2015	Tahun 2016 (Akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Rambu Lalu lintas darat	699	700	700	100
2	APILL	5	5	5	100
3	RPPJ	13	13	13	100
4	Traffic Cone	58	58	58	100
5	Paku Jalan	0	0	0	0
6	Tenda Portable	4	4	4	100
7	Rambu lalu lintas sungai	94	94	94	100
8	Baju Pelampung	166	166	166	100
9	Delinator	45	45	45	100
10	Warning Light	4	4	4	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

*Tabel 4.44
Jumlah Kendaraan Yang di Uji*

No	Jenis Kendaraan	Capaian 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1	Mobil Penumpang	114	90	80	100
2	Mobil Bus	225	225	238	100
3	Mobil Barang	6.009	6.009	6.541	100
4	Speed boat	34	67	67	100
5	Kelotok	64	41	41	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun tahun 2015 sebanyak 5.964 sedangkan di tahun 2016 sebanyak 7.109 Artinya, pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami peningkatan sebesar 84 % dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Adapun faktor –faktor yang mengakibatkan pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami peningkatan di sebabkan :

1. Jumlah penumpang yang mengalami peningkatan
2. Bertambahnya armada pesawat. Dari 4 maskapai menjadi 5 maskapai
3. Bertambahnya rute penerbangan pesawat.
4. Adanya pergantian armada kapasitas pesawat kecil menjadi kapasitas pesawat yang lebih besar (boeing)

Dengan adanya beberapa faktor tersebut, maka pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami peningkatan sehingga daya angkut penumpang dari 2 (dua) kali penerbangan menjadi 1 (satu) kali penerbangan.

Sedangkan Program Pengembangan Bandara Baru tetap dilaksanakan guna percepatan pembangunan bandara baru melalui program peningkatan pelayanan angkutan dan program pembangunan prasara dan fasilitas perhubungan serta study kelayakan bandara baru.

Jalan Khusus Industri

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan besar tersebut. Di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menggunakan jalan umum aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perkebunan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan. Perda ini mengatur Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di ruas jalan umum.

1. Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
 - a. Memiliki muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 (delapan) ton;
 - b. Memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - c. Konvoi kendaraan/angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan.
2. Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batu bara, bijih besi dan zirkon;
3. Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel Oil (PKO)*, *Slab* dan *Lumb*;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
 - a. Hasil hutan;
 - b. Material bangunan;
 - c. Sembilan bahan pokok.

Panjang Jalan Khusus adalah 197,34 Km, yang terdiri dari :

1. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) dengan panjang 53,41 Km;
2. Main Road Barat (Rangda–Sei Rangit Jaya) dengan panjang 51,80 Km;

3. Ruas Semanggang–Pabrik Pulp dengan panjang ruas 18,80 Km;
4. Jalan penghubung main road timur dan barat yakni :
 - a. Ruas Semanggang – Sei rangit Jaya dengan panjang 25,90 Km;
 - b. Ruas Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo dengan panjang 8,43 Km;
 - c. Ruas Jalan masuk dari Seruyan dengan panjang 39 Km.

Pembangunan Jalan Khusus yang telah dikerjakan oleh PT. Korintiga Hutani dengan rincian sebagai berikut :

1. Main Road Timur (Nanga Mua–Semanggang) sepanjang 28,44 Km;
2. Jalan di Area Konsesi HTI PT. Korintiga Hutani sepanjang 24,97 Km;
3. Ruas Semanggang – Pabrik Pulp sepanjang 18,80 Km;
4. Pembangunan 3 buah jembatan pada main road timur (Nanga Mua-Semanggang) dan Ruas Semanggang – Pabrik Pulp, yakni :
 - a. Jembatan Sungai Arut 40 meter;
 - b. Jembatan Sungai Jampau 15 meter;
 - c. Jembatan Sungai Hijau 15 meter.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 8.667.887.500 dan terealisasi sebesar Rp 8.069.173.582 atau 93,09 %. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.45
Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
Dishubkominfo		8.667.887.500	8.069.173.582	93,09	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.715.840.200	1.535.940.907	89,51	93.33	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	327.000	21,80	100	Terlaksananya pendistribusian surat menyurat dan pengiriman pkt dinas	1	1	tahun
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	79.800.000	58.741.003	73,61	100	Terlaksananya pembayaran jasa rekening telpon, listrik, surat kabar dan internet	1	1	tahun
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	18.700.000	8.647.900	46,24	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi: ~ Roda 2 ~ Roda 4 ~ Roda 6	12 4 1	12 4 1	unit unit unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	589.330.800	509.235.950	86,40	100	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan di lingkungan Dishub, Komunikasi dan Informatika	1	1	tahun
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	251.807.600	230.065.250	91,36	100	Terlaksananya penyediaan tenaga jaga malam, petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	13 1	13 1	orang tahun
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	31.300.000	18.460.000	58,97	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja yang memadahi berupa : ~ PC Komputer ~ Komputer Notebook ~ Printer ~ HT (Handy Talkie)	16 14 16 8	16 14 16 8	unit unit unit unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	67.532.800	67.532.800	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	pkt
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	204.445.000	202.218.150	98,91	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa STK, Buku Uji, Tanda Uji, Plat Uji dan karcis retribusi	1	1	tahun
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10.420.000	10.340.000	99,23	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk mendukung aktivitas pelayanan dan penerangan gedung kantor	1	1	tahun

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
j.	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000	5.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Alat prasmanan ~ Karpet/ambal	1 2	set lbr	Unit Unit
k.	Penyediaan makanan dan minuman	117.270.000	87.837.000	74,90	100	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat yang memadai	1	1	tahun
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	338.734.000	337.535.854	99,64	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	tahun
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.003.904.600	1.707.637.370	85,21	90	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11	11	keg.
a.	Pembanguna n gedung kantor	1.103.395.600	1.099.230.000	99,62	100	Terlaksananya pembuatan: ~ Peningkatan musholla kantor dinas ~ Peningkatan gedung kantor tahap II ~ Pembangunan gedung arsip ~ Peningkatan jalan dan gapura kantor ~ Pembangunan pagar di jln HM Rafi' I P.Bun ~ Pemasangan keramik, instalasi listrik dan pengecatan gedung kantor	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	pkt pkt pkt pkt pkt pkt
b.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	140.500.000	134.600.000	95,80	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ~ Papan nama bidang/ruangan ~ Tiang Umbul-umbul ~ Pengadaan Air Conditioner (AC) ~ Papan nama struktur organisasi ~ Papan pengumuman/white board ~ Papan pengumuman/absen si pejabat ~ Sound syatem	20 20 10 1 2 1 1	20 20 10 1 2 1 1	buah buah Unit Buah Buah Buah set
c.	Pengadaan peralatan gedung kantor	18.000.000	10.500.000	58,33	100	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor untuk menunjang			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						pelaksanaan kerja berupa : ~ Mesin potong rumput	3	3	unit
d.	Pengadaan mebeleur	57.000.000	55.800.000	97,89	100	Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor untuk menunjang pelaksanaan kerja berupa : - Meja kerja ½ biro - Kursi kerja - Kursi tunggu gdng pengujian KB	20 30 4	20 30 4	Buah Buah set
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	107.584.000	12.714.000	11,81	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin : - gedung kantor dinas	180	180	m2
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	415.000.000	238.099.370	57,37	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas roda enam, roda empat, roda dua dan speed boat	1	1	tahun
g.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000	2.350.000	94	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ~ AC ~ Kipas angin	5	5	unit
h.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	17.500.000	13.090.000	74,80	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ~ Genset ~ Mesin potong rumput	1	1	tahun
i.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	142.425.000	141.254.000	99,17	100	Tersedianya gedung kantor yang lebih baik	1	1	pkt
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	86.700.000	81.400.000	93,88	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	66.500.000	61.200.000	92,03	100	Tersedianya pakaian seragam dinas harian pegawai yang memadai	95	95	stel
b.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	20.200.000	20.200.000	100	100	Tersedianya pakaian seragam dinas operasional lapangan dan pengujian kendaraan bermotor yang memadai	20	20	stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	68.000.000	57.403.305	84,41	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang	68.000.000	57.403.305	84,41	100	Tersedianya tenaga / SDM yang berkualitas	1	1	tahun

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	undangan								
5.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	2.130.506.700	2.105.287.500	98,81	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	1	keg.
a.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	2.130.506.700	2.105.287.500	98,81	100	Terlaksananya penyusunan dokumen Pra study kelayakan (FS) dan (FS) pelabuhan samudra, study tatanan transportasi lokal (tatralok), study terminal barang, study dokumen lingk. Hidup terminal naitai suka, study dok. Lingk. Hidup dermaga indera sari	1	1	pkt
6.	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	185.490.000	172.717.000	93.11	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	1	1	keg.
a.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	185.490.000	172.717.000	93.11	100	Terlaksananya rehabilitasi terminal Naitai Suka	1	1	pkt
7.	Program peningkatan pelayanan angkutan	378.150.000	359.748.000	95,13	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pelayanan angkutan	1	1	tahun
a.	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	378.150.000	359.748.000	95,13	100	Tersedianya honor penertiban lalu lintas angkutan jalan darat maupun sungai	1	1	tahun
8.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	290.500.000	287.519.000	98,97	98,97	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	1	keg.
a.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	290.500.000	287.519.000	98,97	98,97	~ Terlaksananya Pembangunan halte bus/ taxi ~ pembuatan pagar terminal sei kafitan	1 1	1 1	Buah pkt
9.	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	828.356.000	811.572.000	97,97	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1	1	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	75.200.000	74.307.000	98,81	100	Terlaksananya pemeliharaan dan pemindahan warning light	1	1	buah
b.	Pengadaan marka jalan	753.156.000	737.265.000	97,89	100	Terlaksananya pengecatan marka jalan ruas jalan sutan syahrir	2568	2568	M1
10.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	196.200.000	178.004.500	90,72	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1	1	keg.
a.	Pembanguna n balai pengujian kendaraan bermotor	196.200.000	178.004.500	90,72	100	Terlaksananya pembangunan pagar gedung pengujian kendaraan bermotor, pembangunan km/wc, pemindahan menara jaringan internet SIMPKB	1	1	pkt
11.	Program pembanguna n dan rehabilitasi/ pemeliharaa n prasarana dan fasilitas LLASDP	784.240.000	771.944.000	98,43	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP	1	1	keg.
a.	Pembanguna n dermaga/ gedung kantor LLASDP	784.240.000	771.944.000	98,43	100	Terlaksananya : ~ penimbunan lahan terminal bongkar muat dan pemb. Reservoir pelabuhan roro ~ penimbunan dan siring dermaga LLASDP indera sari ~ rehabilitasi kantor LLASDP dermaga kumai hulu	1 1 1	1 1 1	Pkt Pkt Pkt

Sumber : Dinas Perhubungan

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan perhubungan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana lalu lintas untuk mendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban berlalu lintas;
- 3) Terealisasinya pendapatan retribusi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.450.150.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 1.518.751.000 atau 100,73 %

- 4) Secara umum meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pada sektor perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada urusan perhubungan yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
2. Terbatasnya infrastruktur pelayanan umum sektor perhubungan;
3. Study Kelayakan percepatan pembangunan bandara baru terus dilaksanakan dengan Study Master plan / Rencana Induk yang dilaksanakan tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 tidak ada program / kegiatan pada DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat, adapun dasar percepatan pembangunan bandara baru antara lain :
 - a. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
 - c. Permenhub Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
 - e. Keputusan Dirjen Perhubungan Nomor SKEP.120/VI/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara;
 - f. Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE.09/XI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara.

Sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas ada beberapa tahapan yang wajib dilalui dalam pembangunan Bandar Udara Baru, yaitu :

- a. Studi Kelayakan : untuk memperoleh tingkat kelayakan;
- b. Studi Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara : sebagai dasar penetapan lokasi oleh Menteri Perhubungan;

- c. Studi Rencana Teknik Terinci (RTT) : sebagai rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandara;
- d. Studi AMDAL : kelestarian lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengusulkan pembuatan/penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
2. Mengajukan usulan-usulan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas;

Tahapan pembangunan bandara baru akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a) Kondisi Umum

Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, telah dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, dengan konsep *e-gov* tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraksi melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Kepemilikan dan akses terhadap media informasi dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang.

Dalam era globalisasi saat ini, berbagai informasi dapat diakses melalui semua media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Namun perangkat

komputer dan situs internet masih belum populer di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai komputer dan penduduk yang mengakses internet. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, persentase penduduk yang mengakses internet masih sangat rendah yaitu hanya 11,23 %, sementara yang tidak mengakses internet sebesar 88,77 %. Oleh sebab itu, agar kebutuhan informasi untuk masyarakat tetap terpenuhi, Bagian Humas Setda Kab. Kotawaringin Barat juga menyediakan informasi Pembangunan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Offline melalui kerjasama media elektronik dan media cetak, penerbitan media internal berupa tabloid Warta Kobar, Bulletin Marunting Batu Aji, kalender tahunan serta media informasi digital lainnya yang telah di distribusikan ke seluruh kecamatan dan desa di Kab. Kotawaringin Barat.

Tabel 4.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015-2016

No.	Indikator	Satuan	2015	2016		
				Target	Realisasi	(%)
1.	Ketersediaan web site pemda	Unit	16	37	16	43
2.	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital	Keping CD,	• 62 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	• 100 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	• 62 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	98
3.	Ketersedian bulletin, buku dan poster pemerintah daerah, foto, spanduk, baliho	Eksemplar, buku, lembar	• 20 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 buletin • 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) • 150 Buah Photo Presiden dan Wakil Presiden RI • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 279 m2 baleho kegiatan • 98 lembar spanduk kegiatan • BinteK jurnalistik 1 kali	• 25 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 Buletin • 5000 Tabloid Warta Kobar (5 edisi) • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 453 m2 baleho kegiatan • 150 lembar spanduk kegiatan • 5 buah baleho kecamatan • Gatering Wartawan • Bimtek Jurnalistik dan kehumasan	• 20 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 buletin • 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 279 m2 baleho kegiatan • 98 lembar spanduk kegiatan • 5 buah baleho kecamatan • - kali • 1 kali	85

4.	Terselenggara pameran/ekspo	Kali	1 kali	1 kali	1 kali	100
5.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Media	7 Media	5 media	5 media	100
6.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/Media Online	Media	6 Media	4 Media (2 Radio lokal swasta, SBTN dan TVRI)	4 media	100
7	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak	Media	7 media	7 media (5 media harian, 1 mingguan, 1 liputan khusus)	7 media	100
8	Siaran Keliling /Publikasi Keliling	Kali	48 kali	60 kali	47 kali	78

Sumber : Bagian Humas dan Bagian Komunikasi dan PDE Setda Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Humas dan Santelda & PDE serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.084.243.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.982.651.056 atau 96,70%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.47
Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real .	Sat.
			Realisasi	(%)					
SEKRETARIAT DAERAH		2.763.017.500	2.662.041.556	96,34	100				
1.	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	147.612.500	114.874.056	77,82	99,2	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1	1	keg.
a.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	147.612.500	114.874.056	77,82	99,2	Terlaksananya penyediaan tenaga dan sarana komunikasi informasi yang handal untuk keperluan Pemerintah daerah	1	1	tahun
2.	Program kerjasama informasi dan media massa	2.615.405.000	2.547.167.500	97,39	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program kerjasama	2	2	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real .	Sat.
			Realisasi	(%)					
						informasi dan media massa			
a.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	559.150.000	500.315.000	89,47	100	Tersedianya dokumentasi kegiatan Pemkab. Kotawaringin Barat dalam bentuk : • Foto • Bulletin marunting batu aji • Kalender duduk • Kalender Dinding • Himpunan pidato bupati • DVD kegiatan pemkab. • Majalah Digital • DVD kilas kobar 2016 • Spanduk • Baliho • Baliho di Kecamatan • Pameran Photo • Warta Kotawaringin Barat (5 edisi) • Bimtek Jurnalistik dan kehumasan SKPD	25 500 500 500 150 100 350 350 160 453 5 1 3000 1	20 500 500 500 150 62 350 350 78 571 5 1 3000 1	album Eksp Eksp Eksp Buku DVD DVD DVD lbr m2 buah Kali Eksp Kali
b.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	2.056.255.000	2.046.852.500	99,54	100	Terselenggaranya penyebaran informasi melalui : - Langganan koran dan majalah - Publikasi keliling - Talk show di radio - Talk Show di TV - Kontrak Media cetak dan elektronik dan Media Nasional Online	5 60 99 48 12	5 47 99 48 12	media kali kali kali media

Sumber : Sekretariat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	DINAS PERHUBUNGAN	321.225.500	320.609.500	99,80	100				

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000	9.384.000	93,84	100	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan jaringan kominfo yang lebih baik	1	1	keg.
a.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	10.000.000	9.384.000	93,84	100	- Tersedianya kegiatan monitoring, pembinaan dan pengawasan BTS (Base Transceiver Station) menara informasi se Kab. Kobar 1 Tahun	1	1	Pkt
2.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo	311.225.500	311.225.500	100	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo	1	1	keg.
a.	Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	311.225.500	311.225.500	100	100	Terlaksananya : - Perenc. Peny. data base sebaran menara telekomunikasi di kab. Kobar	1	1	Pkt

Sumber : Dinas Perhubungan

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut di atas dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Komunikasi Dan Informatika sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya kegiatan peliputan dalam bentuk foto dan DVD Video kegiatan sebagai bahan penyebarluasan informasi serta dokumentasi daerah.
- 2) Tersedianya media informasi offline dalam bentuk Himpunan Pidato Bupati, Majalah Digital, Tabloid Warta Kobar, Buletin Marunting Batu Aji, Kalender Dinding, dan Spanduk serta Baleho kegiatan.
- 3) Tersedianya sarana penyebaran informasi melalui media elektronik (siaran di radio dan televisi) dan media cetak sehingga informasi tentang pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat sampai ke semua lapisan masyarakat;
- 4) Tersedianya sistem informasi berbasis *website*, dengan adanya sistem informasi berbasis *website* ini maka informasi tentang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diakses melalui internet secara *on-line*;

- 5) Pengembangan Web Kabupaten Kotawaringin Barat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pemerintah daerah seperti :
- Tersedianya Konten ULP untuk mengumumkan Pelelangan dan Pemenangnya;
 - Tersedianya Konten Arsip PERDA/Peraturan Daerah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi peraturan daerah;
 - Tersedianya Konten Artikel, Berita dan Forum Komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Meskipun kampanye mengadopsi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah cukup masif, Inisiatif pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi belum begitu menjadi arus utama. Kendala terbesar pada aspek ini adalah faktor kemampuan SDM aparat dan faktor budaya (kultur).
2. Belum adanya beberapa faktor penunjang untuk penerapan pendayagunaan TIK, termasuk regulasi dan kelembagaan yang memungkinkan implementasi TIK secara optimal.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung *e-government*;
4. Kurangnya koordinasi antara unit penyedia data fungsional dengan pusat data;
5. Belum terbangunnya aplikasi program yang strategis dan terintegrasi;
4. Belum tersedia Master Plan Sistem Teknologi Informasi untuk Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk merencanakan, membangun, dan mengembangkan teknologi informasi kedepan;
5. Kurangnya dukungan unit penyedia data dari masing-masing satker dengan pusat data;
6. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi (TI) yang tersedia.
7. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis dibidang kehumasan.

8. Belum maksimalnya peran aktif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyampaikan data dan informasi kegiatan untuk disebarluaskan.

Atas dasar permasalahan tersebut maka solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Mengupaya pengarusutamaan cetak biru (blue print) Pendayagunaan Teknologi Informasi Kabupaten Kotawaringin Barat, bahkan apabila memungkinkan menetapkan Perda/Perbup agar bisa diimplementasikan secara optimal.
2. Membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung *E-goverment*;
3. Meningkatkan koordinasi antara unit penyedia data dengan pengelola pusat data atau server;
4. Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Menyiapkan Master Plan Sistem Teknologi Informasi dan sistem pendukung agar komunikasi dan informatika bisa didayagunakan sebagai instrumen reformasi birokrasi dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi dalam rangka mendukung Penyajian data dan informasi yang cepat dan akurat.
7. Penambahan serta peningkatan kemampuan dan keahlian SDM yang menguasai IT.
8. Penambahan dan peningkatan keahlian SDM di bidang Kehumasan.
9. Peningkatan koordinasi dan hubungan antar lembaga/instansi/unit satuan kerja dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

4.1.18. URUSAN PERTANAHAN

a) Kondisi Umum

Urusan pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi salah satu pelaksanaan urusan yang penting, mengingat urusan pertanahan merupakan urusan yang sangat sensitif yang apabila tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya akan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Pelaksanaan urusan pertanahan

bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan penataan pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki kewenangan dibidang pertanahan karena semua kewenangan di bidang pertanahan menjadi urusan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi vertikal yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan baik di pusat maupun di daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah melakukan fasilitasi terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya melakukan koordinasi dengan badan Pertanahan Nasional guna untuk kepentingan pembangunan daerah.

Tabel 4.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015-2016

No.	Indikator	satuan	2015	2016		
				Target	Realisasi	%
1.	Luas tanah bersertifikat	Hektar	-	1.113.218	-	-
2.	Luas tanah yang belum bersertifikat	Hektar	-	875.871	-	-
3.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	bidang	445	62	16	25,81%
4.	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	bidang	342	-	-	-
5.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	bidang	820	-	-	-
6.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan pemkab yang sudah bersertifikat	bidang	445	-	-	-
7.	Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ke tiga	bidang	-	-	-	-
8.	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	Ijin	-	-	-	-
9.	Konflik pertanahan yang terjadi	kasus	3	3	3	100%
10.	Konflik pertanahan yang terselesaikan	kasus	3	3	3	100%

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan dan Perlengkapan Setda

Pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan,

Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PPIB Revisi XI).

Adapun pada tahun 2016 bagian pemerintahan telah melakukan survey lapangan baik dari Tim Pusat maupun dari Tim provinsi untuk melakukan idetifikasi kawasan gambut. Pada PPIB Revisi X kawasan gambut di kabupaten kotawaringin barat seluas 98.448 Ha terbagi di wilayah 3 kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama. Sedangkan untuk tahun 2016 setelah diterbitkannya PPIB Revisi XI luasan kawasan gambut Kabupaten Kotawaringin Barat telah berkurang menjadi 84.308 Ha. Artinya ada pengurangan sekitar 14.140 Ha zona kawasan gambut di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Administrasi Pemerintahan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.360.850.000 dengan realisasi sebesar Rp. 112.702.400 atau 4,77 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.49
Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
1.	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.360.850.000	112.702.400	4,77	4,77	Terpenuhinya keperluan tanah untuk pembangunan daerah			
a.	Keg. Penataan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.360.850.000	112.702.400	4,77	4,77	Terlaksananya penyediaan : • Pengadaan tanah Masjid agung • Laporan hasil survey areal gambut berupa peta dan SK pelepasan kawasan gambut	1 1	- 1	Persil dok
2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Keg. Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	88.279.100	61.279.100	69	100	Dokumen fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	3	3	Keg

Sumber : Sekretariat Daerah

c) *Permasalahan dan Solusi*

Permasalahan urusan pertanahan yang perlu mendapat penanganan segera adalah :

- 1. Sistem administrasi pertanahan yang belum efektif dan efisien;
- 2. Belum seluruh tanah asset pemda memiliki sertifikat;
- 3. Belum lengkapnya data-data asset pertanahan pemerintah daerah.
- 4. Pada Anggaran Perubahan Sub Bagian Pertanahan mendapatkan tambahan Anggaran Rp. 2.000.000.000, untuk kegiatan pembebasan tanah. Namun, kegiatan tersebut belum terlaksana dan akan dilaksanakan di tahun 2017.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

- 1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
- 2. Meningkatkan pengamanan aset tanah pemda dengan sertifikasi dan pemasangan plang kepemilikan;
- 3. Menginventarisir kembali data-data aset tanah pemda yang ada dalam penguasaan masing-masing SKPD;
- 4. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan sistem pelaksanaan pengadaan tanah.

4.1.19. **URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

a) *Kondisi Umum*

Kesatuan bangsa memiliki arti adanya rasa kebersamaan di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kondisi politik dalam negeri dipengaruhi oleh adanya kemajemukan masyarakat, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan juga golongan. Kemajemukan masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa, tetapi dapat juga menjadi ancaman atau potensi penyebab konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Begitu juga dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yang notabene memiliki heteroginitas masyarakat yang tinggi, apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi konflik yang berbasis SARA. Pada tahun 2016, di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terjadi unjuk rasa di beberapa tempat. Unjuk rasa yang terjadi terdiri atas permasalahan sosial ekonomi dan konflik pertanahan.

Meskipun demikian, unjuk rasa berjalan dengan relatif tertib dan damai. Aksi unjuk rasa biasanya dilakukan terjadi di depan kantor Bupati dan kantor DPRD. Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan sinergis antara Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan demikian, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat diminimalisir.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di Kotawaringin Barat. Usaha itu di antaranya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog Antar-Umat Beragama/ Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan program pendidikan politik masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah, Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas dan LSM, Forum Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan Perempuan, serta Sosialisasi Undang-Undang Parpol bagi Partai Politik peserta Pemilu 2016. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dilakukan agar terwujudnya kerjasama yang baik dan persatuan antar Parpol, LSM dan Ormas. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara rutin dan penyampaian sosialisai peraturan yang baru terkait Parpol, LSM dan Ormas seperti penyaluran Bantuan Keuangan untuk Parpol, Pemberian Dana Hibah untuk LSM dan Ormas.

Tabel 4.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015 – 2016

No.	Uraian	Satuan	Capaian	2016	%

			2015	Target	Realisasi	
1.	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	kegiatan	3	3	3	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	2	1	1	100
3.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,ORMAS dan OKP	kegiatan	1	-	-	-
4.	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian potensi linmas dan hak-hak sipil	kegiatan	3	3	3	100

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat, 2016

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif dan represif. Proses penegakan peraturan daerah dilakukan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat, pemantauan apakah masyarakat sudah memahami peraturan yang disosialisasikan.

Kemudian, untuk masyarakat yang melanggar, dilakukan operasi non-yustisi dengan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Selanjutnya, perlakuan terhadap pelanggar ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu pelanggar diproses secara hukum.

*Tabel 4.51
Pelanggaran Perda di KabupatenKotawaringin Barat
Tahun 2015 – 2016*

No.	Jenis Pelanggaran	JumlahPelanggaran (kali)		+/(-)	Ket
		Tahun 2015	Tahun 2016		
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	3	43	+	
2.	Minuman Keras (Miras)	80	61	-	
3.	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum	39	81	+	
4.	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	6	13	+	
5.	Premanisme	0	0		
6.	Judi Togel	1	0	-	
7.	Mucikari	14	9	-	
8.	KTP	9	4	-	
9.	Ngelem Fox	1	6	+	
10.	Pengamen	0	22	+	
11.	Waktu kunjung warnet	0	1	+	
12.	Pelajar bolos sekolah	0	1	+	

	Jumlah	153	241		

Sumber : PPNS Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan Tabel 4.49 di atas dapat dilihat jenis pelanggaran yang meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah PSK liar/prostitusi/pasangan mesum, PKL, GEPENG, ngelem fox dan pengamen.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Sekretariat Daerah (Setda) dengan total Pagu Anggaran anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.770.339.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.189.138.760 atau 91,41,86 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.52
Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
Kesbangpolinmas		4.004.263.000	3.565.991.415	89,05	100	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	703.377.500	622.787.974	88,54	100	Pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	0	0	91,66	Pengiriman paket	12	12	bln
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	103.200.000	88.326.287	85,58	100	Rekening listri, air, telepon, surat kabar/majalah dan internet	12	12	bln
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.450.000	1.804.500	52,30	100	Perijinan kendaraan dinas/operasion al roda 4 (empat) dan 2 (dua) ~ Roda 2 ~ Roda 4	11 1	7 1	unit unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	116.397.800	109.174.050	93,79	99,87	Honor pengelola keuangan, kontrak pengadminstras	12	12	bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						ian umum dan tenaga kontrak keamanan kantor			
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.561.600	26.029.900	85,17	100	Honor Tenaga kontrak petugas kebersihan dan kebun serta pengadaan peralatan rumah tangga, kebersihan dan bhn pembersih	1 1	1 1	org thn
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28.300.000	21.100.000	74,55	82,22	pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa: ~ Printer ~ Komputer notebook ~ Komputer PC ~ Mesin tik ~ Pemeliharaan jaringan internet	13 9 12 4 1	13 9 12 4 1	unit unit unit unit thn
g.	Penyediaan alat tulis kantor	59.098.200	57.524.845	97,33	100	Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	1	1	thn
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.750.500	26.686.500	99,76	100	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	1	thn
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.000.000	4.750.000	79,16	100	penyediaan bahan komponen instalasi listrik: - Bola lampu - Baterai - Baterai microphone - Terminal listrik - kabel listrik - lampu taman	76 10 5 10 100 10	76 10 5 10 100 10	lampu kotak buah buah M buah
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	87.025.000	81.093.000	93,18	100	Peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa: ~ flashdisk ~ scanner ~ Tele lensa kamera ~ komputer/PC ~ memori kamera ~ printer ~ Hardisk eksternal ~ mouse	10 2 1 6 1 3 2 5	10 2 1 6 1 3 2 5	bh unit buah unit buah unit buah buah
k.	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000	2.970.000	99	100	peralatan rumah tangga (pengadaan kulkas)	1	1	unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
l.	Penyediaan makanan dan minuman	11.520.000	8.560.000	74,30	100	minum harian pegawai kontrak	3	3	org
m.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.474.400	194.768.892	85,62	90	perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar kota dan dalam kota	1	1	tahun
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	197.920.000	142.511.686	72	100	Cakupan keg. pada Prog. Peningkatan sarpras aparatur	7	7	keg.
a.	Pembangunan gedung kantor	10.600.000	10.307.000	97,24	100	Pembelian pintu pagar besi dan pintu gedung kantor	6	6	buah
b.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	20.000.000	18.599.800	92,99	100	pembelian kendaraan dinas roda 2 (dua)	1	1	unit
c.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.300.000	10.230.000	83,17	100	pembelian perlengkapan gedung kantor -liser -umbul-umbul	60 12	60 12	M buah
d.	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.490.000	5.472.500	99,68	100	Pembelian Air conditioner (AC)	1	1	unit
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	147.200.000	96.502.386	65,55	100	service/penggantian suku cadang dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional : ~ Roda 2 ~ Roda 4	11 1	11 1	unit unit
f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.330.000	1.400.000	60,08	100	pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa: ~ AC split ~ Mesin potong rumput	3 1	3 1	unit unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	41.000.000	37.000.000	90,24	100	Cakupan kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.500.000	18.000.000	87,80	100	Pakaian dinas harian beserta perlengkapannya	41	41	stel
b.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.500.000	19.000.000	92,68	100	pakaian hari-hari tertentu	41	41	stel
4	Program fasilitasi pindah/purnatugas PNS	17.500.000	6.390.000	36,51	100	Pelaksanaan kegiatan pada Program fasilitasi pindah/purnatugas PNS			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Pemulangan pegawai yang pensiun	17.500.000	6.390.000	36,51	100	Pemulangan pegawai pensiun	1	1	org
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	83.000.000	44.819.750	53,99	100	Pelaksanaan kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimtek implementasi peraturan per-UU	83.000.000	44.819.750	53,99	100	Bimtek implementasi peraturan per-UU	20	20	org
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.500.000	3.474.750	99,27	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.
a.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.250.000	1.245.250	99,62	100	penyusunan laporan keuangan capaian dan ikhtisar SKPD	5	5	buku
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.000.000	989.250	98,92	100	penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10	10	buku
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.250.000	1.240.250	99,22	100	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5	5	buku
7.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.558.060.000	1.555.738.500	99,85	100	Pelaksanaan kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3	3	keg.
a.	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.080.000.000	1.079.898.000	99,99	100	pendataan satuan anggota linmas dan bantuan transport serta uang saku	1.160	1.160	org
b.	Pembangunan pos jaga ronda	458.060.000	457.020.500	99,77	100	Pembangunan pos jaga linmas dengan lokasi: ~ Kel.baru ~ Kel.kumai hilir ~ Kel.pangkut	3 3 2	3 3 2	unit unit unit
c.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000	18.820.000	94,10	100	Laporan hasil monitoring	6	6	buku
8.	Program pemeliharaan kantrantib mas dan pencegahan tindak kriminal	553.640.000	491.618.800	88,79	95,22	Pelaksanaan kegiatan pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan	1	1	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						tindak kriminal			
a.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	553.640.000	491.618.800	88,79	95,22	kerjasama operasional dibidang pemeliharaan keamanan	1	1	tahun
9.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	242.400.000	194.137.155	80,08	95	Terlaksananya kegiatan pada Program pengembangan wawasan kebangsaan	2	2	keg.
a.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	151.775.000	114.812.155	75,64	94,27	Pertemuan forum pembauran kebangsaan (FPK)	200	200	org
b.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	90.625.000	79.325.000	87,53	90	kegiatan ikrar bersama anak bangsa dan HSP	40	40	org
10.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	285.350.000	250.027.300	87,62	100	Pelaksanaan kegiatan pada Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	2	2	keg.
a.	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	252.050.000	217.127.300	86,14	94,25	Kegiatan forum-forum keagamaan dan study banding tokoh lintas agama	25	25	org
b.	Seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	33.300.000	32.900.000	98,80	100	Pelaksanaan rakor kesbang se-kalteng di kab.ktw.barat	84	84	org.
11.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	150.128.000	93.900.000	62,54	100	Pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	1	1	keg.
a.	Penyuluhan Pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	135.128.000	79.400.000	58,75	92,97	Penyuluhan tentang bahaya praktek prostitusi dan penertiban/razia	400	400	org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						prostitusi (pekat)			
b.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000	14.500.000	96,66	100	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10	10	buku
12.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	168.387.500	123.585.500	73,39	88	Terlaksananya kegiatan pada Program Pendidikan Politik Masyarakat	4	4	keg.
a.	Penyuluhan kepada masyarakat	120.450.000	94.098.000	78,12	87,04	Penyuluhan kepada masyarakat tentang pend. politik	150	150	org
b.	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	26.237.500	15.487.500	59,02	93,38	Terwujudnya persatuan antar parpol ormas/LSM dan Generasi muda	12 40	12 40	Parpol Ormas/ LSM
c.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.700.000	14.000.000	64,51	76,15	Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan	6	6	Kec.

Sumber : Kesbangpolinmas

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
SATPOL PP		2.752.101.000	2.610.599.345	94,85	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	627.061.300	612.767.976	97,72	98,65	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	26.994.000	25.350.736	93,91	94,85	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bln
b.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000	1.500.000	100	100	Terlaksananya jasa service AC	12	12	bln
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	5.323.500	4.121.900	77,42	78,65	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	kendaraan dinas/ operasional					operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4 ~ Roda 6 (Truk)	6 4 1	6 4 1	unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	95.834.000	92.140.000	96,14	97,61	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan	12	12	bln
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.686.900	22.256.000	98,10	99,85	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1 1	1 1	org thn
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.200.000	10.180.000	99,80	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ~ Printer ~ Komputer notebook ~ Komputer PC	 10 6 8	 10 6 8	 unit unit unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	25.202.000	25.178.100	99,90	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	thn
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.290.000	28.800.000	98,32	99,70	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan rutin kantor	1	1	thn
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik berupa : ~ Lampu LED ~ Battery ~ Lampu bolam	12	12	bln
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.874.800	101.500.000	97,71	98,95	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Spray gas air mata ~ kalkulator ~ jam ~ bendera ~ umbul-umbul ~ pigura ~ AC ~ kipas angin	 30 4 8 5 20 20 2 5	 30 4 8 5 20 20 2 5	 bh bh bh bh bh bh unit unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						~ Papan informasi ~ Komputer desktop ~ Komputer notebook ~ Printer ~ Kursi rapat ~ Tv	5 1 2 2 10 2	5 1 2 2 10 2	bh unit unit unit bh bh
k.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000	1.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk menunjang kelancaran kerja	5	4	bh
l.	Penyediaan makanan dan minuman	148.740.000	144.380.000	97,06	98,25	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian anggota Banpol PP	12	12	bln
m.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	153.416.100	153.361.240	99,96	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	803.202.500	778.723.000	96,95	97,85	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.
a.	Pembangunan gedung kantor	2.500.000	2.500.000	100	100	Terlaksananya pengadaan instalasi listrik	1	1	pkt
b.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	387.620.000	387.620.000	100	100	Terlaksananya pembelian kendaraan dinas roda 4 (empat)	1	1	unit
c.	Pengadaan peralatan gedung kantor	37.696.500	37.500.000	99,47	100	Terlaksananya pembelian meja piket/meja kerja dan sofa	3	3	set
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	294.220.000	270.652.000	91,99	92,75	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional : ~ Roda 2 ~ Roda 4 ~ Roda 6	6 4 1	6 4 1	unit unit unit
e.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	81.166.000	80.451.000	99,11	100	Terlaksananya pengecatan, perbaikan plafond dan pembuatan meja kursi taman	2201 78	2201 78	M2 M2
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	81.000.000	80.550.000	99,44	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81.000.000	80.550.000	99,44	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai	90	90	stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	101.000.000	95.891.869	94,94	96,21	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	101.000.000	95.891.869	94,94	96,21	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	36	36	orang
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.387.500	936.000	67,45	68,95	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	342.500	330.000	96,35	97,80	Tercapainya standar pelaporan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	5	5	Lap
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	522.500	303.000	57,99	58,87	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5	5	Lap
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	522.500	303.000	57,99	58,87	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5	5	Lap
6.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.003.478.100	970.808.500	96,74	97,79	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2	2	keg.
a.	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	959.028.100	928.358.500	96,80	97,64	Tersedianya tenaga Banpol PP dan terciptanya TRANTIBUM di kabupaten KOBAR	39	39	org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
b.	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	44.450.000	42.450.000	95,50	97,37	Terciptanya KANTRANTIBMAS di kab. Kotawaringin Barat			
7.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	27.450.000	18.900.000	68,85	69,75	Terlaksananya kegiatan pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3	3	keg.
a.	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	11.450.000	10.200.000	89,08	90,25	Terbayarnya honorarium jaga/ pengamanan VIP,aset, pejabat-pejabat daerah Kobar	1	1	thn
b.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	9.000.000	8.700.000	96,66	97,77	Tersedianya personil yang memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam tugas pengendalian anti huru hara	90	90	org
c.	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	7.000.000	0	0	0	Terlaksananya pelatihan anggota Satpol PP	90	90	org
8.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	107.521.600	52.022.000	48,38	49,85	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	3	3	Keg.
a.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	89.496.600	38.897.000	43,46	44,25	Terlaksananya operasi rutin anggota Pol PP dan terlaksananya sosialisai pencegahan miras dan narkoba	1	1	thn
b.	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	14.650.000	11.100.000	75,76	76,43	Terlaksananya operasi penertiban prktek prostitusi	1	1	thn
c.	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	3.375.000	2.025.000	60	61,95	Terlaksananya operasi penertiban tindak premanisme	1	1	thn

Sumber : Satpol PP

	Program/	Input	Real.	CapaianKinerja Program/Kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik (%)	Kinerja (Harus Terukur)			
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
SEKRETARIAT DAERAH		13.975.000	12.548.000	90	100	-			
1.	Program pendidikan politik masyarakat	13.975.000	12.548.000	89,78	100	-	-	-	-
	Monitoring dan pelaporan pemilu	13.975.000	12.548.000	89,78	100	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pemilihan kepala daerah	100	90	%

Sumber : Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan ketentuan daerah atau nasional yang mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan berbagai penyuluhan;
2. Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta operasi yustisi. Melalui kegiatan tersebut berdampak kondusifnya ketertiban umum di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2016.

c) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Badan Kesbangpolinmas
 - a. Tidak adanya satuan kerja ditingkat Kecamatan / Desa / Kelurahan yang menangani khusus tugas / fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga pelaksanaannya belum memadai;
 - b. Terbatasnya kemampuan SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat;

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugas belum maksimal;
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan;
 - e. Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terjadi penumpukan tugas.
2. Satuan Polisi Pamong Praja
- Peambinaan dan pengawasan perda masih belum optimal. hal ini dikarenakan :
- a. Jumlah maupun kualitas SDM personil Satpol PP masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas cakupan wilayah operasi;
 - b. Sarana dan prasarana Satpol PP juga masih kurang memadai;
 - c. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terjadi penumpukan tugas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Badan Kesbangpolinmas
- a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Instansi / Kecamatan / Desa / Kelurahan dalam menangani bidang tugas Badan Kesbang. Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Memberikan petunjuk / pengarahan kepada staf yang menangani tugas-tugas Badan Kesbang. Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi;
 - c. Mengadakan bimbingan teknis maupun diklat kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing guna meningkatkan SDM;
 - d. Memanfaatkan secara optimal fasilitas yang ada baik sarana maupun prasarana yang ada untuk melaksanakan tugas Badan

Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;

- e. Dilaksanakannya sosialisasi tentang pamswakarsa dengan melibatkan aparat keamanan secara intensif.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Mengusulkan penambahan jumlah personil Satpol PP;
- b. Penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Satpol PP dan melakukan koordinasi dengan Pemda / Pemprov Kalimantan Tengah guna melaksanakan peningkatan kantor dari eselon III.a menjadi eselon II.b (PP No. 06 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2011);
- c. Optimalisasi personil maupun sarana dan prasarana yang sudah ada dengan peningkatan pembinaan dan pelatihan secara berlanjut dengan melaksanakan DIKLATSAR SATPOL PP;
- d. Diperlukannya dukungan dari semua pihak (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Aparat-aparat terkait) untuk memberikan informasi yang benar tentang pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Penyesuaian tingkat pendapatan bagi semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

4.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

a) *Kondisi Umum*

Kebijakan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan. Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya.

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan yang pengelolaannya masuk dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

20.1 SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD yang juga berperan sebagai koordinator bagi SKPD lainnya mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 dengan alokasi Belanja Langsung pada Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp. 16.277.162.800 dan terealisasi Rp. 14.976.766.090 atau 92,01 % seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.53
Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
SETDA		16.277.162.800	14.976.766.090	92,01	96	-			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.393.421.100	8.894.343.576	94.68	95.94	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	15	Keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.525.000	3.366.380	51,59	51,59	Terlaksana nya penyediaan perangkat dan pengiriman paket untuk menunjang pelaksanaan tupoksi : - Paket pegiriman ke kecamatan - Paket pengiriman luar daerah	840 75	612 7,29	lbr kg
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3.886.340.000	3.611.730.527	92,93	100	Terlaksa nanya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Sekretariat Daerah dan jaringannya	1	1	thn
c.	Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	238.800.000	226.100.000	94,68	100	Terlaksa nanya penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	1	1	thn
d.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	118.750.000	113.280.552	95,39	100	Terlaksa nanya penyediaan dana perjalanan berobat KDH, WKDH, Pejabat Eselon II dan ASN	25	25	org
e.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	204.550.000	197.428.635	96,51	100	Terlaksa nanya pembayaran premi asuransi barang milik daerah dan sewa mess mahasiswa di Semarang, Yogyakarta, Malang.	1	1	thn

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						Surabaya, dan Banjarmasin			
f.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	54.375.000	52.442.900	96,44	87,5	Terlaksana nya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ KIR Kendaraan ~ STNK/Plat/ Pajak Kendaraan	8 76	6 76	unit unit
g.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	981.843.800	944.276.400	96,17	100	Terlaksa nanya pembayaran honor jasa: ~ administrasi keuangan petugas jaga malam ~ petugas rujab ~ sopir ~ petugas jaga kantor ~ Uang lembur ~ Tersedianya materai	17 17 4 4 1 16 12.035	17 17 4 4 1 16 12.035	org org org org org lbr
h.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	394.277.300	365.183.950	92,62	100	Terjaminnya kebersihan dan kenyamanan gedung kantor dan rujab ~ Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap ~ Belanja Jasa Cleaning Service ~ Laundry	4 2.154 4 500	4 2.154 4 500	pkt OH Tri wulan Kg
i.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	112.032.000	108.570.000	96,90	100	Terlaksa nanya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Setda berupa: ~ PC Komputer ~ Komputer notebook ~ Printer ~ UPS ~ Proyektor ~ Audio Visual ~ Televisi ~ Radio SSB	45 35 37 20 3 12 10 4	45 35 37 20 3 12 10 4	unit/th unit/th unit/th unit/th unit/th unit/th unit/th unit/th

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
j.	Penyediaan alat tulis kantor	175.887.500	174.515.000	99,21	100	Terlaksana nya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	43	43	jenis atk
k.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	194.075.000	194.075.000	100	100	Terlaksana nya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan - Cetakan - Penggan daan	1 21 300.00 0	1 20 300.000	thn jenis cetakan lbr
l.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	39.000.000	39.000.000	100	100	Terlaksana nya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang Sekretariat Daerah	32	32	Jenis kompo nen listrik
m.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	419.725.000	419.715.000	99,99	100	Terlaksana nya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa: ~ Komputer Desktop ~ Notebook ~ Printer ~ UPS ~ Harddisk Eksternal ~ Mesin Fax ~ Software	 5 14 13 1 3 1 1	 5 14 13 1 3 1 1	 unit unit unit unit unit unit pkt

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						Aplikasi Form Rekam Data Kepegawaian Setda ~ Sistem Informasi Pelayanan/ Pengolahan Informasi Daerah (PPID) ~ Sistem e-document (PPID) ~ Server ~ Mesin Hitung ~ Brankas ~ Drone kamera	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	pkt pkt unit unit unit unit
n.	Penyediaan makanan dan minuman	1.257.240.500	1.136.026.500	90,35	100	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	1	1	thn
o.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.310.000.000	1.308.632.732	99,89	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat dan konsultasi ke luar daerah	1	1	thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.023.990.700	2.686.299.097	88,83	100	Tercapai nya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9	9	keg.
a.	Pembangunan gedung kantor	306.745.500	306.314.500	99,85	100	Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa pembangunan: ~ Aula Kodim 1014 P. Bun ~ tempat parkir kendaraan R. 2	1 1	1 1	pkt pkt

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	70.840.000	70.840.000	100	100	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional berupa : ~ kendaraan dinas roda 2 keperluan Setda	4	4	unit
c.	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	249.440.000	249.440.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ~ AC 1,5 PK ~ Kipas angin tornado ~ meja tamu ~ kursi susun ~ sarung kursi susun (warna kuning) ~ sarung kursi susun (warna putih) ~ kompor gas ~ Dispenser ~ Ceret/teko listrik ~ Kulkas	5 2 10 200 200 200 1 10 22 8	5 2 10 200 200 200 1 10 22 8	unit unit set buah buah buah set unit unit unit
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	62.641.000	62.611.000	99,95	100	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan meliputi : ~ Pengecatan rujab sekda	1	1	pkt
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	356.780.000	350.739.000	98,30	90	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor bupati, yaitu: ~ Honor PPTK ~ Pemeliharaan konstruksi jaringan air bersih ~ Pemeliharaan instalasi listrik ~ Pemeliharaan instalasi telepon ~ Pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor bupati ~ Pemeliharaan dan pengecatan	12 1 8 10 1 1	12 1 8 10 1 1	OB thn unit/th unit/th pkt Pkt

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						Aula Antakusuma ~ Pemeliharaan dan pengecatan gedung juang	1	1	pkt
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	152.300.000	86.531.910	56,81	100	Terlaksananya penyediaan BBM dan suku cadang kendaraan dinas bupati dan wakil bupati	3	3	unit
g.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1.133.871.200	875.436.187	77,20	100	Terlaksana nya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	1	1	thn
h.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	52.680.000	51.030.000	96,86	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor setda dan rumah jabatan berupa ~ AC ~ Suku Cadang Genset	99 1	99 1	unit thn
i.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	638.693.000	633.356.500	99,16	100	Terlaksananya rehabilitasi sedang berat gedung kantor, meliputi: ~ Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun ~ Rehab Ringan Ruang Kerja, Ruang Tunggu dan Ruang Rapat Bupati ~ Rehab Berat Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Kantor Bupati ~ Rehab/Penggantian Paving	1 1 1	1 1 1	pkt pkt pkt pkt

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						Stone Tempat Parkir Kantor Bupati ~ Rehab ringan Gudang Kantor Bupati ~ Rehab Aula Kantor Bupati	1 1	1 1	pkt pkt
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	163.400.000	163.300.000	99,93	100	Tercapai nya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	Keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	129.400.00	129.300.000	99,92	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan pakaian dinas pegawai di lingkungan Setda Kab. Kotawaringin Barat meliputi: ~ Pakaian sipil harian (PSH) Bupati ~ Pakaian sipil lengkap (PSL) Bupati ~ Pakaian sipil resmi (PSR) Bupati ~ Pakaian dinas harian lengan pendek Bupati ~ Pakaian dinas harian lengan panjang Bupati ~ Pakaian dinas Pegawai Setda ~ Pakaian dinas upacara (PDU) Bupati	2 1 2 1 1 203 1	2 1 2 1 1 203 1	Stel Stel Stel Stel Stel Stel

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
b.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	34.000.000	34.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa: ~ Pakaian adat daerah bupati ~ Pakaian adat tamu	1 20	1 20	Pasang Stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	310.250.000	289.261.974	93,23	95	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Thn
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	310.250.000	289.261.974	93,23	95	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	1	Thn
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.965.000	1.785.000	90,83	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	Keg.
a.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	720.000	660.000	91,66	100	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2	2	Lap.
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.245.000	1.125.000	90,36	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2	2	Lap.
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	1.114.000.000	1.013.291.455	90,95	100	Tercapai nya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	4		Keg.
a.	Dialog / Audensi	290.000.000	269.250.000	92,84	100	Terlaksananya fasilitasi dialog	1	1	Thn

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
	Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat. Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat					dengan tokoh masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakan			
b.	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	372.500.000	321.714.543	86,36	100	Terlaksananya pelayanan tamu dari Kunjungan Kerja pejabat negara / departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	1	1	Thn
c.	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	181.500.000	153.193.750	84,40	100	Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah ke daerah kecamatan	1	1	Thn
d.	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	270.000.000	269.133.162	99,67	100	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1	1	Thn
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	882.591.000	759.383.384	86,04	100	Tercapai nya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2	Keg
a.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	786.991.000	690.637.116	87,75	100	Terlaksananya Penata usahaan barang Milik Daerah dengan Baik dan Tertibnya Pencatatan Barang Daerah	1	1	Thn
b.	Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Daerah	95.600.000	68.746.268	71,91	100	Terlaksananya pengumpulan data inventaris barang milik daerah kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	Thn

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
8.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	320.830.000	313.276.262	97,64	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	1	Keg.
a.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	320.830.000	313.276.262	97,64	100	Terlaksananya ~ Pengelolaan kelembagaan ~ Pengelolaan GG dan LHKPN ~ Penyusunan RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP ~ Asistensi Lakip dan Raker Staf Ahli se-Kalteng ~ Penyusunan Dok. Anjab / BK ~ Laporan SPM Smt I dan II	36 2 3 2 1 2	36 2 3 2 0 0	SKPD Dok. Dok. Keg. Dok. Dok
9.	Program Penataan Peraturan Perundang - undangan	519.715.000	503.096.162	96,80	97,05	Tercapai nya sasaran kegiatan pada Program Penataan Peraturan Perundang - undangan			
a.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	200.228.498	188.993.320	94,38	93	Terlaksana nya kegiatan pembinaan kadarkum terhadap masyarakat	12	4	Kec.
b.	Publikasi peraturan perundang undangan	43.500.000	39.375.000	90,51	96,97	Terlaksananya penyediaan buku peraturan perundang undangan	50	50	Buku
c.	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru. Lebih Tinggi Dari	275.986.502	274.272.842	99,54	100	Terlaksananya ~ Penyusunan Perda ~ Penyusunan Perbup	30 30	8 89	Buah Buah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
	Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah								
10.	Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	472.600.000	342.172.999	72,40	100	Tercapai nya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	6	6	Keg.
a.	Pemberian bantuan hukum	472.600.000	342.172.999	72,40	100	Terlaksananya bantuan hukum kepada aparaturn dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	6	6	Keg
11.	Program peningkatan kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia	74.400.000	10.557.000	14,18	100	Tercapai nya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kesadaran dan pemahaman HAM	1	1	Keg.
a.	Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM)	74.400.000	10.557.000	14,18	100	Terlaksananya penetapan keputusan bupati tentang panitia RANHAM dan pelaksanaan kegiatan RANHAM	1	1	Keg.

Sumber : Sekretariat Daerah

- Kegiatan 1.f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional berupa KIR kendaraan dengan target 8 (delapan) kendaraan namun terealisasi hanya 3 (tiga) kendaraan karena 3 (tiga) kendaraan barang dan penumpang lainnya kondisinya sudah kurang layak pakai sehingga tidak dilaksanakan KIR.
- Kegiatan 8.b. Revaluasi/Appraisal asset/barang, kegiatan inventarisasi barang milik daerah dilaksanakan 100 % namun honorarium panitia pelaksana ada yang tidak terbayarkan karena keterbatasan waktu perubahan SK panitia.
- Kegiatan 9.a. Sosialisasi peraturan perundang- undangan dengan target 6 (enam) kecamatan namun yang terealisasi hanya 4

(empat) kecamatan dikarenakan dana yang tersedia berkurang untuk efisiensi anggaran, jadi sosialisasi hanya dilaksanakan untuk 4 (empat) kecamatan.

- Kegiatan 11.a. Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia berupa diseminasi/sosialisasi HAM bagi aparatur pemerintah dan masyarakat tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu, dana masuk pada perubahan anggaran.

Pencapaian kinerja output dan outcome kegiatan pada Sekretariat Daerah, mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :

Tersusunnya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi:

- a) Perda dan Perbub APBD sebanyak 4 buah;
- b) Perda dan Perbub Perubahan APBD sebanyak 5 buah;
- c) Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Catatan Laporan Keuangan.

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah :

1. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran;
2. Diperlukan penataan gedung, sarana dan prasarana sehingga dapat menunjang kenyamanan dan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan.
3. Perubahan sistem Penataan Kelembagaan / Organisasi Perangkat Daerah sesuai amanat UU N0. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pemetaan Urusan Pemerintahan serta terbitnya PP. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang harus dirampungkan paling lambat Desember 2016 menghambat proses penyusunan dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja, karena

pelaksanaan Anjab / BK harus menyesuaikan dengan struktur / nomenklatur SKPD yang baru, sehingga sampai dengan akhir tahun belum bisa terlaksana (Bagian Organisasi);

4. Kegiatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik lanjutan dalam rangka perwujudan Good Governance berupa implementasi PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan **Standar Pelayanan Minimal**, belum bisa terlaksana, karena perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan wajib, yang tidak lagi meminta / mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyampaikan Laporan SPM baik Semester I maupun II seperti tahun sebelumnya. (Bagian Organisasi);
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Peraturan perundang-undangan dari pusat seringkali tumpang tindih antar kementerian sehingga berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam tataran pelaksanaannya.

Upaya Pemecahan masalah Sekretariat Daerah :

1. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan fasilitas yang ada serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
3. Meningkatkan koordinasi di tingkat bagian maupun lintas instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Telah dilakukan pergeseran anggaran kegiatan dalam DPA terhadap kegiatan yang tidak terlaksana, guna menambah daya dukung anggaran yang sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok & Fungsi Bagian Organisasi Setda, terutama penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang mendesak penyelesaiannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2016. (Bagian Organisasi);
5. Mengupayakan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

6. Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait seperti BPK dan Kementrian di tingkat pusat.

20.2 SEKRETARIAT DPRD

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD guna mendukung tugas dan fungsi DPRD meliputi pengelolaan dan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan professional serta menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerja yang baik antar kegiatan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan komponen lainnya. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.741.911.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.963.664.396 atau 91,09 % yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 4.54
Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
Sekretariat DPRD		8.741.911.000	7.963.664.396	91,09	92	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.842.675.900	1.674.692.256	90,88	93,09	Terlaksananya kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	14	Keg
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	100.000	33,33	50	Surat/dokumen/ paket yang dikirim	12	6	Buah
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	255.520.000	229.406.438	89,75	100	Langganan listrik, telpon, koran, speedy dan TV Kabel (6 sambungan)	1	1	Thn
c.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	96.030.000	45.285.552	47,15	50	Keanggotaan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	60	30	Org

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
d.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	27.150.000	13.505.100	49,74	84	Perpanjangan pajak kendaraan dinas meliputi : ~ STNK Motor ~ STNK Mobil ~ KIR Mobil	16 15 1	16 10 1	Unit Unit Unit
e	Penyediaan jasa administrasi keuangan	471.213.750	449.848.500	95,46	95,46	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	1	1	Thn
f.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000	149.700.000	99,80	100	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih jasa cleaning service	12	12	Bln
g.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19.850.000	9.450.000	47,60	72,73	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja : ~ Jaringan Komputer ~ PC Komputer ~ Laptop ~ Mesin Fotocopy ~ Proyektor ~ Sound system	1 8 8 1 2 2	1 6 7 - 1 1	Thn Unit Unit Buah Unit Unit
h.	Penyediaan alat tulis kantor	75.728.600	75.268.600	99,39	100	Alat Tulis Kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran	1	1	Thn
i.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	88.719.200	81.962.500	92,38	100	Barang cetakan dan penggandaan	1	1	Thn
j.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	20.755.700	20.000.000	96,35	100	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Lampu TL 23 Watt - Lampu TL 35 Watt - Baterai A2 - Baterai A3	160 100 15 10	160 100 15 10	Buah Buah Buah Buah
k.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.850.000	48.600.000	97,49	100	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran, berupa : ~ Laptop ~ UPS ~ Hardisk External 500 GB ~ Microtik ~ Modem Wifi ~ Printer Ink Jet ~ Voice	2 1 4 1 5 3 3	2 1 4 1 5 3 3	Unit Unit Buah Unit Unit Unit Buah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)				
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan				Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)						
						Recorder				
l.	Penyediaan peralatan rumah tangga	31.000.000	29.500.000	95,16	100	Peralatan rumah tangga yang diadakan : ~ Termos Stainless ~ Karpet / Hambal ~ Karpet	4 4 50	4 4 50	Buah Lbr M2	
m.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10.000.000	0	0	0	Buku peraturan per Undang-Undangan yang diadakan	50	0	Buah	
n.	Penyediaan makanan dan minuman	135.450.000	123.131.800	90,90	100	~ Makan minum harian Anggota DPRD ~ Makan Minum harian satpam ~ Makan minum harian sopir, tenaga admin, operator sound ~ Makan minum tamu	7920 2555 1320 1	7439 2548 1232 1	OH OH OH Thn	
o.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	411.108.650	398.933.766	97,03	100	Perjalanan dinas Pegawai Sekretariat DPRD rapat, konsultasi ke luar daerah	59	92	OK	
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.044.690.100	2.864.220.388	90,07	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	8	Keg	
a.	Pembangunan gedung kantor	165.775.000	161.330.000	97,31	100	~ Penataan taman halaman kantor Setwan DPRD ~ Sekat ruangan Ketua DPRD	1 1	1 1	Pkt Pkt	
b.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	136.187.500	133.100.000	97,73	100	Perlengkapan gedung kantor yang diadakan berupa: ~ Almari Arsip ~ Plakat ~ Bendera Merah Putih ~ Bendera Lambang Daerah ~ Lambang Garuda Tembaga/Kuningan	4 50 2 2 2 30	4 50 2 2 2 30	Buah Buah Lbr Lbr Buah Lbr	

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						~ Umbul-Umbul ~ AC 1 PK ~ AC Standing ~ Mesin Pompa Air	2 2 2	2 2 2	Unit Unit Buah
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	31.910.000	30.500.000	95,58	100	~ Pemeliharaan bangunan rumah jabatan ~ Pemeliharaan halaman rumah jabatan	250 60	250 60	M2 M2
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	49.000.000	49.000.000	100	100	~ Pemeliharaan bangunan gedung kantor	392	392	M2
e	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	135.000.000	94.400.000	69,92	100	Pemeliharaan mobil jabatan unsur Pimpinan DPRD	3	3	Unit
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	490.600.000	370.368.388	75,49	100	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara : ~ Roda 2 ~ Roda 4 ~ Honor KPA dan PPTK	16 12 2	16 12 2	Unit Unit OB
g.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	21.450.000	18.890.000	88,06	100	Peralatan gedung kantor yang dipelihara ~ AC split ~ Genset	16 1	16 1	Unit Unit
h.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	2.014.767.600	2.006.632.000	99,59	100	~ Rehab atap dan plafon gedung kantor, ruang rapat gabungan dan mushola kantor DPRD ~ Rehab kamar mandi/WC gedung kantor DPRD ~ Pengaspalan halaman kantor DPRD ~ Rehab Garasi dan rumah genset	1 1 1 1	1 1 1 1	Pkt Pkt Pkt Pkt
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	175.500.000	175.500.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	175.500.000	175.500.000	100	100	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya meliputi : ~ PDH anggota DPRD ~ PDH untuk	30 34	30 34	Stel Stel

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						PNS ~ PDH untuk sopir, tenaga admin dan operator ~ PSH anggota DPRD ~ PSH untuk Satpam ~ PSR anggota DPRD	5 60 7 30	5 60 7 30	Stel Stel Stel Stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	219.000.000	189.379.075	86,47	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	219.000.000	189.379.075	86,47	100	Pegawai Sekretariat DPRD yang mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek, Ujian Dinas dll	26	29	OK
5.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3.460.045.000	3.059.872.677	88,43	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	7	7	Keg
a.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	659.500.000	647.482.681	98,17	100	~ Rapat pembahasan Ranperda inisiatif ~ Perjalanan dinas Badan Legislasi ke luar daerah ~ Honor KPA dan PPTK ~ Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif	4 5 2 4	4 5 2 4	Kali OK OB Pkt
b.	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	90.000.000	52.275.000	58,08	93,10	Rapat Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	29	27	Kali
c.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	164.400.000	109.650.000	66,69	85,32	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	109	93	Kali
d.	Rapat-Rapat Paripurna	130.400.000	87.100.000	66,79	100	Terlaksananya Rapat-rapat paripurna	25	33	Kali

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
e	Kegiatan Reses	132.900.000	57.245.000	43,07	50	Perjalanan dinas anggota dewan dalam rangka reses	60	29	OK
f.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	127.445.000	94.116.000	73,84	87,50	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (monitoring/undangan dll) dan personil Setwan dalam rangka mendampingi anggota DPRD	120	105	OK
g.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.155.400.000	2.012.003.996	93,35	100	Perjalanan dinas luar daerah Anggota dewan dalam rangka kunker/ konsultasi/ koordinasi/ undangan/ bimtek/ diklat/ sosialisasi dll.	220	225	OK

Sumber : Sekretariat Dewan

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dibidangnya jumlahnya terbatas, sehingga mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kurang maksimal dan hanya staf tertentu saja yang diberdayakan;

Upaya Pemecahan masalah Sekretariat DPRD :

1. Permasalahan yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) diselesaikan secara internal dengan melakukan pembinaan bagi pegawai agar meningkatkan kinerjanya;

20.3 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD)

Pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan

dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan administrasi keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Untuk tahun 2016 ditargetkan **3 (tiga) Peraturan Daerah** yaitu:

- Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang APBD TA 2016;
- Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD TA 2016;
- Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017.

Serta 3 (tiga) Peraturan Bupati yaitu:

- Perbup Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA 2016;
- Perbup Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2016;
- Perbup Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017.

Telah dapat direalisasikan semua.

Kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2016 adalah :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Arus Kas;
 - Neraca;
 - Catatan L/K;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.55
Capaian Indikator Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2015	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	% Realisasi dari Target

- Persentase Realisasi Pendapatan	86,25	105	92,14	87,75
- Persentase Realisasi Pajak				
- Persentase Lain – Lain	78,65	106	86,98	82,06
Penerimaan Daerah	116,23	100	121,16	121,16
- Persentase Ketepatan Penyerapan Belanja Pegawai (Gaji)	89,79	99	94,35	95,30
- Persentase Penyerapan Belanja Langsung	95,96	99	79,23	80,03
- Persentase Ketepatan Penyaluran Dana Transfer	99,39	99	97,49	98,47
- Persentase Akurasi Anggaran Kas	98,95	97	95	97,94
- Ketepatan Penyediaan Dana Untuk Membiayai Pengeluaran	100	98	98	100
- Persentase Realisasi Fungsi Pelayanan	100	98	98	100
- Ketersediaan Informasi Yang Handal	100	100	100	100
- Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan SKPD	100	3	0	0
- Ketepatan Penyampaian LKPD	100	100	100	100
- Persentase Penyerapan DPA – SKPD	91,84	99	89,21	90,11
- Persentase Satuan Kerja Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	99	99	100
- Indek Kepuasan Pelanggan	90,82	98	91	92,86
- Persentase Penyelesaian SOP	100	100	100	100
- Persentase Profil Resiko	87,50	3	2,5	83,33
Rata – rata capaian	96,20			89,94

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar **89,94%**. Penjelasan terkait pencapaian masing - masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

- Indikator : Persentase realisasi pendapatan.** Target persentase realisasi pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 masih harus lebih ditingkatkan, dengan tingkat pencapaian sebesar 91,14% Berdasarkan tingkat capaian tersebut masih perlu adanya penambahan aparatur yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan agar target yang ditetapkan dapat tercapai, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pemungutan secara optimal.

2. **Indikator : Persentase realisasi pajak.** Target persentase realisasi pajak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 masih harus ditingkatkan, dengan pencapaian sebesar 86,98 %.
3. **Indikator : Persentase lain – lain penerimaan daerah.** Target persentase lain-lain penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 121,16 %.
4. **Indikator : Persentase ketepatan penyerapan belanja pegawai (gaji).** Target persentase ketepatan penyerapan belanja pegawai (gaji) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 94,35 %.
5. **Indikator : Persentase penyerapan belanja langsung.** Target persentase penyerapan belanja langsung Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 79,23 %, dari pagu anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 7.939.795.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.291.381.124**
6. **Indikator : Persentase ketepatan penyaluran dana transfer.** Target persentase ketepatan penyaluran dana transfer Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 ke desa - desa di Kotawaringin Barat sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 97,49%.
7. **Indikator : Persentase akurasi anggaran kas.** Target persentase anggaran kas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 95%.
8. **Indikator : Ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran.** Target ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 98
9. **Indikator : Persentase realisasi fungsi pelayanan.** Target persentase realisasi fungsi pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 98%.

- 10. Indikator : Ketersediaan informasi yang handal.** Target ketersediaan informasi yang handal Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 100 %.
- 11. Indikator : jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan SKPD.** Target jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 0%.
- 12. Indikator : ketepatan penyampaian LKPD.** Target ketepatan penyampaian LKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.
- 13. Indikator : Persentase penyerapan DPA–SKPD.** Target persentase penyerapan DPA–SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 89,21% atau persentase capaian sebesar 90,11%. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyerapan DPA Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 23.369.938.000** dengan tingkat penyerapan **89,21%** atau Rp. 20.850.304.897 yang terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 15.430.143.000** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 14.558.923.773** atau **94,35%**
 - Belanja Langsung dengan jumlah anggaran **Rp. 7.939.795.000** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 6.291.381.124** atau **79,23%**
- 14. Indikator : Persentase satuan kerja yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.** Target persentase satuan kerja yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 99 %.
- 15. Indikator : Indek Kepuasan Pelanggan.** Target Indek Kepuasan Pelanggan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 91 %. Dilihat dari capaian berarti masih adanya sedikit perbaikan dalam beberapa hal antara lain :
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu secara optimal meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

- Meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan publik di bidang administrasi keuangan daerah.
- Mendukung kelancaran penerimaan perpajakan dengan pembayaran pajak dipotong melalui SP2D.
- Tersedianya sistem informasi penerimaan daerah (terwujudnya sistem informasi database yang akurat dan lengkap).
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak daerah (cepat, tepat, efisien dan efektif).
- Meningkatkan sumber daya aparatur secara bertahap dan berkesinambungan.
- Penyelesaian permasalahan dan pembayaran pajak daerah.
- Peningkatan sarana prasarana sistem informasi keuangan daerah.

16. Indikator : Persentase penyelesaian SOP. Target Persentase penyelesaian SOP Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 100 %.

17. Indikator : Persentase Profil Resiko. Target persentase profil resiko Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 2,5 %. Dalam hal ini Sumber daya manusia yang masih kurang menjadi sedikit kendala dalam pencapaiannya. Diharapkan pada tahun mendatang permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia dapat terpenuhi dengan maksimal.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Perubahan Tahun Anggaran 2016, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 7.939.795.000** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.291.381.124** atau **79,23%**. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.56
Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh DPKD

No.	Program/ Kegiatan	Input		Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)
		Pagu Anggaran	Keuangan		

		(Rp)	Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
DPKD		7.939.795.000	6.291.381.124	79,23	95,20	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.339.336.200	2.144.620.013	91,67	95,87	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Adm. Perkantoran	12	12	Keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	910.660	91,06	100	Terlaksananya pengiriman surat dinas	50	50	Kkt
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	409.990.000	356.086.183	86,85	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan DPKD	12	12	Bln
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.850.000	5.084.000	74,21	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi: ~ Roda 2 ~ Roda 4	29 4	29 4	Unit Unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	462.210.400	428.021.100	92,60	99,25	Terlaksananya penyediaan keperluan pengelolaan keuangan dinas	1	1	Thn
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	113.600.000	109.000.000	95,95	97,50	Terlaksananya jasa kebersihan lingkungan kantor	1	1	Thn
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	96.260.000	63.717.000	66,19	94	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan DPKD berupa : ~ Telepon dan jaringan PABX ~ Jaringan komputer ~ Komputer Desktop ~ UPS/stabilizer ~ Printer ~ Notebook/laptop ~ Komputer Server ~ Alat Audio Sound System ~ Proyektor ~ Faximili	1 1 25 27 47 25 2 1 2 1	1 1 25 27 47 25 2 1 2 1	Unit Thn Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	192.385.000	191.400.000	99,48	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Thn
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	178.795.000	164.410.900	91,95	94	Terlaksananya cetak sarana administrasi perkantoran dan keuangan serta penggandaan	1	1	Thn
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11.605.000	11.435.000	98,53	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor	1	1	Thn

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	442.700.000	406.021.478	91,71	96,56	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ DVD eksternal ~ harddisk eksternal ~ UPS ~ Printer dotmatrik ~ Printer tinta ~ Printer tinta (A3) ~ Notebook ~ Komputer PC ~ Komputer PC (All in one mini) ~ Hub port ~ Flashdisk ~ Mp3 Player USB ~ Printer laser ~ Switch monitor ~ Wireless access ~ Wireless card ~ Printer dotmatrik kecil ~ Mouse ~ Keyboard	2 5 5 1 7 2 6 7 1 1 25 1 1 1 1 1 2 1 25 10	2 5 5 1 7 2 6 7 1 1 25 1 1 1 1 1 2 1 25 10	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
k.	Penyediaan makanan dan minuman	92.300.000	81.435.000	88,22	99	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	1	1	Thn
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	331.640.800	327.098.692	98,63	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.617.547.000	1.307.940.621	80,85	94,82	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	keg
a.	Pembangunan gedung kantor	294.150.000	291.507.500	99,10	100	Terlaksananya pembuatan Musholla	1	1	Keg
b.	Pengadaan kendaraan dinas operasional	386.000.000	384.420.000	99,59	100	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 dan Accessories mobil	1	1	Unit
c.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	219.000.000	215.770.000	98,52	99,65	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa Lemari Arsip, Lemari Sekat, Meja komputer, Meja Rapat, Meja Rapat Ruang Aula, Kursi Rapat, Jam Dinding	29 8 2 1 2 10 2	29 8 2 1 2 10 2	Unit Bh Bh Set Set Unit Unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
d.	Pengadaan peralatan gedung kantor	294.997.000	42.735.000	14,48	91,25	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa Tabung Pemadam Kebakaran, Mesin Genset, Kipas Angin Blower, CCTV, Pengadaan dan Pemasangan Kabel dari Instansi ke Panel	8 1 2 1 1	8 1 2 1 1	Unit Unit Unit Pkt Pkt
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	42.000.000	40.900.000	97,38	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa : ~ Pemeliharaan pintu harmonika garasi ~ Pemeliharaan rumah genset ~ Pembongkaran menara antena / radio	210	210	m2
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	360.800.000	312.978.121	86,74	99	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional yang meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	29 5	29 5	Unit Unit
g.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	20.600.000	19.630.000	95,29	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa ~ AC standing ~ AC split	14 12	14 12	Unit Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	86.400.000	80.645.000	93,33	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	Keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengka pannya	43.400.000	40.550.000	93,43	100	Tersedianya kebutuhan pakaian Dinas Harian (PDH) dan Satpam	86	86	Stel
b.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	43.000.000	40.095.000	93,24	100	Tersedianya kebutuhan pakaian Batik tradisional	86	86	Stel
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	257.102.000	200.006.546	77,79	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	257.102.000	200.006.546	77,79	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang	28	28	Org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						undangan			
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70.610.000	61.670.250	87,33	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	Keg.
a.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	70.610.000	61.670.250	87,33	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap .
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.568.799.800	2.496.498.694	69,95	80,54	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9	9	Keg.
a.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	233.069.000	211.456.354	90,72	95,68	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen KUA PPAS, dan Perda tentang APBD	80.000	80.000	Lbr
b.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	53.750.000	52.438.320	97,55	100	Terlaksananya penyusunan Buku penjabaran APBD, Nota keuangan, RKPD, Renstra, buku risalah sidang Perbup. APBD	207.000	207.000	Lbr
c.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	131.400.000	128.192.919	97,55	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen perda perubahan APBD, KUA PPAS	47.500	47.500	Lbr
d.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	52.500.000	51.479.230	98,05	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan : Buku peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	202.000	202.000	Lbr
e.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	249.965.800	233.083.278	93,24	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan dokumen perda tentang pertanggung jawaban APBD	200.000	200.000	Lbr
f.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung	32.500.000	32.296.500	99,37	100	Terlaksananya penyusunan dan penggandaan perbup tentang pertanggungjawaba n pelaksanaan	130.000	130.000	Lbr

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	jawaban Pelaksanaan APBD					APBD			
g.	Bimbingan Teknis Implementasi Pkt Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan	54.650.000	0.00	0	6,40	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah	130	130	Org
h.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan	2.281.690.000	1.629.480.693	71,41	89,81	Terlaksananya peningkatan penerimaan daerah	1	1	Keg
i.	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan	479.275.000	158.071.400	32,98	96,25	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	100	100	%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SIMKADA per Februari 2017

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi DPKD

Permasalahan

1. Adanya usaha meringankan beban pajak daerah oleh wajib pajak sesuai ketentuan maupun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan;
2. Pendapatan Asli Daerah dari Pajak belum optimal;
3. Penegakan hukum terhadap wajib Pajak Daerah masih lemah terhadap kepatuhan membayar Pajak Daerah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;
5. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
6. SKPD yang mempunyai pendapatan belum semua memahami mekanisme penyetoran pendapatan;
7. Belum semua SKPD dalam penyusunan aliran kas berdasarkan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehinga kesulitan dalam merealisasikan sehingga perlu merevisi anggaran kas dan DPA yang telah ditetapkan;
8. Belum semua SKPD mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pencatatan akuntansi untuk pelaporan;

9. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset daerah masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
10. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Terdapat kesulitan dalam inventarisasi Barang Milik Daerah yang ada di SKPD.

Solusi

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Meningkatkan pengawasan yaitu dengan cara :
 - Melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah;
 - Meningkatkan efesiensi administrasi serta memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
 - Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
3. Optimalisasi/pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD;
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan pemerintah pusat;
5. Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimbingan teknis pajak dan retribusi daerah;
6. Koordinasi dengan SKPD secara lebih insentif dalam rangka optimalisasi pengelolaan APBD di masing-masing SKPD;
7. Sosialisasi sistem dan prosedur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pendampingan dalam pelaksanaannya;

8. Dalam rangka mempertahankan WTP maka diperlukan langkah yang lebih baik dalam pengelolaan barang milik daerah mulai dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi penggunaan barang di SKPD;
9. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan di bidangnya dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan;
10. Menyediakan sarana prasana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimtek dan pendampingan;
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

20.4 BADAN KEPEGAWAIAN

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang menjadi penggerak jalannya organisasi. Tanpa didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional, suatu organisasi akan kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu peningkatan profesionalisme secara berkesinambungan. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten di bidang tugasnya. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme ASN dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir.

Perekrutan ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diawali dengan penyusunan formasi sesuai persyaratan jabatan dan seleksi sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Penyelenggaraan penerimaan pegawai didukung adanya formasi pegawai, kebutuhan pegawai serta adanya pedoman pengadaan pegawai yang menganut prinsip-prinsip transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif serta

tidak dipungut biaya. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir ASN akan memandu karir ASN sejak berstatus calon hingga pensiun. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim ASN dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Dalam rangka meningkatkan disiplin ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Kedisiplinan ASN digunakan sebagai salah satu indikator kinerja. Selanjutnya diberikan *reward* bagi ASN sesuai dengan kinerjanya. *Reward* diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Kinerja yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. *Reward* juga diberikan dalam bentuk pemberian tali asih bagi PNS yang memasuki masa purna tugas. *Punishment* diterapkan kepada ASN berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pegawai selama ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Seleksi Penerimaan CPNS.

Dalam rangka mengisi formasi tambahan PNS pada SKPD/Satuan Unit Kerja, dilaksanakan melalui pengadaan CPNSD Kabupaten Kotawaringin Barat. Usul dan alokasi formasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.57
Usulan dan Alokasi Formasi PNS Tahun 2010 – 2016

TH	USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA				ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA				KETERANGAN
	GURU	KES	TEKNIS	JML	GURU	KES	TEKNIS	JML	
2010	619	50	613	1.282	117	50	93	260	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	2	-	13	15	2	-	13	15	
2013	50	4	18	72	50	4	18	72	Dari hasil tes tenaga honorer K.2 sebanyak 71 orang + 1 orang dari formasi khusus dokter
2014	632	206	320	1158	42	36	17	101	Formasi jalur khusus dokter 6 + formasi umum 95

TH	USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA				ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA				KETERANGAN
	GURU	KES	TEKNIS	JML	GURU	KES	TEKNIS	JML	
2015	661	150	337	1148	-	-	-	-	Tidak ada penerimaan CPNS karena adanya moratorium dari pemerintah pusat
2016	661	166	366	1163	-	-	-	-	Tidak ada penerimaan CPNS karena adanya moratorium dari pemerintah pusat

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

2. Penempatan PNS

Melalui penempatan PNS diharapkan dapat mengisi jumlah, kualitas, komposisi, distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan SKPD/Satuan Unit Kerja dilaksanakan melalui penempatan PNS dengan mengangkat CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.58
Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Tahun 2010-2016

TAHUN	JUM LAH	GOLONGAN RUANG								KET
		I.a	I.b	I.c	II.a	II.b	II.c	III.a	III.b	
2010	229	0	0	0	0	8	57	161	3	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	15	1	-	3	6	-	2	3	-	
2013	72	2	-	2	49	2	4	12	1	
2014	74	2	-	2	17	5	4	35	9	
2015	90	-	-	-	-	1	26	56	7	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan administrasi kepegangatan.

Tabel 4.59
Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun 2010-2016

NO	KEGIATAN	Tahun							Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kenaikan Pangkat	988	792	1111	814	1012	696	585	
2	Peninjauan Masa Kerja	4	7	7	1	12	3	2	Sesuai usulan dari SKPD
3	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	171	317	234	4	12	-	79	CPNS formasi tahun 2010. Tahun 2011 tidak ada penerimaan CPNS. Tahun 2014, 2015 dan 2016 dari honorer
4	Pencantuman Gelar	19	13	8	16	28	15	19	Sesuai usulan dari SKPD

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Informasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan pegawai, melalui peningkatan dalam pengelolaan database. Jumlah PNS yang masuk data base dari tahun ke tahun terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.60
Data Base Kepegawaian Tahun 2010 – 2016

NO	TAHUN	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					JUM LAH
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	2010	4	9	28	15	159	426	553	259	885	572	583	498	882	51	16	1	0	4941
2	2011	2	7	13	16	105	474	580	252	1011	536	495	563	911	85	19	0	0	5069
3	2012	2	6	12	16	97	367	589	230	830	643	456	610	1008	78	22	0	0	4966
4	2013	2	6	10	34	153	498	421	474	715	576	544	822	561	62	19	0	0	4897
5	2014	4	4	11	9	100	131	392	487	598	918	480	668	1021	74	24	1	0	4922
6	2015	3	3	13	7	88	86	401	503	492	1016	499	655	1036	65	33	1	0	4901
7	2016	3	3	12	5	76	74	284	425	571	850	432	617	873	90	32	1	0	4348

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

4. Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tabel 4.61
Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2010– 2016

NO.	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah	Keterangan
1	Pelanggaran Disiplin	18	-	-	-	8	5	8	31	
2	Dugaan Pelanggaran Disiplin	-	-	-	12	10	8	8	30	
3	PNS melakukan Tindak Pidana	6	5	3	2	-	-	-	16	
4	Pemberhentian PNS	2	-	2	1	4	7	1	16	
5	Pemberian Izin Cerai	6	7	1	8	13	5	21	40	
6	Bimbingan Teknis Disiplin	-	1	6	6	29	1	1	43	Bimtek 2015 diikuti 100 orang dari semua SKPD
7	Siraman Rohani	-	-	-	1	1	7	7	9	Siraman Rohani tahun 2015 dilaksanakan di setiap Kecamatan
8	Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010	-	-	-	-	1	2	7	3	

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi melalui pemberian piagam Satyalencana Karya Satya, Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Pensiun PNS.

Tabel 4.62
Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2010 – 2016

NO	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1	KARPEG	186	111	538	195	13	33	14	1090
2	KARIS / KARSU	201	232	529	261	251	317	540	2331
3	PENSIUN	74	78	74	74	50	59	110	519
4	SATYA LENCANA	93	62	27	74	194	83	79	612
5	TASPEN	141	85	20	20	5	75	29	375

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dilakukan melalui kegiatan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dan pengiriman mengikuti seleksi tugas belajar serta pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas serta pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.

Tabel 4.63
Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Th. 2010-2016

NO	KEGIATAN	Tahun							JUMLAH
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	DIKLAT KEPEMIMPINAN	46	91	54	22	19	61	39	332
2	DIKLAT PRA JABATAN	294	679	226	16	1	71	99	1386
3	TUGAS BELAJAR	33	10	18	22	23	27	18	151
4	IJIN BELAJAR	21	360	234	75	95	104	61	950
5	UJIAN DINAS	35	33	12	34	40	41	231	426
6	UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH	60	10	11	18	20	12	7	138
7	IPDN	3	1	2	1	4	1	2	14

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.709.382.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.693.143.193 atau 84,85 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.64
Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
BKD		6.709.382.000	5.658.072.403	84,33	94,28	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.088.082.450	945.577.434	86,90	95,99	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	14	Keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	Terpenuhinya jasa surat - menyurat ~ Perangko ~ Surat	80 10	0 0	Lbr Pkt
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	183.000.000	129.064.581	70,52	100	Terpenuhinya listrik, Air Bersih, Komunikasi/ Telpon, Koneksi Internet, Langganan Koran	12	12	Bln
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	9.400.000	2.470.100	26,27	100	Terpeliharanya kendaraan dinas dan perpanjangan perijinan ~ Roda 2 ~ Roda 4	22 2	21 2	Unit Unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	180.990.250	171.460.250	94,73	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan BKD	12	12	Bln
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65.406.450	62.178.600	95,06	66,67	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	3	2	Org
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.100.000	15.985.000	88,31	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan berupa : ~ PC Komputer ~ Laptop/ notebook ~ Printer ~ Jaringan komputer	12 12 12 12	12 12 12 12	Bln Bln Bln Bln
g.	Penyediaan alat tulis kantor	236.613.150	230.847.100	97,56	100	Terpenuhinya alat tulis kantor	12	12	Bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	19.643.500	78,57	80	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa : ~ Amplop ukuran A ~ Amplop ukuran C ~ Amplop ukuran E ~ Buku NCR ~ ID Card Badan Kepegawaian	60 25 30 30 45	60 25 30 30 0	Pak Pak Pak Bk Bk
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9.140.000	9.125.000	99,83	100	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	12	Bln
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	118.500.000	117.018.000	98,74	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa : ~ Komputer All In One ~ Printer All In One ~ Scanner ~ Scanner e-Surat ~ Wifi Router e-Surat ~ Switch HUB 48 Port ~ Kabel Jaringan CAT ~ Rak Switch HUB CAT	3 7 2 2 1 1 5 1	3 7 2 2 1 1 5 1	Unit Buah Unit Unit Buah Unit Rol Unit
k.	Penyediaan peralatan rumah tangga	17.052.600	15.675.000	91,92	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	12	12	Bln
l.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2.500.000	0	0	0	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10	0	buku
m.	Penyediaan makanan dan minuman	25.780.000	24.290.000	94,22	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL	12	12	Bln
n.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	192.600.000	147.820.303	76,74	100	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	Bln
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.331.548.000	1.250.667.006	93,92	98,50	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan	8	8	Keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						prasarana aparatur			
a.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	350.000.000	350.000.000	100	100	Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4	1	1	Unit
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	57.700.000	54.945.000	95,22	100	Tersedianya : ~ Umbul – umbul ~ Tiang umbul – umbul ~ Flatsir / bendera tirai ~ Ventilator ~ Kamera CCTV ~ AC	14 14 80 2 8 2	14 14 80 2 8 2	Lbr Buah M Unit Unit Unit
c.	Pengadaan meubeleur	99.400.000	94.468.000	95,03	66,67	Tersedianya meubeleur kantor berupa : ~ Meja Printer ~ Kursi lipat ~ Kursi kerja ~ Kursi kerja eselon III ~ Kursi rapat ~ Kursi resepsionis	12 80 22 2 58 1	12 80 22 0 58 0	Buah Buah Buah Buah Buah Buah
d.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.780.000	23.765.000	95,90	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung / bangunan kantor	210	210	M2
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal	145.100.000	87.200.000	60,09	100	Tersedianya BBM : ~ BBM Roda 2 ~ BBM Roda 4 Pemeliharaan kendaraan dinas: ~ Roda 2 ~ Roda 4	22 2 22 1	22 2 22 1	Unit Unit Unit Unit
f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.060.000	11.760.006	68,93	100	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor: ~ Minyak mesin potong rumput ~ Minyak solar genset ~ Pemeliharaan AC ~ Pemeliharaan Amplifier ~ Pemeliharaan mixer 12ch	120 500 22 2 1	120 500 22 2 1	Liter Liter Unit Unit Unit
g.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.150.000	0	0	0	Terlaksananya perbaikan meja dan kursi kantor	15	0	Buah
h.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	636.358.000	628.529.000	98,76	100	Terlaksananya rehab interior dan eksterior gedung kantor	1	1	Pkt
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	53.560.000	48.092.000	89,79	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan	1	1	Keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						disiplin aparatur			
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53.560.000	48.092.000	89,79	100	Tersedianya pakaian dinas : ~ PDH ~ PSH ~ Pakaian kerja satpam ~ Pakaian cleaning service ~ Pakaian tukang kebun ~ Pakaian tenaga pendukung administrasi	45 45 4 4 2 8	45 45 4 4 2 8	Stel Stel Stel Stel Stel Stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	74.000.000	61.288.600	82,82	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	74.000.000	61.288.600	82,82	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis	8	9	Org
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.200.000	4.405.000	84,71	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
a.	Penyusunan lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.900.000	1.105.000	58,15	100	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	20	20	Eksp.
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.400.000	1.400.000	100	100	Tersedianya dokumen laporan semesteran	15	15	Eksp
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.900.000	1.900.000	100	100	Tersedianya dokumen akhir tahun	15	15	Eksp
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.434.175.000	1.962.593.419	80,62	94,75	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	4	Keg.
a.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	722.200.000	720.374.000	99,74	100	Terlaksananya CPNS Daerah yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III Golongan II	72 25	72 27	Org Ora

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
b.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	1.510.400.000	1.091.124.656	72,24	100	Terlaksananya pengiriman peserta: ~ Diklatpim Tingkat IV ~ Diklatpim Tingkat III	35 4	35 4	Org Org
c.	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	157.075.000	151.094.763	96,19	100	Terlaksananya ~ Bimbingan Teknis Kepegawaian ~ Siraman Rohani PNS	1 7	1 7	Keg Keg
d.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	44.500.000	0	0	0	Pengiriman peserta perancang undang – undang	1	0	Org
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.722.816.550	1.385.448.944	80,41	88,82	Terlaksananya kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	11	11	Keg.
a.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	220.006.750	169.983.383	77,26	75	Terlaksananya pelantikan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural	2	0	Keg
b.	Seleksi penerimaan calon PNS	113.536.000	48.525.500	42,74	100	SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2016 jalur khusus	29	29	Org
c.	Penempatan PNS	136.628.500	76.045.300	55,65	47,07	Terlaksananya : ~ Keputusan CPNS Formasi Th 2016 ~ Usulan Formasi tahun 2016 ~ Keputusan mutasi ASN	92 1 250	- 1 103	Org Buku Org
d.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	182.900.000	179.341.103	98,05	71,57	Terlaksananya : ~ Keputusan Kenaikan Pangkat PNS ~ Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS ~ Keputusan Pencantuman Gelar ~ Keputusan Peninjauan Masa Kerja PNS	1000 90 15 15	585 79 19 2	SK CPNS PNS PNS
e.	Pembangunan/ Pengembang an sistem informasi kepegawaian daerah	108.310.000	105.186.897	97,11	100	Terselenggaranya pengelolaan data dan layanan inforamsi kepegawaian	12	12	Bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
f.	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	33.500.000	29.410.000	87,79	100	Terfasilitasinya PNS Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti ~ Seleksi administrasi tugas belajar ~ Ijin belajar ~ Ujian Dinas ~ Ujian penyesuaian ijasah	10 75 20 20	18 61 231 7	Org Org Org Org
g.	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	192.196.000	156.252.552	81,29	93,29	~ Piagam satyalancana ~ Keputusan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun ~ Pengambilan sumpah/janji PNS ~ Kartu TASPEN ~ KARPEG ~ KARIS/KARSU	100 75 260 100 100 300	79 116 203 29 39 540	Lbr SK Buah Buah Buah Buah
h.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	142.289.300	112.548.106	79,09	100	Terlaksananya pemrosesan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	12	12	Bln
i.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	581.550.000	501.946.103	86,31	100	Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS meliputi : ~ Jenjang S1 ~ Jenjang S2	10 5	10 8	Org Org
j.	Pemberian bantuan penyelengga raan penerimaan Praja IPDN	6.900.000	2.160.000	31,30	82,67	Terlaksananya penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Jumlah Capra IPDN	1 25 2	1 12 2	Perio de Pela mar Org
k.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.000.000	4.050.000	81	100	Terlaksananya monitoring disiplin PNS	6	6	Kec.

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kobar

Permasalahan Badan Kepegawaian :

1. Adanya penjadwalan kegiatan yang menyesuaikan jadwal dari Pusat.
2. Asesmen Managerial belum bisa dilaksanakan karena menunggu PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Masih terlambatnya proses penyelesaian kenaikan pangkat khususnya tenaga fungsional tertentu karena kesalahan perhitungan angka kredit

Upaya Pemecahan masalahBadan Kepegawaian :

1. Perlu adanya koordinasi kegiatan yang intensif.
2. Menunggu pengesahan PP 18 Tahun 2016 untuk mengetahui jumlah perangkat daerah yang akan dibentuk.
3. Perlu sosialisasi khusus kepada fungsional tertentu terkait dengan mekanisme kenaikan pangkat.

20.5 INSPEKTORAT KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, dan pencegahan terhadap peluang praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi.

Pengawasan intern salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP

harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, selama Tahun 2016 dilakukan beberapa hal yaitu

1. Pemeriksaan reguler Desa dengan jumlah obyek pemeriksaan 28, dengan temuan 120 dan jumlah rekomendasi sebanyak 325. Sedangkan pemeriksaan reguler SKPD dengan jumlah obyek pemeriksaan 10, dengan jumlah temuan 49 dan jumlah rekomendasi 136. Hasil dari pemeriksaan reguler desa dan SKPD Tahun 2016 yang telah ditindak lanjuti rekomendasinya sejumlah 299.
2. Melakukan review laporan kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPD dengan hasilnya adalah Laporan Kinerja Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang disusun masih terdapat salah saji dan kekurangan penyajian data dan informasi yang diperlukan, dengan rekomendasi terhadap hasil tersebut adalah memperbaiki laporan kinerja Kab. Ktw. Barat Tahun 2015 sesuai hasil review tim Inspektorat Kobar.

Selanjutnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan berdasar jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT 2016) meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan reguler secara berkala
2. Monitoring dan evaluasi ADD;
3. Reviu penyerapan anggaran, pengadaan brg/jasa, monitoring dana desa;
4. Review LKPD;

5. Review LKIP;
6. Review RPJMD, Reviu RKA;
7. Monitoring inventarisasi aset tetap 2016;
8. Pemeriksaan Khusus (Pemsus);
9. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi Anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.2.405.271.000 dengan realisasi BL sebesar Rp. 2.197.176.165 atau 91,34 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.65
Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
Inspektorat		2.405.271.000	2.197.176.165	91,34	98,74	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	340.809.400	326.281.444	95,73	100	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	Keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.375.000	3.461.635	79,12	100	Terlaksananya penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya dan pengiriman paket surat dinas ke luar daerah	500	500	lbr
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	50.640.000	43.443.409	85,78	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan Inspektorat	12	12	Bln
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.100.000	2.344.400	75,62	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas/ operasional meliputi: ~ Roda 2 ~ Roda 4	15 2	15 2	Unit Unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.450.000	64.210.000	99,62	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di	12	12	Bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						lingkungan Inspektorat			
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.739.400	20.791.300	91,43	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	12	Bln
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.800.000	15.740.000	99,62	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Inspektorat berupa: ~ Printer ~ Scanner ~ Laptop	10 4 14	10 4 14	Unit Unit Unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	25.845.000	25.817.000	99,89	100	Terlaksananya penyediaan ATK untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	Bln
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.400.000	30.350.000	99,83	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa: ~ Cetak disposisi ~ Cetak stopmap logo ~ Cetak blangko NCR ~ Amplop Dinas 27x40 ~ Amplop Dinas 12x40 ~ fotocopy	50 500 20 10 10 80000	50 500 20 10 10 80000	Buku Buah Buku Pak Pak Lbr
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.200.000	3.182.000	99,43	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor, berupa : - lampu - baterai kecil - lampu pijar - baterai kering - fitting, steker, kabel	10 5 10 10 1	10 5 10 10 1	Buah Kotak Buah Buah Set
j.	Penyediaan makanan dan minuman	10.260.000	9.960.000	97,07	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	150	150	OK
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000	106.981.700	97,25	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	597.180.000	589.089.001	98,64	100	Terlaksananya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	4	Keg.
a.	Pembanguna n gedung kantor	443.500.000	442.736.500	99,82	100	Terlaksananya pembangunan aula kantor tahap 2	1	1	Pkt
b.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.480.000	24.224.541	98,95	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor beserta taman	200 m2	200 m2	Bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal	120.000.000	113.777.960	94,81	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi: ~ Roda 2 ~ Roda 4	12 2	12 2	Unit Unit
d.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.200.000	8.350.000	90,76	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa: ~ Air Conditioner (AC) ~ Jaringan internet ~ BBM potong rumput	13 1 70	13 1 70	Unit Thn Liter
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	46.000.000	45.742.400	99,44	100	Terlaksananya Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	Keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya	23.000.000	22.770.000	99	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Inspektorat	46	46	Stel
b.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23.000.000	22.972.400	99,88	100	Tersedianya kebutuhan pakaian adat daerah pegawai di lingkungan Inspektorat	46	46	Stel
4.	Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS	12.000.000	11.888.000	99,06	100	Terlaksananya kegiatan pada Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	1	1	Keg.
a.	Pemulangan pegawai yang pensiun	12.000.000	11.888.000	99,06	100	Terlaksananya bantuan pemulangan pegawai yang pensiun keluar daerah	1	1	Orang
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.750.000	3.648.000	97,28	100	Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.500.000	1.419.000	94,60	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	Lap.
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	750.000	741.000	98,80	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap.
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.500.000	1.488.000	99,20	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap.
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan	1.214.821.600	1.055.164.694	86,85	100	Terlaksananya Program Peningkatan Sistem	3	3	Keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
a.	Pelaksanaan Peng. Internal Secara Berkala	806.905.000	658.098.800	81,55	100	Terlaksananaya pemeriksaan internal secara berkala	60	73	Obrik
b.	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	15.657.500	15.334.900	97,93	100	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan khusus non reguler	5	5	Lap.
c.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	392.259.100	381.730.994	97,31	100	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	70	75	Obrik
7.	Program Peningkatan Profesionalis me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	154.900.000	147.280.906	95,08	100	Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	1	Keg.
a.	Pelatihan Pengembang an Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	154.900.000	147.280.906	95,08	100	Terlaksananya pelatihan terhadap tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	20	20	Orang
8.	Program Penataan & Penyempurna an Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	35.810.000	18.081.720	50,49	100	Terlaksananya Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	1	Keg.
a.	Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan	35.810.000	18.081.720	50,49	100	Terlaksananya penyusunan program kegiatan tahunan	2	2	Lap.

Sumber : Inspektorat

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten :

1. Masih terbatasnya aparatur pengawasan baik Auditor maupun P2UPD;
2. Masih rendahnya komitmen entitas terperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
4. Masih terbatasnya dana yang tersedia untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
5. Motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata;

6. Adanya 2 (dua) instansi pembina jabatan fungsional yang ada di Inspektorat Kabupaten/Kota;

Upaya Pemecahan masalah Inspektorat Kabupaten :

1. Mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti diklat-diklat Teknis;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada entitas diperiksa yang tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang masih rendah;
3. Mengusulkan program peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai daya dukung yang memadai dalam pelaksanaan tupoksi;
4. Mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi;
6. Koordinasi dan konsultasi dengan APIP lainnya (Irjen, BPKP, Inspektorat Provinsi)
7. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan yang bersifat strategis;
8. Menyelenggarakan pelatihan kantor sendiri bekerja sama dengan BPKP;
9. Melaksanakan pengawasan secara komprehensif.

20.6 KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN (KPTP)

Lahirnya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadikan Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah yang telah menerapkan prinsip pelayanan satu pintu kepada masyarakat. Langkah tersebut dikatakan strategis karena akan membawa dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan investasi.

Terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan investasi, maka dampak langsung maupun tidak langsung yang akan terjadi adalah dengan meningkatnya investasi daerah mampu menciptakan peluang kerja serta mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Langkah strategis yang diambil berupa kemudahan dan

kecepatan memperoleh layanan perizinan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) sebaiknya diikuti dengan stabilitas iklim investasi daerah seperti : konsistensi regulasi (kepastian hukum), stabilitas keamanan dan dukungan pemerintah daerah.

Selain itu, kejelasan regulasi tentang apa dan bagaimana pelayanan prima pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) dilaksanakan harus jelas dan tegas, sehingga prinsip cepat dan mudah yang diharapkan masyarakat akan dapat terwujud, karena sebuah lembaga pelayanan publik yang tidak memiliki kewenangan yang jelas berupa regulasi pelimpahan wewenang, maka kepastian waktu, prosedur yang sederhana, kemudahan serta biaya yang murah sebagaimana prinsip pelayanan prima tidak akan tercapai.

Salah satu tujuan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) adalah agar masyarakat dapat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat (one stop service), dimana penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat. Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah mengembangkan sistem pelayanan perizinan yang Cepat, Tepat, Sederhana, Transparan dan Murah sehingga terjamin kondisi yang kondusif dan kesempatan yang sama dalam bekerja / berusaha.

Semakin berkembangnya teknologi internet, saat ini Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai aplikasi SIMKPTP untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada alamat website yaitu simkptp.kotawaringinbaratkab.go.id. Website ini berguna untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara cepat, serta memberikan berbagai informasi perizinan dengan mudah.

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat menangani beberapa jenis izin yaitu sebanyak 15 jenis izin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan / Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berikut ini adalah informasi tentang jenis dan realisasi izin yang diterbitkan oleh sebagai berikut :

Tabel 4.66
Jenis dan Realisasi Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2014 s/d 2016

No.	Jenis Izin Usaha	Ralisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	2016		
				Target	Realisasi	% target
1.	IMB	1.229	769	769	749	97,40
2.	SITU	700	573	573	587	102,44
3.	HO		550	550	496	90,18
4.	Reklame	13	0	0	0	0
5.	TDP	462	428	428	389	90,89
6.	IUI	1	1	1	1	100
7.	TDI		3	3	3	100
8.	SIUP	466	439	439	363	82,69
9.	TDG/R	3	10	10	10	100
10.	IUA	1	0	0	0	0
11.	IT (Izin Trayek)			0	0	0
12.	IUA-PP	41	18	18	15	83,33
13.	IT-PP	0	3	3	0	0
14.	IBA dan Logpond	107	36	36	23	63,89
15.	IUJK	112	145	145	103	71,03
JUMLAH		3.135	2.975	2.975	2.739	92,07

Sumber : KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2016 telah menerbitkan berbagai izin usaha sebanyak 2.739 izin. Izin yang diterbitkan terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 749 izin, Izin Tempat Usaha (SITU) 587 izin, Izin Gangguan (HO) sebanyak 496 izin, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 389 izin, Izin Usaha Industri (IUI) sebanyak 1 izin, Tanda Daftar Industri sebanyak 3 izin, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 363 izin, Tanda Daftar Gudang / Ruang sebanyak 10 izin, Izin Usaha Angkutan (IUA) dan Izin Trayek (IT) tidak ada yang mengajukan permohonan izin untuk tahun 2016. Kemudian Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman (IUA-PP) sebanyak 15 izin, Izin Trayek Perairan Pedalaman (IT-PP) sebanyak 0 izin, Izin Bangunan Air (IBA) dan Logpond sebanyak 23 izin, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 103 izin.

Dalam hal ini berdasarkan tabel di atas, bahwa di beberapa izin mengalami penurunan realisasi dalam penerbitan dibandingkan tahun

sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadi pembagian kewenangan penanganan perizinan dengan adanya PATEN di Kecamatan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu izin yang ditangani dengan persyaratan di bawah 100 m².

Pada tahun 2016 ini Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi IMB sebesar Rp. 2.843.897.572 dari targetnya yaitu Rp. 2.127.000.000 juga Retribusi HO sebesar Rp. 2.499.698.550 dari targetnya Rp. 3.059.000.000 Serta Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 18.611.997 dari targetnya Rp. 17.000.000 dengan demikian total PAD retribusinya sebesar Rp.5.362.208.119.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.521.151.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.432.608.410 atau 94,17 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.67

Program/Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Re al.	Sat
			Realisasi	(%)					
KPTP		1.521.151.000	1.432.608.410	94,17	100	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	775.664.700	726.752.527	93,69	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	Keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	176.376.000	158.003.938	89,58	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan KPTP	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.000.000	1.186.500	39,55	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : • Roda 2 • Roda 4	6	6	Unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	140.607.250	118.789.550	84,48	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan KPTP	12	12	Bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	39.770.300	37.659.900	94,69	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	12	Bln
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.500.000	33.200.000	99,10	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan KPTP berupa : • Mesin tik • Komputer PC • Laptop/notebook • Printer • Jaringan Komputer	53	53	Unit / Buah
f.	Penyediaan alat tulis kantor	45.554.000	45.554.000	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	Bln
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	149.600.000	45.554.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop surat berkop dinas, blanko, spanduk	1	1	Pkt
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.550.000	7.550.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor	12	12	Bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Re al.	Sat
			Realisasi	(%)					
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.258.000	100.000.000	99,74	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas yaitu : • Komputer Desktop / PC • Komputer Note • Printer • Layar Proyektor • Proyektor • Pesawat telephon	4 2 4 1 1 2	4 2 4 1 1 2	Buah Buah Buah Buah Buah
j.	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.878.000	4.860.000	99,63	100	Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan yaitu : • Gelas Cngkir • Sendok • Keranjang sampah stinlees	2 2 4	2 2 4	Set Lusin Buah
k.	Penyediaan makanan dan minuman	10.790.000	9.840.000	91.19	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	12	12	Bln
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	63.781.150	60.508.639	94,86	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	507.585.800	497.579.242	98,02	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	Keg.
a.	Pembangunan gedung kantor	165.125.700	162.048.000	98,13	100	Terlaksananya Penyediaan Penataan Interior Ruang pelayanan dan ruang rapat serta penambahan daya listrik	2	2	Pkt
b.	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	207.725.000	206.325.000	99,32	100	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa : • Lemari Arsip Kayu • Lemari Arsip Besi • AC • Meja Pelayanan • Meja CS • Kursi Rapat • Jam dinding digital	3 6 2 1 1 16 4	3 6 2 1 1 16 4	Buah Buah Unit Pkt Buah Buah Buah
c.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	55.500.100	55.500.000	99,99	100	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor meliputi : • Pengecatan bagian luar gedung Kantor • Perawatan pitu/ Jendela • Pemeliharaan Instalasi Air	1 10 1	1 10 1	Pkt Buah Pkt
d.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	73.745.000	68.756.242	93,23	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : • Roda 2	6	6	Unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Re al.	Sat
			Realisasi	(%)					
						Roda 4			
e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.490.000	4.950.000	90,16	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)	9	9	Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	24.300.000	24.300.000	100	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	24.300.000	24.300.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan KPTP	50	50	Stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	94.554.000	85.531.141	90,45	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg.
a.	Pendidikan dan pelatihan formal	94.554.000	85.531.141	90,45	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti : - Diklat pemantapan aparatur - Pendidikan dan pelatihan SDM	1	1	Thn
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.471.500	2.570.500	57,48	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1.490.500	1.184.000	79,43	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10	Buku
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.490.500	0	0	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	10	10	Buku
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.490.500	1.386.500	93,02	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	Buku
6.	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	108.600.000	91.475.000	84,23	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Optimalisasi pemamfaatan teknologi informasi	1	1	Keg
a.	Penyusunan sistem informasi layanan publik	108.600.000	91.475.000	84,23	100	Terlaksananya sosialisasi Perizinan terhadap masyarakat dan pengusaha	6	6	Loka si
7.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	5.975.000	4.400.000	73,64	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1	1	Keg
a.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan	5.975.000	4.400.000	73,64	100	Terlaksananya pendataan perizinan di Kecamatan Kumai	1	1	Kec

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Re al.	Sat
			Realisasi	(%)					
	masyarakat								

Sumber : KPTP Kobar

Permasalahan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan :

- 1. Belum optimalnya Pelayanan Perizinan / Non Perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 2. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Bupati Kotawaringin Barat yang dapat menjadi acuan / dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang sesuai Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah;
- 3. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus di bidang perizinan, misalnya ahli program komputer, ahli dalam pengolahan data base, dan lain-lain;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

- 1. Perlunya dukungan tenaga teknis yang profesional untuk meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 2. Melakukan perumusan bersama tenaga teknis terkait dalam hal rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan untuk menciptakan pelayanan maksimal kepada masyarakat;
- 3. Menambah/mengadakan sarana pendukung yang masih dirasa perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- 4. Mengirimkan/mengikutsertakan staf Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja pegawai;

20.7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Maka tanggung jawab tersebut dipegang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Di tingkat daerah, dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karena itu, landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial. Pertama, Bencana Alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena factor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Kedua, Bencana Non Alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Ketiga, Bencana Sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kesehatan PU, dll. Begitu pula pada Tingkat Kabupaten, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Pengisian dan Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013.

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat alokasi anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 12.317.432.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.211.582.059 atau 99,14%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.68
Program / Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
BPBD		12.317.432.000	12.211.582.059	99,14	100	-			
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran	854.501.050	795.067.939	93,60	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Adm. Perkantoran	100	100	%
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	90.500	90.500	100	100	Jumlah Pkt yang dikirim	5	5	Pkt

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.606.000	65.995.665	96,19	100	Jumlah bulan pembayaran tagihan rekening air, listrik, speedy, surat kabar	12	12	Bln
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal	35.450.000	17.241.000	48,63	100	Jumlah kendaraan yang dibayarkan Administrasi Perpajakan - Roda 2 - Roda 4 - Roda 6	7 2 9	7 2 9	Unit Unit Unit
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	149.503.850	131.314.500	87,83	100	- Jumlah panitia pelaksana kegiatan - Jumlah pembelian Buku Cek - Jumlah pembelian materi - Jumlah Pegawai Kontrak	19 2 700 2	18 1 700 2	Org Org Lbr Org
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.240.100	22.687.400	80,33	100	- Lama pembayaran upah honor dan kebersihan - Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan	12 18	12 18	Bln Jenis
6.	Penyediaan alat tulis kantor	47.045.000	47.045.000	100	100	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	37	37	Jenis
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.700.000	30.700.000	100	100	- Jumlah jenis barangcetakan : - JumlahPenggandaan /fotocopy :	5 3.600	5 3.600	Jenis Lbr
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000	7.000.000	100	100	Jumlah jenis komponen instalasi listrik BPBD - Lampu SL - Terminal listrik - Kabel listrik - Baterai kering - Fitting listrik	50 10 5 20 10	20 10 5 20 10	Buah Buah Rol Pak Ktk
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	117.500.000	116.895.000	99,48	100	Jumlah / jenis penyediaan peralatan danperlengkapan kantor - Antena Orari - Repeater Orari - Handy Talky	1 1 7	1 1 7	Pkt Pkt Unit
10.	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.095.000	5.085.000	99,80	100	- Jumlah jenis perlengkapan dapur - Jumlah pembelian mesin potong rumput	1 1	1 1	Set Unit
11.	Penyediaan makanan dan minuman	113.630.000	105.670.000	92,99	100	Lama penyediaan makan/minum pegawai dan rapat	12	12	Bln
12.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	251.640.600	250.146.365	99,40	100	Lama pelaksanaan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi ke luar	12	12	Bln
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	564.327.200	539.317.794	95,56	100	Terlaksananya kegiatan pada progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur			

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Pembangunan Gedung Kantor	222.457.200	199.773.000	89,80	100	Jumlah pkt pekerjaan pemb. Garasi Damkar	1	1	Pkt
2.	Pengadaan kendaraan dinas/operasi onal	108.000.000	106.568.000	98,67	100	- Jumlah pengadaan Kendaraan DinasRoda 2 - Jumlah Pkt Pengiriman Peralatan Hibah BNPB	1 1	1 1	Unit Pkt
3.	Pengadaan mebeleur	55.650.000	54.891.394	98,63	100	Jumlah/Jenis Pengadaan meubeler kantor: - Lemari Arsip - Meja Staf - Kursi Staf - Kasur untuk Piket Damkar - Filling Kabinet - Kursi Rapat - Gorden	3 4 2 6 1 10 1	3 4 2 6 1 10 1	Unit Unit Unit Buah Unit Unit Set
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52.500.000	52.374.000	99,76	100	Volume Gedung Kantor yang Terpelihara	300	300	M2
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal	114.620.000	114.617.000	99,99	100	- Jumlah Kendaran dinas/operasional yang disediakan BBM : Roda 2 Roda 4 - Jumlah Ban Mobil yang diganti - Jumlah ban motor yang diganti - Jumlah gear set yang diganti	7 4 8 4 2	7 4 8 4 2	Unit Unit Unit Unit Set
6.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	9.300.000	9.300.000	100	100	Jumlah/jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara: - AC - Desktop - Notebook - Printer	5 5 5 5	5 5 5 5	Unit Unit Unit Unit
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.500.000	4.470.000	99,33	100	- Jumlah Genset yang dipelihara - Jumlah penyediaan BBM Genset	3 240	3 240	Unit Liter
C	Program peningkatan disiplin aparatur	78.400.000	78.400.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	Keg.
1.	Peng.pakaian dinas beserta perlengkapan nya	28.000.000	28.000.000	100	100	- Jumlah Pengadaan PDH BPBD	57	57	Stel
2.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	50.400.000	50.400.000	100	100	- Jumlah Pengadaan PDL BPBD	57	57	Stel
D.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	48.456.300	48.456.300	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg.

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	48.456.300	48.456.300	100	100	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	6	6	Org
E.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	3.538.000	3.538.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	Keg.
1.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.358.000	1.358.000	100	100	Jumlah laporan keuangan semesteran	10	10	Buku
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.180.000	2.180.000	100	100	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	20	20	Buku
F.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulan gan Korban Bencana Alam	1.064.163.250	1.053.519.547	98,99	100	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur	60	50	%
1.	Pemantauan penyebarluas an informasi potensi bencana alam	116.315.000	116.312.000	99,99	100	- Jumlah kegiatan sosialisasi	2	2	Keg.
	Patroli Satgas dan Posko Penanggulan gan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan	841.448.250	833.168.272	99,01	100	Terlaksananya patroli satgas dan posko penanggulangan kebakaran hutan lahan dan pekarangan	6	6	Kec.
	Patroli Pencegahan dan Siap Siagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor	106.400.000	104.039.275	97,78	100	Terlaksananya patroli dan pengawasan di wilayah ktw. Barat pada musim hujan	6	6	Kec.
G.	Program Tanggap Darurat Pasca Bencana	9.661.684.200	9.651.4825.688	99,89	100	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	60	50	%
1.	Penyusunan Program dan Rencana Rehab.dan Rekonstruksi	44.635.000	44.625.000	99,97	100	Jumlah Dokumen RR yang Disusun	12	12	Dok
2.	Penyusuna Laporan dan Evaluasi RR Pasca Bencana	34.500.000	34.179.301	99,07	100	Jumlah Laporan Evaluasi RR	12	12	Dok
3.	Pengendalian Program RR	44.385.000	44.356.702	99,93	100	Jumlah Laporan koordinasi	10	10	Dok
4.	Rehabilitasi	9.538.164.200	9.528.321.685	99,89	100	Jumlah pekerjaan	12	12	Pkt

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	dan Rekonstruksi Pasca Bencana					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			
H.	Program Tanggap Darurat	42.362.000	37.122.300	87,33	100	Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat	80	79,86	%
1.	Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC	4.120.000	3.375.000	81,91	100	Jumlah anggota TRC dalam penanganan tanggap darurat	15	15	Keg.
2.	Pengangkutan Logistik	32.642.000	28.722.300	87,99	100	Lama penyediaan transportasi untuk pengangkutan logistik	12	12	Bln
3.	Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana	5.600.000	4.900.000	87,50	100	- Lama Kegiatan Monitoring - Jumlah Rapat Evaluasi Status Darurat Bencana	12 2	12 2	Bln Keg.

Sumber : BPBD Kobar

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat:

- 1) Terbatasnya personil BPBD dalam melakukan operasi penanggulangan bencana;
- 2) Belum memadainya pendanaan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dalam penanganan tanggap darurat;
- 3) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penanganan kebencanaan;
- 4) Belum optimalnya kapasitas dan peran Tim Reaksi Cepat (TRC).

Upaya Pemecahan Masalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat:

- 1) Melakukan operasi terpadu dalam melaksanakan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan lintas sektor (TNI, Polri, Dinas Kehutanan, BKSDA, Dinas Sosial, dan Relawan/masyarakat) ;
- 2) Melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB (mengajukan proposal bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB dan Sarpras Penanggulangan bencana)

- 3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui Sosialisasi, Pelatihan dan Patroli kesiapsiagaan;
- 4) Meningkatkan kapasitas TRC melalui bimtek / pelatihan;

20.8 KANTOR KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis dan vital karena merupakan ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, disamping pemerintahan desa dan kelurahan.

Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan bahwa tugas kecamatan adalah “Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

8.a KECAMATAN ARUT SELATAN

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016, Kantor Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.476.526.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.328.900.937,03 atau 94,03 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.69
Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun
Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Selatan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
Kecamatan Arut Selatan		2.476.526.000	2.328.900.937,03	94,03	95	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.275.296.296	1.180.915.830,03	92,59	93	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	162.300.000	136.991.637	84,40	84,40	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kec dan kel	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.200.000	3.078.000	49,64	49,64	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	16 2	16 2	Unit Unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	443.334.200	426.920.400	96,29	96,29	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta honor petugas jaga malam	12 137	12 137	Bln RT
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.470.200	49.928.000	95,15	95,15	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan serta peralatan kebersihan kantor	2 1	2 1	Orang Pkt
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	29.750.000	17.800.000	59,83	59,83	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ~ Faximile ~ Printer ~ Laptop ~ Komputer PC ~ LCD Proyektor	1 30 5 20 8	1 18 5 20 8	Unit Unit Unit Unit Unit
f.	Penyediaan alat tulis kantor	72.006.000	72.006.000	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pekerjaan rutin	1 7	1 7	Kec. Kel.
g.	Penyediaan barang	31.175.000	30.250.000	97,03	97,03	Terlaksananya pvenyediaan	1	1	Kec.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	cetakan dan penggandaan					barang cetakan berupa spanduk dan foto copy penggandaan	7	7	Kel.
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	18.609.782	18.609.782	100	100	Terlaksananya penyediaan penjilidan dan pengadaan dok kantor berupa : ~ Lampu hemat energi ~ Kabel rol ~ Steker	250 1 5	250 1 5	Buah Buah Buah
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	138.516.000	138.516.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk berupa : ~ CPU komputer ~ Printer ~ Scanner F-4 ~ LCD Proyektor ~ CCTV ~ Aplikasi	3 10 1 6 1 1	3 10 1 6 1 1	Set Unit Unit Unit Set Pkt
j.	Penyediaan makanan dan minuman	86.260.000	80.465.000	93,28	93,28	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan kelurahan serta makan minum rapat	1	1	Tahun
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	234.675.114	206.351.011,03	87,93	87,93	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan pembinaan desa	1	1	Tahun
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	987.503.000	950.767.000	96,27	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
a.	Pembangunan gedung kantor	421.200.000	418.574.000	99,37	100	Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor Kel. Mendawai Seberang serta tambah daya listrik kantor kelurahan	1 3	1 3	Unit Kel
b.	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	5.800.000	5.800.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ~ Bendera Merah Putih ~ Audio Visual	1 7	1 7	Kec. Kel.
c.	Pengadaan peralatan	28.512.000	28.512.000	100	100	Terlaksananya penyediaan:			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	gedung kantor					- Genset	1	1	Unit
d.	Pengadaan meubeleurn	75.075.000	74.384.000	99,07	100	Terlaksananya penyediaan - Kursi kerja	7	7	Kel
e.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	74.576.000	74.119.000	99,38	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan dan kelurahan	8	8	Kantor
f.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	157.200.000	130.050.000	82,72	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	16 2	16 2	Unit Unit
g.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.940.000	10.080.000	72,30	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : ~ Mesin potong rumput ~ Air Conditioner (AC)	4 18	4 18	Unit Unit
h.	Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	211.200.000	209.248.000	99,07	100	Terlaksananya rehab: ~ Rehab kantor PKK Kel. Baru tahap II	1	1	Kantor
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	59.400.000	59.400.000	100	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur			
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	59.400.000	59.400.000	100	100	Tersedianya pakaian PDH di lingkungan Kecamatan Arut Selatan	120	120	Stel
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	25.000.000	24.342.003	97,36	100	Tercapaiannya hak-hak pegawai			
a.	Pemulangan pegawai yang pension	25.000.000	24.342.003	97,36	100	Terpenuhinya hak pegawai	1	1	Org
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	126.282.704	111.494.104	88,28	88,28	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
a.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	28.912.000	14.329.500	49,56	49,56	Terlaksananya : ~ Sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan dan administrasi desa	1	1	Keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
b.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	97.370.704	97.164.604	99,78	70	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	14	14	Org
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.044.000	1.982.000	65,11	70	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	794.000	644.000	81,10	81,10	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	5	Dok.
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.125.000	570.000	50,66	50,66	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5	5	Dok.

Sumber : Kecamatan Arut Selatan

8.b KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.122.302.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.041.114.495 atau 92,76 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.70
Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Kec. Kotawaringin Lama		1.122.302.000	1.041.114.495	92,76	96,32	-			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	748.372.000	728.957.753	97,40	99,86	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	Keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	65.400.000	60.422.979	92,38	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.325.000	2.498.000	57,75	75	Terlaksananya jasa pengurusan perizinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : □Roda 2 □Roda 4 □Roda 3	10 2 7 1	7 2 5 -	Unit Unit Unit Unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	291.525.400	283.404.600	97,21	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Kotawaringin Lama	12	12	Bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.051.000	56.929.500	98,06	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	6 1	6 1	Org Pkt
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.970.000	16.400.000	96,64	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : - Komputer - Laptop - Printer - Jaringan Komputer - Fax	24 6 8 8 1 1	24 6 8 8 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit
f.	Penyediaan alat tulis kantor	26.395.100	25.851.000	97,93	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	Bln
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.282.500	16.164.750	99,27	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop dinas dan spanduk serta foto copy penggandaan	12	12	Bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.675.000	5.200.150	91,63	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	12	12	Bln
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	69.000.000	68.255.000	8,92	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : - PC - Laptop - Printer - GPS	4 2 6 1	4 2 6 1	Unit Unit Unit Unit
j.	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.500.000	6.500.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga berupa - Dispenser - Kulkas	3 2	3 2	Unit Unit
k.	Penyediaan makanan dan minuman	56.220.000	55.310.000	98,38	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat	222	222	Org
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	132.028.000	132.021.774	99,99	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	Bln
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	255.400.000	221.610.800	86,77	98,01	Tercapainya sasaran kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10	10	Keg.
a.	Pengadaan kendaraan dinas operasional	66.000.000	58.239.600	88,24	100	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 2 untuk operasional	3	3	Unit
b.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.300.000	20.085.000	98,94	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : - Brankas - Kipas angin - Jam dinding - Televisi	1 10 5 1	1 10 5 1	Buah Buah Buah Buah
c.	Pengadaan Mebeleur	49.600.000	48.526.000	97,83	100	Terlaksananya penyediaan mebeleur kantor kecamatan berupa: - Meja kerja ½ biro - Meja Kerja 1 Biro	10 12	10 12	Buah Buah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						- Kursi Putar - Kursi Tunggu	12 2	12 2	Buah Buah
d.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	16.500.000	6.985.000	42,33	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan camat	2	1	Unit/ th
e.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	14.921.000	99,47	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor meliputi : - Gedung kantor kelurahan ktw. Hilir - Gedung kantor camat	200 300	200 300	M2 M2
f.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.500.000	68.746.700	85,39	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : - Roda 2 - Roda 4 - Roda 3	9 2 6 1	9 2 6 1	Unit Unit Unit Unit
g.	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	7.500.000	4.107.500	54,76	100	Terlaksananya pemeliharaan mesin potong rumput	5	5	Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	30.000.000	29.205.000	97,35	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30.000.000	29.205.000	97,35	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) di lingkungan Kecamatan Kotawaringin Lama	60	60	Stel
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	84.000.000	61.340.942	73,02	91,27	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	2	Keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	84.000.000	61.340.942	73,02	91,27	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan - Bimbingan Teknis - Kontribusi	1 8	1 7	Thn OK
7.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan	4.530.000	00	0	95,36	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan	1	1	Keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	keuangan desa					fasilitasi pengelolaan keuangan desa			
a.	Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	4.530.000	00	0	95,36	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa	1	1	Keg.

Sumber : Kecamatan Kotawaringin Lama

8.c KECAMATAN KUMAI

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 Kantor Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.162.877.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.084.719.127 atau 93,27 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.71
Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kumai Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Kec. Kumai		1.162.877.000	1.084.719.127	93,27	100	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	798.203.500	753.905.027	94,45	97,30	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	Keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	71.388.000	66.006.892	92,46	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.050.000	2.756.500	68,06	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	13 2	13 2	Unit Unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	332.991.200	304.811.800	91,53	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Kumai	12	12	Bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	73.080.800	72.741.500	99,53	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	4 1	4 1	Org Pkt
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.500.000	6.675.000	70,26	70,26	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ~ Komputer ~ Notebook ~ Printer	10 4 10	7 2 7	Unit Unit Unit
f.	Penyediaan alat tulis kantor	51.517.000	51.517.000	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1 3	1 3	Kec. Kel.
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.400.000	30.399.000	99,99	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa amplop dinas dan blanko serta foto copy penggandaan	1 3	1 3	Kec. Kel.
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.060.000	3.060.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	12	12	Bln
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000	8.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Proyektor	1	1	Unit
j.	Penyediaan makanan dan minuman	113.870.000	113.850.000	99,98	100	Terlaksananya penyediaan makan rapat dan minum harian PHL kecamatan dan kelurahan serta snack rapat	12	12	Bln
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.346.500	94.087.335	93,76	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	Bln
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	216.833.500	200.164.000	92,31	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	3	Keg.

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
a.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	59.933.500	58.133.500	96,99	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor meliputi : ~ Gedung Kantor kecamatan ~ Halaman kantor kec. ~ Halaman 3 kelurahan ~ Gedung Kantor 3 kelurahan	100 400 150 90	100 400 150 90	M2 M2 M2 M2
b.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	153.300.000	138.430.500	90,30	100	Terlaksananya service, suku cadang dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	13 2	13 2	Unit Unit
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.600.000	3.600.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa Air Conditioner (AC)	12	12	Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	34.280.000	34.280.000	100	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34.280.000	34.280.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai dan pakaian kerja di lingkungan Kecamatan Kumai	70	70	Stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	83.057.000	65.943.100	79,39	90	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	83.057.000	65.943.100	79,39	90	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	10	9	OK
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.742.000	2.716.000	99,05	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	Keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.110.000	1.358.000	99,05	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	Lap.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.371.000	1.358.000	99,05	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap.
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	27.761.000	27.711.000	99,81	100	Tercapainya administrasi keuangan desa yang tertib dan baik	1	1	Keg.
a	Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	27.761.000	27.711.000	99,81	100	Teriaksananya evaluasi penyusunan APB Desa	1	1	Keg.

Sumber : Kecamatan Kumai

8.d KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 974.031.000 dan terealisasi sebesar Rp. 899.365.577 atau 92,33%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.72
Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Kec. Pangkalan Banteng		974.031.000	899.365.577	92,33	100	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	469.905.000	440.732.972	93,79	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	Keg

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	53.200.000	33.719.003	63,38	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar di lingkungan kantor kecamatan	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.450.000	3.019.400	87,51	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	11 7 2	8 7 2	Unit Unit Unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	109.370.050	108.752.250	99,43	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Pangkalan Banteng	12	12	Bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.028.200	34.683.200	91,20	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	2 1	2 1	Org Pkt
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.590.000	10.044.000	94,84	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : ~ Komputer ~ Notebook ~ Printer	6 3 3	6 3 3	Unit Unit Unit
f.	Penyediaan alat tulis kantor	23.554.500	23.154.500	98,30	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Pkt
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.100.000	24.100.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk, bulletin, amplop berkop dinas serta foto copy penggandaan	12	12	Bln
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	5	5	Jns
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	55.500.000	55.349.000	99,72	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Komputer ~ Notebook ~ Printer ~ Komputer Noot Book ~ Jaringan Komputer	3 3 2 1	3 3 2 1	Unit Unit Unit Unit
j.	Penyediaan makanan dan	26.251.000	25.632.000	97,64	100	Terlaksananya penyediaan makan	3	3	Org

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	minuman					dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat	1	1	Thn
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	123.861.250	120.279.619	97,10	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	Bln
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	403.150.000	396.953.800	98,46	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	Keg
a.	Pembangunan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	100	100	Bertambahnya Daya Listrik dari 2.200 Va ke 6.600 Va	1	1	Sam bung an
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan - AC 2 Pk Ruang Kerja - AC ½ Pk Ruang Sekcam - Kipas Angin Aula Kecamatan	2 1 8	2 1 8	Unit Unit Unit
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	3.750.000	3.711.000	98,98	100	Terlaksananya pemeliharaan - rumah jabatan kecamatan	30	30	M2
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3.000.000	2.975.000	99,16	100	Terlaksananya pemeliharaan : - Mushola	15	15	M2
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	90.600.000	87.568.000	96,65	100	Terlaksananya service dan penggantian suku cadang serta penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	7 2	7 2	Unit Unit
f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.300.000	4.500.000	84,90	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : - BBM mesin ptg rumput - mesin potong rumput , - AC,	2 2 5	2 - 6	Unit Unit Unit
g.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	265.500.000	263.199.000	99,13	100	Terlaksananya rehab ruang pelayanan Paten Kecamatan	1	1	Pkt
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	14.820.000	12.820.000	86,50	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	23 Stel	23 Stel	Keg
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengka pannya	14.820.000	14.820.000	86,50	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) pegawai di lingkungan kantor Kecamatan Pangkalan Banteng	23	23	Stel
4.	Program peningkatan kapasitas	80.761.000	44.733.805	55,39	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program	9	9	Keg

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	sumber daya aparatur					peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	80.761.000	44.733.805	55,39	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	9	5	Kali
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	670.000	0	0	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	200.000	0	0	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	Lap
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	200.000	0	0	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Lap
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	270.000	0	0	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Lap
6.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	4.725.000	4.125.000	87,30	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	Keg
a.	Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	4.725.000	4.125.000	87,30	100	Terlaksananya pendampingan penyusunan APBDes oleh Tim	17	17	Ds

Sumber : Kecamatan Pangkalan Banteng

8.e KECAMATAN PANGKALAN LADA

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 Kantor Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.304.796.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.114.212.599 atau 85,39 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.73
Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun
Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Lada

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.274.000	436.400.297	86,36	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	Bln
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	53.400.000	27.906.825	52,25	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan listrik, surat kabar dan internet di lingkungan kantor kecamatan	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.800.000	2.729.700	71,83	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda	9 2	9 2	Unit Unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	131.485.600	116.663.800	88,72	100	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Pangkalan Lada	12	12	Bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41.773.700	36.488.600	87,34	100	Terlaksananya penyediaan honorarium petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	2 1	2 1	Org Thn
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.560.000	10.730.000	79,12	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja - Komputer PC ~ Komputer Note Book ~ Printer	8 4 10	8 4 10	Unit Unit Unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
f.	Penyediaan alat tulis kantor	36.412.000	36.412.000	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Thn
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.450.000	25.450.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk, bulletin, amplop berkop dinas serta foto copy penggandaan	12	12	Bln
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.312.700	3.310.000	99,91	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor	12	12	Bln
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	44.150.000	41.270.000	93,47	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Plakat nama ruangan ~ Bendera merah putih ~ Jam LED kotak ~ Komputer notebook ~ Printer Dot Matrik ~ Peralatan jaringan internet kantor	7 7 2 2 1 1	7 7 2 2 1 1	Set Lbr Unit Unit Unit Set
j.	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000	4.070.000	81,40	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Tabung gas LPG 12 kg ~ Kompor gas ~ Dispenser ~ Kulkas	1 1 1 1	1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit
k.	Penyediaan makanan dan minuman	36.930.000	22.650.000	61,33	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan sertamakan dan minum rapat	3 1	3 1	Org Thn
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000	108.719.372	98,83	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	Bln
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana	673.330.000	589.185.600	87,50	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan	7	7	Keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	aparatur					sarana dan prasarana aparatur			
a.	Pembangunan gedung kantor	370.000.000	367.431.100	99,30	100	Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa : ~ Pengaspalan jalan lingkungan kantor ~ Lanjutan pembangunan pagar kantor ~ Pembangunan pintu masuk kantor	1 1 1	1 1 1	Pkt Pkt Pkt
b.	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	132.195.000	120.599.500	91,22	100	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor berupa : ~ Almari besi ~ Brankas ~ Air Conditioner (AC) ~ Kursi Kerja ~ Audio Visual	1 1 2 4 1	1 1 2 4 1	Unit Unit Unit Unit Pkt
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	28.125.000	28.000.000	99,55	100	Terlaksananya pemeliharaan aula kecamatan berupa : ~ Perbaikan jaringan listrik dan pengecatan dinding dalam	1	1	Pkt
d.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	132.200.000	66.280.000	50,13	100	Terlaksananya service dan penggantian suku cadang serta penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	8 2	8 2	Unit Unit
e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.810.000	6.875.000	63,59	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : ~ AC split ~ Mesin potong rumput			Unit Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	12.000.000	11.880.000	99	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.000.000	11.880.000	99	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	24	24	Stel
4.	Program peningkatan kapasitas	98.000.000	62.420.702	63,69	100	Terlaksananya kegiatan pada Program			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	sumber daya aparatur					peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	98.000.000	62.420.702	63,69	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	11	8	Org
5.	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.296.000	2.826.000	65,78	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.544.000	998.000	64,63	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10	Buku
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.376.000	914.000	66,42	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	10	10	Buku
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.376.000	914.000	66,42	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10	10	Buku
6.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	11.896.000	11.500.000	96,67	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	Thn
a.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	11.896.000	11.500.000	96,67	100	Terlaksananya pendampingan penyusunan APBDes oleh Tim	11	11	Desa

Sumber : Kecamatan Pangkalan Lada

8.f KECAMATAN ARUT UTARA

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 Kantor Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 947.352.000 dan terealisasi sebesar Rp. 907.734.662 atau 95,81 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.74

Program/ Kegiatan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arut Utara

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
Kec. Arut Utara		947.352.000	815.512.162	95,81		-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.084.000	469.314.962	96,55	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	10	Keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	24.480.000	18.351.280	74,96	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan listrik di lingkungan kantor kecamatan dan kelurahan diwilayahnya	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	5.400.000	1.840.000	34,09	50	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	11 2	5 1	Unit Unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	126.677.500	122.275.500	96,52	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan di lingkungan Kec. Aruta	12	12	Bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.779.400	34.772.400	94,54	100	Terlaksananya penyediaan Honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	2 8	2 8	Org Jenis
e.	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	3.500.000	3.500.000	100	100	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer di Kecamatan dan Kelurahan	7	7	Unit
f.	Penyediaan alat tulis kantor	18.286.000	18.288.000	100	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	Pkt
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.420.000	8.420.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk serta foto copy penggandaan	12	12	Bln
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/	2.010.000	2.010.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan	12	12	Bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	penerangan bangunan kantor					komponen instalasi listrik untuk penerangan lingkungan kantor			
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.500.000	32.500.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Laptop (kecamatan) ~ Printer (kecamatan) ~ Printer (kelurahan)	1 3 2 1	1 3 2 1	Pkt Unit Buah Buah
j.	Penyediaan makanan dan minuman	33.675.000	33.093.000	96,27	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL kecamatan dan snack rapat	6 320	6 320	Org Org
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	194.356.100	194.265.882	99,96	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	Bln
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	311.583.000	299.814.000	96.22	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	Keg.
a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	23.000.000	23.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan, Tangga Almunium dan Gorden untuk Aula Kantor Camat Rumah Dinas Camat	1 30 20	1 30 20	Buah Meter Meter
b.	Pengadaan meubeleur	28.000.000	28.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan mebeleur berupa Kursi Rapat untuk Aula Kecamatan	40	40	Buah
c.	Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	53.500.000	53.000.000	99,06	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin pada : Gedung Kantor Camat Aula Kantor Camat Pagar depan serta penataan taman kantor	1 1 1 1	1 1 1 1	Pkt Pkt Pkt Pkt

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
d.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	130.700.000	123.903.000	94,79	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	11 2	11 1	Unit Unit
e.	Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan gedung kantor	3.883.000	0	0	0	Terlaksananya pemeliharaan peralatan genset listrik agar siap pakai	2	0	Unit
f.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Kantor	72.500.000	71.911.000	99,18	100	Terlaksananya Pemasangan daya listrik Aula, Jaringan PAM serta rehabilitasi Rumah Dinas Camat	1 6 1	1 6 1	Buah Unit Buah
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	18.000.000	18.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.000.000	18.000.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian (PDH) di lingkungan Kecamatan Arut Utara	36	36	Stel
4.	Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS	3.000.000	3.000.000	100	100	Tersedianya bantuan pemulangan bagi PNS yang purna Tugas	1	1	Org
a.	Pemindahan Tugas/Purna Tugas PNS	3.000.000	3.000.000	100	100	Terlaksananya fasilitasi purna tugas bagi PNS	1	1	Org
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	118.000.000	106.922.700	90,61	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	2	Keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	118.000.000	106.922.700	90,61	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	13	11	Org
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.500.000	1.498.000	99,86	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan peng. sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	Keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	750.000	749.000	99,86	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	12	Eksp.
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	750.000	749.000	99,86	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12	12	Eksp.
7.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	9.185.000	9.185.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	1	Keg.
a.	Evaluasi rancangan paeraturan desa tentang APB Desa	9.185.000	9.185.000	100	100	Terlaksananya pembayaran honorarium : ~ Tim pendamping ADD	4	4	Org

Sumber : Kecamatan Arut Utara

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan :

1. Pelimpahan wewenang tugas-tugas yang diberikan kepada Camat dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat, dirasa masih belum bisa mengakomodasi kebutuhan dalam penerapan dan pelaksanaannya sebagai Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga pendelegasian tersebut tidak bisa berjalan maksimal sesuai harapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Terbatasnya jumlah SDM pagawai yang memiliki kompetensi yang diperlukan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran;
3. Belum dipisahkannya kelurahan dari SKPD Kecamatan membuat perbandingan pagu anggaran antara Belanja Pegawai (Belanja tidak langsung) dengan belanja Kegiatan (Belanja langsung) tidak proporsional;
4. Pemahaman yang kurang tepat oleh SKPD lain maupun masyarakat dan swasta tentang SKPD Kecamatan khususnya berkaitan dengan fungsi kewilayahan menyebabkan meluasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan;

5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan kantor kecamatan;

Upaya Pemecahan Masalah yang dilakukan Kecamatan :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2005 dengan tidak meninggalkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai salah satu acuan operasionalisasi di lapangan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai;
3. Meningkatkan koordinasi di tingkat bagian maupun lintas instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja langsung;
5. Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat dan pemerintah;

4.1.21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a) Kondisi Umum

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya diperlukan pendekatan yang tepat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di desa.

Terbatasnya akses dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan) dapat berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk mandiri.

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilakukan serta dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan kelembagaan dalam masyarakat serta pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui

pemantapan nilai sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna. Berikut adalah indikator dan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa th. 2015-2016 :

Tabel 4.75
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2015-2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	desa	77	94	77	81,10
2.	Jumlah musyawarah pembangunan desa/ kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel.	94	94	94	100
3.	Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	desa	1	1	1	100
4.	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih	orang	0	-	-	-
5.	Jumlah desa/ kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel.	1	1	1	100

Sumber : BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Dalam upaya pengentasan dan percepatan desa tertinggal pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 4.001.565.650 dan terealisasi sebesar Rp. 3.625.718.968 atau 90,60 %. Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.76
Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input		Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)
		Pagu	Keuangan		

		Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
BPMD		2.816.762.950	2.696.306.768	95,72	98,50				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	483.672.386	455.272.421	94,12	94,13	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	10	Keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	80.400.000	65.102.735	80,97	80,97	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan surat kabar serta internet	12	12	Bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.200.000	1.123.400	51,06	51,06	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi: ~ Roda 2 ~ Roda 4	6 1	2 1	Unit Unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.075.250	87.475.250	99,31	99,32	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan BPMD	12	12	Bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.235.000	31.021.100	93,34	93,34	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1 1	1 1	Org Pkt
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28.810.000	28.616.000	99,33	99,33	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan BPMD berupa : ~ Mesin tik ~ Komputer PC ~ Komputer notebook ~ Printer ~ Proyektor ~ Mesin faximili	 1 14 14 10 1 1	 1 14 14 10 1 1	 Unit Unit Unit Unit Unit Unit
f.	Penyediaan alat tulis ktr	64.518.500	64.089.750	99,34	99,34	Terlaksananya penyediaan ATK	1	1	Pkt
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	21.997.000	99,99	99,99	Terlaksananya penyediaan barang cetakan berupa spanduk foto copy dan penjilidan	66.000	66.000	Lbr
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.150.000	1.150.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa : ~ Bolamp SL ~ Bolamp SL	 20 10	 20 10	 Buah Buah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						glass ~ Kabel box	4	4	Buah
i.	Penyediaan makanan dan minuman	26.720.000	18.333.000	68,61	68,61	Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian PHL dan snack rapat	20 1	14 1	Kali Thn
j.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136.563.636	136.364.186	99,85	99,85	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	141.255.500	125.506.100	88,85	88,85	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	4	Keg.
a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.000.000	2.000.000	100	100	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1	1	Pkt
b.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	33.205.500	330.055.00	99,40	99,40	Terlaksananya pemeliharaan gedung gedung berupa : ~ pengecatan dinding kantor dan plafon ~ pengecatan halaman kantor ~ pengecatan pagar kantor ~ kilap kusen, jendela, pintu ~ perbaikan plafon	2.150 380 100 600 25	2.150 380 100 600 25	M2 M2 M2 M2 M2
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	98.100.000	82.600.600	84,20	84,20	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi: ~ Roda 2 ~ Roda 4	6 1	6 1	Unit Unit
d.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan ktr	7.950.000	7.900.000	99,38	100	Terlaksananya pemelih.peralatan AC	15	15	Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	19.500.000	19.461.000	99,80	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	Pkt
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.500.000	19.461.000	99,80	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan BPMD	39	39	Stel

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	67.000.000	65.698.900	98,06	98,06	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	Keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	67.000.000	65.698.900	98,06	98,06	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1	1	Thn.
5.	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.936.000	2.936.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	946.000	946.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	5	Buku
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	717.000	717.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	Buku
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.273.000	1.273.000	100	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	Buku
6.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.040.674.902	1.009.037.569	96,96	96,96	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	3	3	Keg.
a.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	381.688.000	372.800.889	97,67	97,67	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	1	1	Kali
b.	Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	34.817.800	32.099.920	92,19	92,19	Terlaksananya sosialisasi cara pengolahan dan penggunaan air bersih serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistem	120	120	Org
c.	Penyelengaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	624.169.102	604.136.760	96,79	96,79	Terlaksananya Gelar TTG dan Sosialisasi Posyantek dan Karya Bakti TNI 2016	1 1 1	- 1 1	Kali Kali Pkt

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
7.	Program Pengembang an Lembaga Ekonomi Pedesaan	249.289.300	237.080.765	95,10	95,10	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	2	2	Keg.
a.	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	105.140.400	102.603.400	97,59	97,59	Terlaksananya : ~ Monitoring Pasar Desa ~ Pelatihan pengelolaan pasar desa ~ Pembinaan pengelolaan pasar desa ~ Lomba pasar desa ~ Pembinaan pedagang pasar ~ Monev Rastra	6 6 2 6 6 6	6 6 2 6 6 6	Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.
b.	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil & Menengah di Pedesaan	144.148.900	134.477.365	93,29	93,29	Pelatihan Kades, BPD dan Sekdes serta Sosialisasi Penyusunan RPJMDes	6	6	Kec.
8.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	483.574.962	474.663.885	98,15	98,16	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dlm Membangun Desa	4		Keg.
a.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	146.217.300	142.877.200	97,72	97,72	Terlaksananya : ~ sosialisasi dana bantuan keuangan provinsi untuk desa dan kelurahan tahun 2016 ~ pemilihan juara desa PM2L tahun 2016 ~ Sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi desa lokasi PM2L ~ Pembekalan bagi aparatur desa, anggota BPD, kelembagaan desa dan PM2L tahun 2016	6 3 6 3	6 3 6 3	Kec. Desa Desa Desa
b.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	42.180.000	42.180.000	100	100	Terlaksananya pendampingan musyawarah rencana pembangunan desa	6	6	Kec.
c.	Pemberian Stimulan Pembangunan	215.867.662	210.317.325	97,43	97,43	Terlaksananya penyaluran program PMT-AS	325	325	Siswa

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	Desa					dan lomba desa/ kelurahan	3	3	Desa/ kel.
d.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	79.310.000	79.289.360	99,97	99,97	Terlaksananya monitoring penyaluran dana ADD dan Dana Desa	6	6	Kec.
9.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	202.497.500	194.980.478	96,29	96,29	Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa	2	2	Keg.
a.	Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	154.507.500	147.210.478	95,28	95,28	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Aparatur Pemdes dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	6	6	Kec.
b.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	47.990.000	47.770.000	99,54	99,54	Terlaksananya monitoring pembentukan BUMDes dan penyaluran Rastra serta pelaksanaan Bedah Rumah	6	6	Kec.
10.	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif (P2W - KSS)	83.262.400	72.005.400	86,48	86,48	Terlaksananya pelatihan perempuan di pedesaan	60	60	Org
a.	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif (P2W - KSS)	83.262.400	72.005.400	86,48	86,48	Terlaksananya pelatihan perempuan di pedesaan	60	60	Org
11.	Program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	43.100.000	39.664.250	92,03	92,03	Terlaksananya kegiatan pada Program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	1		Keg.
a.	Penyusunan pendataan profil desa dan kelurahan	43.100.000	39.664.250	92,03	92,03	Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan profil desa	94	75	Desa

Sumber : BPMD

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
SETDA		1.184.802.700	929.412.200	78,44	100	-			
1	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.083.502.700	830.717.200	76,66	100	-			
a	Pemberian stimulan pembangunan desa	44.000.000	36.000.000	81,81	100				
b	Pemilihan kepala desa	1.039.502.700	794.717.200	76,45					
2.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	101.300.000	98.695.000	97,42	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2	2	Keg.
a.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	71.300.000	69.995.000	98,16	100	Terlaksananya penyelenggaraan rapat kerja camat, kepala desa/kelurahan, BPD dan DKA se kabupaten Kotawaringin Barat	168	168	Org
b.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.000.000	28.700.000	95,66	100	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	35	35	Desa

Sumber : Setda

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk peduli lingkungan melalui sosialisasi penggunaan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam sebanyak 120 orang kader dengan tingkat capaian 92,12 %;
- 2) Terlaksananya monitoring pengelolaan pasar desa dan Pelatihan Pasar Desa sebagai bahan pengembangan pasar desa dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan di desa dan kelurahan di 6 kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat dengan tingkat capaian sebesar 97,59%;

- 3) Terlaksananya pembinaan pembangunan desa tertinggal dalam program PM2L dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa / kelurahan di Desa Sei. Sekonyer Kec. Kumai dan Desa Sambi Kec. Arut Utara.
- 4) Terbentuknya 58 BUMDes di 6 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai cikal bakal desa yang mandiri secara ekonomi.
- 5) Meningkatnya ketahanan fisik dan daya tahan tubuh siswa anak sekolah (SD/MI/Ponpes Negeri dan Swasta di 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat) melalui program PMT - AS berupa pemberian kudapan yang dibagikan secara reguler;
- 6) Terlaksananya lomba desa / kelurahan tingkat kabupaten dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa/kelurahan. Pada tahun 2016 didapatkan Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai sebagai Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan.
- 7) Terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan di perdesaan sebanyak 60 orang dalam rangka memberi nilai tambah untuk kemajuan ekonomi keluarganya;
- 8) Hasil pencapaian pada desa dengan adanya program PM2L adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya prasarana dasar (Jalan, Jembatan, gorong-gorong, drainase, listrik, air bersih);
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan;
 - c. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan;
 - d. Meningkatnya ekonomi rakyat (pertanian dalam arti luas, industri rumah tangga, perdagangan, pariwisata dan lain-lain);
 - e. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparatur Desa dan masyarakat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

1. Kurangnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menentukan arah perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa;

2. Keterbatasan kemampuan SDM aparat desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan desa;
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan keluarga terutama di desa-desa terpencil;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menentukan arah perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desadengan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara lebih intensif;
2. Pendidikan dan Pelatihan aparatur desa dibidang manajemen pemerintahan desa;
3. Meningkatkan Pendapatan keluarga melalui Pelatihan-pelatihan keterampilan dan pembentukan BUMDes.

4.1.22. URUSAN SOSIAL

a) Kondisi Umum

Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi terhadap peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintahdaerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhikebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui beberapa program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari dinamika sosial dan perubahan lingkungan fisik dan non-fisik, baik lingkup lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat maupun lingkup nasional. Arah perencanaan ke depan secara komprehensif memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal tersebut akan berkaitan antara pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan lainnya, seperti ekonomi, politik, sosial-budaya dan keamanan.

Permasalahan kesejahteraan sosial ke depan semakin kompleks. Permasalahan tersebut diantaranya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketertinggalan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, bencana sosial, diintegrasi sosial, dan kesenjangan sosial. Permasalahan tersebut perlu perhatian yang serius, fokus dan berkesinambungan.

Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat membutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Orsos), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun unsur masyarakat secara keseluruhan. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk menjadi leading sektor bagi penanganan berbagai masalah sosial di tingkat kabupaten.

Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, atau tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterbatasan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama keluarga miskin, pada tahun 2016 telah dilakukan upaya pemberdayaan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin untuk 26 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian bantuan kepada 20 KUBE Keluarga Miskin Perdesaan yang berasal dari Kementerian Sosial RI, serta diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) yang

tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 5 Kelompok (15 orang) berupa peralatan mesin jahit kepada peserta hasil kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di LBK Pangkalan Bun.

Program pemberdayaan sosial pada tahun 2016 banyak melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dan sesuai dengan perencanaan Dinas Sosial yang telah ditetapkan. Studi Banding PANDU GEMPITA yang dilakukan merupakan Kegiatan dalam mendukung pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada Tahun 2016 Studi Banding PANDU GEMPITA (pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera) dilakukan ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. Dalam pelaksanaan kaji banding tersebut dalam pelaksanaannya melibatkan instansi terkait seperti Dinas Sosial, DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dan DPKAD. Dalam kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 3 Karang Taruna, Penyediaan jasa cuci motor, bengkel motor. Pemberdayaan organisasi sosial (orsos) berupa yayasan atau organisasi dalam bentuk lain milik masyarakat yang melaksanakan penanganan PMKS, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam atau luar panti yang jumlahnya telah mencapai 21 orsos atau yayasan.

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 19 orang. Pelaksanaan pendampingan pada tahun 2016 menjangkau sasaran sebanyak 2.806 KK peserta PKH yang tersebar di 6 kecamatan.

Pada kegiatan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, sebagai upaya tetap eksis dan *establish* peran pemerintah daerah masih sebatas memberikan bantuan dalam bentuk makanan dan peralatan mandi, yang dilaksanakan melalui kegiatan anjangsana ke Panti Asuhan, Lembaga Permasyarakatan, Rumah Sakit Daerah, Sekolah Luar Biasa dan Pondok Pesantren.

Pada tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi tuan rumah dalam kegiatan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSAN pada tanggal 15 Desember 2016. Adapun rangkaian kegiatan pada peringatan yaitu upacara peringatan HKSAN di halaman Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, pelayanan pembuatan akte kelahiran, pelayanan pembuatan kartu keluarga, penyelenggaraan nikah massal, pemberian paket bantuan untuk anak sekolah, pemberian bantuan kursi roda.

Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan arah rencana kerja (Renja) Dinas Sosial pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terdapat 2 orang dengan kecacatan yang dikirim untuk mengikuti pelayanan rehabilitasi sosial vokasional di Balai Besar Bina Daksa Prof. DR Suharso Surakarta Provinsi Jawa Tengah, 1 orang mendapatkan UEP pengembangan bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan rapat kerja Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), pelaksanaan Sosialisasi Narkoba bagi pelajar, pembinaan Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 19 orang yang terjaring dalam operasi PEKAT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pemberian bantuan bahan makanan sembako dikarenakan pendanaan yang telah direncanakan pada awal tahun mengalami rasionalisasi.

Kegiatan lain yang terkait dengan rehabilitasi sosial yaitu Program Pembinaan Anak Terlantar melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar memberikan pelayanan berupa pelatihan kerajinan tangan (*hand craft*) kepada 15 (lima belas) anak yang dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun dan pengiriman klien sebanyak 5 (lima) orang ke Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Palangkaraya. Selain itu sebagai tindak lanjut dari pelatihan di Loka Bina Karya (LBK) telah dibentuk 3 KUBE dan masing-masing KUBE mendapatkan bantuan stimulan berupa pemberian peralatan dan perlengkapan pembuatan akrilik dan bahan kain panel. Pada kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar, pelayanan yang diberikan berupa Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 10 (sepuluh) anak terlantar/putus sekolah, terdapat 2 bayi terlantar dan hak asuhnya telah diberikan kepada

orang tua asuh adopsi dan pelayanan pemberian rekomendasi pengangkatan anak atau proses adopsi sebanyak 4 orang.

Program Bantuan dan Jaminan Sosial pada tahun 2016 melalui PMKS telah memberikan bantuan pemulangan kepada pekerja migran terlantar sebanyak 179 orang (lebih banyak dibanding pemulangan ex migran pada tahun 2015 sebanyak 107), pemulangan eks napi sebanyak 26 orang, dan pemulangan gepeng sebanyak 2 orang. Disamping itu telah terlaksana pendampingan kepada Penerima Bantuan Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.806 KK yang tersebar di 6 kecamatan. Dan juga telah terlaksana pemberian surat rekomendasi BPJS bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sebanyak 791 orang.

Tabel 4.77
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Keberadaan Sarana sosial: • Panti asuhan • Panti jompo • Panti rehabilitasi	Unit Unit Unit	17 - -	21	21	100
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	88,12	2.587	2.675	103,40
3.	Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	kasus	91,22	956	1.024	93,36

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tabel di atas untuk indikator PMKS yang memperoleh bantuan dan indikator Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terlihat capaian pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah Kasus PMKS sehingga pemberian bantuan dan jumlah kasus yang ditangani di tahun tersebut terjadi peningkatan dari jumlah yang sudah direncanakan. Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan pada tahun 2016 sebanyak 2.790 orang (data pkh, aslut).

Jumlah anggota berdasarkan data tahun 2016 sebanyak 58 orang. Adapaun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 yaitu; kesiapsiagaan penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa telah dikirim 10 orang tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk mengikuti gelar

kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana se Kalimantan Tengah, pengiriman 2 orang tenaga TAGANA pada kegiatan Pemantapan Kemampuan Petugas Pendamping Sosial Pemantapan Petugas Psikososial Korban Bencana Alam, 2 orang tenaga TAGANA pada Pemantapan Kemampuan Petugas Shelter/Huntara (Hunian Sementara) dan pengiriman 2 orang tenaga TAGANA pada kegiatan Pemantapan Kemampuan Pengelolaan Logistik Korban Bencana Alam di Palangka Raya, dan pengiriman 10 orang tenaga TAGANA baik untuk kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.537.911.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.465.585.870 atau 97,15 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.78
Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS SOSIAL		2.537.911.000	2.465.585.870	97,15	100	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	564.648.099	554.963.386	98,28	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	Keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perangkat untuk kebutuhan pengiriman pkt surat dinas	200	200	Lbr
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	69.120.000	64.859.685	93,83	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bln
c.	Penyediaan jasa	3.160.000	2.515.800	79,61	100	Terlaksananya jasa			

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional					pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	8 2	8 2	unit unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	110.179.000	108.705.800	98,66	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinsos	12	12	bln
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.974.600	25.703.500	95,28	100	Terlaksananya penyediaanho nor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1 12	1 12	Org Bln
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.800.000	11.750.000	99,57	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Sosial berupa : ~ Komputer PC ~ Komputer notebook ~ Printer ~ Faximili ~ Peralatan Kerja	6 9 10 1 12	6 9 10 1 12	unit unit unit unit Bln
g.	Penyediaan alat tulis kantor	40.831.500	40.590.500	99,40	100	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	Bln
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.325.000	23.325.000	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan Berupa : Amplop Bupati Besar Amplop Bupati tandar Amplop Sekda Besar Amplop Sekda Standar Amplop Dinas Besar Amplop Dinas Standar Kartu Barang	1 3 5 2 2 5 8 1 30 72.000	1 3 5 2 2 5 8 1 30 72.000	Tahun Pak Pak Pak Pak Pak Pak Rim Buku Lbr

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						NCR Lembaran isposisi Penggandaan			
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.155.000	5.155.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa : ~ kabel ~ lampu ~ piting ~ Saklar ~ stop kontak ~ Klem Kabel ~ Battery Kering	1 49 10 20 5 5 30	1 49 10 20 5 5 30	Rol buah buah buah buah bks psg
j.	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	68.990.000	67.590.000	97,97	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Dinas Sosial berupa : ~ komputer notebook ~ Radio HT ~ Printer ~ Pengadaan Router ~ Flash disk ~ Mouse Wireles ~ Kalkulator	5 3 4 3 6 7 10	5 3 4 3 6 7 10	unit buah unit buah buah buah buah
k.	Penyediaan makanan Dan minuman	20.080.000	19.770.000	98,45	100	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta minuman harian PHL	8 3	8 3	Keg Org
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	184.532.999	184.498.101	99,98	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	289.390.000	287.270.230	99,26	100	Terlaksana nya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	3	keg.
a.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	20.000.000	19.733.500	98,66	100	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	1	Pkt
b.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	117.300.000	115.849.230	98,76	100	Terlaksananya servis dan penyedian BBM kendaraan dinas meliputi : - R 2 - R 4	8 1	8 1	Unit Unit

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Gedung kantor	8.890.000	8.890.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa : Air Conditioner (AC) Mesin potong rumput	13 4	13 4	Unit Unit
d,	Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	143.200.000	142.797.500	99,71	100	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	1	Pkt
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	43.000.000	42.871.000	99.70	100	Terlaksana nya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	86	86	Stel
a.	Pengadaan pakaian dinas Harian (PDH) beserta perlengkapannya	43.000.000	42.871.000	99.70	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	86	86	Stel
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur`	52.000.000	49.498.801	95,19	100	Terlaksana nya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	6	6	Org
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	52.000.000	49.498.801	95,19	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk bimbingan teknis implementasi peraturan	6	6	Org
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.027.000	3.027.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	Keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.371.000	1.371.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	4	4	Buku
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	285.000	285.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	4	4	Eksp
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.371.000	1.371.000	100	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4	4	Eksp

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
6.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtern Sosial (PMKS) lainnya	731.911.000	728.894.000	99,58	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	2	2	Keg.
a.	Pengadaan sarana dan Pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	632.650.000	631.280.000	99,78	100	Terlaksananya ~ Sosialisasi pember- dayaan sosial ~ Penyediaan barang bantuan pendukung bagi kelompok usaha bersama keluarga miskin (KUBE-KM) dan warga miskin binaan sosial (WBS) ~ Identifikasi dan assesment calon penerima bantuan barang pendukung KUBE keluarga miskin dan warga binaan sosial	3	3	Keg.
b.	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)	99.261.000	97.614.000	98.34	100	Terlaksananya Pelatihan ketrampilan teknis bagi penyandang masalah kesejahteraan Ketersediaan barang bantuan bagi peserta pelatihan	15 Kk	15 Kk	WBS /WR SE
7.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	306.361.000	286.118.750	93,39	100	Terlaksana nya kegiatan pd Program Pelayanan & Rehab.Kese jahteraan Sosial	3	3	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
a.	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50.761.000	45.361.000	89,36	100	Terlaksananya : ~ Pemberian Tali Asih bagi Pendamping ASLUT tingkat desa ~ Koordinasi peningkatan pelayanan kessos,lansia dan ODK dengan aparaturn tingkat desa. ~ Pelaksanaan Rapat Kerja Komda Lansia Kabupaten ~ Pelaksanaan Sosialisasi Narkoba Bagi Pelajar	108 12 1 1	108 12 1 1	Org Keg Keg Keg
b.	Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	157.300.000	142.808.000	90,78	100	Terlaksananya pemberian jaminan sosial bagi korban bencana,korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	1	1	Keg
c.	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	98.300.000	97.949.750	99,64	100	Terlaksananya Program Keluarga Harapan	1	1	Keg
8.	Program Pembinaan Anak Terlantar	164.625.000	160.069.300	97,23	100	Terlaksana nya kegiatan pd Program Pembinaan Anak Terlantar	2	2	Keg
a.	Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	126.475.000	122.588.300	96,92	100	Terlaksananya ~ Bimbingan sosial dan keterampilan serta praktek belajar kerja anak ~ Penyaluran bantuan stimulasi UEP bagi anak setelah mengikuti proses bimbingan	1 1	1 1	Keg Keg
b.	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	38.150.000	37.481.000	98,24	100	Terlaksananya bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dan bimbingan sosial kewirausahaan bagi Anak terlantar	1	1	Keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
9.	Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	58.675.000	49.708.502	84,71	100	Peningkatan kemampuan SDM ODK (Orang Dengan Kecatatan)	1	1	keg.
a.	Pendayaguna an Para Penyandang Cacat dan eks trauma	58.675.000	49.708.502	84,71	100	Terlaksananya : ~ Penyediaan Bantuan UEP ~ Penyediaan Bantuan Perjalanan ke dan dari Balai Rehabilitasi Sosial Surakarta	1 3	1 3	ODK Org
10.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	324.273.901	303.164.901	93,49	100	Peningkatan peran aktif masyarakat, dunia usaha, peningkatan jejaring dan pengembang an model kelembagaan sosial masyarakat	5	5	keg.
a.	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam dunia Usaha	3.119.500	3.119.500	100	100	Pelaksanaan sosiali perda pengumpulan uang dan barang undian gratis berhadiah	2	2	Keg
b.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	73.505.000	68.825.000	93,63	100	Terlaksananya ~ Penyediaan bantuan usaha ekonomi produktif bagi karang taruna dan LKS ~ Penyediaan insentif bagi TKSK sebagai petugas pendamping tingkat kecamatan	3 6	3 6	Klmp UEP K.T Org
c.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	21.650.000	13.290.000	61,38	100	Terlaksananya ~ Pelatihan pekerja sosial bagi pengurus ORSOS/LK S, KT & PSM ~ Pembinaan dan evaluasi kegiatan Karang Taruna	1	1	Keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
d.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	8.244.901	8.244.901	100	100	Terlaksananya launching pandu gempita	1	1	Keg
e.	Pelestarian & Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan dan Kesetia kawatan Sosial	217.754.500	209.685.500	96,29	100	Terlaksananya ~ Pelestarian dan pendayagunaan nilai-nilai kepahlawanan melalui kegiatan sarasehan ~ Pemeliharaan TMP Indra Pura	1 1	1 1	Keg. Pkt

Sumber : Dinsos Ktw.Barat

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Urusan Sosial yang perlu perhatian adalah :

1. Belum dimilikinya panti-panti sosial oleh pemerintah daerah serta belum memadainya sarana dan prasarana Panti Sosial milik masyarakat;
2. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial yaitu SDM kesejahteraan sosial dan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS;
3. Penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif masih belum optimal diantaranya peralatan evakuasi dan distribusi saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan; catatan belum mempunyai truck angkut logistik,
4. Minimnya data PMKS dari masing-masing Desa/Kelurahan;
5. Belum komprehensifnya LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS;
6. Keterbatasan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS belum optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

Mencermati hal-hal tersebut di atas Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial senantiasa berbuat dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan yang mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta membangun sinergisitas dan

jejaring dengan Dinas Sosial Provinsi maupun Kementerian Sosial RI dan PSKS serta Dunia Usaha.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan antara lain :

1. Mengusulkan pembangunan panti sosial termasuk Tempat Penitipan Anak beserta sarana dan prasarana pendukungnya milik pemerintah daerah serta memberikan bantuan operasional, sarana dan prasarana bagi panti milik masyarakat pada setiap forum pertemuan koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat maupun dengan pihak legislatif; rencana pembangunan LKSA
2. Mengoptimalkan potensi kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dan pendayagunaan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS;
SDM Kesejahteraan Sosial memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial. Integritas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial. SDM ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.
Pendayagunaan Pilar Partisipasi Usaha Kesejahteraan Sosial seperti keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSBM, Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha, TAGANA dan TKSK) diharapkan mampu dan berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya, masalah sosial keluarga dan masalah sosial lingkungannya.
3. Mengoptimalkan penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif terutama kesiapsiagaan personil dan peralatan evakuasi serta data korban dan distribusi bantuan saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan;
4. Mengupayakan tersedianya data base PMKS dari masing-masing Desa/Kelurahan dengan memanfaatkan basis data terpadu BDT hasil PPLS 2015 dari TNP2K;
5. Mengupayakan memadainya sarana dan prasarana LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS;

6. Mengoptimalkan ketersediaan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS berjalan optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara khusus yaitu penduduk rentan dan penduduk yang memiliki risiko sosial yaitu penduduk miskin kluster I dan II serta penduduk lainnya yang karena faktor tertentu tidak memiliki kepastian masa depan seperti orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

4.1.23. URUSAN KEBUDAYAAN

a) Kondisi Umum

Awalnya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi yang digalakkan pemerintah pada tahun 1980 an. Dari program transmigrasi ini, warga pendatang dari berbagai daerah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menetap hingga saat ini. Saat ini penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras, yang telah berasimilasi dengan sangat baik.

Keberagaman suku dan ras penduduk ini tentunya juga menyebabkan keberagaman seni dan budaya yang berkembang. Masing-masing budaya terpetakan dengan sangat baik. Kesenian yang berkembang di suatu kecamatan biasanya juga merefleksikan dominasi kesukuan yang mendiami wilayah tersebut.

Di Kecamatan Arut Selatan sebagai ibukota Kabupaten, kesenian yang berkembang didominasi oleh budaya dengan ciri khas Melayu, yang merupakan asal usul Kesultanan Kotawaringin. Terdapat 44 grup kesenian, terdiri dari kesenian hadrah, rebana dan tari tradisional dayak pedalaman dan seni tradisional daerah lain di nusantara seperti Kesenian Sunda, Padang dan Jawa. Adapun penyelenggaraan kegiatan kesenian di tahun 2016 ini sebanyak 5 kali event besar dan 1 event berskala nasional yaitu Festival Keraton Nusantara X yang dihadiri 65 Kerajaan dan Kesultanan dari Nusantara. Sedangkan di Kecamatan Arut Utara, budaya dan adat Dayak dominan dalam kehidupan sehari-hari terdapat 7 sanggar, adapun untuk desa tertentu terdapat kesenian pesisir dan jawa. Di Kecamatan Kotawaringin Lama kebudayaan yang berkembang juga diwarnai ciri Melayu. Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan pusat Kesultanan

Kotawaringin. Sementara itu, di Kecamatan Pangkalan Lada budaya yang berkembang didominasi budaya Jawa.

Di Kecamatan Pangkalan Lada terdapat 30 grup dan kelompok kesenian yang terdiri dari grup reog, kuda lumping, wayang dan tari tradisional, bahkan juga barongsai serta Sanggar Tari Dayak. Kecamatan Pangkalan Lada tercatat paling aktif menyelenggarakan pementasan kesenian, dimana tahun 2016 terjadi 7 kali penyelenggaraan kesenian. Pergelaran tersebut merupakan bagian dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang melekat dalam kehidupan. Misalnya untuk memperingati tahun baru Hijriyah diadakan bersih desa dan pergelaran wayang. Kegiatan berkesenian biasanya ditampung di gedung serbaguna milik desa ataupun di lapangan. Dengan demikian dapat diasumsikan masing-masing desa di Pangkalan Lada memiliki saranafasilitas seni.

Senada dengan Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng juga didominasi kebudayaan Jawa. Terdapat 16 grup kesenian di kecamatan ini, dengan 3 kali penyelenggaraan kesenian dan budaya selama tahun 2016. Sedangkan di Kecamatan Kumai, budaya yang berkembang dominan budaya pesisir lokal. Terdapat 29 grup kesenian dan satu kali penyelenggaraan kegiatan seni budaya pada 2016.

Sedangkan di Bidang Keagamaan terdapat Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji dengan fasilitasi keberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Kota Pangkalan Bun menuju Kota Palangka Raya sebanyak 77 orang yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Serta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan yang merupakan rangkaian kunjungan kerja Bupati Kotawaringin Barat ke 6 (enam) Kecamatan dalam bentuk Safari Ramadhan.

Tabel 4.79
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11 kali	4	11	11	100
2.	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	100
3.	Jumlah group kesenian	43 group	43	50	43	86
4.	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
5.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	33 buah	33	36	33	91,66
6	Pelayanan Ibadah Haji	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
7	Safari Ramadhan Bupati Kobar	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat dan Bagian Administrasi Kesra Setda

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal maupun nusantara. Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global. Langkah yang bisa ditempuh adalah :

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan;
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial;
3. Memberikan dukungan dan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional.
4. Mendukung dan memfasilitasi setiap kegiatan keagamaan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Sekretariat Daerah (Setda) dengan total Belanja Langsung sebesar Rp. 9.170.783.300 dan terealisasi sebesar Rp. 8.396.370.416 atau 91,55 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.80
Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
DISBUDPAR		8.773.045.800	8.036.091.652	91,59	100	-			
1.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	664.045.800	607.271.502	91,45	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	2	keg
a.	Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	644.045.800	588.271.502	91,34	100	Tercapainya rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah	4	4	pkt
b.	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	20.000.000	19.000.000	95	100	Pencetakan buku silsilah dan sejarah Kerajaan Kutaringin	1	1	pkt
2.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	8.109.000.000	7.428.820.150	91,61	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	2	keg
a.	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah	2.783.650.000	2.690.170.000	96,64	100	Terwujudnya peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya	1	1	keg
b.	Fasilitasi penyelenggaraa n festival budaya daerah	5.325.350.000	4.738.650.150	88,97	100	Terwujudnya pembinaan dan penyaluran seni budaya kobar melalui festival tingkat daerah, propinsi maupun nasional	4	4	keg

Sumber : Disbudpar

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
SETDA		397.737.500	360.278.764	90,58	100	-			
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	259.637.500	229.808.764	88,51	100	Terciptanya Pelayanan Ibadah Haji yang prima	1	1	Keg
	Pelayanan ibadah haji	259.637.500	229.808.764	88,51	100	Terlaksana nya pelayanan pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji	1	1	Keg.
2.	Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai- nilai keagamaan	138.100.000	130.470.000	94,47	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengem bangan nilai- nilai keagamaan	6	6	lokasi
	Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan	138.100.000	130.470.000	94,47	100	Terwujudnya peningkatan tali silaturahmi antar masyarakat dengan Kepala Daerah dan aparaturn pemerintah	6	6	Lokasi

Sumber : Setda

Acara Pembukaan Festival Keraton Nusantara ke X Tahun 2016
Di Pangkalan Bun



Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kebudayaan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya motivasi masyarakat untuk melestarikan upacara adat hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2016;
- 2) Terinventarisasinya benda cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak sehingga memudahkan dalam upaya pelestariannya.
- 3) Meningkatnya ikatan tali silaturahmi antara Pemerintah Daerah, Ulama dan Masyarakat di 6 (enam) Desa di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Urusan Kebudayaan yang perlu mendapat penanganan adalah :

1. Masih belum optimalnya upaya pengembangan dan perlindungan kebudayaan daerah;
2. Masih belum dimilikinya Museum Budaya Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan urusan kebudayaan;
4. Materi budaya dalam pendidikan sekolah dirasa masih kurang mendapat porsi yang memadai.
5. Masih belum merata dan memadainya sarana prasarana rumah ibadah di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Peningkatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah;
2. Memberikan dukungan yang memadai dalam pengelolaan urusan kebudayaan baik dari segi pendanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, maupun koordinasi dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dengan mengikutsertakan pelatihan, bimtek maupun studi banding;
4. Meningkatkan peran pendidik untuk transformasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan.
5. Memfasilitasi dan memberikan kepada masyarakat untuk membangun rumah ibadah dengan sebaik-baiknya.

4.1.24. URUSAN STATISTIK**a) Kondisi Umum**

Keberhasilan perencanaan pembangunan dimulai dari penggunaan data dan informasi yang benar dan akurat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang benar dan akurat antara lain ditentukan oleh kualitas SDM pengelola data dan tingkat kepedulian baik pemerintah maupun masyarakat sebagai sumber data dengan didasari kesadaran akan pentingnya data statistik.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan berbagai kepentingan statistik yang implementatif, efektif, dan akuntabel. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap data statistik daerah diperlukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara stakeholders penyedia data (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, instansi vertikal, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan penyedia data lainnya).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar-unsur dalam penyelenggaraan manajemen baik pemerintahan maupun swasta, merupakan bentuk data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan. Dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik baik skala nasional maupun daerah yang terpadu, andal, efektif dan efisien. Secara terinci, sesuai dengan pemanfaatannya statistik dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Statistik Dasar, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik;
2. Statistik Sektoral, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
3. Statistik khusus, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan sosial

budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Urusan statistik di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan penyediaan data statistik dasar ditangani oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasinya melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan menyediakan anggaran untuk penggandaannya dan membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung proses penyusunan buku statistik dasar tersebut yang meliputi Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka, Buku PDRB Kotawaringin Barat, Buku Penduduk Kotawaringin Barat dan Buku Distribusi Pendapatan. Sedangkan untuk penyediaan data statistik sektoral dan statistik khusus seperti Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Profil Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Statistik Perkebunan, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Tabel Input Output Daerah dan yanglainnya ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah di daerah.

Namun demikian di dalam penganggarannya, kegiatan-kegiatan dalam rangka menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan daerah tersebut, tidak diklasifikasikan kedalam Urusan Statistik melainkan diklasifikasikan menjadi urusan lain seperti Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pertanian dan lain sebagainya, sehingga terkesan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalokasikan dana untuk melaksanakan urusan statistik.

Berikut dapat dilihat mengenai Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik selama tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.81
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik
Tahun 2015 - 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka	buku	Ada	Ada	Ada	100
2.	Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat	buku	Ada	Ada	Ada	100
3.	Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	elemen data	Dari 1.382 isian elemen data yang tersedia, berhasil terisi sebanyak 1.246 atau (90,16%)	1.633 elemen data	1.187 elemen data	72,69 %

Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalokasikan anggaran untuk penggandaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015 dan Buku PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, dikarenakan pihak BPS selaku lembaga yang berwenang dalam menyediakan data statistik dasar tidak memberikan rekomendasi dalam hal penggandaan buku-buku dimaksud.

Namun demikian meskipun buku-buku tersebut tidak tersedia, kebutuhan akan data-data terbaru untuk kepentingan penyusunan perencanaan tetap dapat terpenuhi karena fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui SKPD terkait, dengan pihak BPS tetap dapat berjalan dengan baik.

Kemudian bila dilihat dari indikator tingkat capaian keterisian data statistik pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 74,92 % pada tahun 2014 menjadi 90,16 % pada akhir tahun 2015.

b) Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Dalam pengklasifikasian penganggaran di Kabupaten Kotawaringin Barat, program kegiatan yang berkenaan dengan penyediaan data statistik dasar dikelompokkan dalam urusan perencanaan pembangunan sehingga untuk rincian program kegiatan dan realisasinya dapat dilihat pada urusan Perencanaan Pembangunan.

c) Permasalahan dan Solusi**Permasalahan**

1. Dalam urusan statistik, data statistik diperoleh dari berbagai penyedia data, seperti BPS, SKPD serta lembaga terkait lainnya sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data sering terjadi perbedaan angka atau data;
2. Sifat data statistik yang dinamis, berakibat pada sulitnya penentuan data akhir secara cepat, tepat dan akurat sesuai denganyang diharapkan;
3. Dalam hal ketersediaan data statistik untuk kebutuhan bahan perencanaan daerah, khususnya untuk penyediaan data statistik dasar terjadi leg satu tahun dimana data yang tersedia merupakan data kondisi tahun sebelumnya sehingga data-data yang diperlukan masih merupakan data proyeksi yang mana dari tingkat keakuratannya masih diragukan karena dimungkinkan masih terjadi bias data;
4. Beberapa data statistik dalam pengadaannya sangat komprehensif, sehingga dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan angka akhir dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini berakibat pada beberapa data penting belum dapat diwujudkan;
5. Tuntutan pemenuhan kebutuhan data dari peraturan perundang-undangan, pusat (K/L/D/I), dan kebutuhan data untuk perencanaan intern instansi sangat beragam sehingga berakibat munculnya ragam data yang sangat banyak. Hal ini seringkali menyulitkan dinas, instansi, lembaga penanggung jawab data dalam penyediaannya;
6. Selama ini belum ada regulasi maupun payung hukum yang tepat yang mengatur mengenai kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan BPS sebagai instansi vertikal dalam rangka fasilitasi penyusunan dan penggandaan buku Kotawaringin Barat Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Solusi

1. Proporsi tanggung jawab terhadap data oleh para pemangku penyedia data harus lebih ditegaskan, sehingga tidak terjadi duplikasi data, atau bahkan kelangkaan data akibat dari tidak adanya tanggung jawab terhadap data-data tertentu;

2. Perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik;
3. Perlunya dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pihak BPS terkait dengan pemenuhan data statistik dasar pada tahun berjalan meskipun data dimaksud masih berupa angka sementara (masih bertanda *). Selain itu perlu juga dilakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti pelatihan maupun bimtek berkenaan dengan penyediaan data statistik misal: bimtek penghitungan PDRB;
4. Peningkatan anggaran bagi penyediaan data oleh semua penanggungjawab data yang didahului dengan komitmen semua stakeholders terhadap arti penting data dan statistik;
5. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang data dan statistik bagi berbagai kepentingan baik peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyediaan data dan statistik;
6. Perlu adanya penyamaan pemahaman dan persepsi antara pihak BPS dan Bappeda mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten terkait dengan kewenangan dan mekanisme prosedur penyediaan data statistik, sehingga tercipta keseragaman mengenai mekanisme prosedur dalam proses penyediaan data statistik pada kabupaten/kota seluruh Indonesia yaitu dengan menerbitkan regulasi yang dapat dijadikan landasan dalam hal prosedur penyusunan, penyediaan dan penggandaan dokumen publikasi data statistik.

4.1.25. URUSAN KEARSIPAN

a) Kondisi Umum

Arsip berguna sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan, menjadi alat pembuktian, alat untuk kepentingan politik dan ekonomi. Banyak proses pembangunan yang terhambat karena hilangnya salah satu

arsip sebagai alat pembuktian. Belajar dari berbagai pengalaman yang terjadi beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Arsip merupakan bukti-bukti kongkrit yang akan menjelaskan kebenaran suatu peristiwa.

Perlakuan terhadap arsip di masa sekarang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pengelolaan arsip yang sistematis akan mengendalikan pertumbuhan arsip yang semakin hari semakin menumpuk dengan semakin kompleksnya kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan otomatisasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khazanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online. Pengelolaan arsip secara elektronik ini perlu mendapat dukungan dana yang memadai.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertanahan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.82
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

No.	Indikator	Capaian 2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	100
2.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	4	4	5	125
3.	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	4	4	4	100
4.	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	4:36	4:36	11,11
5.	Arsip audio visual	265	265	265	100
6.	Arsip Foto/Album	279	30	30	100
7.	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	38	17	21	123,53
8.	Sosialisasi kearsipan	1	2	2	100
9.	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	19.462	2.000	19.515	975,75
10.	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	1.001	-	7	-

Sumber : KPAD Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 999.432.750 dengan realisasi sebesar Rp 971.584.015 atau 97.21 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.83
Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan		999.432.750	971.584.015	97,21	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	511.666.150	499.096.606	97,54	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Administrasi Perkantoran	13	13	keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000	460.000	100	100	Terlaksananya pengiriman pkt surat dinas	15	15	pkt
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	159.375.000	154.028.865	96,64	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	Bln
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.800.000	1.591.800	88,43	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi - Roda 2 - Roda 4 - Roda 4 MPK	2 1 1	2 1 1	Unit Unit Unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	107.205.100	107.205.100	100	100	Terlaksananya pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan, honor pegawai tidak tetap dan administrasi keuangan.	12	12	Bln
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.946.000	55.602.250	97,64	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	12	Bln
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.300.000	6.300.000	100	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja berupa : - Komputer PC - printer - jaringan jaringan internet	6 4 2 1	6 4 2 1	unit unit unit Thn
g.	Penyediaan alat tulis kantor	28.195.250	28.193.250	99,99	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	12	12	Bln
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.723.500	7.723.500	100	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kedinasan	12	12	Bln
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.250.000	1.250.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan ruang kantor berupa lampu SL	10	10	buah
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23.000.000	22.800.000	99,13	100%	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan	5	5	buah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
						kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas			
k.	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.000.0000	7.000.000	77,77	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga (kipas angin, tangga, TV)	6	6	Unit
l.	Penyediaan makanan dan minuman	44.600.000	43.050.000	96,52	100	Terlaksananya penyediaan minuman harian PHL	15	15	Org
m.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.811.300	63.891.841	97,08	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	355.945.000	355.240.007	99,80	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	6	keg.
a.	Pembangunan gedung kantor	299.255.000	298.824.000	99,85	100	Terlaksana pembangunan gedung kantor, rehab jaringan listrik, perencanaan teknis, pengawasan teknis, pembuatan pintu	6	6	pkt
b.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.500.000	12.500.000	100	100	Tersediannya : - Gorden dan perlengkapannya, - AC	1 2	1 2	Pkt Unit
c.	Pengadaan meubeleur	10.200.000	10.200.000	100	100	Terpenuhinya perlengkapan meja baca dan kursi baca	21	21	buah
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan	28.500.000	28.446.007	99,81	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	5	unit
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	5.490.000	5.270.000	95,99	100	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (AC)	9	9	unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	18.500.000	18.500.000	100	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.500.000	18.500.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai	37	37	stel
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	5.000.000	5.000.000	100	100	Tercapainya sasaran kegiatan program fasilitas pindah/purna tugas PNS	1	1	Keg .
a.	Pemulangan pegawai yang pensiun	5.000.000	5.000.000	100	100	Terlaksana pemulangan pegawai yang pensiun	1	1	oran g
5.	Program peningkatan kapasitas	65.700.000	52.332.500	79,65	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program	1	1	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	sumber daya aparatur					peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	65.700.000	52.332.500	79,65	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	9	9	OK
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000.000	2.904.000	96,80	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	968.000	96,80	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	5	Buk u
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.000.000	968.000	96,80	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	5	5	Buk u
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	968.000	96,80	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5	5	Buk u
7.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	32.221.600	31.110.902	96,55	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	3	3	keg.
a.	Pengumpulan data	13.754.200	12.796.502	93,03	100	Tersedianya arsip daerah	245	245	Ber kas
b.	Pengklasifikasian Data	9.467.400	9.314.400	98,38	100	Terlaksananya kegiatan pengklasifikasian data melalui kartu deskripsi, buku induk dan label klasifikasi	500	500	Ber kas
c.	Pengadaan sarana penyimpanan	9.000.000	9.000.000	100	100	Tersedianya rak besi siku lubang	3	3	buah
8.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	2.000.000	2.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	1	1	keg
a.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	2.000.000	2.000.000	100	100	Terciptanya duplikat dokumentasi/ arsip daerah dalam bentuk informatika	10	10	lem bar
9.	Program peningkatan kualitas pelayanan	5.400.000	5.400.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan	1	1	Keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	informasi					kualitas pelayanan informasi			
a.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta	5.400.000	5.400.000	100	100	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pencipta arsip SKPD	45	45	Org

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

c) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kearsipan, antara lain:

1. Kurangnya tingkat pemahaman *stakeholder* terhadap arsip statis dan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Hal ini terlihat dari arsip yang diserahkan masih dalam bentuk arsip mentah dan harus dipilah-pilah lagi oleh petugas kearsipan KPAD. Kondisi ini tidak sesuai dengan kewajiban dan tugas KPAD sebagai lembaga kearsipan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Belum terbentuknya unit pengolah dan unit kearsipan pada semua SKPD;
3. Kompetensi petugas kearsipan belum memadai;
4. Pembinaan kearsipan belum menjangkau seluruh *stakeholder*;
5. Arsiparis masih dipandang sebagai profesi yang kurang menarik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kearsipan kepada seluruh *stakeholder*;
2. Membentuk unit pengolah dan unit kearsipan pada setiap SKPD;
3. Meningkatkan kompetensi petugas kearsipan melalui diklat;
4. Secara bertahap melakukan pembinaan kearsipan ke seluruh *stakeholder*;
5. Mensosialisasikan tentang jabatan fungsional Arsiparis.
6. Mengikuti lomba pengelolaan arsip daerah ke tingkat propinsi dan nasional.

4.1.26. **URUSAN PERPUSTAKAAN**

a) **Kondisi Umum**

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui

penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IIPTEK) secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kreatif, kritis dan inovatif.

Di samping itu, Perpustakaan memiliki peran sebagai pelestari nilai budaya (*culture building*) di masyarakat dan memajukan peradaban bangsa, bahkan peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari tata kelola, arsitektur bangunan dan koleksi dari perpustakaan. Perpustakaan hanya akan berarti bila koleksi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk itu penyelenggaraan perpustakaan harus diupayakan agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah untuk meningkatkan pengunjung Perpustakaan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah koleksi bahan pustaka, baik melalui pengadaan langsung ataupun gerakan hibah buku;
2. Menyediakan Layanan Ruang Baca Anak;
3. Menyediakan Internet / *WiFi* gratis;
4. Menyediakan Layanan Audio Visual;
5. Menyediakan Layanan Ruang Baca di tempat;
6. Menyediakan Layanan Referensi;
7. Kelas Berbagi (*workshop photography*, kelas kecantikan, belajar bersama);
8. Layanan Wisata Pustaka;
9. Layanan Mendongeng/ *Story Telling* untuk anak usia TK;
10. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
11. Layanan Pinjam Pakai Buku.
12. Layanan Taman Baca Baruna
13. Layanan Bimbingan Pemakai/ pustakawan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memajukan urusan perpustakaan pada tahun 2016 meliputi :

- 1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, yaitu dengan mengadakan lomba bercerita tingkat SD se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Pengembangan minat dan budaya baca, yaitu dengan membuka layanan setiap hari sampai pukul 21.00 WIB, mengadakan lomba cipta dan baca puisi tingkat SMP, Lomba menulis surat untuk ibu ditingkat SMA, Lomba senam beruang untuk anak PAUD dan TK dan Lomba menyanyi untuk tingkat SD/MI, mengadakan layanan story telling (mendongeng) untuk anak TK, dan memberikan layanan kelas berbagi untuk masyarakat.
- 3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan kelurahan/desa yang diharapkan akan meningkatkan pengelolaan perpustakaan kelurahan/desa menjadi lebih baik dan juga mengadakan Lomba perpustakaan desa/kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, yaitu dengan kegiatan MPK ke sekolah/desa/kelurahan yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah;
- 5) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, yaitu dengan memberikan promosi layanan perpustakaan daerah melalui media elektronik/ siaran radio dan televisi lokal, mengikuti acara Kobar expo dan mengadakan acara peluncuran koleksi buku baru tahun 2016.
- 6) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, yaitu pengadaan langsung buku-buku perpustakaan, yang diharapkan dengan bertambahnya bahan pustaka akan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka dan juga akan meningkatkan jumlah pemustaka (anggota baru, pengunjung dan peminjam buku).
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kepada perpustakaan desa/kelurahan yang telah mengikuti Bimtek Pengeolaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh KPAD Kab. Kotawaringin Barat.
- 8) Perawatan Bahan Pustaka, yaitu kegiatan untuk memelihara dan merawat koleksi bahan pustaka agar tidak rusak.

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.84
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Indikator	Capaian s/d 2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi thd target
1.	Jumlah Perpustakaan/tahun	328	338	343	150
2.	Jumlah anggota perpustakaan/tahun	7.012	7.512	8.732	344
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	75.309	80.000	93.737	1,17
4.	Jumlah peminjam/tahun	45.287	48.787	73.393	803
5.	Jumlah koleksi bahan pustaka/tahun	18.173	21.173	21.799	120
6.	Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	328 : 278.141	338 : 286.714	343 : 286.714	101
7.	Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk	3 : 278.141	1 : 286.714	1 : 286.714	100

Sumber : KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 545.224.250 dengan realisasi sebesar Rp 536.139.850 atau 98,33 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perpustakaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.85
Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	545.224.250	536.139.850	98,33	100				
1.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	545.224.250	536.139.850	98,33	100	Terlaksananya kegiatan pada program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	6	6	Keg
a.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan	23.922.500	23.922.500	100	100	Meningkatnya minat baca masyarakat melalui lomba	1	1	Keg

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat.
			Realisasi	(%)					
	membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar					bercerita			
b.	Pengembangan minat dan budaya baca	185.399.000	182.114.600	98,22	100	Meningkatnya jumlah anggota dan kunjungan ke perpustakaan	10.000	10.000	orang
c.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	58.275.00	55.300.000	94,89	100	Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan desa/kelurahan, meningkatnya perpustakaan sekolah	4	4	Kegiatan
d.	Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca	14.183.750	14.033.750	98,94	100	Meningkatnya minat baca dan jumlah kunjungan MPK	40	40	lokal
e.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	24.010.000	23.975.000	99,85	100	Meningkatnya jumlah kunjungan dan anggota perpustakaan	4	4	paket
e.	Penyediaan bahan pelaksanaan perpustakaan umum daerah	239.434.000	236.794.000	98,89	100	Bertambahnya koleksi bahan pustaka yang variatif	3.000	3.000	eks

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

c) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi urusan perpustakaan, antara lain :

1. Layanan perpustakaan belum sepenuhnya ditunjang sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan layanan perpustakaan;
3. Terbatasnya jenis layanan perpustakaan. Koleksi bahan pustaka masih terbatas, baik dari segi jumlah koleksi maupun klasifikasi bukunya, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Jumlah dan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan belum memadai;
5. Layanan perpustakaan keliling belum dapat menjangkau ke seluruh pelosok desa;
6. Lambannya pertumbuhan perpustakaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya yang akan dilakukan, yaitu mengusulkan tambahan pagu anggaran yang memadai, sehingga secara bertahap akan dapat mengupayakan :

1. Secara bertahap meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan serta melakukan perubahan *lay out* ruangan, mengganti warna cat pagar, bangunan dan perabotan perpustakaan ;
2. Melakukan sosialisasi dan promosi-promosi melalui penyelenggaraan even-even dengan cara kemitraan seperti lomba-lomba, mini bazar, pasar murah, parade band dan dance, pentas teater, ikut pameran dan peluncuran koleksi buku baru;
3. Meningkatkan jenis layanan perpustakaan yang semula hanya 6 layanan (sirkulasi, ruang baca, ruang anak, referensi, perpustakaan keliling dan mendongeng) ditambah 7 layanan (wisata pustaka, internet, *wifi*, pinjam pakai buku, audio visual, bimbingan pemakai dan kelas berbagi) sehingga saat ini menjadi 13 layanan;
4. Secara bertahap memperbanyak koleksi bahan pustaka serta menggalakkan gerakan hibah buku;
5. Meningkatkan kapasitas SDM melalui diklat yang dibiayai sendiri juga dengan kemitraan;
6. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling ke pelosok desa disertai dengan kegiatan pendukung, seperti kelas berbagi dan mendongeng;
7. Mendorong pertumbuhan perpustakaan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

4.2 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

4.2.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a) Kondisi Umum

Pembangunan subsektor kelautan dan perikanan selain ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan juga terus didorong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan kelautan dan perikanan juga harus secara berkelanjutan. Oleh karena itu, selain tetap menggiatkan pengawasan

dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya keautan dan perikanan, juga perlu didukung upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 178 km sehingga potensi dari penangkapan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga ada sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya. Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua kecamatan. Usaha untuk meningkatkan perikanan budidaya perlu terus digalakan untuk mengurangi ketergantungan dari perikanan tangkap. Produksi perikanan secara keseluruhan pada tahun 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 19.922,39 ton.

Produksi ikan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, yaitu perairan laut dan perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum berhubungan dengan permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial, maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan melalui pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan dan kelautan.

Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal perlu dilakukan, terutama di kawasan perairan umum dan pantai. Hal tersebut dilakukan guna peningkatan hasil usaha dan pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut diatas, perlu juga dilakukan perlindungan dan pengembangan reservasi ikan (sungai).

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.86
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No.	Indikator	2015	2016		
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% target

No.	Indikator	2015	2016		
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% target
1.	Produksi perikanan (ton)	16.055,81	18.700	19.922,39	106,54
2.	Produksi Perikanan tangkap (ton)	12.050,40	13.650	14.792,70	108,37
	a. Perairan Laut	10.896,70	11.812,50	10.874,40	92,06
	b. Perairan Umum	1.153,70	1.837,50	3.918,30	213,24
3.	Produksi Perikanan Budi daya (ton)	4.005,41	5.050	5.129,69	101,58
	a. Budidaya Air Payau	626,19	900	918,20	102,02
	b. Budidaya Air Tawar	2.996,15	3.582	3.811,16	106,40
	c. Budidaya Perairan Laut	383,07	568	400,33	70,48
4.	Rata-rata Konsumsi ikan per orang/tahun (kg)	41,35	43,5	43,5	100
5.	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	174,32	500	518,66	11,25
6.	Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor)	941,73	1.170.000	1.577.193	134,80

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar

Berdasarkan Tabel diatas dari indikator yang ada mengalami kenaikan produksi bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, ini di karenakan pada tahun 2016 perubahan iklim *el nino* tidak sepanjang tahun 2015 yang menyebabkan beberapa fisik lokasi rawa atau danau yang kering/ luasan berkurang, sedangkan untuk perairan laut kondisi asap mengurangi/mengganggu aktivitas penangkapan ikan.

Jumlah kapal penangkapan ikan perairan laut terdiri dari 195 perahu tanpa motor, 975 kapal ukuran 0 – 5 GT, 134 kapal ukuran 5 - 30 GT, dan 5 kapal ukuran lebih dari 30 GT. Jumlah kapal penangkapan ikan diperairan umum terdiri dari 424 buah perahu tanpa motor dan 583 buah motor tempel.

Alat tangkap perairan laut terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 604 buah, jaring tiga lapis sebanyak 796 buah, jaring insang hanyut sebanyak 318 buah, purseine sebanyak 53 buah, rawai sebanyak 210 buah, serok sebanyak 65 buah, alat penangkap kerang 25 buah, bubu 170 buah lain-lain sebanyak 115 buah. Alat tangkap perairan umum terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 632 buah, bubu sebanyak 460 buah, pancing sebanyak 370 buah, rawai sebanyak 680 buah, jala tebar sebanyak 313 buah, sero sebanyak 40, garpu tomba, dan lain-lain 205 buah.

Potensi usaha budidaya tambak tahun 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 35.200 ha. Dari luasan tersebut yang sudah diusahakan dan aktif beroperasi seluas 93,63 ha atau sebanyak 362 Rumah Tangga Perikanan (RTP), terdapat di Kecamatan Kumai seluas 87,43 ha atau 671 unit tambak atau 341 RTP dan Kecamatan

Arut Selatan 6,2 ha yang terdiri dari 24 unit tambak atau 21 RTP dengan total produksi 918,2 ton.

Untuk perkembangan usaha budidaya kolam ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berkembang di 6 (enam) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama, Kumai dan Arut Utara, terdiri dari 1.520 RTP dengan luas areal 44,74 ha dan 3.388 unit. Hasil produksi sebesar 1.900,28 ton terdiri dari ikan mas, nila, lele, gurame, gabus dan patin.

Usaha budidaya Keramba dan keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di sepanjang daerah aliran sungai Arut dan Lamandau. Areal yang telah dimanfaatkan sebesar 12,90 ha atau sebanyak 7.662 unit. Jumlah hasil produksi sebesar 1.910,88 ton terdiri dari ikan nila, patin, mas, jelawat, toman, baung, bawal, batutu dan ikan lainnya.

Usaha budidaya rumput laut hanya di Desa Teluk Bogam dengan jumlah 60 RTP, luas areal 10 ha atau sebanyak 600 unit. Jumlah produksi sebesar 400,33 ton basah. Bila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan pembudidaya kekurangan bibit rumput laut terutama pada musim penghujan. Mereka tidak bisa mempertahankan bibit rumput laut untuk bisa dijadikan bibit setelah musim hujan berakhir.

Usaha budidaya mina padi masih belum dikembangkan, untuk menyebarluaskan usaha budidaya mina padi, pada tahun 2016 dibuat kawasan terpadu pertanian di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Pangkalan Banteng yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan juga atas keinginan dari masyarakat setempat.

Sasaran produksi usaha budidaya ikan pada tahun 2016 sebesar 5.050 ton dan mencakup rumah tangga perikanan (RTP) sebanyak 1.750 RTP, dengan rincian : jumlah unit usaha budidaya tambak 800 ha, dengan produktivitas 500-1.000 kg/Ha/tahun, kolam ikan 140 ha, dengan produktivitas 10.000-20.000 kg/Ha/tahun, karamba 2.850 unit dengan produktivitas 400-1.000 kg/unit/tahun, serta rumput laut 500 unit dengan produktivitas 400 ton /tahun (basah).

Perkembangan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum masih sangat minim sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah

unit pengolahan, pabrik es dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan. Namun demikian dalam beberapa tahun ini usaha untuk meningkatkan mutu produk hasil perikanan serta perluasan pasar ikan telah banyak diusahakan, antara lain :

1. Pembangunan gedung outlet pemasaran ikan;
2. Pengadaan alat penampung ikan, alat penghancur es, ice storage, long pan dan ice can;
3. Pengadaan box dingin (*cool box*) untuk menjaga rantai dingin;
4. Pembangunan pasar ikan;
5. Peralatan outlet pemasaran ikan.

Pengendalian mutu produk hasil perikanan sangat bergantung pada sarana rantai dingin, hal ini karena produk perikanan merupakan jenis produk yang mudah busuk (*Ferisablefood*) dimana perlu terjaga rantai dingin dari pasca penangkapan/pasca budidaya hingga sampai ke konsumen.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 difokuskan pada pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan penertiban ijin usaha perikanan. Hasil pengawasan dilapangan berupa pelanggaran penggunaan alat/bahan penangkap ikan yang dilarang seperti strum sebanyak 1 kasus, trawl sebanyak 2 kasus dan potasium sebanyak 1 kasus, perijinan usaha penangkapan ikan 1 kasus dan penangkapan ikan yang dilindungi (*duyung*) sebanyak 1 kasus.

Salah satu program pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat mendesak adalah pembentukan daerah suaka perikanan, dimana hal ini sangat penting guna menjaga dan melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kerusakan yang tidak diinginkan. Pada perkembangan beberapa tahun ini telah pula disusun zonasi/daerah sumberdaya kelautan.

Beberapa potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikelola menjadi daerah suaka antara lain :

1. Gosong Senggora;
2. Gosong Sepagar;
3. Gosong Sebogor-Lubang Buaya;
4. Danau Masorayan;
5. Danau Seluluk;
6. Danau Terusan;

7. Danau Gatal Kiri-Kanan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.911.822.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.293.318,194 atau 94,33 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.87
Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Dinas Perikanan dan Kelautan		10.911.822.000	10.293.318.194	94,33	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	986.292.050	894.053.370	90,64	99,85	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	10	keg
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	143.700.000	107.130.479	74,55	100	Meningkatnya kinerja dinas secara keseluruhan	12 12 12 60 12	12 12 12 60 12	Bulan Bulan Bulan Buah Bulan
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	11.500.000	4.325.400	37,61	99,12	Meningkatnya kinerja aparatur dinas	3 25	3 25	Unit unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	180.501.400	157.946.400	87,50	100	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 100 12 1600 12 4	12 100 12 1600 12 4	Bulan Paket Bulan Lembar Bulan Buku
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.637.500	39.864.000	89,30	100	Terciptanya lingkungan kebersihan dan kenyamanan tempat kerja	2 1	2 1	Orang Tahun
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.950.000	25.580.000	94,91	100	Berfungsinya peralatan kerja secara optimal	10 10 15 1	10 10 15 1	unit unit unit Tahun
f.	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	49.987.000	99,97	100	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1	1	Tahun
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.310.000	39.057.000	99,35	100	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 130000	1 130 000	Tahun lembar
h.	Penyediaan komponen	9.100.000	9.082.000	99,80	100	Meningkatnya kinerja dinas	1	1	Tahun

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor								
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	124.521.150	122.475.000	98,35	100	Meningkatnya kinerja dinas	2 2 3 1 5 1	2 2 3 1 5 1	Unit Unit Unit Unit Unit Paket
j.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	14.000.000	100	100	Meningkanya kinerja dinas	1 1	1 1	Unit Unit
k.	Penyediaan Makan dan Minum	88.510.000	72.480.000	81,88	99,07		8581 60 60	8581 60 60	OK Kotak Kotak
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	253.562.000	252.126.091	99,43	100	Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi	1	1	Tahun
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.266.385.000	1.188.439.835	93,84	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	7	keg.
a.	Pembangunan Gedung Kantor	357.720.000	354.531.060	99,10	100	Meningkatnya kinerja dinas secara keseluruhan	64 24 1 1 1	64 24 1 1 1	M2 M2 Paket Paket Paket
b.	Pengadaan kendaraan dinas/operasi onal	422.500.000	421.769.000	99,82	100,		1 1	1 1	Unit unit
c.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25.500.000	25.500.000	100	100	Meningkatnya kinerja dinas	3	3	Unit
d.	Pengadaan meubeleur	55.000.000	53.135.775	96,61	100	Meningkatnya kinerja dinas	3 10 5 10 5 2	3 10 5 10 5 2	Buah Buah Buah Buah Buah Buah
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	147.125.000	146.145.000	99,33	100	Terpeliharanya gedung kantor Dinas, PPI Kumai, BBI Pinang Merah dan BBAP Sei Bakau	220 120 89 600 1000	220 120 89 600 1000	M2 M2 M2 M2 M2
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	250.000.000	178.819.000	71,52	100	Meningkatnya kinerja dinas	29 28 29	29 28 29	Unit Unit unit
g.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.540.000	8.540.000	100	100	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	14	14	Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	75.000.000	70.758.600	94,34	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas	75.000.000	70.758.600	94,34	100	Terciptanya keseragaman	150	150	Stell

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	beserta perlengkapan					pakaian dinas pegawai			
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	110.500.000	60.875.505	55,09	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	110.500.000	60.875.505	55,09	100	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur	15	15	OK
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.609.000	2.912.000	80,68	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.737.000	1.392.000	80,13	100	Terlaksananya pelaporan kinerja dinas	12	12	Buku
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.872.000	1.520.000	81,19	100	Terlaksananya pelaporan keuangan dinas	6	6	Buku
6.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	83.050.000	12.140.000	14,61	77,74	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1	1	Keg
a.	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	83.050.000	12.140.000	14,61	77,74	Tersedianya hasil pengujian kualitas air dan ikan	35	35	Orang
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	545.889.700	527.299.299	96,59	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	2	2	keg.
a.	Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan	309.702.250	308.145.628	99,49	100	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan penagwasan sumberdaya kelautan dan perikanan	1 120 1 3	1 120 1 3	Tahun Orang Paket Paket
b.	Pengelolaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	236.187.450	219.153.671	92,78	100	Meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan SDKP	120 50	120 50	Orang Buah
8.	Program Pengembangan	2.321.425.500	2.247.337.712	96,80	100	Tercapainya sasaran kegiatan	3	3	keg.

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	an Budidaya Perikanan					pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan			
a.	Pengembang an Bibit Ikan Unggul	630.600.500	586.521.501	93	100	Meningkatnya penyediaan bibit ikan unggul untuk pembudidaya ikan di Kab.Ktw.Barat	1 1 2 1 2 2	1 1 2 1 2 2	Unit Unit Unit Unit Buah Unit
b.	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	702.625.000	690.021.745	98,20	100	Berproduksinya kawasan budidaya ikan di kolam	110 50 110 4	110 50 110 4	Ekor Ekor Ekor Kelp
c.	Pembinaan dan Pengembang an Perikanan	988.200.000	970.794.466	98.23	100	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1 1 1 3 1 1	1 1 1 3 1 1	Peket Peket Peket Peket Peket Peket
9.	Program Pengembang an Perikanan Tangkap	4.904.220.750	4.715.392.050	96,14	99,87	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3	3	keg.
a.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1.888.956.750	1.835.163.750	97,15	100	Berfungsinya PPI dan TPI Kumai sebagai pusat pelelangan ikan	43 3 1 2 2 1 5 1 1	43 3 1 2 2 1 5 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit Paket Unit Unit Unit
b.	Pengembang an Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	1.284.400.000	1.212.782.500	94,42	99,61	Meningkatnya kelembagaan usaha perdagangan perikanan tangkap	8 1 19 1 3 3 1 2 1 1 1	8 1 19 1 3 3 1 2 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Unit Paket Unit
c.	Peningkatan Perikanan Tangkap	1.730.864.000	1.667.445.800	96,33	100	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	4 3 6 64 1 1 1	4 3 6 64 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Paket Paket Paket
10.	Program pengembang an sistem penyuluhan perikanan	141.900.000	122.084.001	86,03	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	1	1	keg.
a.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan	141.900.000	122.084.001	86,03	100	Meningkatnya kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan	1	1	Kali
11.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi	473.550.000	452.025.822	95,45	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program optimalisasi pengelola- an dan pemasaran	4	4	keg.

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	perikanan					produksi perikanan			
a.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan	201.800.000	195.807.261	97,03	100	Meningkatnya mutu hasil perikanan	1 1 2	1 1 2	Tahun Unit Paket
b.	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan tradisional	107.400.000	105.008.000	97,77	100	Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan	1	1	Kali
c.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	55.750.000	43.706.000	78,39	100	Tercapainya sasaran/tujuan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	Tahun
d.	Pengembang an Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	108.600.000	107.504.561	98,99	100	Meningkatnya promosi dan pemasaran hasil perikanan	1 1	1 1	Tahun Paket

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan pembudidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan masih rendah;
2. Sarana dan teknologi penangkapan ikan yang di miliki nelayan masih belum memadai;
3. Sarana, prasarana dan teknologi dalam budidaya ikan masih sederhana;
4. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih terbatas;
5. Akses terhadap informasi teknologi, permodalan dan pemasaran masih terbatas;
6. Sarana produksi perikanan sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah;
7. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan masih kurang;
8. Penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*) oleh masyarakat masih cukup tinggi;
9. Pencemaran dan penurunan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan akibat aktifitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan faktor alam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas beberapa solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pendampingan dan penyuluhan serta pelatihan untuk peningkatan sumberdaya dan penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan;
2. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan dan mempermudah akses nelayan pembudidaya dan pelaku usaha terhadap informasi, teknologi, permodalan dan pemasaran yang dibutuhkan;
4. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan budidaya;
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil perikanan;
6. Meningkatkan peran Balai Benih dan Usaha Pembibitan Rakyat (UPR) dalam menyediakan bibit ikan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah;
7. Mengoptimalkan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelayanan kapal perikanan;
8. Pengembangan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara lestari, berkelanjutan dan bertanggung jawab;
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4.2.2 URUSAN PERTANIAN

1. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

a) Kondisi Umum

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain sebagai penyedia bahan pangan baik nabati maupun hewani, sektor ini berperan dalam rangka penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan sumber pendapatan masyarakat di perdesaan, sekaligus pemenuhan input bagi sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap pembentukan PDRB terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Pembangunan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan sub-sektor pendukungnya, menjadi tanggung jawab tiga pilar, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pembangunan sektor ini diarahkan pada terwujudnya pertanian yang bersifat komersial dan efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi tepat guna, yang berimplikasi pada peningkatan daya saing, pendapatan dan nilai tambah produk pertanian.

Keberhasilan pembangunan pertanian di daerah salah satunya tercermin dari peningkatan produksi komoditas subsektoral (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan), peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dari besaran nilai tukar petani yang meningkat dari tahun ketahun.

Capaian ini sejalan dengan terget capaian indikator kinerja pembangunan sektor pertanian dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 yang meliputi peningkatan pengembangan aktivitas kelembagaan petani, nilai tukar petani, peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, serta perkembangan luas lahan produktif sehubungan dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan.

Terkait dengan Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.88
Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016		
			Target	Capaian	%
	Pelayanan Urusan Pilihan				
1.	Pertanian Tanaman Pangan				
1.1.	Luas tanam tanaman pangan				
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	5.412	9.065	4.209	46,43
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	1.454	3.981	746	18,73
1.1.3	Jagung (Ha)	1.526	1.546	2.438	157,67
1.2.	Luas Panen Tanaman Pangan				
1.2.1	Padi sawah (Ha)	4.000	8.612	4.731	54,94
1.2.2	Padi ladang (Ha)	1.664	3.782	1.296	34,27
1.2.3	Jagung (Ha)	608	1.469	1.171	79,72
1.3	Produktivitas tanaman pangan				
1.3.1	Padi sawah (Ton/Ha)	3,73	4,10	3,63	88,54
1.3.2	Padi ladang (Ton/Ha)	2,28	2,13	2,05	96,24
1.3.3	Jagung (Ton/Ha)	3,65	3.30	3,73	113,03
1.4	Produksi tanaman pangan				

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016		
			Target	Capaian	%
1.4.1	Padi sawah (Ton)	14.928	35.308	17.174	48,64
1.4.2	Padi ladang (Ton)	3.797	8.056	2.657	32,98
1.4.3	Jagung (Ton)	2.219	4.848	4.368	90,11

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Pada tahun 2016 capaian produksi tanaman pangan strategis yakni padi meskipun kurang optimal namun naik dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 19.831 ton, lebih tinggi dari tahun 2015 (18.725 ton).Di sisi lain, produksi jagung pada tahun 2016 meningkat sangat menggembirakan, yaitu sebesar 4.368 ton pipilan kering (PK) naik 96,85 % dari tahun 2015 yang mencapai 2.219 ton PK. Sedangkan untuk hasil komoditi tanaman pangan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.89

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

No	Jenis Komoditi	2015			2016			+/(-) Produk- tivitas
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti- vitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produk- tivitas (Ton/Ha)	
1	Kedelai	59	70	1,19	126,90	176	1,39	17,16
2	Kacang Tanah	79	92	1,16	50,60	58	1,15	-1,25
3	Kacang Hijau	5	4	0,80	0	0	0	-100
4	Ubi Kayu	426	5.263	12,35	356,70	4.691	13,15	6,44
5	Ubi Jalar	114	1.040	9,12	87,50	823	9,40	3,04

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar.

Produksi kedelai sebesar 176 ton, naik 152% dari tahun 2014 yang hanya mencapai 70 ton, dengan produktivitasnya juga mengalami peningkatan. Kondisi peningkatan produksi tanaman ini disebabkan adanya stimulus yang berikan pemerintah melalui pengembangan tanaman kedelai seluas 200 ha. Selain itu, adanya motivasi petani untuk menanam kedelai karena alasan harga yang lebih baik dan adanya pemasaran yang lebih jelas di tingkat lapangan. Dukungan dan bantuan pemerintah umumnya akan membuat petani lebih berminat menanam tanaman pangan.

Produksi ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2016 masing-masing sebesar 4.691 ton dan 823 ton. Angka produksi ketiga komoditi ini turun masing-masing sebesar 10,88%, 20,91% dibandingkan produksi tahun 2015. Untuk komoditi lainnya, yakni kacang tanah, produksinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 58 ton, turun 37,25% dari tahun 2015 yang angka produksinya pencapai 92 ton. Komoditi yang tidak terdapat

penanaman adalah kacang hijau, hal ini disebabkan kondisi minat petani lebih memprioritaskan pada komoditi pangan lainnya seperti kedelai dan jagung.

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat baru sebagian kecil yang berorientasi pasar, karena hasil produksi umumnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri. Selain itu, lahan-lahan pertanian yang baru dikembangkan belum berfungsi secara optimal, disisi lain tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan sawit dan karet menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengetahui produksi dan produktivitas tanaman sayur sayuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.90
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

No.	Jenis Komoditi	2015			2016			+/(-) Produkti vitas (%)
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	
1	Bayam	76	159,7	2,10	89	164,8	1,85	-0,12
2	Cabe Rawit	163	390,3	2,39	156	436,7	2,80	0,17
3	Cabe Besar	52	131,5	2,53	57	117,2	2,06	-0,19
4	Kacang Panjang	227	512,6	2,26	222	555,8	2,50	0,11
5	Kangkung	99	227,3	2,30	105	194	1,85	-0,19
6	Ketimun	91	305,1	3,35	101	454,3	4,50	0,34
7	Sawi	191	389,4	2,04	171	381,7	2,23	0,09
8	Terung	164	564,1	3,44	155	573,9	3,70	0,08
9	Tomat	73	199,3	2,73	87	165,5	1,90	-0,30
10	Buncis	77	166,4	2,16	87	155,6	1,89	-0,18
11	Bawang Daun	87	182,8	2,10	82	207,9	2,54	0,21

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar

Upaya mendorong dan mengoptimalkan sentra-sentra baru pengembangan padi yang lebih tertata secara kewilayahan terus dilakukan. Tahun 2016 dilaksanakan rehabilitasi/optimalisasi lahan sawah seluas 50 ha, dan pembangunan *long storage* sebanyak 1 unit untuk pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman. Dalam bidang perbenihan dilaksanakan pengembangan Balai Benih Padi di Tanjung Terantang seluas 25 ha dan penangkaran benih padi seluas 30 ha di tingkat petani penangkar. Balai Benih Padi ini akan terus dioptimalkan fungsinya dalam rangka pemenuhan penyediaan benih unggul berkualitas bagi petani.

Produktivitas dan produksi tanaman pangan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah

(penyediaan pangan bagi masyarakat di daerah secara mandiri), seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri. Pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian.

Hal ini akan dapat dicapai melalui perluasan/rehab/optimasi lahan pertanian dan pengamanan produksi pertanian sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan. Peningkatan mutu dan kualitas produk perlu dilakukan perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya.

Selain faktor fisik, faktor sumber daya petani dan kelembagaannya juga perlu terus dikembangkan agar petani mampu mengelola usaha taninya secara lebih optimal, mandiri dan lebih baik. Lembaga penyuluh pertanian juga perlu terus didorong fungsi dan perannya dalam rangka pendampingan peningkatan kesejahteraan petani. Mengenai indikator capaian kinerja Sub Sektor Peternakan dapat digambarkan secara rinci pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.91
Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor
Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2015-2016

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016		
			Target	Capaian	%
	Pelayanan Urusan Pilihan				
2.	Peternakan				
2.1	Populasi Ternak				
2.1.1	Sapi (ekor)	14.397	20.872	17.203	82,42
2.1.2	Kerbau (ekor)	-	-	-	-
2.1.3	Kambing /Domba (ekor)	2.764	2.699	2.538	94,03
2.1.4	Babi (ekor)	5.718	6.625	5.881	88,77
2.1.5	Ayam buras (ekor)	345.661	508.770	346.843	68,17
2.1.6	Ayam ras petelur (ekor)	46.500	-	50.794	100
2.1.7	Ayam ras pedaging (ekor)	158.253	249.148	210.115	84,33
2.1.8	Itik (ekor)	41.527	48.485	42.574	87,81
2.2	Produksi Daging Ternak				
2.2.1	Sapi (Ton)	572,24	737,42	625,86	84,87
2.2.2	Kerbau (Ton)	-	-	-	-
2.2.3	Kambing / Domba(Ton)	58,14	61,16	33,02	53,99
2.2.4	Babi (Ton)	94,47	122,16	86,53	70,83
2.2.5	Ayam buras (Ton)	340,50	482,82	400,60	83,53
2.2.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	20,39	100
2.2.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	817,78	947,59	1.031,75	108,89
2.2.8	Itik (Ton)	14,12	15,9	17,09	107,62
2.3	Produksi Telur				
2.3.1	Ayam buras (Ton)	207,98	316,09	212,71	67,29

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016		
			Target	Capaian	%
2.3.2	Ayam Ras Petelur (Ton)	209,25	-	366,39	100
2.3.3	Itik (Ton)	133,19	174,09	176,97	101,65

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat terus didorong peran strategisnya terutama dalam rangka peningkatan produksi daging untuk mencapai kemandirian atau mengurangi ketergantungan dari luar daerah. Capaian produksi daging sapi potong pada tahun 2016 sebesar 625,86 ton, naik sebesar 9,37% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 572,24 ton.

Pemotongan ternak sapi potong tahun 2016 tercatat sebanyak 4.166 ekor dengan tingkat produksi daging mencapai 625,86 ton, sedangkan pemotongan ternak Kambing/Domba sebesar 3.918 ekor dengan produksi daging mencapai 33,02 ton. Disisi lain, produksi telur unggas secara keseluruhan pada tahun 2016 mencapai 756,07 ton (naik 37,36% dari produksi tahun 2015 sebesar 550,42 ton). Peningkatan produksi telur ini diperoleh dari adanya pengembangan ayam ras petelur di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana pada tahun 2016 produksi telur ayam ras telah mencapai 366,39 ton (naik 75,10% dari tahun 2015 yang hanya sebesar 209,25 ton). Disisi lain, produksi telur ayam buras dan itik pada tahun 2016 masing-masing sebesar 212,71 ton dan 176,97 ton.

Peningkatan produksi daging sapi potong, tidak diikuti dengan kenaikan produksi ternak kambing/domba. Produksi daging kambing/domba tahun 2016 sebesar 33,02 ton, menurun dibanding tahun 2015 yang mencapai 58,14 ton. Produksi daging ternak babi juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 produksinya mencapai 86,53 ton, sedikit turun dibandingkan produksi tahun 2015 yang mencapai 94,47 ton. Produksi daging ternak unggas pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 25,37%, dimana pada tahun 2016 produksinya mencapai 1.469,83 ton dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya mencapai angka produksi sebesar 1.172,40 ton. Adapun dinamika populasi ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.92
Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2016

No.	Jenis Ternak	Satuan	Populasi		
			2015	2016	(%)

1	Sapi	Ekor	14.397	17.203	19,49
2	Kambing/Domba	Ekor	2.764	2.538	-8,18
3	Babi	Ekor	5.718	5.881	2,85
4	Ayam Buras	Ekor	345.661	346.843	0,34
5	Ayam Ras Pedaging	Ekor	158.253	210.115	32,77
6	Ayam Ras Petelur	Ekor	46.500	50.794	9,23
7	Itik	Ekor	41.527	42.574	2,52

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar

Populasi ternak terus mengalami peningkatan pada tahun 2016, Populasi ternak sapi potong pada akhir tahun 2016 telah mencapai 17.203 ekor (naik 19,49% dari tahun 2015 yang mencapai 14.397 ekor). Populasi Ternak Kambing/Domba sebesar 2.538 ekor, mengalami penurunan 8,18% dibanding tahun 2015 yang mencapai 2.764 ekor. Populasi ternak Babi 5.881 ekor (naik 2,85%), Ayam Buras 346.843 ekor (naik 0,34%), Ayam Ras Pedaging 210.115 ekor (naik 32,77%), Ayam Ras Petelur populasinya juga mengalami peningkatan yakni mencapai 50.794 ekor (naik 9,23 % dari tahun 2015 yang mencapai 46.500 ekor), sedangkan populasi ternak Itik sebanyak 42.574 ekor (naik 2,52%).

Pada tahun 2016 sarana pendukung pelayanan kesehatan ternak dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) terus dilengkapi sehingga dapat mendukung pengembangan populasi dan produksi ternak. Dalam bidang perbibitan ternak sapi, kinerja petugas Inseminasi Buatan (IB) cukup baik dimana terfasilitasi pelaksanaan IB atau kawin suntik pada ternak masyarakat sebanyak 1.844 ekor epseptor ternak sapi (82,88% dari target yang ditetapkan 2.225 ekor). Sedangkan angka kelahiran ternak sapi hasil IB sebanyak 1.626 ekor (82,12 % dari target yang ditetapkan 1.980 ekor).

Secara umum produksi ternak di Kotawaringin Barat dalam tahun 2016 mengalami kenaikan. Namun demikian dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak, perlu diperhatikan aspek budidaya peternakan yang terencana dengan baik. Kedepan, populasi dan produksi ternak diharapkan dapat terus meningkat, sehingga tidak hanya mampu memenuhi konsumsi lokal daerah saja tetapi juga dapat meluas hingga pasar ekspor.

Dalam konteks ini, terobosan kedepan yaitu dengan pengembangan peternakan dengan pendekatan sistem integrasi sawit-sapi yang melibatkan pihak swasta, pengembangan model *silvopasture*, pengembangan teknologi *embrio transfer*, pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil ternak, penataan kelembagaan peternak dan pengembangan investasi, serta mengurangi angka kesakitan dan kematian ternak.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2016

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP), dan Dinas Perkebunan. Alokasi anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2016 sebesar Rp. 12.559.983.840 dan terealisasi sebesar Rp. 10.789.937.760 atau 85,9 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.93
Program/Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan
Tahun Anggaran 2016 Yang dilaksanakan oleh Distanak dan KP2KP

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
DISTANAK		8.995.117.950	7.697.694.332	85,57	96				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	921.993.900	799.932.606	86,76	99,25	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	keg.
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	135.040.000	104.467.454	77,36	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik serta surat kabar	12	12	bln
b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	15.260.000	9.066.900	59,42	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional	45	45	unit
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	221.263.500	164.493.500	74,34	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan, tenaga kontrakdinas dan administrasi keuangan	12	12	bln
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	61.843.200	58.256.000	94,20	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	4 12	4 12	orang bln

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.100.000	12.330.000	94,12	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas berupa : ~ Mesin tik ~ Printer ~ PC/Laptop	3 10 20	3 10 20	unit unit unit
f.	Penyediaan alat tulis kantor	62.932.200	62.900.000	99,95	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi	12	12	bln
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.350.000	29.282.250	93,40	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan administrasi perkantoran	12	12	bln
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9.915.000	9.915.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	16	16	jenis
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48.800.000	44.650.000	91,50	91,80	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Mesin Penghancur Kertas ~ Printer all in one (Print, scan, copy) ~ Printer Laser Perencanaan ~ Pengadaan radio komunikasi (HT) ~ Kulkas Portabel/Cool Box Mobile DC	4 6 1 5 2	4 6 1 5 -	buah buah buah buah buah
j.	Penyediaan makanan dan minuman	142.490.000	126.000.000	88,43	100	Tersedianya minum harian bagi Pegawai THL, dan makan-minum kegiatan rapat dinas	12	12	bln
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180.000.000	78.571.502	99,21	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	bln
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.065.085.000	1.000.194.945	93,91	96,08	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur bagi pelayanan publik	7	7	Keg.
a.	Pembangunan gedung kantor	196.385.000	95.773.000	99,69	100	Terlaksananya : ~ Terlaksananya perluasan ruang keuangan ~ Terlaksananya pemasangan	50 11	50 11	M2 M2

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						teralis gedung kantor perbenihan			
b.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	350.000.000	350.000.000	100	100	~ Tersedianya mobil operasional eselon II	1	1	unit
c.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23.150.000	16.800.000	72,57	72,57	~ Tersedianya perlengkapan gedung kantor	6	6	jenis
d.	Pengadaan meubeleur	72.150.000	72.150.000	100	100	Terlaksananya penyediaan : ~ Almari Arsip ~ Meja Kerja ~ Kursi kerja ~ Kursi Tamu/Sofa	9 14 12 2	9 14 12 2	Buah Buah Buah set
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	53.500.000	53.157.200	99,36	100	Terlaksananya pemeliharaan : ~ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor dan halaman kantor ~ Pemeliharaan Jaringan air dan Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 2	1 2	pkt pkt
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	359.000.000	301.624.295	84,02	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional	32	32	unit
g.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.900.000	10.690.450	98,08	100	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor : ~ AC ~ Mesin Potong rumput	16 2	16 2	Unit unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	112.200.000	112.200.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	1	1	keg.
a.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	112.200.000	112.200.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian hari-hari tertentu bagi aparatur dinas	210	210	stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85.000.000	63.475.354	74,68	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	85.000.000	63.475.354	74,68	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	16	16	Org
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.020.000	1.060.000	52,48	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	3	3	keg.

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan keuangan	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	280.000	280.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	lap
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	500.000	500.000	100	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	2	2	lap
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.240.000	280.000	22,58	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	lap
6.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	212.789.000	207.812.400	97,66	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	2	keg.
a.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	72.514.000	71.524.000	98,63	100	Terlaksananya : ~ Pelatihan Budidaya cabe dan bawang merah ~ Bimtek pengolahan hasil pertanian (2 kec)	30 60	30 60	Org Org
b.	Peningkatan kemampuan lembaga petani	140.275.000	136.288.400	97,16	100	Terlaksananya : ~ Fasilitasi peserta dan pendamping PEDDA XI ~ Pameran produk pertanian unggulan Kobar di PEDDA XI	20 1	20 1	Org Kali
7.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	1.224.766.000	414.164.182	33,82	70,67	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	3	3	keg.
a.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	884.073.000	107.270.500	12,13	13,24	~ Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT) ~ Terbangunnya long storage	2 1	- 1	desa unit
b.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	121.525.000	108.135.500	88,98	98,77	Terlaksananya : ~ demplot bawang merah ~ Pertemuan kegiatan demplot	0,5 4	0,5 4	ha kali
c.	Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian	219.168.000	198.758.182	90,69	100	Terlaksananya : ~ Pertemuan UPJA ~ Terbinanya pengelola alsintan/UPJA ~ Terlaksananya pengadaan Alsintan	1 1 4	1 1 4	kali thn pok tan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
8.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	833.583.700	91.372.454	94,94	99,87	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	2	2	keg.
a.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	68.750.000	67.894.003	98,75	100	Terlaksananya : ~ Fasilitasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida ~ Penyusunan RDK/RDKK ~ Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	1 6 6	1 6 6	Thn Kec. Kec.
b.	Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian	110.544.000	104.053.250	94,13	99,62	Terlaksananya : ~ Fasilitasipengamanan dan pengendalian OPT ~ Tersedianya bahan laboratorium untuk pengendalian OPT ~ Tersediannya leaflet pengendalian OPT/HPT	1 1 1.000	1 1 1000	thn Pkt Eksplr
c.	Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian	654.289.700	619.425.201	94,67	100	Terlaksananya : ~ Tersosialisasinya kegiatan PLA ~ Pendampingan kegiatan PLA ~ rehab/optimasi lahan ~ Pengendalian alih fungsi lahan ~ identifikasi/ verifikasi/ audit lahan pertanian ~ Pertemuan kegiatan P3A	2 1 50 6 6 1	2 1 50 6 6 1	lokasi Thn ha kec kec kali
9.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	539.057.600	503.603.200	93,42	84,21	Terlaksananya kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	2	2	keg.
a.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	189.143.350	159.440.500	84,30	83,06	Terlaksananya : ~ Sosialisasi Keswan ~ Terfasilitasinya kegiatan pelayanan kesehatan hewan ~ Pemeriksaan specimen ternak	2 6 4	2 6 4	lokasi kec kali
b.	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	349.914.250	344.162.700	98,36	85,36	Terlaksananya : ~ Pengawasan perdagangan/ pemotongan ternak di RPH dan luar RPH ~ Tersedianya buku pedoman pemotongan hewan kurban ~ Pemeriksaan	1 200 11	1 200 11	Tahun Buku Sam

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						specimen ternak dan residu antibiotika, cemaran mikroba dan toksisitas pada PAH (daging dan telur) ~ Sosialisasi pangan asal hewan yang ASUH ~ Pengawasan pemotongan hewan kurban ~ Terasilitasnya pengawasan lalu lintas perdagangan ternak dan peredaran bahan pangan asal ternak ~ Pembinaan dan Pembekalan Penyelenggaraan Hewan Kurban	30 6 1 60	30 6 1 60	pel Org Kec Tahun orang
10.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.998.622.750	3.803.879.191	95,13	97,96	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4	4	keg.
a.	Pembibitan dan Perawatan Ternak	585.114.050	578.130.800	98,81	99,14	Terlaksananya : ~ Fasilitas Unit Layanan IB (18 ULIB) ~ Operasional Breeding Farm ~ Rakor. IB dan Perbibitan Ternak ~ Tersedianya brosur perbibitan ternak ~ Pembuatan instalasi air di Puskesmas/ Pos IB ~ Pemasangan keramik dan plafon, dan pembuatan jembatan di Puskesmas/Pos IB Kumpai Batu Atas	6 1 1 1.000 1 1	6 1 1 1.000 1 1	SPIB Thn Kali eksl pkt pkt
b.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1.934.897.400	1.841.587.941	95,18	97,28	Terlaksananya : ~ Refresing data statistik peternakan ~ Pendataan ternak pemerintah ~ Pertemuan stakeholder pengembangan integrasi sawit sapi ~ Sosialisasi pengembangan ternak sapi ~ Pengembangan integrasi sawit-sapi	25 6 1 60 8	25 6 1 60 8	orang kec kali orang Klp

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						~ Tersedianya alat pencacah kelapa sawit	10	10	buah
						~ Fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak	1	1	tahun
c.	Pengembangan Agribisnis Peternakan	1.187.611.300	1.105.083.650	93,05	95,42	Terlaksananya : ~ Pelatihan penggaduh ternak sapi	30	30	Orang
						~ Pelatihan pengembangan unggas	30	30	Orang
						~ Fasilitasi perizinan usaha peternakan	1	1	Tahun
						~ Pengembangan lumbung pakan	2	2	unit
						~ Rakor usaha peternakan	2	2	kali
						~ Pengembangan ternak ayam buras	2	2	Klp
						~ Pengembangan ternak itik	9	9	Klp
						~ Tersedianya leaflet pengembangan usaha peternakan	1000	1000	eksplr
d.	Penyediaan sarana produksi peternakan	291.000.000	279.076.800	95,90	100	Terlaksananya : ~ Pengadaan bahan kimia (N2Cair) untuk pengembangan inseminasi buatan(IB)	2.000	2.000	liter
						~ Pengadaan bahan IB (straw)	2.000	2.000	dosis
						~ Pengadaan obat- obatan untuk pelayanan keswan	10	10	jenis

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan		884.159.000	718.356.162	81,24	100				
1.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	356.040.000	269.845.000	75,79	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	1	1	keg.
a	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	356.400.000	269.845.000	75,79	100	Terlaksananya - Pekan Daerah - KTNA Tk. Provinsi, Rembung KTNA - Pelatihan Petani	15 7 162	15 7 162	Org. Keg. OH
2.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	528.119.000	448.511.162	84,92	100	Terlaksananya pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	1	1	Thn

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
a	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	528.119.000	448.511.162	84,92	100	Terlaksananya program penyuluh pertanian kelurahan, kecamatan, kabupaten & money	1	1	Thn

Sumber : Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kobar

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pertanian sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pertanian tanaman pangan strategis (padi, jagung, dan kedelai) tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.
2. Meningkatnya produktivitas tanaman sayuran untuk mendorong peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging ternak dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya
4. Terdorongnya perkembangan sentra-sentra produksi yang berskala ekonomi dan berbasis agribisnis melalui kegiatan :

❖ Sentra Produksi Tanaman Pangan

- Pengembangan Padi Sawah 4.870 ha;
- Pengembangan Padi Ladang 400 ha;
- Pengembangan Jagung 2500 ha;
- Pengembangan Kedelai 200 ha;
- Pengembangan ubi kayu 2 ha;
- Optimasi lahan sawah 50 ha;
- Pengembangan sumber air (*long storage*) 1 unit;
- Penangkaran benih padi di Balai Benih Padi 20 ha;
- Demplot bawang merah 0,5 ha;
- Pengadaan Alsintan 4 kelompok;
- Pengamanan produksi TPH 1 tahun.

❖ Sentra Produksi Peternakan

- Pengembangan/penyebaran ternak sapi 80 ekor;
- Pengembangan lumbung pakan ternak 2 unit;
- Pengadaan alat pencacah pelepah sawit (*shredder*) 10 unit;
- Pengembangan integrasi sawit sapi 8 pkt;
- Pengembangan ayam buras 2 pkt (400 ekor);
- Pengembangan itik alabio 9 pkt (1.800 ekor);
- Peningkatan kelahiran ternak melalui IB 1.626 ekor;

- Pembinaan dan Pelayanan di Sentra IB (18 ULIB);
 - Pengamanan kesehatan ternak 1 tahun.
5. Meningkatnya sikap pengetahuan dan ketrampilan petani, petugas lapangan dan berkembangnya kelembagaan, melalui:
- ❖ Peningkatan kapasitas petugas teknis peternakan, mantri tani dan pengamat hama melalui : optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH), Pelayanan IB, Pelayanan Keswan, Brigade Pengendali HPT dan Unit-Unit pelayanan lainnya;
 - ❖ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan budidaya sayuran (cabe dan bawang merah), pelatihan pengolahan hasil pertanian, sosialisasi dan pembinaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, serta pelatihan peternak penggadu.
6. Terlaksananya pengobatan ternak sehingga kualitas kesehatan ternak dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pengobatan ternak meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak untuk mendiagnosa penyakit secara klinis, patologis maupun epidimiologis. Kegiatan pengobatan ternak dilakukan secara massal dengan berkoordinasi dengan PPL/petugas teknis di lapangan melalui kegiatan Posyandunak;
7. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan rabies sehingga dapat mencegah dan menekan penyakit menular hewan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan pemberian vaksinas anti rabies terhadap anjing berpemilik dan eliminasi/pemusnahan terhadap anjing liar. Selain itu, kegiatan ini dibarengi juga dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit rabies pada anjing, potensi penularan rabies dari anjing kepada manusia, tindakan pencegahan serta tindakan penanganan apabila terjadi kasus gigitan. Dalam kegiatan vaksinasi anti rabies, jumlah anjing yang divaksin sebanyak 5.747 ekor anjing dengan eliminasi anjing liar sebanyak 483 ekor;
8. Terlaksananya pengambilan sampel darah anjing sebanyak 31 ekor untuk pemeriksaan antibodi rabies. Pengambilan otak anjing sebanyak 21 sampel untuk pemeriksaan laboratorium (19 ekor anjing positif rabies). Pengiriman sampel organ sapi *suspect* rabies sebanyak 1 pkt, dengan hasil positif rabies. Terlaksananya pengambilan sampel darah sapi sebanyak 63 sampel untuk pemeriksaan BVD dan IBR dan 117 sampel darah sapi untuk

pengujian penyakit parasit darah. Kegiatan pengambilan sampel dan pengujiannya dilakukan untuk dapat mencegah dan menekan kasus penyakit menular ternak;

9. Terlaksananya *surveilans* penyakit ternak dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan sehingga dapat diketahui jenis-jenis penyakit dan sebaran penyakit. *Surveilans* merupakan kegiatan pengamatan terhadap pola penyakit ternak dengan mengambil sampel serum kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian di laboratorium rujukan. Pada tahun 2016 dilaksanakan pengambilan 257 sampel serum darah untuk identifikasi penyakit *brucellosis* dan 55 sampel fases untuk identifikasi parasit sel cerna, parasit darah dan bakteriologi pada ternak sapi. Sedangkan untuk unggas tidak dilakukan pengambilan sampel serum ayam untuk pengujian terhadap penyakit flu burung mengingat wilayah Kotawaringin Barat masih dalam status bebas flu burung. Berdasarkan hasil uji laboratorium pada sampel ternak ruminansia tidak terdapat penyakit ternak yang bersifat *zoonosis*.
10. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah dilaksanakan meliputi pengawasan lalu lintas ternak oleh 4 orang petugas di 2 (dua) lokasi cek point ternak (Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng dan Desa Sei. Kapitan Kecamatan Kumai) sehingga termonitornya ternak yang keluar/masuk daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, pengendalian pemasukan dan pemotongan ternak, pengawasan produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan, pengawasan ternak kurban dan pengawasan perdagangan dan pemotongan ternak unggas. Berdasarkan laporan dari Pos Pemeriksaan Ternak selama tahun 2016 terdapat data pemasukan ternak dan produk asal ternak sebagai berikut:
 - Telur Ayam Ras : 2.358,50 ton
 - Sapi : 4.166 ekor
 - Kambing : 3.918 ekor
 - DOC ayam ras : 89.916 box
 - Ayam broiler : 174.161 ekor
11. Pemotongan ternak sapi yang tercatat di RPH Pangkalan Bun pada tahun 2016 sebanyak 1.312 ekor dan pada Hari Raya Idul Qurban dilaksanakan pemeriksaan hewan kurban dengan jumlah

ternak kurban seluruhnya 973 ekor terdiri dari sapi 683 ekor dan kambing 290 ekor;

12. Selama kurun waktu 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan ikut memberikan kontribusi dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.94
Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016*

Kode Rekening	Uraian	Target 2016	Realisasi	
			Rp.	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	435.000.000	314.359.000	72,27
4.1.2	Retribusi Daerah	435.000.000	314.359.000	72,27
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	435.000.000	314.359.000	72,27
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	160.000.000	65.600.000	41
	Retribusi Tempat Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging	160.000.000	65.600.000	41
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :	275.000.000	248.759.000	90,46
	Penjualan Hasil Breeding Farm	25.000.000	25.000.000	100
	Penjualan Hasil Balai Benih Tanaman Pangan	150.000.000	150.259.000	100,17
	Keuntungan Bagi Hasil Penjualan Sapi Turunan (Pedet)	100.000.000	73.500.000	73,50
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	30.000.000	23.500.000	78,33
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	30.000.000	23.500.000	78,33
4.3.6.02	Sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan	30.000.000	23.500.000	78,33
4.3.6.02.01	Sumbangan dari Kelompok Masyarakat	30.000.000	23.500.000	78,33
Jumlah		465.000.000	337.859.000	72,66

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Ktw. Barat, Tahun 2017

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas tanaman pangan belum optimal dalam mendorong peningkatan produksi padi dan palawija;
2. Beberapa wilayah sentra Tanaman Pangan masih rawan terhadap serangan OPT;
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani akibat biaya produksi yang tinggi, harga jual belum kompetitif;
4. Populasi dan Produksi ternak khususnya sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daerah;

5. Kebutuhan ternak untuk konsumsi masyarakat masih tergantung dari luar daerah terutama Kalimantan Selatan dan pulau Jawa. Tingkat kelahiran/produktivitas ternak masih rendah dengan skala usaha ditingkat peternak masih belum memenuhi skala ekonomis.

Solusi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. **Peningkatan Produksi**, dilakukan dengan peningkatan luas tanam, rehabilitasi dan optimalisasi atau peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 100-200 pada kawasan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana irigasi, melakukan gerakan aksi membuka lahan tidur dan pemanfaatan tanaman sela pada areal perkebunan;
2. **Peningkatan Produktivitas**, dilakukan dengan mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani melalui meningkatkan mutu intensifikasi, penggunaan benih/bibit unggul bermutu, pemanfaatan alsintan, dan pemanfaatan paket teknologi mulai pra produksi, proses produksi, panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
3. **Pengamanan Produksi**, dilakukan dengan antisipasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pengendalian Hama Terpadu (HPT) dan menggerakkan peran serta aktif masyarakat dalam pengendalian OPT melalui pembentukan regu pengendali hama ditingkat kelompok tani. Memanfaatkan musuh alami dalam pengendalian hama dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan. Antasipasi terhadap perubahan iklim dengan memperkuat antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari.
4. **Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pemasaran**, dilakukan melalui peningkatan ketrampilan kelompok tani dalam penanganan panen dan pasca panen, pengolahan hasil melalui pelatihan dan demonstrasi. Memfasilitasi terlaksananya kemitraan antara petani selaku produsen dengan mitra usaha/swasta dalam menangani pemasaran;
5. **Pembinaan Kelembagaan**, dilakukan dengan mendorong peningkatan peranan BPP, Penyuluh dan Kelompok Tani secara

optimal dalam pembinaan usahatani. Optimalisasi kelembagaan terkait seperti UPJA, P3A maupun penangkar benih;

6. **Peningkatan populasi ternak**, dilakukan dengan peningkatan kelahiran melalui IB, peningkatan produksi dan produktivitas, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengendalian reproduksi dan penyediaan bibit ternak, serta pengembangan integrasi sawit-sapi;
7. **Pengembangan sumberdaya pakan**, melalui pembinaan mutu pakan, pemanfaatan pakan lokal dan pemanfaatan teknologi pakan;
8. **Melakukan penyebaran ternak**, dalam rangka pengembangan ternak dan mendorong berkembangnya integrasi sapi dan tanaman. Pemasyarakatan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya lokal, spesifik lokal dan berhasil guna;
9. **Pembinaan kelembagaan dan permodalan**, meliputi pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, asosiasi peternak dan penyediaan modal usaha melalui perbankan maupun lembaga permodalan lainnya;
10. **Pelayanan kesehatan hewan**, untuk menekan tingkat kematian melalui pengobatan masal dan vaksinasi;
11. **Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan hewan**, menular melalui pengambilan spesimen, vaksinasi anti rabies, eliminasi anjing liar dan depopulasi ternak unggas serta pengawasan lalu lintas ternak.

2. Sub Sektor Perkebunan

a) Kondisi Umum

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang menjadi andalan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh masyarakat dan juga ada investasi dari beberapa perusahaan besar. Beberapa komoditi perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat antara lain : karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, mente dan aren. Kebun rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh kelapa sawit, dengan luasan mencapai **44.984,10** ha.

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 1.075.900 Ha.mempunyai potensi lahan perkebunan seluas 281.780 Ha. Dari

luasan tersebut 212.426,46 Ha diantaranya telah ditanami. Secara terperinci potensi lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.95
Potensi Lahan di wilayah Kotawaringin Barat Tahun 2016

NO	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1.	Konsesi Kehutanan	565.028	52,54
2.	Konsesi Transmigrasi	28.164	2,62
3.	Kawasan Pengembangan	69.696,95	6,48
4.	Konsesi Budidaya Perkebunan	212.426,46	19,78
5.	Kawasan Non Perkebunan	191.309	17,79
6.	Danau dan Sungai	9.142	0,85
	Jumlah	1.073.766,41	100

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Terdapat 5 komoditi perkebunan utama yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2016 yang diusahakan pada areal seluas 212.426,46 Ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2015 yaitu 212.083,05 terjadi pertambahan luasan sebesar 343,41 ha namun pada tahun 2013 sebesar 204.868,62 ha terdapat penurunan sebesar 12.022,06 Ha. Penurunan ini disebabkan oleh dikeluarkannya data luasan pada 5 Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit yang merupakan perusahaan lintas daerah. Data PBS lintas daerah dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi yaitu seluas 29.586,91 Ha. Jika data yang dikeluarkan dan data penurunan disinkronkan maka terdapat peningkatan perluasan areal sebesar 17.564,84 Ha (29.586,91-12.022,06). Data luas 5 komoditi secara terperinci disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.96
Luas Areal Perkebunan Per Komoditi di Kab. Ktw. Barat

No	Komoditi	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1	Karet	17.451,50	17.907	18.082,50	14.560,30
2	Kelapa	1.176,51	1.069,52	776,75	738,75
3	Lada	875,20	268,95	297,74	318,64
4	Kelapa sawit	184.695,33	173.048,34	192.669,23	196.541,30
5	Nilam	-	-	-	-
6	Lain-lain	313,50	243,50	226,83	268,51
	Jumlah	204.868,62	192.846,56	212.083,05	212.426,46

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat

Luas kebun di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 di dominasi oleh perkebunan besar swasta 71,35 %, dibandingkan perkebunan besar negara 1,05 % dan perkebunan rakyat 27,61 %, yang terperinci seperti pada tabel berikut ini :

Tabel : 4.97
Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan di Kabupaten Kotawaringin Barat 2014-2016

No	Kepemilikan Kebun	2014		2015		2016	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Perkebunan	60.859,01	31.55	62.236,92	29,35	58.649,26	27,61

	Rakyat						
2	Perkebunan Besar Negara	2.220	1,16	2.220	1,05	2.220	1,05
3	Perkebunan Besar Swasta	129.767,55	67.29	147.626,13	69,61	151.557,20	27,61
Jumlah		192.846,56	100	212.083,05	100	212.426,46	100

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat

Produksi perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 meningkat, dibanding pada tahun 2015. Produksi kebun didominasi oleh produk kelapa sawit yang terperinci seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 4.98

Produksi perkebunan per komoditi di Kab. Kotawaringin Barat 2014-2016

No.	Komoditi	2014 (Ton)	2015 (Ton)	2016 (Ton)	Keterangan
1.	Karet	7.619,22	7.433,42	7.253,40	Karet Kering
2.	Kelapa	343,83	267,74	265,45	Kopra
3.	Lada	268,95	162,10	156,49	Biji Kering
4.	Kelapa sawit	3.585.307,15	1.096.178,33	2.878.287,21	TBS
5.	Nilam	--	--		Brangkasan
6.	Lain-lain	20,24	14,59		

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat

Produksi perkebunan per komoditi terjadi penurunan pada semua komoditi di sebabkan karena pengaruh musim kemarau yang cukup panjang. Pengembangan perkebunan dengan menggunakan tanaman tahunan yang berupa pohon, merupakan teknologi yang kompatibel dengan persyaratan ekologis, dapat memberikan fungsi hutan yang berbeda dengan hutan produksi. Pengembangan perkebunan pada dasarnya berupa membangun suasana harmonis antara unsur-unsur ekologi, ekonomi dan sosial budaya, sehingga nantinya bisa menjadi Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Dalam konteks ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan kebun sebagai sumber pangan dalam arti luas. Upaya untuk mendorong pengembangan perkebunan di daerah, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013, Tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Ijin Usaha Perkebunan. Sampai dengan Tahun 2016 perusahaan Perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 20 perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.99

Nama Perusahaan Perkebunan yang beroperasi di Kab. Ktw. Barat s/d tahun 2016

No	Perusahaan	Komoditi	Pola Pengembangan	Lokasi Kecamatan
1	PT. Meta Epsi Agro	K. sawit	Plasma (KKPA)	Arsel, Kumai. P. Lada
2	PT. Primasentosa Pratama Putra	K. Sawit	Non PIR	P. Lada
3	PT.Persada Bina Nusantara Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
5	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Arsel
6	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	K. Sawit	Non PIR	P.Banteng-Aruta
7	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng
8	PT. Agro Menara Rahmat	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
9	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Aruta
10	PT. Bumi Langgeng Perdana Trada	K. Sawit	Inti - Plasma	Kumai
11	PT. Bangun Jaya Alam Permai	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng- Aruta
12	PT. Mitra Mendawai Sejati	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan, Aruta
13	PT. Satya Kisma Usaha	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
14	PT. Kalimantan Sawit Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Kolam
15	PT. Sawit Sumber Mas Sarana	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Aruta, Kolam
16	PT. Surya Sawit Sejati	K. Sawit	Non PIR	P. Lada, Arsel
17	PT. PTPN XIII	Karet	PIR - SUS	P. Banteng
18	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	K. Sawit	Inti-Plasma	Ktw. Lama
19	PT. Arut Sawit Mandiri	K. Sawit	Inti-Plasma	Aruta
20	PT. Andalan Sukses Makmur	K. Sawit	Inti-Plasma	Kumai

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibangun dan operasional sebanyak 14 unit Pabrik Crude Palm Oil (CPO) serta 4 unit Pabrik Inti Sawit / Palm Kernel Oil (PKO), terperinci seperti disajikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel. 4.100
Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kec. P. Lada	60	60
2	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	60	60
3	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	60	60
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kec. Arut Utara	45	45
5	PT. Sabut Mas Abadi	Kec. P. Lada	30	30
7	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	120	120
8	PT. Sawit Sumbermas Sarana-I	Kec. Arut Selatan	90	90
9	PT. Sawit Sumbermas Sarana-II	Kec. Arut Selatan	90	90
10	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Kec. Arut Selatan	45	45
11	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Kec. Kolam	90	60
12	PT. Bumi Langgeng	Kec. Kumai	45	45
13	PT. Surya Sawit Sejati	Kec. Kumai	60	60
14	PT. Mitra Mendawai Putra	Kec. Arsel	60	60

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 4.101
Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	7,5	7,5
2	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	7,5	7,5
3	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	15,0	15,0
4	PT. Mitra Mendawai Sejati	Kec. Arsel	7,5	7,5

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Beberapa komoditi perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat antara lain : karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, mente dan aren. Kebun rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh kepala sawit dengan luasan mencapai **44.984,10 ha**. Kebun kelapa sawit rakyat terbesar terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas mencapai **18.631,38 ha**, diikuti Pangkalan Lada sebesar **13.247,78 ha**, Kumai sebesar **6.031,13 ha**, Arut Selatan sebesar **4.293,81 ha**, Pangkalan Banteng sebesar **1.431 ha** dan Arut Utara sebesar **1.628 ha**. Sedangkan dari sisi produksi, produksi kelapa sawit terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Lada dengan produksi sebesar **27.028,72 ton**. Ini lebih besar dibandingkan produksi di Kecamatan Kotawaringin lama yang hanya sebesar **20.790 ton**, hal ini karena di Kecamatan Pangkalan Lada umur tanaman lebih tua sehingga produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Produksi selanjutnya yang tinggi adalah Kecamatan Kumai dengan produksi sebesar **9.261,07 ton**, diikuti Kecamatan Arut Selatan dengan produksi sebesar **7.031 ton**, Kecamatan Pangkalan Banteng dengan produksi sebesar **2.862,20 ton** dan terakhir Kecamatan Arut Utara dengan produksi sebesar **1.764,38 ton**. Sedangkan yang dikembangkan oleh investor adalah kelapa sawit dan karet. Luas areal dan produksi beberapa komoditi perkebunan rakyat dapat dilihat pada tabel :

Tabel. 4.102
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan Tahun 2016.

No	Kecamatan	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Arut Selatan	2.378,50	614,32	91,25	25,62	4.293,81	7.121
2	Kotawaringin Lama	1.521	496,98	92	60,12	18.631,38	21.115,83
3	Kumai	2.020	465,80	280	67,37	6.031,13	9.747,35
4	Arut Utara	1.026	152,29	11,50	5,22	1.349	1.200,37
5	Pangkalan Banteng	6.292,01	2.665,87	128	51,92	1.431	2.732,10
6	Pangkalan Lada	1.890,99	1.116,05	136	55,20	13.247,78	26.515,56
Jumlah		15.862,50	5.633,42	738,75	265,45	44.984,10	68.432,21

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Produksi kelapa sawit rakyat yang ada selama ini masih mampu ditampung oleh pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pabrik-pabrik tersebut disamping menampung hasil perkebunan rakyat juga menampung hasil produksi kebun mereka sendiri. Komoditi perkebunan rakyat yang dominan setelah kelapa sawit adalah karet. Luas areal tanaman karet

Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar **15.862,50** ha. Luas areal tersebut tersebar di enam kecamatan. Di Kecamatan Pangkalan Banteng kebun karet rakyat menempati luas tertinggi sebesar **6.292,01** ha. Hal ini karena awalnya di Kecamatan Pangkalan Banteng terdapat lokasi eks transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans) yang komoditinya adalah karet. Berikutnya terdapat di Kecamatan Arut Selatan seluas **2.378,50** ha, disusul Kumai seluas **2.020** ha, Pangkalan Lada seluas **1.890,99** ha, Kotawaringin Lama seluas **1.521** ha dan terakhir adalah Arut Utara seluas **1.026** ha. Sedangkan dari sisi produksi, produksi terbesar di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu mencapai **2.665,87** ton, selanjutnya adalah Pangkalan Lada sebesar **1.116,05** ton, diikuti Arut Selatan sebesar **614,32** ton, Kotawaringin Lama sebesar **496,98** ton, Kumai sebesar **465,80** ton dan terakhir Arut Utara dengan produksi sebesar **152,29** ton.

Luas areal dan produksi kelapa di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 masing-masing sebesar **776,99** ha dan produksi **291,02** ton. Tanaman kelapa tersebar di enam kecamatan. Luas areal kelapa terbesar dan produksinya terdapat di Kecamatan Kumai dengan luasan sebesar **313** ha dan produksi sebesar **67,20** ton. Diikuti Pangkalan Lada dengan luasan **141** ha dan produksi sebesar **56,12** ton, Pangkalan Banteng luas areal **128** ha dan produksi sebesar **52,80** ton, Kotawaringin Lama luas areal **92** ha dan produksi sebesar **60,48** ton, Arut Selatan luas areal sebesar **91,25** ha dan produksi sebesar **25,92** ton dan terakhir Arut Utara dengan luasan **11,50** ha dan produksi **5,22** ton. Komoditi lain yang dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kopi dan lada. Data luas areal dan produksi kopi dan lada per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel. 4.103
Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada Per Kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.*

No	Kecamatan	Kopi		Lada	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Arut Selatan	23	1,49	0	0
2	Kotawaringin Lama	33,75	2,10	130,36	71,83
3	Kumai	22	1,21	16	6,71
4	Arut Utara	0	0	5,70	2,46
5	Pangkalan Banteng	38,88	4,60	86,24	45,07
6	Pangkalan Lada	36,88	1,93	80,30	30,42
Jumlah		154,51	11,33	318,60	156,49

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Dari tabel di atas, dapat dilihat luas areal dan produksi Kopi Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar **154,51** ha dengan produksi **11,33**ton. Tanaman kopi tersebar di lima kecamatan, luas areal terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar **38,88** ha, disusul Pangkalan Lada dengan luas sebesar **36,88** ha, Kotawaringin Lama sebesar **33,75** ha, diikuti Kumai sebesar **22** ha, Arut Selatan sebesar **23** ha dan terakhir untuk Arut Utara tidak ada luasan komoditi kopi. Sedangkan produksi kopi yang terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu sebesar **4,60** ton, diikuti Kotawaringin Lama sebesar **2,10** ton, Pangkalan lada dengan produksi sebesar **1,93** ton, Kumai dengan produksi **1,21** ton dan terakhir di Arut Selatan dengan produksi sebesar **1,49** ton

Sementara untuk komoditas Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat luas areal total sebesar 318,60 ha dengan jumlah produksi 156,49 ton. Luasan terbesar terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar **130,36** ha, disusul Pangkalan Banteng dengan luas sebesar **86,24** ha, diikuti Pangkalan Lada **80,30** ha, Kumai sebesar **16** ha dan Arut Utara sebesar **5,70** ha. Sedangkan produksi lada yang terbesar di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu mencapai 71,83ton, diikuti Pangkalan Banteng sebanyak 45,07 ton, Pangkalan Lada sebesar 30,42 ton, Kumai sebesar **6,75** ton dan Arut Utara dengan produksi sebesar **2,46** ton. Komoditi lain yang dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah jambu mete dan aren.

Tabel. 4.104
Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Kecamatan	Jambu Mete		Aren	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kotawaringin Lama	0	0	99	1,90
2	Arut Selatan	0	0	0	0
3	Kumai	14	0,40	0	0
4	Pangkalan Banteng	0	0	0	0
5	Pangkalan Lada	0	0	0	0
6	Arut Utara	0	0	0	0
Jumlah		14	0,40	99	1,90

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat
Luas areal dan produksi Jambu Mete Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar **14** ha dan **0,40** ton. Jambu Mete hanya dibudidayakan di Kecamatan Kumai. Demikian juga dengan tanaman Aren, tanaman Aren hanya terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama

dengan luas areal sebesar **99** ha dan produksi **1,90** ton, luasan dan produksi tidak seimbang hal ini dikarenakan pertambahan luas masih belum produksi.

Sebagai salah satu sub sektor andalan, perkebunan perlu lebih didorong dalam upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil. Mengingat produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih dibawah rata-rata produktivitas perkebunan nasional. Disamping itu perlu ada upaya untuk menarik investasi di sektor perkebunan. Investasi di sektor perkebunan memiliki potensi sangat luas, yakni dalam bidang pengembangan industri hilir pengolahan produk turunan dari kelapa sawit dan karet.

Saat ini industri pengolahan produk kelapa sawit baru sebatas *crude palm oil (CPO)* dan *Palm Kernel Oil (PKO)*. Produk turunan sawit masih sangat banyak untuk dikembangkan, seperti *palm stearin, olein*, minyak goreng, *palmitat*, sabun, kosmetik dan bahan kimia lain. Secara umum perlu perhatian serius terhadap kondisi Kecamatan Arut Utara, di mana hampir seluruh *komoditi* pertanian memiliki luasan dan produktivitas yang paling rendah.

Tabel. 4.105
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian subsektor Perkebunan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Indikator	Capaian 2016	2015		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
A.	Perkebunan				
1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	21,61***	37**	21,61	58,41
2	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	88,62***	79,50**	88,60	111,45
3	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)	189.439,16***	199.182,20**	189.439,16	95,11
4	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	55.160***	79.820**	55.160	69,11
5	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	15	15**	15	100
6	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12.447.807.384*	11.500.000.000	12.447.807.384	108,24
7	Kemitraan/Plasma	28.785,91*	25.957,91**	28.785,91	110,89
B.	Pengembangan/perluasan areal perkebunan	212.426,46	225.833,35**	212.426,46	94,06
1	Karet	14.560,30	18.284**	14.560,30	99,44

No	Indikator	Capaian 2016	2015		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
2	Kelapa sawit	196.541,30	204.908,65**	196.541,30	95,92
3	Kelapa	738,75	1.205**	738,75	61,31
4	Lada	318,60	1.042,20**	318,60	30,57
5	Lainnya	267,51	393,5**	267,51	67,98
C.	Produksi komoditi perkebunan				
1	Karet (lump)	7.253,83	15.600**	7.253,83	46,50
2	Kelapa (kopra)	265,45	347**	265,45	76,50
3	Kelapa Sawit (Tbs)	2.974.134,28	4.550.000**	2.974.134,28	65,37
4	Lada (putih/hitam)	156,49	432**	156,49	36,22
5	Lainnya	13,63	23,4**	13,63	58,25

Catatan : * Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat
 ** Data Renstra 2012-2016
 *** Data Statistik daerah 2016

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Dinas Perkebunan sebagai salah satu SKPD pelaksana Urusan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran Belaja Langsung sebesar Rp.6.392.397.000 realisasi Rp. 5.997.655.536 atau (93,82%), dengan program kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.106
 Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2016
 yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan*

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
Dinas Perkebunan		2.680.706.890	2.373.887.266	88,55	100				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	788.401.600	737.374.699	93,53	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.475.000	1.426.000	96,68	100	Terlaksananya penyediaan keperluan pendistribusian surat dinas dalam daerah maupun luar daerah ~ Perangko ~ Pkt	270 8	270 8	Lmbr pkt
b.	Penyediaan jasa	85.267.200	80.812.411	94,78	100	Terbayarnya listrik, telepon.	12	12	bulan

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
	komunikasi sumber daya air dan listrik					Koran, internet, dan faximili kantor			
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	7.000.000	4.102.100	58,60	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	13 2	13 2	unit unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.396.150	144.683.650	89,65	100	Terbayarnya honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta honor supir, jaga malam dan tukang kebun di lingkungan Dinas Perkebunan	12	12	bulan
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	81.642.830	75.364.500	92,31	100	~ Tersedianya peralatan kebersihan ~ Terbayarnya honor petugas kebersihan ~ Terbayarnya honor tukang kebun dinas di Bumiharjo ~ Terbayarnya honor Tukang jaga malam	1 2 1 1	1 2 1 1	pkt orang orang orang
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	47.640.000	46.040.000	96,64	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Dinas Perkebunan berupa : ~ Mesin tik ~ Mesin fotocopy ~ Komputer ~ Laptop/ notebook ~ Printer ~ UPS ~ Jaringan komputer	8 1 23 15 20 7 1	8 1 23 15 20 7 1	unit unit unit unit unit unit unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	44.695.010	39.725.500	88,88	100	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12	12	bulan
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.220.000	14.220.000	100	100	Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan kebutuhan administrasi perkantoran	12	12	bulan
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.657.500	4.657.500	100	100	Penyediaan keperluan alat listrik dan elektronik kantor ~ Lampu hemat energi ~ Baterai kecil ~ Lampu TL / Neon ~ Lampu Taman	50 35 30 5	50 35 30 5	Buah Buah Buah buah

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125.133.650	121.204.000	96,86	100	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : ~ Komputer Desktop ~ Notebook ~ Kamera ~ Hendycam ~ sound system ~ Mixer	3 5 1 1 1 1	3 5 1 1 1 1	unit unit unit unit set unit
k.	Penyediaan makanan dan minuman	28.780.000	20.955.000	72,81	100	Tersedianya makanan dan minuman rapat serta minum harian PHL	40 6	40 6	orang orang
l.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	186.494.260	184.184.038	98,76	100	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Tahun
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	525.358.790	462.478.750	88,03	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	3	keg.
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	113.595.000	113.595.000	100	100	Tersedianya peralatan transportasi aparatur	6	6	unit
b.	Pengadaan Mebeleur	113.245.600	111.000.000	98,02	100	Terlaksananya penyediaan : ~ almari ~ filing kabinet ~ meja rapat ~ kursi kerja	4 3 1 40	4 3 1 40	buah buah buah buah
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	200.123.190	141.278.750	70,60	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	17 2	17 2	unit unit
d.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	13.370.000	89,13	100	Terlaksananya pemeliharaan : ~ Ac ~ Mesin potong rumput	15 2	15 2	Unit unit
e.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	83.395.000	83.235.000	99,81	100	Rehap mushola kantor dinas perkebunan	1	1	pkt
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	45.280.000	44.018.700	97,21	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya	45.280.000	44.018.700	97,21	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian ASN dan kontrak Dinas Perkebunan	92	92	stel

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	11.567.000	11.567.000	100	100	Terfasilitasinya aparatur yg purna tugas	1	1	keg.
a.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	11.567.000	11.567.000	100	100	Terfasilitasinya aparatur yg purna tugas	1	1	org.
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	263.000.000	213.745.820	71,17		Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	263.000.000	213.745.820	81,27	87,87	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	33	29	org
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.080.500	2.680.500	87,02	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	3	keg.
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.243.500	931.500	74,91	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	lap
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	401.500	348.000	86,67	100	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	lap
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.435.500	1.401.000	97,60	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	lap
7.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	425.240.000	420.521.902	98,89	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3	3	keg.
a.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	127.915.000	127.882.500	99,97	100	Terlaksananya magang bagi petani perkebunan	50	50	orang
b.	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis	57.595.000	53.784.800	93,38	100	Terlaksananya pendataan rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (RDKK) T.A. 2016	1	1	Pkt
c.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	239.730.000	238.854.602	99,63	100	Pembinaan asosiasi petani perkebunan di 6 kecamatan - Ass. Lada (APLI) - Ass. Kelapa Sawit (APKASINDO) - Ass. Karet	160	160	orang

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
						(APKARINDO) - Ass. Kelapa (APKI)			
8.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan	138.305.000	116.377.000	84,15	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan	2	2	keg.
a.	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	72.495.000	51.502.000	71,04	100	Terlaksananya keikutsertaan pada pameran Kobar Expo, EXPO Kalteng dan pameran lainnya	5	3	Pame ran
b.	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat	65.810.000	64.875.000	98,58	100	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar produk-produk perkebunan melalui PIP dan sosialisasi SNI Bokar (bahan olah karet)	12	12	Perte muan TBS
9.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	107.175.000	82.142.300	76,64	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	1	1	keg.
a	Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	107.175.000	82.142.300	76,64	100	Terlaksananya sosialisasi cara-cara pengendalian OPT, pembukaan lahan tanpa bakar dan pengendalian kebakaran lahan	180	180	org
10.	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	373.299.000	282.980.595	75,81	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	1	keg.
a.	Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan	66.950.000	62.067.800	92,71	96,24	Pemeliharaan - dinas dan - kebun entrys	3 2	3 2	Ha Ha
b.	Pengem bangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan	96.820.000	52.572.400	54,30	100	Terlaksananya sosialisasi perbenihan serta	120	120	orang
c.	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	45.699.000	30.487.000	66,71	100	Terlaksananya penyusunan peta kebun desa perkebunan rakyat, PBS/N	1	1	tahun
d.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	42.800.000	24.618.900	57,52	100	Terlaksananya pelaporan dan monitoring Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	1	tahun

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Tar get	Real	Sat.
			Realisasi	(%)					
e.	Muyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian	121.030.000	113.234.495	93,56	100	Penyusunan rencana kerja pembangunan (APBN/DAK/APBD I/APBD II)	4	4	usulan

Sumber : Dinas Perkebunan

c) Permasalahan dan Solusi

Di Bidang Perkebunan permasalahan yang sering timbul antara lain :

1. Tidak stabilnya harga komoditas karet di dunia, berimbas kepada petani karet di Kotawaringin Barat
2. Perkebunan rakyat (petani) sering tidak menggunakan bahan tanam yang bermutu (misalnya kelapa sawit, karet dan lada);
3. Tidak mengikuti kultur teknis yang memadai sehingga produktivitasnya masih rendah;
4. Masyarakat (petani) belum memahami pola usaha tani yang benar;
5. Kelembagaan petani masih lemah, sehingga pola usahanya masih individualistis tidak terorganisir sehingga posisi tawar (*bargaining power*) masih rendah;
6. Luas areal perkebunan rakyat kurang dari 30 % dari luas perkebunan yang dikembangkan oleh perkebunan besar. perbandingan 30 : 70 % semacam ini kurang baik untuk stabilitas ekonomi dan sosial daerah;
7. Masih banyak sengketa lahan antara perkebunan besar dengan masyarakat baik dengan penduduk lokal maupun dengan warga transmigrasi di sekitarnya
8. Usaha perkebunan rakyat yang dapat disentuh langsung oleh proyek pembangunan perkebunan dengan biaya pemerintah. baik dari dana APBN. APBD (provinsi dan kabupaten) dan sumber dana lainnya masih kurang dari 20 %. sehingga sisanya berkembang dengan dana masyarakat (swadaya);
9. Masih sulitnya akses permodalan (pengucuran kredit usaha perkebunan) untuk pengembangan perkebunan rakyat dari pihak perbankan;

10. Fenomena alam (iklim) yang tidak dapat diprediksi. menyebabkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Solusi Sub Sektor Perkebunan

1. Memberikan penyuluhan agar meningkatkan mutu karet dengan menggunakan pembeku yang direkomendasikan
2. Memacu dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan areal kebun rakyat yaitu pada : a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu perkebunan b) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan;
3. Mengarahkan masyarakat dengan melakukan pembinaan-pembinaan yang terkait dengan budidaya kelapa sawit yang benar dan sesuai kaidah-kaidah agrobisnis melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penyebaran informasi perkebunan melalui leaflet dan brosur;

4.2.3. URUSAN KEHUTANAN

a) Kondisi Umum

Ruang lingkup pembangunan kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, sumber daya hutan, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan kehutanan, pengembangan kelembagaan, optimalisasi dan pemanfaatan fungsi hutan, peningkatan konservasi sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, kelestarian hutan dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pengurusan sumber daya alam sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan, yaitu: (1) Keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional; (2) Keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi; (3) Tata kelola sumber daya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, ekologi/lingkungan maupun

sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh.

Posisi strategis sumber daya hutan dalam konteks pembangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) Peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian dan masyarakat; (2) Peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Barat di Sub Sektor Kehutanan sangat besar, namun demikian kelestarian kawasan hutan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam sangat perlu diperhatikan. Karena dengan ekosistem yang lestari maka akan menunjang ketersediaan fungsi kehidupan. Paradigma lama yang mengeksploitasi kayu sebagai hasil hutan unggulan mulai menurun seiring dengan semakin baiknya penegakan hukum dalam mengatasi *illegal logging* dan tuntutan dunia untuk terus mempertahankan fungsi dan kawasan hutan sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon. Kelestarian hutan sebagai penjaga iklim dari pemanasan global harus terus ditingkatkan. Hal tersebut hanya dapat terjadi jika fungsi dan kawasan hutan dapat terus dilestarikan dan dijaga.

Sampai dengan tahun 2016 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya berdasarkan SK Menhut No. 529 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.107
Luas Potensi Hutan Kab. Kotawaringin Barat
Berdasarkan (SK MENHUT NO: SK.529/Menhut-II/2012 Tgl 25 September 2012)

No.	Fungsi	Luas (Ha)	%
1	Arel Penggunaan Lainnya (APL)	235.731	23,90
2	Hutan Lindung (HL)	9.698	1
3	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	156.003	15,8
4	Hutan Produksi (HP)	257.045	26,10
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	49.314	5
6	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	16.482	1,70
7	Kawasan Suaka Alam /Pelestarian Alam (KSA/PA)	239.091	24,30
8	Sungai	22.073	2,20
	Jumlah	985.437	100

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 4.108
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016

No.	Indikator	2015	2016		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	100	3.041	-	-
2.	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP)(Ha)	-	-	-	-
3.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	155,25	100	25	25
4.	Penanganan Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	1.400	1.000	300	100

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari target RPJMD seluas 3.041 Ha sebagian besar belum bisa dilaksanakan disebabkan RTRWK belum ditetapkan dan banyak lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan corporate. Penataan kawasan KPHP tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya penataan kawasan hutan yang sesuai dengan RTRWK Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.109
Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2015

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M³)			
	2013	2014	2015	2016
Kayu Meranti	27.689,61	40.219,03	38.608,07	-
Kayu Rimba Campuran	2.772,03	6.223,98	5.741,29	-
Kayu Indah	-	-	-	-
Jumlah	30.461,64	46.443,01	44.349,36	-

Catatan : untuk tahun 2016, karena urusan kehutanan sudah menjadi kewenangan Provinsi, maka dinas Kehutanan Kabupaten tidak dapat memenuhi data tersebut karena sudah tidak ada laporan yang masuk dari perusahaan/industri kayu ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.672.978.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.780.281.372 atau 75,69 %. Adapun realisasi anggaran program

kegiatan Urusan Kehutanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.110
Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2016

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
DINAS KEHUTANAN		3.672.978.000	2.780.281.372	75,69	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	813.716.200	701.456.701	86,20	93,11	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perangko untuk kebutuhan	400	400	lembar
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	109.575.000	83.148.186	75,88	100	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar	12	12	bula n
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	34.200.000	9.209.000	26,92	30	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4 & 6 ~ Speed boat	47 4 2	33 4 2	unit unit unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	162.185.800	147.690.300	91,06	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Dinas Kehutanan	12	12	bln
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	102.108.800	96.201.500	94,21	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	4 1	4 1	org pkt
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	56.200.000	46.240.000	82,27	82,28	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja di lingkungan Dinas Kehutanan berupa : ~ Jaringan dan peralatan SIKD ~ Mesin tik ~ Flooter ~ Printer ~ Laptop/ notebook ~ Komputer PC	1 2 1 30 15 15	1 2 1 30 15 15	unit unit unit unit unit unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	67.100.400	65.962.000	98,30	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	pkt

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.240.000	43.914.500	82,48	82,48	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kedinasan	1	1	thn
i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.300.000	59.207.000	98,18	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas berupa : - Printer Dot Matrik - Printer Ink Jet - UPS - Kamera pocket - LCD proyektor + layar - Sound wireless + microphone - Faximili	1	1	pkt
j.	Penyediaan makanan dan minuman	24.180.000	23.230.000	96,07	100	Terlaksananya penyediaan: ~ makan dan minum harian tenaga honorer	1	1	thn
k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142.626.200	124.654.215	87,39	91	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	thn
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	398.890.000	248.691.848	62,34	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	5	keg.
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.000.000	8.960.000	74,66	100	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor berupa : - lemari kaca - Tangga aluminium	2 2	2 2	unit unit
b.	Pengadaan meubeleur	7.000.000	7.000.000	100	100	Terlaksananya penyediaan meubeleur kantor berupa : - Sofa	1	1	Set
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	31.950.000	29.387.000	91,97	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor berupa : ~ Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1	1	Pkt
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	331.660.000	191.112.848	57,62	100	Terlaksananya service dan penyediaan BBM kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4 ~ Roda 6 ~ Speed boat	25 4 2 2	25 4 2 2	unit unit unit unit

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.280.000	12.232.000	75,13	100	Terlaksananya : ~ Penyediaan bahan bakar genset ~ Penyediaan bahan bakar mesin potong rumput ~ sevice AC ~ service mesin potong rumput	1 24 10 2	1 24 10 2	Unit kali Unit unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	92.000.000	92.000.000	100	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	2	2	keg.
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	46.000.000	46.000.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan berupa: ~ PDH pegawai	46	46	Stell
b.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	46.000.000	46.000.000	100	100	Tersedianya kebutuhan pakaian batik	46	46	stell
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	158.000.000	146.492.968	92,71	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg.
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	158.000.000	146.492.968	92,71	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18	18	org
5.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1.217.441.800	977.875.228	80,32	84,12	Terlaksananya kegiatan pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	6	6	keg.
a.	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	57.800.000	30.845.500	53,36	53,37	Terlaksananya koordinasi KPHP	1	1	thn
b.	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	360.022.800	293.860.000	81,62	91,52	Terlaksananya : ~ penanaman serentak dalam rangka HMI ~ Pemeliharaan Hutan rakyat (HR)	1 134	1 134	kali Ha
c.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	134.290.000	101.566.870	75,63	77,57	Terlaksananya : ~ Koordinasi tentang kawasan hutan	1	1	Tahun
d.	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	436.240.000	425.249.858	97,48	97,48	Terlaksananya : ~ Pemeriksaan dan pengawasan kegiatan penebangan oleh HPH dan HTI	6	6	Perusa haan

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						~ Pembinaan dan pengawasan pemungutan hasil hutan ~ Penyediaan data PSDH/DR ~ Pembinaan, pengawasan dan pengujian hasil hutan ~ Keikutsertaan pada Pekan promosi dan pameran industri di Palangka Raya dan Jakarta	6 1 80 1	6 1 80 1	Perusa haan Tahun Orang kali
e.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	172.059.000	76.428.000	44,41	45,86	Terlaksananya : ~ Patroli perambahan kawasan hutan ~ Pengamanan dan pengukuran barang bukti	20 2	20 2	kali kali
f.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	57.030.000	49.925.000	87,54	97,27	Terlaksananya monitoring dan penyusunan laporan monev : ~ HTI ~ HTR ~ Penggunaan koridor jalan	2 10 2	2 10 2	lap. lap. lap.
6.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	412.540.000	338.871.077	82,14	90,32	Terlaksananya kegiatan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4	4	keg.
a.	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	195.500.000	174.802.627	89,41	97,27	Terlaksananya : ~ Terlaksananya partisipasi PEDAKTNA ~ Konsultasi publik kegiatan RHL	1 4	1 4	kali kali
b.	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	169.240.000	142.893.000	84,43	99,69	Terlaksananya penyediaan bibit untuk penghijauan lingkungan Kehutanan(54.000) Mpts (11.000)	65.000	65.000	btg
c.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	47.800.000	21.175.450	44,30	44,30	Terlaksananya : ~ Monev kegiatan penghijauan ~ Monev TPTI & PMDH	13 3	6 3	
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	525.950.000	230.357.050	43,79	75,40	Terlaksananya kegiatan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	2	2	keg.
a.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	83.100.000	36.450.000	43,86	50,69	Terlaksananya : ~ pemantauan titik api	20	10	Kali

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
b.	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	442.850.000	193.907.050	43,78	80,04	Terlaksananya : ~ Operasional posko pengendalian kebakaran hutan	1	1	thn
8.	Program perencanaan dan pengembangan hutan	54.440.000	44.536.500	81,80	81,81	Terlaksananya kegiatan pada Program perencanaan dan pengembangan hutan	1	1	keg.
a.	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat	54.440.000	44.536.500	81,80	81,81	Terlaksananya pelatihan kelompok masyarakat pengelola HKM dan sosialisasi kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL	1	1	kali

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat

c) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Kehutanan adalah :

1. Setelah keluarnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pihak Dinas Kehutanan tidak dapat menjalankan Tugas dan Fungsi nya dengan lebih optimal dikarenakan tidak adanya wewenang dalam pengelolaan bidang Kehutanan. Tidak adanya kewenangan kehutanan di Kabupaten, diperlukan UPTD dari tingkat Provinsi kalteng untuk perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai penerus dari Dinas Kehutanan Kabupaten yang sudah dibubarkan. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk teknis perwakilan Provinsi di Kabupaten. Untuk mengatasi permasalahan tersebut. upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah menunggu aturan teknis yang mengatur keberadaan UPTD ataupun KPH yang ada di tingkat Kabupaten.

4.2.4 **URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

a) **Kondisi Umum**

Secara umum sektor energi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari beberapa indikator seperti produksi listrik dan distribusi listrik. Sebagai sumber

penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital.

Subsektor ketenagalistrikan diprogramkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik.

Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya, antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan produksi listrik di Kotawaringin Barat cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi produksi maupun dari jumlah pelanggan. Peningkatan ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terjadinya perkembangan pada pusat-pusat pertumbuhan sehingga kebutuhan listrik sebagai sumber penerangan maupun energi juga semakin meningkat.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 77,72 % rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan 1,65 % menggunakan listrik non PLN. Selain dua sumber penerangan tersebut, terdapat sumber penerangan lain yaitu petromak 20,63 %, maka kondisi untuk tahun 2016 ini dengan pertumbuhan penduduk semakin meningkat maka target yang diinginkan secara keseluruhan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun non PLN sebagai sumber penerangan utama tahun 2015 mencapai 77,72 %. Dalam upaya pemenuhan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2016 diarahkan pada peningkatan pembangunan penyediaan jaringan distribusi listrik melalui kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur ketenagalistrikan.

Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokkan dalam 3 jenis komoditas tambang, yaitu Batubara, mineral logam, dan mineral non logam dan batuan.

Potensi Batubara di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Arut Selatan (Desa Runtu) dan Kecamatan Kotawaringin Lama.

Mineral logam meliputi emas dan biji besi, sementara mineral non logam dan batuan meliputi pasir zirkon, kecubung, kaolin, tanah urug, pasir, sirtu, batu belah dan lainnya.

Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah dari mineral logam seperti emas yang memiliki potensi di wilayah Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Sementara untuk mineral non logam dan batuan seperti Pasir Kwarsa dan Zirkon terdapat di Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Kotawaringin Lama. Potensi potensi mineral bukan logam dan batuan seperti Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis, Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu, pasir kwarsa, tanah liat dan batu belah yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Agar pemanfaatan hasil Sumberdaya Alam yang lebih maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kiranya perlu penelitian dan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap potensi sumber daya alam yang ada untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas zircon sand (pasir zirkon) dengan nilai ekspor tahun 2014 mencapai Rp. 2.069.600.000 sedangkan tahun 2015 dengan capaian Rp. 2.779.600.000 dan tahun 2016 dengan capaian Rp. 2.489.200.000 maka total ekspor bahan galian zircon dari tahun 2014, sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 7.338.000.000 dengan volume ekspor 36.790 ton, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.111
Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan

Uraian	Produksi (Ton)			Volume Ekspor (MT)			Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
• Zircon Sand	10.346	13.998	12.446	10.346	13.998	12.446	2.069.200	2.779.600	2.489.200
• Lump Ore Zink	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Iron Ore	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ilmenite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.346	13.998	12.446	10.346	13.998	12.446	2.069.200	2.779.600	2.489.200

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kobar

Kegiatan pertambangan tersebut dalam skala besar diusahakan oleh perusahaan swasta sedangkan dalam skala kecil merupakan kegiatan pertambangan rakyat. Semenjak diberlakukannya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada Tahun anggaran 2016, tidak menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 3.269.899.100 dan terealisasi sebesar Rp. 3.220.566.007 atau 98,49 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

*Tabel 4.112
Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran 2016*

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satuan
			Realisasi	(%)					
SEKRETARIAT DAERAH		3.269.899.100	3.220.566.007	98,49	100				
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	30.730.000	17.150.000	55,80	80	Terwujudnya Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku	1	1	keg.
a.	Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	30.730.000	17.150.000	55,80	80	Terbinanya Pengelolaan Air tanah dan air permukaan	1	1	keg.
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrik	3.239.169.100	3.203.416.007	98,89	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrik	9	9	keg.

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satuan
			Realisasi	(%)					
a.	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrik an	3.239.169.100	3.203.416.007	98,89	100	Terlaksananya : - Pengadaan dan Pemasangan Jaringan JTR dan Travo 50 KVA di Lokasi Pondok Pesantren Habib Abdul Rahman Desa Sei. Tendang Kecamatan Kumai. - Pemasangan Jaringan JTM, JTR dan 2 Unit Travo 50 KVA di Kelurahan Kotawaringin Hilir, seberang Kecamatan Kotawaringin Lama. - Pemasangan Jaringan lanjutan tahap II distribus JTM, JTR dan Travo 100 kVA dari Desa Rungan ke Desa Kondang Kec. Ktw. Lama - Pengadaan dan Pemasangan lampu PJU terpusat di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arsel dan Desa Humi Harjo Kec. Kumai - Pengadaan dan Pemasangan PJU tersebar di Kecamatan Arut Utara, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, Kumai dan Kecamatan Arut Selatan - Pengadaan dan pemasangan lampu PJU mulai dari Sungai Desa Pasir Panjang menuju bundaran monyet. - Pengadaan dan Pemasangan lampu PJU Kota Pangkalan Bun (Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Mustalim dan Jl. Masuk gerbang perumahan BTN Beringin Rindang). - Pengadaan tiang listrik dan penerangan jalan Cemara Permai, pemasangan lampu penerangan	1 		

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Satuan
			Realisasi	(%)					
						jalan lingkungan Gg. Toman RT. 01 Kelurahan Baru Gg. Manggis RT. 12 Kel. Raja Kecamatan Arsel - Pemasangan tiang listrik dan jaringan jalan menuju pondok pesantren Miftahul Ulum Kumai.	1	1	Pkt

Sumber :Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kobar

c) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

1. Masih terdapat sambungan listrik rumah tangga di 12 desa yang belum berlistrik, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum berkembang terutama minimnya akses jalan darat sehingga pembangunan distribusi jaringan listrik terhambat dan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar;
2. Masih maraknya penambangan secara ilegal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat baik Mineral Logam (Emas) dan Mineral bukan logam dan batuan (Pasir dan Batu Belah) sehingga pendapatan dari sektor pertambangan tidak dapat diserap secara maksimal
3. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis;
4. Belum tersedianya fasilitas penunjang kelancaran kerja (peralatan survey) dan kendaraan lapangan;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut. upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. Dalam rangka pemenuhan listrik perdesaan, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dengan PT. PLN (Persero) khususnya pada wilayah-

wilayah yang secara teknis dan ekonomis tidak layak dibangun jaringan;

2. Perlu dilakukan penataan kegiatan penambangan tanpa izin, dengan cara memberikan/menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baik Mineral Logam serta Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pembinaan teknis dibidang Energi dan Sumberdaya Mineral;

4.2.5. URUSAN PARIWISATA

a) Kondisi Umum

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan pengeluaran belanja baik konsumsi dan akomodasi maupun souvenir, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *Final Demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut.

Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri

jasa, rumah makan restoran dan lain-lain. Sehingga sektor pariwisata memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dengan melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan integratif dengan bisnis pariwisata.

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan terbagi atas beberapa, yaitu:

1. Wisata alam, antara lain Taman Nasional Tanjung Puting, Air Terjun Patih Mambang, Arung Jeram, Danau Gatal dan Danau Masorayan;
2. Wisata sejarah/budaya/religi, antara lain Istana Kuning, Astana Al-Nursari, Istana Mangkubumi, Palagan Sambu, Masjid Kyai Gede, Makam Kyai Gede, Makam Kuta Tanah, Batu Petahan dan Tiang Pantar;
3. Wisata bahari antara lain Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, dan Tanjung Penghujan;

Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi icon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat. Namun demikian untuk tahun 2016 mengalami penurunan dimana untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2015 sebanyak 9.767 orang dan tahun 2016 turun menjadi 8.942 orang sedangkan untuk wisatawan nusantara tahun 2015 sebanyak 2.797 orang dan tahun 2016 naik menjadi 6.164 orang sedangkan untuk lama kunjungan wisatawan dari 1 hari menjadi 2 - 3 hari.

Obyek wisata sejarah, budaya dan religi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi Pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya

pada tahun 2015 sebanyak 50.717 orang dan pada tahun 2016 naik menjadi 72.754 orang.

Tabel 4.113
Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
1	Pantai Kubu dan Tanjung Keluang	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan alam
2	Pantai Teluk Bogam	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
3	Tanjung Penghujan	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
4	Istana Kotawaringin	Kec. Ktw. Lama	Sejarah	Barang Kuno/Antik peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
5	Istana Kuning	Kec. Arut Selatan	Sejarah	Kerajaan yang dipindahkan dari Kotawaringin
6	Mesjid Kyai Gede	Kec. Ktw. Lama	Religi	Mesjid Kuno Peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
7	Tudung Saji dan Batu Kecubung	Kec. Arut Selatan	Budaya/Seni	Nilai Seni
8	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam, serta Pusat Rehabilitasi Orang Utan dan Satwa Langka lainnya
9	Pantai Sei Uambang	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
10	Danau Burung	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
11	Danau Gatal	Kec. Ktw. Lama	Alam	Keindahan Alam
12	Upacara Tiwah	Kec. Arut Utara	Budaya	Upacara Tradisional Suku Dayak
13	Riam Senamang	Kec. Arut Utara	Alam	Keindahan Alam
14	Palagan Sambu	Kec. Arut Utara	Sejarah	Nilai Sejarah

Sumber : Laporan Penyusunan Data Base Spasial Potensi Pariwisata Kalimantan Tengah

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.819.042.200 dengan realisasi sebesar Rp 3.175.822.976, - atau 83,15 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pariwisata selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.114
Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2016

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
Disbudpar		3.819.042.200	3.175.822.976	83,15	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	850.996.400	660.519.736	77,61	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	keg.
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	390.000	100	100	Terlaksananya penyediaan perangko	78	78	lbr
b.	Penyediaan jasa	215.954.544	80.161.329	37,11	100	Terlaksananya penvediaan	12	12	bln

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	komunikasi sumber daya air dan listrik					kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta surat kabar			
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.144.600	1.907.200	60,65	100	Terlaksananya jasa pengurusan perijinan STNK kendaraan dinas operasional meliputi : ~ Roda 2 ~ Roda 4	7 1	7 1	unit unit
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	133.165.750	125.874.400	94,52	100	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta petugas keamanan di lingkungan Disbudpar	12	12	bln
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.946.500	18.415.300	92,32	100	Terlaksananya penyediaan honor petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	1 1	1 1	org pkt
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.970.000	11.125.000	92,94	100	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja dilingkungan Disbudpar berupa : ~ Komputer PC ~ Komputer notebook	7 12	7 12	unit unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	54.285.110	51.307.800	94,51	100	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kerja	1	1	thn
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.570.000	16.119.500	78,36	100	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kedinasan	1	1	thn
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.296.000	4.296.000	100	100	Terlaksananya penyediaan bahan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	1	1	thn
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	126.843.885	116.168.885	91,58	100	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas	26	26	unit
k.	Penyediaan peralatan rumah tangg	2.500.000	2.500.000	100	100	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk mendukung tupoksi	1	1	Unit
l.	Penyediaan makanan dan minuman	32.930.000	23.415.000	71,10	100	Terlaksananya penyediaan: ~ Snack untuk rapat ~ Makan untuk rapat ~ makan dan minum harian tenaga honorer	1	1	thn
m.	Rapat-rapat koordinasi	225.000.011	208.839.322	92,81	100	Terlaksananya perialanan dinas	1	1	thn

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	dan konsultasi ke luar daerah					rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	435.595.000	393.317.550	90,29	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	4	keg.
a.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	273.755.000	273.755.000	100	100	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	3	3	unit
b.	Pengadaan Mebeuler	66.850.000	66.850.000	100	100	Terlaksananya penyediaan mebeler kantor berupa : ~ Lemari arsip, ~ Kursi eselon II, III, IV ~ Kursi kerja	2 26 15	2 26 15	buah set buah
c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	89.250.000	48.492.550	54,33	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berupa : ~ Jasa service ~ Suku cadang ~ BBM	1 1 1	1 1 1	Thn Thn thn
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	5.740.000	4.220.000	73,51	100	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meliputi : ~ Bahan bakar bbm ~ Pemeliharaan AC	1 5	1 5	thn unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	34.431.000	33.111.000	96,16	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan disiplin aparatur	75	75	stel
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya	34.431.000	33.111.000	96,16	100	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Disbudpar	75	75	stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	96.000.000	55.022.803	57,31	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	keg
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	96.000.000	55.022.803	57,31	100	Terlaksananya keikutsertaan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	1	thn
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.344.000	2.790.000	83,43	100	Terlaksananya kegiatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	2	keg

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.672.000	1.395.000	83,43	100	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	eksp
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.672.000	1.395.000	83,43	100	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	100	eksp
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	641.295.800	381.220.081	59,44	80	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3	3	keg.
a.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	12.500.000	12.345.000	98,76	100	Terpeliharanya website	1	1	keg
b.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	554.242.300	303.646.052	54,78	100	Tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata dan terlaksananya promosi pariwisata kepada wisman dan wisnus.	1	1	thn
c.	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	74.553.500	65.229.029	87,49		Terlaksananya pelatihan pemandu wisata terpadu	1	1	keg
7.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.710.580.000 ,-	1.649.391.806 ,-	96,42	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	3	keg
a.	Pengembang an Objek Pariwisata Unggulan	346.572.500	337.152.500	97,28	100	Terlaksananya pengembangan obyek pariwisata unggulan di Kab. Kotawaringin Barat	1	1	thn
b.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.204.040.000	1.175.938.000	97,66	100	Terlaksananya pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif berupa : ~ Pengecatan pesawat di monumen palaganambi ~ Pemeliharaan toilet Tanjung Harapan dan Toilet Camp Leakey ~ Rehab gedung kantor pariwisata dan TIC Kumai ~ Pembangunan MCK di pintu Udang ~ Pembanguna plaza pusat jajanan kuliner (tahap I) ~ Laniutan pedestrian	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
						pintu Udang ~ Lanjutan penimbunan pintu Udang dan pintu Kepiting	1	1	Pkt
c.	Pengembang an daerah tujuan wisata	159.967.500	136.301.306	85,20	100	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pokdarwis di desa Sebuai dan Pasir Panjang dan Terselenggaranya paket wisata di desa wisata	4	4	keg
8.	Program Pengembang an Kemitraan	46.800.000	450.000	0,96	100	Terlaksananya kegiatan pada Program Pengembangan Kemitraan	1	1	Keg
a.	Pengembang an SDM dan Profesionalis me Bidang Pariwisata	46.800.000	450.000	0,96	100	Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan bimtek bagi pramusaji rumah makan/restoran	1	1	Keg

Sumber : Disbudpar Kab. Kobar

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya obyek wisata Taman Nasional Tanjung Putting. Pada Tahun 2015 jumlah wisatawan 12.564 orang (terdiri atas 9.767 wisatawan mancanegara dan 2.797 wisatawan nusantara) turun sebesar 21,65 % dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 16.035 orang (terdiri atas 11.000 wisman dan 5.035 wisnus). Dimana terdapat pula kunjungan dari kapal pesiar pada bulan September, Oktober dan November yang terdiri dari Kapal Cruise Orion I sebanyak 4 kali ± 392 orang, *Yacht Rally Sail* Indonesia sekitar 18 kapal ± 91 orang dan *Yacht Rally Odyssey* 9 kapal ± 20 orang. Penurunan jumlah wisatawan dikarenakan krisis Ekonomi Eropa dan adanya bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera, walaupun jumlah wisatawan menurun tetapi pendapatan retribusi meningkat terutama TNTP, karena adanya perubahan tarif masuk.

Hal – hal lain yang perlu dilaporkan :

1. Kunjungan wisatawan dari Kapal Cruise Orion pada Bulan September dengan wisatawan sebanyak 392 orang berasal dari Amerika, Finlandia, New Zealand, Canada, Swiss dan Inggris;

2. Kegiatan Sail Indonesia merupakan Program Pemerintah Pusat, yang dipadukan dengan Festival Daerah (Pawai Nasi Adab) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dengan jumlah yacht 18 peserta sebanyak 91 orang dan Rally Odyssey 9 yacht peserta 20 orang pada bulan November 2016;
3. Jasa transportasi udara untuk tahun 2016 sebanyak 4 armada dengan rute Pangkalan Bun – Jakarta – Semarang – Surabaya – Ketapang Pontianak, Palangka Raya, Sampit dan Banjarmasin;
4. Penginapan yang ada di Kotawaringin Barat sebanyak 30 hotel dengan rincian klasifikasi antara lain :
 - 1) Bintang 3 sebanyak 2 hotel;
 - 2) Bintang 1 sebanyak 1 hotel;
 - 3) Melati 1 sebanyak 12 hotel;
 - 4) Melati 2 sebanyak 7 hotel;
 - 5) Melati 3 sebanyak 8 hotel;
5. Biro perjalanan maupun Agen Perjalanan dalam kurun waktu tahun 2015 sangat maju pesat perkembangannya dimana untuk biro sebanyak 44 biro dan agen sebanyak 27 agen.

c) *Permasalahan dan Solusi*

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan program dan kegiatan kepariwisataan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang kepariwisataan dalam hal infrastruktur, sarana transportasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keramahtamahan dalam hal mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata;
2. Belum optimalnya peran dan komitmen seluruh stakeholders untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata;
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan pengelola kepariwisataan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang perlu dilakukan :

1. Perlu adanya upaya peningkatan perencanaan pembangunan kepariwisataan secara integral dan terkoordinasi lintas sektoral serta evaluasi yang bersifat berkala maupun tahunan;
2. Meningkatkan komitmen seluruh stakeholders untuk mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata dan dapat menjadi andalan PAD, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui bimtek, diklat maupun pelatihan teknis;
4. Memfasilitasi sarana dan prasarana obyek pariwisata terutama dukungan akses infrastruktur jalan yang memadai;
5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan obyek pariwisata.

4.2.6. URUSAN INDUSTRI

a) Kondisi Umum

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Industri pada perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yang berasal dari sektor industri pengolahan terutama industri besar. Sektor Industri menempati urutan ke dua setelah sektor Pertanian (PDRB 2015).

Pembangunan sektor Industri lebih memprioritaskan pada sektor Industri kecil dan menengah yang di nilai memiliki potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya yang penting dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antar usaha kecil menengah dan besar dalam rangka pemerataan dalam mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membina, mengarahkan, membimbing , melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Pentingnya peranan industri kecil dan menengah dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan

ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemanfaatan potensi bahan baku, penyerapan tenaga kerja, maupun pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan. Semuai ini bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil dan menengah yang mandiri, tangguh dan berkembang menjadi industri besar.

Adanya alih fungsi sebagian besar lahan hutan yang tidak produktif menjadi lahan perkebunan sawit baik yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun perusahaan mendorong terbukanya industri pengolahan hasil sawit, untuk itu perlu diupayakan industri yang dapat mengolah hasil sawit dan turunannya yang mempunyai peluang untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan PAD serta kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dilihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, secara umum kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dimungkinkan oleh sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil. Hanya beberapa industri yang berskala menengah keatas seperti industri kayu lapis dan kelapa sawit.

Sektor industri komoditas kayu pada tahun 2016, dimana pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu dan bahan dari kayu berupa *plywood* dan *moulding* yang nilainya pada tahun 2013 mencapai 154.742.687,27 USD, pada tahun 2014 nilai ekspor sebesar 80.384.733,38 USD, tahun 2015 mencapai 94.346.892,17 USD dan pada tahun 2016 turun menjadi 79.147.364,25 USD dimana jumlah

produksi pada tahun 2013 sebesar 147.413,3316 m3,, tahun 2014 sebesar 159.122,0999 m3, tahun 2015 sebesar 580.321.9909 m3, tahun 2016 sebesar 529.028,4520 m3

Jumlah produk kayu olahan sektor perindustrian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4.115
Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian

Produk	Jumlah Produksi (dalam m³)			
	2013	2014	2015	2016
Plywood & Moulding	146.247,3055 1.166,0261	157.218,0200 1.904,0799	191.647,6977 388.674,2932	529.028,4520
Jumlah	147.413,3316	159.122,0999	580.321.9909	529.028,4520

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

Tabel 4.116
Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian

Produk	Nilai Ekspor (dalam USD)			
	2013	2014	2015	2016
Plywood & Moulding	154.310.965,28 431.721,99	79.458,726,93 926.006,45	84.108.278,72 10.238.613,45	79.147.364,25
Jumlah	154.742.687,27	80.384.733,38	94.346.892,17	79.147.364,25

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

Adapun masalah lain yang dihadapi IKM dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja dan peralatan yang dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan SDM pelaku IKM potensial melalui pelatihan-pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan keuangan daerah terkait devisa anggaran.

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih di dominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit usaha pada tahun 2016 sebanyak 590 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.807 orang. Kondisi tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.117
Perkembangan Potensi IKM Tahun 2013 – 2016

No.	Potensi IKM	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	13,87	13,20	25,24**	25,30**
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	6,52	5,22	6,2**	4,82**
3.	Jumlah Unit Usaha	unit	509	536	573	590
4.	Penyerapan Tenaga Kerja	orang	1,549	1.643	1.756	1.807
5.	Nilai Investasi	Rp.	67,704,825	74,591,109	79.737.889	82.035.421
6.	Nilai Produksi	Rp.	118,444,438	112,119,149	119.855.369	123.308.829
7.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Klpk	7	16	19	0

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat
** BPS Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.275.715.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.205.063.955 atau 94,46 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Industri seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.118
Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2016

No	Program/ Kegiatan	Input			Real	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)	(%)				
Disperindag		1.275.715.000	1.205.063.955	94,46	100				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	534.595.000	551.251.355	94,29	100				
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.322.500	5.295.000	99,29	100	Perangko Terkirimnya Paket Surat Menyurat	1133 100	1133 100	Lbr Paket
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.744.000	43.745.405	65,64	100	Air Bersih Internet Listrik Tabloid/ koran Telepon	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.050.000	1.630.000	53,44	80,50	Perizinan (STNK) Kendaraan Roda Dua Perizinan (STNK) Kendaraan	9 1	9 1	Unit Unit

No	Program/ Kegiatan	Input			Real	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)	(%)				
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	121.875.250	117.111.600	96,09	100	Administrasi Bank Buku Cek Honorarium PNS Pengelola Kegiatan Materai Penjaga Malam	12 2 12 2041 365	12 2 12 2041 365	Bulan Buku Bln Lbr Hari
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.676.0000	22.470.500	94,90	100	Jasa Kebersihan kantor Peralatan dan bahan Pembersih	264 1	264 1	Hari Thn
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	32.690.000	32.585.000	99,67	100	Pemeliharaan Faximili Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Mesin Tik Pemeliharaan Notebook Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer (Wifi dan Router) Pemeliharaan Printer	1 10 4 7 1 17	1 10 4 7 1 17	Unit Unit Unit Unit Thn Unit
g.	Penyediaan alat tulis kantor	47.937.200	47.935.400	99,99	100	Alat Tulis Kantor	1	1	Tahun
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.650.250	17.640.750	99,94	100	Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	Tahun
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.604.800	1.600.000	99,70	100	Bola Lampu Neon Kabel Rol Lampu Hias	24 4 2		Buah Rol Buah
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.910.000	102.525.500	98,66	100	Air Conditioner Kipas Angin Pengadaan Almari Arsip Besi 2 pintu Pengadaan filling kabinet Pengadaan Sound System Pengadaan Website Portable Computer / Notebook Printer Dotmatrik Double Folio & Printer 3 in 1	1 2 2 6 1 1 2 2 5	1 2 2 6 1 1 2 2 5	Unit Unit Buah Buah Unit Paket Unit Unit

No	Program/ Kegiatan	Input			Real	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik				
			Realisasi	(%)	(%)	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Sat
						UPS	5	5	UPS
k.	Penyediaan makanan dan minuman	10.090.000	8.690.000	86,12	100	Makanan dan minuman Rapat Minuman Harian Pegawai Kontrak	3 2	3 2	Rapat OH
l.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.035.000	150.022.200	99,99	100	Laporan Hasil Koordinasi & Konsultasi	40	40	Lap
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	142.045.000	138.522.800	97,52	100				
a.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.125.000	27.992.800	99,52	100	Tambah daya ke 10600 VA	1	1	paket
b.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	108.600.000	105.232.000	96,89	100	BBM dan Pelumas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2 dan roda 4 yang di pelihara	10 10	10 10	Unit Unit
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.320.000	5.298.000	99,58	100	BBM Alat Potong Rumput Pemeliharaan AC Pemeliharaan Alat Potong Rumput	1 7 1	1 7 1	Unit Unit Unit
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	40.000.000	39.204.000	98,01	100				
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.000.000	19.690.000	98,45	100	Pakaian Dinas	38	38	Stel
b.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.000.000	19.514.000	97,57	100	Pakaian Adat Daerah	38	38	Stel
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	71.900.000	62.974.200	87,58	100				
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	71.900.000	62.974.200	87,58	100	Biaya Perjalanan Dinas dan Kontribusi Bimtek Peningkatan Sumberdaya Aparatur Perindustrian dan Perdagangan	5	5	Org

No	Program/ Kegiatan	Input			Real	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik				
			Realisasi	(%)	(%)	Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Sat
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.500.000	2.478.000	99,12	100				
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	988.000	98,80	100	Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	7	7	Buku
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.500.000	1.490.000	99,33	100	Laporan akhir tahun	7	7	Buku
6.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	346.500.000	323.457.000	93,34	100				
a.	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	346.500.000	323.457.000	93,34	100	Mesin Produksi bagi IKM	1	1	Paket
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	88.175.000	87.176.600	98,86	100				
a.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	5.400.000	5.050.000	93,51	100	Terlaksananya Kegiatan Pemutahiran database IKM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	6	6	Kec
b.	Pengembangan kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	82.775.000	82.126.600	99,21	100	Terlaksananya Keikutsertaan Produk IKM Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pameran Produk IKM	1	1	Pameran

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Industri adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya jumlah industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.119
Perkembangan Jumlah Industri di Kab. Ktw. Barat Tahun 2014 – 2016

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah			+ / (-)
		Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	
1	Industri Kecil	536	573	590	17

2	Industri Menengah	-	-	-	-
3	Industri Besar	29	35	35	-

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat

Untuk industri menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum ada, karena kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta – Rp. 10 Milyar di luar tanah dan bangunan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas SDM pengrajin sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi untuk menciptakan produk kerajinan yang mempunyai keunggulan kompetitif;
2. Sulitnya memperoleh bahan baku kerajinan yang berkualitas (contoh getah pantung);
3. Kurangnya modal bagi Usaha Industri Kecil;
4. Rendahnya modal usaha dan tingkat kreativitas sehingga produk industri kecil kurang bisa bersaing dengan industri besar;
5. Masih minimnya peralatan/mesin yang memadai untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas;
6. Rendahnya tingkat pendidikan pengrajin sehingga berpengaruh pada manajemen pengelolaan usaha;
7. Rendahnya dan terbatasnya jaringan pemasaran produk kerajinan;
8. Rendahnya motivasi pengrajin untuk mengembangkan usahanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut. upaya pemecahan yang perlu dilakukan :

1. Meningkatkan pembinaan dengan cara lebih mengintensifkan pelatihan-pelatihan untuk pengerajin;
2. Memberikan referensi produk dari daerah lain untuk meningkatkan kreatifitas pengerajin;
3. Memfasilitasi atau membantu memberikan kemudahan permodalan bagi industri kecil diantaranya dengan mencarikan bapak angkat;
4. Melakukan pendampingan untuk lebih memotivasi pengerajin dalam mengembangkan usahanya;
5. Memberikan bantuan pinjam pakai mesin/peralatan percontohan kepada pengerajin atau dengan penerapan teknologi/rekayasa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksinya;

6. Penambahan aparat pembina untuk mengoptimalkan pembinaan monitoring dan evaluasi usaha industri;
7. Perlu adanya jaringan informasi pemasaran antar lembaga pemerintah (SKPD) antara lain : Disperindang, Diskop UKM dan Pasar, Disbudpar serta Bagian Perekonomian Setda.
8. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi serta memberikan kemudahan ijin usaha industri.

4.2.7. URUSAN PERDAGANGAN

a) Kondisi Umum

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar ketiga pada pembentukan PDRB (2015) setelah sektor pertanian dan industri. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya. Sektor Perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada perlindungan konsumen dan upaya peningkatan ekspor yang dilaksanakan melalui pengamanan produk-produk melalui monitoring harga bahan pokok 10 komoditas, monitoring distribusi barang dalam pengawasan, pembinaan perlindungan konsumen dan pemantauan barang kadaluwarsa. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediannya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Bulog dan lembaga terkait.

Sebagaimana arah kebijakan nasional bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Perdagangan khususnya Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk peningkatan ekspor.

Tabel 4.120
Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013- 2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Nilai (US\$)	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99	120.298.709,60
Volume (m³)	147.413,3316	157.437,0798	517.458,6212	-
Volume (MT)	851.858,935	622.696,302	554.615,120	-

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat

Dengan berlakunya kebijakan pemerintah pusat bahwa pengelola data export-import menjadi kewenangan BPS maka Dinas Perindag tidak dapat menyajikan informasi realisasi volume export tahun 2016 secara lebih detail dan tepat waktu. Realisasi nilai ekspor pada tahun 2016 sebesar 120.298.709,60 US\$. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar 186.428.669,99 US\$ mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 66.129.960,39 US\$ (-35,47 %), Pelemahan ekonomi secara internasional masih berdampak sehingga volume permintaan produk export ikut mengalami penurunan.

Komoditas yang diekspor mencakup 3 jenis komoditi utama terdiri dari ⁽¹⁾Kayu, barang dari kayu, ⁽²⁾Lemak & minyak hewan/habati dan ⁽³⁾Bijih, kerak, dan abu logam dengan tujuan ekspor antara lain ke negara Asean, Eropa, Timur Tengah, China, Jepang dan India

Untuk meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat. Hal ini menjadi konsentrasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar yang mana perdagangan adalah merupakan urusan pilihan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Pada program ini Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Menjadi leading sektor pada Penanganan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan terbitnya Perbup Nomor 24 tahun 2012 tanggal 31 agustus 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat. Dimana pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern yang semakin menjamur di Kabupaten Kotawaringin Barat, akan berdampak pada keberlangsungan pasar-pasar tradisional yang punya stigma negatif bahwa pasar tradisional tersebut becek, kumuh, jorok dan timbangan kurang akurat

Pada dasarnya minat konsumen untuk berbelanja ke pasar tradisional pada dasarnya masih sangat tinggi. Hal ini karena pasar tradisional menawarkan mekanisme transaksi yang tidak dimiliki oleh ritel modern pada umumnya, yaitu berbelanja dengan sistem tawar menawar. Akan tetapi hanya segelintir pasar tradisional yang dapat menawarkan

kebersihan dan kenyamanan berbelanja yang merupakan faktor penting dalam menentukan preferensi konsumen. Pasar mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di daerah khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pasar menjadi tempat berinteraksi antara produsen dan konsumen; pemasaran hasil pertanian, industri rumah tangga; menampung pedagang, tenaga kerja lokal; perputaran uang, barang, dan jasa; serta tempat paling mudah bagi masyarakat untuk berbaur. Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin, dan industri rumah tangga. Jumlah mereka puluhan juta dan mereka sangat menyandarkan hidupnya pada pasar tradisional.

Selama ini pasar tradisional selalu menjadi indikator dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi. Dalam menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi objek monitoring para ahli statistik setiap bulannya.

Namun adanya modernisasi dan globalisasi dengan berkembangnya pasar modern (hipermarket, supermarket, minimarket) telah berdampak pada keberadaan pasar tradisional yang lambat laun akan terpinggirkan. Untuk itu pengelolaan pasar tradisional perlu dibenahi baik secara fisik maupun non-fisik sehingga peran pasar tradisional tetap dapat dipertahankan dan bersinergi dengan pasar modern.

Untuk saat ini, yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana agar pasar tradisional bisa dibuat menjadi lebih layak sebagai tempat transaksi tanpa harus secara drastis mengubah citranya atau khasnya sebagai pasar tradisional. Jika pasar tradisional bisa dikelola dan diberdayakan dengan baik dan menarik, maka tidak perlu ada pertentangan antara pasar modern dan pasar tradisional. Keduanya berkembang dengan nuansa serta daya tariknya sendiri-sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa golongan yang berpendapatan tinggi dan menengah atas akan juga tertarik untuk sesekali mengunjungi pasar tradisional untuk menikmati berbagai hal yang tidak tersedia di pasar modern.

Dari kondisi dan analisa diatas Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar menggandeng dan mengajak para pihak yang berkompeten untuk lebih

memperhatikan Pasar Tradisional baik dari sisi kebijakan, regulasi, dan anggaran. Kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar tahun 2016 pada urusan Perdagangan meliputi: kegiatan penyuluhan, penataan dan penempatan pedagang pasar, berkontribusi diraihnya piala Adipura di Kabupaten Kotawaringin Barat, pembangunan kios pasar di Desa Pangkalan Tiga, Pembangunan kios pasar di Desa Mulya Jadi Kecamatan Pangkalan Banteng, Pembangunan siring Pasar Indra Sari, pemavingan dan penimbunan pasar despot Kotawaringin Lama.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Koperasi UMKM dan Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 22.923.561.500 dan terealisasi sebesar Rp. 13.810.553.832 atau 60,24 %. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.121
Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2016

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Re al	Sat
			Realisasi	(%)					
DISKOP UKM DAN PASAR		21.830.628.500	12.872.298.282	58,96					
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	21.590.519.500	12.640.464.882	58,54	100	Pengembangan dan pembangunan pasar serta sarana dan prasarananya	1	1	thn
a.	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	21.590.519.500	12.640.464.882	58,54	100	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional	1	1	thn
2.	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	240.109.000	231.833.400	96,55	100	Pedagang mendapatkan pengetahuan dan wasawan	3	3	Keg.
a.	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	13.607.500	12.357.500	90,81	100	Terlaksananya konsultasi pembentukan organisasi pedagang PKL	2	2	keg
b.	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	152.306.500	145.854.900	95,75	100	Penyuluhan pedagang pasar	3	3	Kec.
c.	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	74.195.000	73.621.000	99,22	100	Pendataan, penataan dan penempatan pedagang	19	19	pasar

Sumber: Diskop UMKM dan Pasar Kab. Kotawaringin Barat

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
DISPERINDAG		1.020.458.000	884.740.550	86,70	86,70				
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	203.884.000	170.898.850	83,82	83,82	Terlaksananya kegiatan pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	4	4	keg.
a.	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	31.515.000	29.175.000	92,57	92,57	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen	2	2	keg
b.	Penyelesaian Permasalahan – permasalahan Pengaduan Konsumen	51.320.000	46.006.600	89,64	89,64	Terlaksananya sidang penyelesaian sengketa konsumen – Telaksana nya Sosialisasi tentang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	2 2	0 2	Keg. Keg.
c.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	58.725.000	40.585.000	69,11	69,11	– Telaksananya kegiatan pengawasan barang dan/ atau jasa beredar. – Telaksananya pengawasan pita cukai rokok	6 6	6 6	Kec. keg.
d.	Pengembangan UPT kemetrollogian daerah	62.324.000	55.312.250	88,46	88,46	– Terlaksananya kegiatan pendataan alat UTTP – Terlaksananya pendampingan sidang tera ulang UTTP	6	6	Kec.
2.	Program Peningkatan dan Pengembang- an Ekspor	138.080.000	133.439.000	96,63	96,63	Terlaksananya kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan ekspor	1	1	Keg.
a.	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	138.080.000	133.439.000	96,63	96,63	Terwujudnya Informasi peluang Perdagangan Luar Negeri.	1	1	Keg
3.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	678.494.000	580.402.700	85,54	85,54	Terlaksananya kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	2	2	Keg.

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
a.	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	457.069.000	361.205.700	79,02	79,02	Terwujudnya Kemudahan Transaksi Jual Beli Masyarakat	1	1	Unit
b.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	221.425.000	219.197.000	98,99	100	Tercapainya Penyebaran Informasi kebutuhan pokok dan strategis pada masyarakat	1	1	Keg

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Output			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Tolok Ukur Kinerja	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DAERAH		72.475.000	53.515.000	73,83	77,75				
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	72.475.000	53.515.000	73,83	77,75	Tersedianya data investasi perdagangan dan industri	1	1	keg.
a.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	72.475.000	53.515.000	73,83	77,75	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengendalian pendistribusian BBM 6 kecamatan	6	6	kec

Sumber: Setda Kab. Kotawaringin Barat

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan atas penggunaan barang dan /atau jasa, yaitu dengan memfasilitasi pengaduan konsumen, memediasi dan mencari solusi penyelesaian sengketa yang terjadi;
2. Meminimalkan peredaran barang yang tidak sesuai standar dan parameter yang ditentukan, dengan melaksanakan pengawasan barang beredar dan / atau jasa dan pengawasan pita cukai rokok pada tahun 2016 di 6 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembinaan dan penyampaian wajib kemasan dan wajib SNI pada minyak goreng sawit serta pemantauan produk pangan kedaluwarsa, tidak layak konsumsi dan tanpa izi edar di 6 Kecamatan ;

- Pengawasan label dan kedaluwarsa pada makanan/minuman di Kecamatan Arut Selatan;
 - Penelusuran peredaran dugaan peredaran garam beriodium bermerek palsu di wilayah Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama dan Arut Utara;
 - Pengawasan menjelang Hari Raya Keagamaan di Kecamatan Arut Selatan
 - Pengawasan dengan instansi terkait yaitu dari kepolisian dan tim terpadu ketahanan pangan di Wilayah Kecamatan Arut Selatan
 - Pembinaan dan pengawasan terkait kewajiban pencantuman harga barang sesuai dengan PERMENDAG Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai.
 - Pengawasan Pita Cukai Rokok di 4 Kecamatan. Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, dan Pangkalan Banteng..
3. Terwujudnya tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan dilaksanakannya kegiatan pendataan UTTP di 6 Kecamatan (Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara) dan dilaksanakan pendampingan *sidang tera* ulang terhadap alat UTTP di 4 Kecamatan (Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng) bekerjasama dengan Balai Kemetrolagian Provinsi Kalimantan Tengah. Terbentuknya pasar tertib ukur di Pasar Saik Indra Kencana Pangkalan Bun;
4. Usaha perdagangan di pasar-pasar tradisional juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dari sektor informal karena banyak pihak yang terlibat langsung mulai dari pemasok barang, kuli angkut /panggul hingga penyedia jasa transportasi seperti tukang ojek;
5. Kondisi Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat yang relatif bersih, tertata dan rapi turut memberikan andil dalam diraihnya piala adi kencana setelah 10 kali berturut-turut meraih piala adipura.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan perdagangan meliputi :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perdagangan untuk melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya;

2. Adanya persaingan yang tidak seimbang antara peretail besar/modern dengan pelaku pasar tradisional karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut diatas;
3. Belum terbentuknya UPTD Kemetrollogian di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga pelaksanaan kegiatan *pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrology tidak dapat terakomodir dengan baik*;
4. Kurangnya tenaga/pegawai metrologi;
5. Tidak adanya SDM yang sesuai persyaratan untuk mengikuti diklat kemetrollogian;
6. Rendahnya kemampuan berpromosi bagi UKM untuk memperluas jaringan pasar;
7. Rendahnya pemahaman terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha perdagangan maupun konsumen sendiri atas hak dan kewajibannya;
8. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BPSK dengan didukung dana yang memadai;
9. Kurang optimalnya penanganan pasar Indra Sari pasca terjadinya musibah kebakaran;
10. Masih adanya tempat-tempat yang kotor dilingkungan Pasar Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengajukan usulan setiap tahunnya kepada kementrian terkait di tingkat pusat, agar dapat dialokasikan anggaran APBN guna pembangunan dan merevitalisasi kawasan-kawasan perdagangan tradisional;
2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya perijinan terhadap pedagang atau pelaku usaha kecil menengah;
3. Mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pembentukan UPTD Kemetrollogian;
4. Melakukan kerjasama dengan Balai Metrologi Regional III Banjarmasin
5. Mengajukan permohonan formasi pegawa imetrologi;
6. Penyediaan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat kemetrollogian;
7. Pengajuan usulan pembentukan pasar tertib ukur di tiap tahunnya menuju daerah tertib ukur dan untuk mewujudkan perlindungan

terhadap kepentingan umum atas jaminan kebenaran hasil pengukuran.

8. Meningkatkan monitoring terhadap aspek harga maupun non harga bagi barang pokok / strategis;
9. Melakukan fasilitasi promosi produk usaha industry kecil dan menengah;
10. Meningkatkan pengawasan peredaran barang beredar di pasar sebagai upaya perlindungan konsumen;
11. Perlunya diadakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen sehingga masyarakat mengetahui akan keberadaan BPSK serta fungsi dan peran dari BPSK.

4.2.8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

a) Kondisi Umum

Transmigrasi merupakan salah satu cara atau metode untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, telah diamanatkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya.

Untuk itu penyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, berkaitan dengan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*. Artinya, pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai

daerah penerima calon transmigran, telah bekerjasama dengan daerah pengirim dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Secara teknis Pelaksanaan Urusan ketransmigrasian selama ini dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya transmigran yang menolak atau pulang kembali kedaerah asal pasca penempatan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah, daerah asal dan lokasi penempatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut Ini :

Tabel 4.122
Data Transmigran dan Penempatannya

No.	Daerah Asal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Waktu Penempatan	Lokasi Penempatan
I	Transmigrasi Penduduk Asal				
1.	Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	10	49	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat	10	37	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	5	28	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
4.	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	10	38	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
5.	Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah	15	58	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
6.	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	25	103	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
7.	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	25	74	02-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
8.	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	15	60	03-12-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
9.	Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah	10	34	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
10.	Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah	15	54	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
II	Transmigrasi Penduduk Setempat				
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	75	322	16-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	25	100	09-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	35	138	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
Jumlah		275	1.095		

Sumber : Disnakertrans Kab. Kotawaringin Barat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp. 1.089.575.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.072.315.608 atau 98,41%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketransmigrasian seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.123
Program/Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Re al	Sat
			Realisasi	(%)					
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1.089.575.000	1.072.315.608	98,41	100	Tercapainya sasaran kegiatan pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	1	keg.
a.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	1.089.575.000	1.072.315.608	98,41	100	Terlaksananya : - Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang - Penimbunan badan jalan - Pembuatan siring batu	1 700 220	0.5 700 220	ha m2 m3

Sumber : Disnakertrans Kab. Kotawaringin Barat

c) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama dilaksanakannya Program dan Kegiatan kerjasama di bidang transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan kualitas SDM warga transmigrasi khususnya pengetahuan dalam hal managerial usaha tani sehingga berpengaruh terhadap perkembangan usaha taninya;
2. Kelembagaan teknis belum berfungsi secara optimal dengan metode yang dikuasai dengan tahapan kehidupan petani;
3. Adanya klaim lahan usaha transmigrasi oleh masyarakat lokal setempat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang ditempuh sebagai berikut :

1. Diprogramkan pelatihan di tahun anggaran 2016 untuk memenuhi pengetahuan para petani untuk dapat mengembangkan usaha taninya sehingga taraf hidup transmigrasi dapat meningkat;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan transmigran dan masyarakat sekitarnya telah dilaksanakan program pelatihan ketransmigrasian agar para transmigran mampu mengembangkan serta mengelola sumber daya alam yang tersedia antara lain :

pelatihan budidaya tanaman hortikultura, Kewirausahaan, pengolahan usaha pertanian, budidaya ternak besar, kader kesehatan, KUB, ketrampilan jahit menjahit, pengolahan air bersih dan kesling perbengkelan, budidaya air tawar, pembuatan pupuk organik, manajemen pemerintahan desa, budidaya jamur tiram dan pemberdayaan perempuan;

3. Telah dibentuk tim teknis untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang terjadi.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN/ KANTOR PUSAT/URUSAN BERSAMA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, konsekuensi dari negara kesatuan tidak memungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi penugasan.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah serta desa. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah meliputi sebagian di antara tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sistem pengaturannya mencakup aspek pendapatan daerah, aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/ kota dan/atau desa sesuai dengan

beban dan jenis penugasan yang diberikan disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pengalokasian dana Tugas Pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Kabupaten Kotawaringin Barat di Tahun Anggaran 2016 menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang berasal dari dana APBN dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 23.575.371.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.744.310.925 atau 92,23 %. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sebesar 97,76 %. Anggaran tersebut dikelola oleh 4 (empat) SKPD yang meliputi : 1) Dinas Perkebunan; 2) Dinas Kelautan dan Perikanan; 3) Dinas Pertanian dan Peternakan; dan 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkait dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kotawaringin Barat selengkapnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

5.1.1 DINAS PERKEBUNAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor DIPA-018.05.4.149081/2016;
10. Rencana Operasional Kerja (ROK) Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan.

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2016 adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program dan Kegiatan

Tugas Pembantuan dari Ditjen Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan melalui program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.

Pelaksanaan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan diwujudkan melalui kegiatan :

- (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim;
- (2) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan;
- (3) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dari Ditjen Perkebunan.

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT
			(Rp)	%		
1.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1.757.235.000	1.719.714.000	97,86	100	Tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan
	1) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1.425.000.000	1.394.767.500	97,88	100	Terlaksananya replanting tanaman karet seluas 150 Ha
	2) Dukungan Perlindungan Perkebunan	77.600.000	77.600.000	100	100	Terlaksananya pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan
	3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan	254.635.000	247.346.500	97,14	100	Terlaksananya administrasi kegiatan dana Tugas Pembantuan selama 1 tahun

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 5.2.
Daftar Nama Penerima Bantuan Karet

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Bantuan	Volume	
1	Gapoktan Mitra Sejahtera	Ds. Kebun Agung Kec. Pangkalan Banteng	31	Bibit Karet Pupuk NPK	17.050 4.650	Btg Kg
2	Sri Ganda Sari	Ds. Kebun Agung Kec. Pangkalan Banteng	17	Bibit Karet Pupuk NPK	9.350 2.550	Btg Kg
3	Sumber Makmur	Ds. Sido Mulyo Kecamatan Pangkalan Banteng	30	Bibit Karet Pupuk NPK	16.500 4.500	Btg Kg
4.	Morodadi	Ds. S. Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng	10	Bibit Karet Pupuk NPK	5.500 1.500	Btg Kg
5.	Jaya Makmur	Ds. S. Bengkuang Kec. Pangkalan Banteng	35	Bibit Karet Pupuk NPK	19.250 5.250	Btg Kg
6.	Lestari Kalimutu	Ds. S. Hijau Kec. Pangkalan Banteng	27	Bibit Karet Pupuk NPK	14.850 4.050	Btg Kg
Jumlah			150	Bibit Karet Pupuk NPK	82.500 22.500	Btg Kg

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.757.235.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan.

f. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi permasalahan dari segi teknis di lapangan maupun administrasi.

5.1.2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 dari Direktur Jenderal (Ditjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Nomor : 032.06.4.149082/2016 tanggal 07 Desember 2015 dan revisi kedua tanggal 08 November 2016.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan dana Tugas Pembantuan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana anggaran Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2016 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2016, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp. 9.685.187.000 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. Pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan diwujudkan melalui kegiatan:

1. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan;
2. Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan;
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP.

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT
		(Rp)	%		
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	9.685.187.000	9.677.654.614	99,20	100	Meningkatnya Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan
1) Kegiatan Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	3.583.800.000	3.581.840.314	99,94	100	Meningkatnya Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) yang dibangun/dikembangkan di sentra perikanan terpadu
2) Kegiatan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	5.932.797.000	5.929.811.150	99,94	100	Tersedianya Lokasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan yang dikembangkan dan dibina
3) Kegiatan dukungan managemen dan pelaksanaan tugas	168.590.000	166.003.150	98,47	100	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK	OUTCOME/OUTPUT
		(Rp)	%	(%)	
teknis di bidang pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan					

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotawaringin Barat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.685.187.000 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

f. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan dan kendala yang cukup berarti. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan. Akan tetapi, manfaatnya belum dapat di rasakan langsung karena meski trafo listrik sudah ada namun jaringan listrik belum tersedia. Solusinya sudah diusulkan dalam tahun anggaran 2017 (APBD).

5.1.3 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima dari Pemerintah melalui Kementerian Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 kepada Dinas Pertanian dan Peternakan berjumlah 2 (dua) program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 11.467.937.000 (sebelas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

a. Dasar Hukum

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

1. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.4.149247/2016 tanggal 07 Desember 2015, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016;
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016;
2. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi I Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.4.149247/2016 tanggal 23 Februari 2016, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016;

- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 30 Maret 2016;
3.
 - a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi II Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.4.149247/2014 tanggal 22 Juli 2016, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2016;
 - b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 Juli 2016;
4.
 - a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi III Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.4.149247/2016 tanggal 26 Juli 2016, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016;
 - b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 26 Juli 2016;
5.
 - a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi IV Ditjen Tanaman Pangan Nomor : SP DIPA-018-03.4.149247/2016 tanggal 07 Nopember 2016, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2016;
 - b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016;
6. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor. PPP.110/33/TP-APBN/II/2016 Tanggal 08 Januari 2016 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PPP.110/57/TP-APBN/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, PP-SPM, Bendahara, Pembantu Bendahara, Penanggungjawab SAI dan SIMAK BMN, Koordinator SAI dan SIMAK BMN, Koordinator Simonev, Petugas Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan, Petugas Ubinan, dan Tim Teknis Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan (APBN) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (018.03.149247) Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PPP.110/126/TP-APBN/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas (PPL) dan Aparat (TNI/Babinsa Pendamping kegiatan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan (APBN) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Kotawaringin Barat (018.03.149247) Tahun Anggaran 2016;

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PPP.110/266/TP-APBN/VII/2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang tentang Perubahan Pertama Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Petugas SAK (SAI dan SABMN), Petugas Simonev, Petugas Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan, Petugas Ubinan, dan Tim Teknis Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan (APBN) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (018.03.149247) Tahun Anggaran 2016;
10. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor PPP.110/346/TP-APBN/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Budidaya Padi Inbrida dengan Teknologi Jajar Legowo untuk Perluasan Tahun Anggaran 2016;
11. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor PPP.110/346.a/TP-APBN/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Budidaya Padi Inbrida dengan Teknologi Jajar Legowo untuk Peningkatan Produktivitas Tahun Anggaran 2016;
12. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor PPP.110/347/TP-APBN/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Intensifikasi Kedelai Tahun Anggaran 2016;
13. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor PPP.110/348/TP-APBN/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Padi Organik Tahun Anggaran 2016;
14. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor PPP.110/349/TP-APBN/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Padi dengan Teknologi Hazton Tahun Anggaran 2016;
15. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor PPP.110/350/TP-APBN/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang

Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Saprodi Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2016;

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PPP.110/1442/TP-APBN/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Penetapan Peserta Sosialisasi dan Narasumber Kegiatan Pengembangan Budidaya Padi dengan Teknologi Hazton Tahun Anggaran 2016;

II. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: SP DIPA - 018.06.4.140562/2016 tanggal 07 Desember 2015, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi I Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: SP DIPA- 018.06.4.140562/2016 tanggal 16 Maret 2016 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi II Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : SP DIPA- 018.06.4.140562/2016 tanggal 13 Juli 2016 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi III Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : SP DIPA- 018.06.4.140562/2016 tanggal 03 Agustus 2016 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi IV Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : SP DIPA-018.06.4.140562/2016 tanggal 29 September 2016, Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 25 Oktober 2016.
6. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : PPP.110/33/TP-APBN/II/2016 Tanggal 08 Januari 2016 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan (APBN) Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PP.110/41.a/TP-APBN/II/2016 Tanggal 11 Januari 2016, tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Kegiatan, Petugas Sistem Akutansi Keuangan (Sistem Akutansi Instansi/SAI dan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi

- Barang Milik Negara/SIMAK-BMN), Petugas Simonev dan Tim Teknis Dana Tugas Pembantuan (TP-APBN) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat (018.06.140562) Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PP.110/47.a/TP-APBN/II/2016 Tanggal 11 Januari 2016, tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat (018.06.140562) Tahun Anggaran 2016;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PPP.110/43.a/TP-APBN/II/2016 Tanggal 11 Januari 2016 Tentang Pembentukan Panitia/ Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (018.06.140562) Tahun Anggaran 2016;
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PP.110/273/TP-APBN/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Perubahan Pertama Penunjukan dan Penetapan Pengelola Kegiatan, Petugas SAK (SAI dan SABMN), Petugas Simonev dan Tim Teknis Dana Tugas Pembantuan (TP-APBN) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat (018.06.140562) Tahun Anggaran 2016;
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nomor PP.110/345/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Indukan Sapi Potong Melalui Kegiatan Integrasi Sapi-Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016;
 12. Surat Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tanggal 25 Juli 2016 Hal Kelompok Penerima Sapi Potong Indukan Impor Tahun 2016 ;
 13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PP.110/395/TP-APBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Pendamping Lapangan Kegiatan pada Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat (018.06.140562) Tahun Anggaran 2016;
 14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PP.110/402/IV/2016 tanggal 01 April 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Indukan Sapi Potong Melalui Kegiatan Fasilitas Pendukung Indukan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016;

15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nomor PP.110/722/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Sapi Potong Melalui Kegiatan Integrasi Sapi-Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nomor PP.110/1416.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Fasilitas Pendukung Indukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pengembangan Budidaya Ayam Lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : SP DIPA -018.06.4.140562/2016 tanggal 07 Desember 2015 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan).

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2016 adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan dari Ditjen Tanaman Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, sedangkan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pangan diwujudkan melalui kegiatan :

- (1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
- (2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia;
- (3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Tanaman Pangan.

Pelaksanaan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat diwujudkan melalui kegiatan :

- (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak;
- (2) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit;
- (3) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing;
- (4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK	OUTCOME/OUTPUT
			(Rp)	%	(%)	
1.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	5.188.137.000	4.689.852.960	90,68	85,20	Tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan
	1) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	328.320.000	262.728.250	80,02	70,83	Terlaksananya penerapan budidaya kedelai seluas 200 Ha
	2) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia	4.710.990.000	4.303.313.866	91,35	84,78	Terlaksananya penerapan budidaya padi 4.070 ha dan jagung 2.500 ha
	3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Tanaman Pangan	148.827.000	138.810.844	93,27	100	Terlaksananya administrasi kegiatan dana Tugas Pembantuan selama 1 tahun (3 dokumen)
2.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	6.279.800.000	5.146.553.260	81,95	92,70	Tercapainya Peningkatan Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
	1) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	2.012.000.000	1.263.171.052	62,78	71,81	Terlaksananya pengembangan Integrasi Ternak-Sawit 20 Klpk
	2) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	1.027.800.000	975.217.705	94,88	100	Terlaksananya Fasilitas Indukan Sapi Potong 2 Klpk, Budidaya Sapi Potong 4 Klpk, dan Budidaya Ayam Lokal di Pedesaan 1 Klpk
	3) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	3.150.000.000	2.825.331.403	89,69	100	Terlaksananya Fasilitas Bangunan 1 unit, Peralatan RPH 1 paket, dan Fasilitas Alat Transportasi Daging 1 unit kendaraan roda dua.
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan	90.000.000	82.833.100	92,04	99,00	Terlaksananya administrasi kegiatan dana Tugas Pembantuan selama 1 tahun (1 dokumen)

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 5.5.
Daftar Nama Penerima Bantuan Padi Organik dan Hazton

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Bantuan
1.	Karya Tani	Ds. Pangkalan Satu, Kumai	20	Padi Organik
2.	Bengaris Raya III	Kel. Mendawai, Arsel	25	Padi Hazton
3.	Marjan Abadi	Teluk Pulai, Kumai	25	Padi Hazton

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 5.6.

Rekapitulasi Jumlah Bantuan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Padi, Budidaya Jagung dan Kedelai per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Bantuan Program	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Poktan
1.	Kumai	Intensifikasi Padi Jarwo	1.072	42
		Ekstensifikasi Padi Jarwo	220	8
		Jagung Hibrida	450	10
		Kedelai	60	3
2.	Pangkalan Lada	Intensifikasi Padi Jarwo	105	5
		Ekstensifikasi Padi Jarwo	100	3
		Jagung Hibrida	300	8
		Kedelai	53	4
3.	Pangkalan Banteng	Intensifikasi Padi Jarwo	187	7
		Ekstensifikasi Padi Jarwo	168	5
		Jagung Hibrida	650	17
		Kedelai	20	3
4.	Kotawaringin Lama	Intensifikasi Padi Jarwo	200	8
		Ekstensifikasi Padi Jarwo	160	4
		Jagung Hibrida	250	9
		Kedelai	28	2
5	Arut Selatan	Intensifikasi Padi Jarwo	1.436	56
		Ekstensifikasi Padi Jarwo	352	12
		Jagung Hibrida	750	48
		Kedelai	39	8
6	Arut Utara	Intensifikasi Padi Jarwo	-	-
		Ekstensifikasi Padi Jarwo	-	-
		Jagung Hibrida	100	3
		Kedelai	-	-
	Jumlah		6.700	265

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 5.7.
Kelompok Tani Penerima Bantuan Fasilitas Pendukung Indukan di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KELOMPOK TANI	KETUA	LOKASI		JUMLAH BANTUAN
			Kecamatan	Desa/Kel	
1	Sindur Sejahtera	Slamet	Arut Selatan	Baru	- Ternak sapi 14 ekor - Obat-obatan dan Vitamin 1 paket - Bibit Taiwan Grass 3.000 stek - Brachiaria Humidicola 3.000 pols - Pupuk Kandang 1.050 kg
2	Simpang Gayam Membangun	Syahmani	Kumai	Sei Cab. Timur	- Ternak sapi 14 ekor - Obat-obatan dan Vitamin 1 paket - Bibit Taiwan Grass 3.000 stek - Brachiaria Humidicola 3.000 pols - Pupuk Kandang 1.050 kg

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 5.8.
Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KELOMPOK TANI	KETUA	LOKASI		JUMLAH BANTUAN
			Kecamatan	Desa	
1	Bukit Batu	Gusti Masrian	Kotawaringin Lama	Rungun	- Ternak sapi 14 ekor - Obat-obatan dan Vitamin 1 paket - Bibit Taiwan Grass 3.000 stek - Brachiaria Humidicola 3.000 pols - Pupuk Kandang 1.050 kg
2	Inti Mulya	Lalu Riadus Sohidi	Kotawaringin Lama	Sagu Suka Mulya	- Ternak sapi 14 ekor - Obat-obatan dan Vitamin 1 paket - Bibit Taiwan Grass 3.000 stek - Brachiaria Humidicola 3.000 pols - Pupuk Kandang 1.050 kg

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 5.9.
Kelompok Tani Penerima Bantuan Pengembangan Budidaya Ayam Lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KELOMPOK TANI	KETUA	LOKASI		JUMLAH TERNAK (Ekor)
			Kecamatan	Desa	
1	Unggas Sejahtera	Esmu Eko S	Kumai	Kumai Hilir	- Ternak Ayam Lokal 400 ekor - Obat-obatan dan Vitamin 1 paket - Pakan 500 kg

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 5.10.
Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Indukan Sapi Potong Melalui Kegiatan Integrasi Sapi– Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KELOMPOK TANI	KETUA	LOKASI		JUMLAH BANTUAN
			Kecamatan	Desa	
1	Umpang Makmur	Syahrani	Arut Selatan	Umpang	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
2	Umpang Sejahtera	Amer Hanijah	Arut Selatan	Umpang	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
3	IGA Lestari I	Kajarman	Arut Utara	Gandis	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
4	IGA Lestari II	Yoner	Arut Utara	Gandis	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
5	Karya Mukti I	Kuwat Siswanto	Pangkalan Banteng	Sei Pakit	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
6	Karya Mukti II	Walidi	Pangkalan Banteng	Sei Pakit	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat

NO	KELOMPOK TANI	KETUA	LOKASI		JUMLAH BANTUAN
			Kecamatan	Desa	
7	Karya Sari I	Widodo	Pangkalan Lada	Kadipi Atas	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
8	Karya Sari II	Sulkan	Pangkalan Lada	Kadipi Atas	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
9	Tri Mulya	Sulistio	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
10	Sari Mulya	Sutarno	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
11	Karya Utama I	Winaryanto	Pangkalan Lada	Makarti Jaya	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
12	Kawasan Ternak Mandiri I	Ujang Syahrani	Arut Selatan	Sulung	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
13	Kawasan Ternak Mandiri II	Edi Saputra	Arut Selatan	Sulung	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
14	Andini Satwa Prima I	Dosim Efendik	Arut Selatan	Sulung	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
15	Andini Satwa Prima II	Rodiansyah	Arut Selatan	Sulung	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
16	Runtu Agri Satwa I	Jainuri	Arut Selatan	Runtu	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
17	Runtu Agri Satwa II	Sahlansyah	Arut Selatan	Runtu	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
18	Bangun Bersama	Juandi	Kumai	Kubu	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
19	Rukun Bersama	M. Sanusi	Kumai	Kubu	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit

NO	KELOMPOK TANI	KETUA	LOKASI		JUMLAH BANTUAN
			Kecamatan	Desa	
					- Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat
20	Usaha Mulya	Doso Ristanto	Arut Selatan	Medang Sari	- Sapi BX 25 ekor (Eselon I) - Shredder 1 unit - Pagar Elektrik 1 unit - Obat-obatan dan Vitamin - Pakan Konsentrat

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan anggaran sebesar Rp. 11.467.937.000 (sebelas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan.

f. Permasalahan dan Solusi

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan pada umumnya tidak ada masalah dan semua kegiatan terlaksana dengan baik. Hanya saja, pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat sejumlah kendala berupa perubahan dan rasionalisasi anggaran. Solusinya adalah dengan koordinasi intensif dengan Eselon I dalam rangka perencanaan anggaran;
2. Kendala cuaca dan banjir yang menyebabkan gagal panen dan perubahan pergeseran waktu tanam dan panen, solusinya adalah perubahan jadwal tanam, perbaikan infrastruktur air dan peningkatan koordinasi dengan kelompok tani dan petugas pendamping di tingkat lapangan.
3. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat menghadapi kendala yang sama yaitu adanya perubahan dan rasionalisasi anggaran. Solusinya adalah melakukan koordinasi intensif dengan Eselon I dalam rangka perencanaan anggaran. Kegiatan produksi pakan ternak realisasi keuangan hanya mencapai 62,48%. Hal ini disebabkan tidak direalisasikannya pengadaan pakan konsentrat untuk mendukung pengadaan sapi brahman melalui DIPA Eselon I (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang juga tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat pengadaan pagar *electric* yang hanya terealisasi 7 unit dari 20 unit. Solusinya yakni dengan memberikan sanksi sesuai aturan kepada pihak rekanan yang gagal melaksanakan kontrak.

5.1.4 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-010.08.4.140560/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

c. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2016 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 melaksanakan Tugas Pembantuan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.11

**Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016**

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK (%)	OUTCOME/OUTPUT
			(Rp)	%		
1	Program Penataan Administrasi kependudukan	665.012.000	535.316.091	80,50	89,52	Meningkatnya Kualita Database Kependudukan Nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan pelayanan publik dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada
	- Kegiatan Pengembangan Sitem Adminstrasi kependudukan (SAK) Terpadu	665.012.000	535.316.091	80,50	89,52	Laporan Penyelenggraan Aminduk

Sumber : Disdukcapil Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2016

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar 710.000.000 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah) setelah mengalami revisi sebanyak 2 kali sehingga menjadi Rp. 665.012.000 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Dalam Negeri.

f. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 adalah :

1. Realisasi fisik dan keuangan tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dikarenakan adanya :
 - ~ Pengurangan Pagu Anggaran /Revisi DIPA
 - ~ Self blocking (penghematan);
 - ~ Honor PPHP dianggarkan 2 kegiatan terealisasi 1 kegiatan;
 - ~ Belanja barang non operasional Lainnya yang dianggarkan 2 semester hanya terealisasi 1 semester.
 - ~ Tidak terpenuhinya jumlah peserta sosialisasi sesuai undangan
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan Tugas Pembantuan ini adalah masih belum menguasai aplikasi-aplikasi penunjang kegiatan yang ada di KPPN Pangkalan Bun. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan dan bimtek di KPPN Pangkalan Bun serta melakukan konsultasi apabila terdapat kesulitan.

3. Kurangnya sumber daya manusia sehingga pengelola keuangan dijabat rangkap (bendahara APBN dan Staf Pengelola Keuangan), Pengelola Simak BMN daerah dan pusat dikelola 1 orang.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

6.1.1 DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan memiliki fungsi utama menyelenggarakan pembangunan dibidang kesehatan. Selain itu, juga menyelenggarakan kerjasama antar lembaga yang bertujuan memberikan peningkatan kapabilitas dan kompetensi di bidang kesehatan. Kerja sama yang dijalin adalah Nota Kesepahaman antara Dinas Kesehatan dengan Pihak BPJS Sampit tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kootawaringin Barat dengan nomor Perjanjian 440/7382.a/KD.B Tahun 2016.

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kesehatan berupaya menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk miskin dan tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun program Jamkesda KOBAR Sehat. Hal ini wujudkan dengan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara optimal dengan prinsip portabilitas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan Cabang Sampit untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat dari sebelumnya berupa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berubah menjadi Jaminan Kesehatan Nasional.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan dan memberikan penjaminan pelayanan kesehatan kepada 36.747 jiwa warga miskin dan tidak mampu di luar penjaminan Jamkesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Selama tahun 2016, jumlah kunjungan rawat jalan yang ada di puskesmas dan jajarannya sebanyak 65.711 kunjungan, rawat inap 1.107 kunjungan dan rujukan sebanyak 8.243 rujukan.

Dalam pembayaran iuran/ premi selama tahun 2016 sebanyak 36.747 Jiwa x 23.000 x 12 = Rp. 10.142.172.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi pembayaran kapitasi yang di bayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan (BPJS Kesehatan) sebesar Rp. 7.872.831.000 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang disebarkan ke 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kobar.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan meliputi :

- 1) Data kepesertaan masih banyak kekurangan terutama Nomor Induk Kependudukan
- 2) Tingginya angka mutasi dan migrasi peserta Jamkesda
- 3) Sering berubah dan kurangnya sosialisasi terkait dengan aturan dan petunjuk teknis dalam menjalankan program
- 4) Kurang pahamnya aturan terkait program yang dilaksanakan
- 5) Sistem pencatatan dan pelaporan tentang kapitasi dan klaim masih banyak yang belum dipahami
- 6) Data yang ada di Kartu Identitas JKN banyak yang tidak sesuai dengan data Base dan Kartu Keluarga peserta
- 7) Datangnya kartu peserta di akhir anggaran/ tahun

Strategi yang ditempuh untuk mengatasi persoalan di atas antara lain:

- 1) Melakukan pendataan ulang terkait dengan kepesertaan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan
- 2) Melakukan Verifikasi kepesertaan dengan aparat desa / kelurahan terkait
- 3) Melakukan konsultasi dengan mengikuti pertemuan tentang sosialisasi aturan JKN
- 4) Melakukan sosialisasi ke jajaran yang terendah
- 5) Melakukan kerja sama dengan bagian keuangan
- 6) Menambah aturan terkait dengan penerbitan kartu identitas JKN

6.1.2 RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerjasama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan pihak ketiga yang dilaksanakan adalah dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang proporsional dengan mitra pelaku kerjasama.

Pelaksanaan kerja sama RSUD Sultan Imanuddin dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat.

Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga adalah efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan bersama, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sampai dengan akhir tahun 2016, kesepakatan/perjanjian kerjasama RSUD Sultan Imanuddin dengan pihak ketiga yang masih berlaku sebanyak **57 MoU**. Secara rinci pihak yang bekerjasama dan hal yang dikerjasamakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Daftar Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama dengan
Pihak Ketiga Pemkab Kotawaringin Barat (RSUD Sultan Imanuddin)

No.	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai
1	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	- Assuransi BNI Life - PT. Astra Agro Lestari - Bakrie Sentosa Persada KAL - BRI - Bumi Langgeng Perdana Trada - Bumi Perdana Prima - Bumitama Gunajaya Abadi - Cipta Tani Kumai Sejahtera - Disnakertrans - Dinkes Kabupaten Seruyan - Dinkes Kabupaten Sukamara - Dinkes Kabupaten Lamandau - First Lamandau Timber - Gemareksa Mekarsari PKS - Graha Cakra Mulia - Graha Cakra Mulya Mill - Group Cintra Borneo Indah - Harapan Sawit Lestari (HSL) - HHK Lipat Gunting Estate - HHK Sungai Bila Estate - Hutanindo Lestari Timber	454/PKS/2HC-RSUDSIPB/VIII - RS/U.12.01.907.I.1 002/Area B-1/IV/2016 - B-0033/KC-X/SDM/01/2010 01-E/MOU/BPM/1/2010 01/BLP-PGA/PK-YANKES/2010 179/BGA-KX/EXT/IX/I1 007/CKS-SPKL/LGL/IV/2012 004/CKS-ADD/LGL/W/2013 014/DTT/PPP.PM/I/2014 842.3/528-A/DINKES/2011 145/678/DINKES/2016 001/FLT-I-HRD/PK/X/2010 - RS/U.11.05.676.I.1 001/GUM-RSUD/I/2010 002/MILL-RSUD/I/2010 01/CBI/PKPK/I/2010 - RS/U.10.01.2010.I.1 003/HHK-LGE-RSUD/I/2010 004/HHK-SBE-RSUD/I/2010 005/HLT-RSUD/II/2010	Telah dilakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dan melakukan kerjasama, dengan outcome: - Kunjungan rumah sakit meningkat; - Pendapatan operasional bertambah.

No.	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai
		22. Indoturba Tengah PKS SKNYR	22. RS/U.10.01.205.I.1	
		23. Indoturba Tengah SKNYR ESTT	23. RS/U.10.01.205.I.1	
		24. Indoturba Tengah SRYN ESTT	24. RS/U.10.01.205.I.1	
		25. Indoturba Timur	25. RS/U.10.01.205.I.1	
		26. PT. Jamsostek	26. 445/825/Kum-Inf/RSUD	
		27. PT. Karda Traders	27. KD-D.16.12011.724	
		28. Korindo Ariabima	28. 167/PU/KAS/VIII/2013	
		29. Korintiga Hutani	29. 1579.3A/KTH-BC/VIII/2013	
		30. Kapuas Prima Coal	30. 167/PU/KAS/VIII/2013	
		31. KSK Group	31. 002/SPK-ADD/UM-KSKPB/X/2014	
		32. Minamas Plantation	32. 001/KPC-PK-PB/09/2011	
		33. Meta Epsi Agro	33. 001/SPK/UM-KSK/013/XI/2010	
		34. Pertamina	34. 011/PK/MLF/PBN/VI/2011	
		35. Petro Andalan Nusantara	35. RS/U.13.11.2056.I.1	
		36. Pilar Wana Persada	36. 001/MEA-Add/LGL/IV/2011	
		37. PLN	37. 272/K17066/12-S8	
		38. PTP. Nusantara XIII	38. 002/PAN-PGA/III/2012	
		39. Sabut Mas Abadi	39. 227/PWP-HRA/X/2010	
		40. SEI. Rangit	40. RS/U.12.01.227.I.1	
		41. Satria Hupasarana Graha	41. Kumai/X/02/III/2011	
		42. Sinar Alam Permai	42. 006/SMA-SPK/LGL/III/2011	
		43. Surya Sawit Sejati	43. 445/0387/RSUD/III/2011	
		44. Tapan Nadegan	44. RS/U.II.05.675.I.1	
		45. TH. Felda Nusantara	45. 005/SMG-RSUD/I/2010	
		46. Klinik Pratama Kasih Ibu	46. 098/ADM/INP/EKS/XI/2010	
		47. Trakindo Utama	47. 005/SMG-RSUD/I/2016	
		48. BWP Mill	48. RS/U.09.12.207.I.1	
		49. Yayasan Samodra Ilmu Cendikia	49. 19/RCKT1/VII/2013	
		50. Sukses Karya Mandiri	50. RS/U.11.05.677.I.1	
		51. Ensburly Kalteng Mining	51. 500.PKS.BL.DIR.1109	
		52. PT. Adira Finance	52. 187/XI/RBKI/2013	
		53. Trieka Agro Busantara	53. RS/U.12.01.942.I.1	
		54. WSSL	54. PKS/ZHC-RSUDSIPB/VIII/2011	
		55. BJAP	55. 036/HRGA-PBN/XI/02011	
		56. PT. Taspen	56. RS/U.11.01.1159.I.1	
		57. Sampoerna Agro	57. RS/U.11.01.1159.I.1	

Sumber : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

c. Permasalahan dan Solusi

Secara umum semua kerja sama sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada permasalahan yang berarti dan dapat terus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu kerjasama. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan diantaranya :

- 1) Perlunya koordinasi secara lebih intensif dan berkala dengan pihak mitra kerjasama;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada mitra kerjasama serta semua pihak terkait (pemerintah daerah, dinas, masyarakat), pelaksanaan sosialisasi serta penyusunan *draft annual exchange*

program yang digunakan sebagai koridor atau acuan pelaksanaan tindak lanjut kerjasama dan pengembangan program;

- 3) Pengembangan hubungan *contact person* dan secara lebih intensif berkoordinasi dengan mitra kerjasama dan atau instansi pemerintah di kabupaten-kota/instansi swasta/kementrian/lembaga terkait yang memiliki kemungkinan untuk dapat mengembangkan kerjasama.
- 4) Terkait dengan hambatan yang muncul dalam implementasi kegiatan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* perlu peningkatan lebih lanjut. Peran monitoring dan evaluasi kerjasama mutlak dibutuhkan untuk melihat secara lebih jauh dampak serta kemanfaatan kerjasama tersebut bagi pemerintah serta masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.1.3 INSPEKTORAT KABUPATEN

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pengawasan merupakan salah satu aspek dalam manajemen yang sangat menentukan guna keberhasilan program pembangunan secara adil, transparan dan akuntabel. Kondisi saat ini banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita khususnya dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, melemahnya citra pemerintah di mata masyarakat dan ketidaktahuan publik terhadap hukum serta masih belum terwujudnya pembangunan yang berbasis pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan hal tersebut perlu adanya komitmen untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pada bidang pembangunan yang strategis serta rawan terjadinya penyimpangan.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam hal ini pengawasan internal pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut maka pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kerjasama di bidang pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan BPKP perwakilan Kalimantan Tengah. Kerjasama ini diimplementasikan melalui :

- 1) Koordinasi antar instansi pengawasan fungsional;

- 2) Pendampingan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Bimbingan teknis / pelatihan dibidang pengawasan

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan adalah suatu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Pelaksanaan kerjasama yang selama ini dilakukan dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan :

- 1) Adanya keseragaman pola dalam pelaksanaan pengawasan antara Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota serta aparat pengawasan fungsional lainnya;
- 2) Tersusunnya laporan Review atas laporan keuangan daerah tahun berjalan;
- 3) Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan pengawasan

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian kinerja antar lain adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat, kurangnya komitmen entitas terperiksa melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada entitas terperiksa, masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek, serta motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata.

Untuk itu, upaya pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah dengan mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat Teknis terkait, mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi. Untuk terus meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang perlu dibuat strategi yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat pengawasan melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis
2. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pengawasan
3. Mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan

4. Peningkatan koordinasi dan konsultasi bersama semua unsur penyelenggara pemerintah.

6.2 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

6.2.1 FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPINDA)

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kegiatan koordinasi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian, kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah. Adapun kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain melalui :

- 1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda). Forum ini dibentuk berdasarkan amanat pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya dalam mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di daerah. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala informasi dan masukan dari anggota Forkopinda yang memberikan manfaat terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 2) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah milik pemerintah daerah maupun dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah;
- 3) Koordinasi dengan Kantor Statistik dalam rangka penyediaan data dan kontribusi sektor ekonomi serta data Kabupaten Kotawaringin Barat di berbagai sektor. Melalui kegiatan ini dihasilkan antara lain penyusunan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka, Penduduk dan PDRB yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- 4) Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembayaran pajak bagi para wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak melebihi tanggal jatuh temponya. Melalui kegiatan ini dapat diupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di daerah.

Selain itu, juga senantiasa dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal lainnya termasuk dengan BUMN dan BUMD yang ada di daerah. Melalui kegiatan koordinasi ini pemerintah daerah dapat melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi vertikal dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan secara rutin maupun insidentil selama satu tahun anggaran terutama dalam rangka pembahasan permasalahan strategis daerah yang memerlukan penanganan dan tindak lanjut segera. Hasil dan manfaat yang diperoleh dari koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah :

- 1) Terwujudnya keselaran dan keterpaduan langkah antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, sesuai tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta kondisi sosial masyarakat yang kondusif;
- 2) Media komunikasi bersama terhadap kegiatan-kegiatan sektoral, koordinatif serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, sehingga :
 - a. Dapat diambil kebijakan dan tindakan implementatif pemecahan masalah;
 - b. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ada untuk diambil kebijakan yang dapat mengakomodasi dari semua kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun kepentingan masyarakat;
 - c. Mendapatkan informasi dan kebijakan untuk menghadapi tantangan kondisi di masa depan terutama dalam meminimalkan konflik-konflik yang ada di masyarakat, serta setiap permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan tepat.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Belum adanya data base bersama mengenai permasalahan-permasalahan di daerah yang dapat digunakan sebagai bahan koordinasi, sehingga menyulitkan penanganan secara komprehensif. Solusi yang ditempuh adalah mengintensifkan komunikasi dengan instansi vertikal di daerah;
- 2) Aturan teknis pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah belum memiliki dasar hukum yang kuat. Solusi yang ditempuh melalui kesepakatan dan menyesuaikan kondisi di daerah.

6.2.2 PEMELIHARAAN KEAMANAN

a. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja) dengan Instansi vertikal di daerah adalah berkaitan dengan kerjasama operasional di bidang pemeliharaan keamanan.

Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan yaitu Polres Kobar, Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun, Kantor Pos Imigrasi Pangkalan Bun, BIN, BAIS, Kodim 1014 P.Bun, Lanud Iskandar, TNI AL Kumai, Sub Denpom XII/2-2

Jumlah kegiatan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Kotawaringin Barat, Kegiatan Komunitas Intelegen Daerah, dan Kegiatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Nasional dengan aparat keamanan dan dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan ada beberapa Kegiatan yang secara realisasi tidak dapat diselenggarakan antara lain : Kegiatan Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional yang mana fisik hanya mencapai 89,5 % dan realisasi keuangan mencapai 89,5 %. Hal ini terjadi disebabkan pada belanja bantuan bahan bakar minyak/gas dan belanja makan dan minum operasional personil yang tersedia untuk kegiatan pengamanan hari-hari besar keagamaan dan nasional tidak dipergunakan oleh personil Lanud Iskandar sebesar Rp. 4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota yang tidak terlaksana sebesar Rp. 8.608.350 (delapan juta enam ratus ribu delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar kota sebesar Rp. 53.412.850 (lima puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) oleh personel

Polres Kobar, Kodim 1014 P.Bun, Lanud Iskandar, dan Denpom XII//2-2di karena berbenturan dengan kegiatan pengamanan pra pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kobar Tahun 2017.

Meski demikian, secara keseluruhan kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama operasional di bidang pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan (Polres Kobar, Kodim 1014 P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 dan Lanud Iskandar) sehingga meningkatnya keamanan daerah untuk terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Terbatasnya kemampuan dan jumlah SDM personil Badan Kebangpolinmas khususnya dalam hal teknik pencegahan dan penanganan tindak kejahatan;
- 2) Keterbatasan anggaran untuk mendukung kerjasama dengan instansi terkait dibidang keamanan dan ketertiban.

Solusi yang bisa ditempuh :

- 1) Mengikutsertakan personil dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang keamanan dan ketertiban;
- 2) Ketersediaan anggaran yang memadai untuk menunjang kerjasama dengan instansi terkait dibidang keamanan dan ketertiban.

6.3 PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Batas daerah merupakan elemen penting era otonomi daerah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara implisit telah mengatur dimensi spasial suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang otonom, yakni memiliki batas-batas wilayah tertentu. Adanya wilayah yang jelas dapat menjadi hak bagi pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridis berupa ditetapkannya legalitas hukum batas daerah melalui Permendagri yang berisi cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya, seperti sungai, jalan. Sedangkan aspek fisik di lapangan ditandai dengan pemasangan pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas.

a. Kebijakan dan Kegiatan

Sejalan dengan penyebaran penduduk, pemekaran wilayah desa dan kecamatan serta pertumbuhan investasi di bidang perkebunan yang sangat besar di Kabupaten Kotawaringin Barat, membawa konsekuensi terhadap munculnya konflik yang menyangkut masalah perbatasan, baik antar desa/kelurahan, kecamatan dan antar Kabupaten.

Penanganan sengketa batas wilayah antar desa dan kelurahan terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Penegasan Batas Desa, sedangkan penanganan masalah perbatasan antar daerah terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Pembinaan batas daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program pengembangan wilayah perbatasan dengan kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah berupa sosialisasi batas daerah, rapat koordinasi perbatasan (rakortas), serta penegasan batas daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai kondisi geografisnya berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan. Telah dilaksanakan beberapa kali rapat pembahasan terkait kesepakatan batas antar Tim Tata Batas Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2013 di Kantor Bupati Kotawaringin Barat. Hasil kesepakatan batas sementara yang telah dicapai dengan ketiga kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Hasil Kesepakatan Penetapan Batas Sementara Tata Batas
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Tata Batas Wilayah Dengan	Jenis Kesepakatan	Yang Menetapkan	Nomor Surat Penetapan / Lampiran
1.	Kabupaten Seruyan	BA. Kesepakatan Bersama	Tim Tata Batas Kotawaringin Barat – Seruyan	- No.- tgl 9 Okt 2004 - No.- tgl 10 Sept 2006
		Peta Acuan Batas Kotawaringin Barat – Seruyan	Tim Tata Batas Provinsi	-
		Nota Kesepakatan	Bupati Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau dan Sukamara	Tanpa Nomor tanggal 5 Juli 2007 di Palangka Raya
		Penegasan Gubernur	Gubernur Kalimantan Tengah	130/1838/Tapra, tgl 1 Desember 2007
		Berita Acara Penyerahan kepada Gubernur Kalteng untuk penetapan Batas Kotawaringin Barat-Seruyan	Bupati Kotawaringin Barat - Bupati Seruyan	BA (tanpa Nomor) tgl. 21 April 2009
		Surat Gubernur Kalimantan Tengah perihal Penegasan Batas Daerah (Kotawaringin Barat - Seruyan)	Gubernur Kalimantan Tengah	No. 130/23/Adpum tgl. 10 Januari 2011
		BA. Verifikasi Batas Daerah Antara Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan	Tim Tata Batas Kemendagri, Prov.Kalteng& Kab. Ktw. Barat	BA Tgl 28 April 2016
2.	Kabupaten Lamandau	Penetapan Peta Batas Sementara	Bupati Lamandau, Sukamara dan Kotawaringin Barat	BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006
		Berita Acara Rapat Penataan Batas antara Kabupaten Kotawaringin barat dengan Kabupaten Lamandau	Tim Tata Batas Kabupaten Kotawaringin Barat – Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau	BA RapatTgl. 13 November 2012
		Penyerahan hasil kajian provinsi terhadap penataan batas antar Kabupaten	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalteng	BA Tgl 9 September 2013
		Berita Acara Rapat Penataan Tata Batas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat	Tim Tata Batas Kabupaten Kotawaringin Barat – Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau	BA Rapat Tgl. 7 November 2013
		Kesepakatan Bersama antar Kab. Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau ttg Batas Daerah Prov. Kalteng	Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Lamandau dan Gubernur Kalteng	BA Tgl 10 Juli 2015
		BA. Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Di Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Tata Batas Kemendagri, Prov.Kalteng& Kab. Ktw. Barat	BA Tgl 31 Mei 2016 di Palangka Raya
		BA. Rapat Pembahasan Segmen Batas Antar Daerah Antara Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau	Tim Tata Batas Kemendagri, Prov.Kalteng& Kab. Ktw. Barat	BA Tgl 24 - 26 Agustus 2016 di Jakarta
3.	Kabupaten Sukamara	Penetapan Peta Batas Sementara	Bupati Lamandau, Sukamara dan Kotawaringin Barat	BA Tgl 18 Februari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Ktw. Barat

Pada tahun 2016, progres pengesahan batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya disahkan oleh Menteri Dalam

Negeri. Kemudian pada bulan Mei tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri bersama Tim PBD Kabupaten Kotawaringin Barat, Tim PBD Kabupaten Lamandau dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun draf Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan batas tersebut. Diharapkan paling lambat pada tahun 2017 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata batas wilayah bisa diterbitkan.

Sedangkan Penyelesaian Batas dengan Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

1. Batas dengan Kabupaten Seruyan

Berkenaan dengan sengketa batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan, terdapat 2 lokasi titik batas yang belum disepakati yakni di Desa Sungai Dau dan di pintu gerbang Selamat Datang di Desa Amin Jaya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik batas tersebut yakni dengan meminta kepada Tim BPD Nasional dari Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau lokasi yang masih disengketakan tersebut. Pada bulan April tahun 2016 Tim PBD Nasional, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD kedua Kabupaten telah meninjau lokasi yang disengketakan yakni di Desa Sungai Dau dan di pintu gerbang Selamat Datang Desa Amin Jaya. Hasil evaluasi dari peninjauan lokasi tersebut masih dalam tahap pembahasan di pemerintah pusat. Tim PBD Kabupaten Kotawaringin Barat telah memberikan data-data pendukung terkait batas dengan Kabupaten Seruyan untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat.

2. Batas dengan Kabupaten Sukamara

Berkenaan sengketa batas dengan Kabupaten Sukamara, terdapat 2 (desa) yang terjadi konflik berdasarkan penegasan batas yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah yakni di Desa Palih Baru dan Desa Sumber Mukti. Apabila mengacu pada penegasan batas oleh Gubernur tersebut maka akan membelah kedua desa. Sampai saat ini masih diupayakan untuk melakukan peninjauan lokasi dilapangan dengan melibatkan Tim PBD Nasional dan Tim PBD Provinsi, namun belum bisa dilaksanakan karena masih menyelesaikan batas dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan. Diharapkan tahun 2017 sudah bisa dilakukan peninjauan lokasi.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kesepakatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan, yang dituangkan dalam peta batas definitif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Kurangnya tenaga ahli dalam penanganan permasalahan batas desa dan batas wilayah antar kabupaten.

Solusi :

Kesepakatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan hingga dituangkan kedalam peta batas definitif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang akan disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang ditetapkan pada 12 Desember 2012 oleh Menteri Dalam Negeri.

6.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kejadian bencana Sosial dan bencana alam di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2016 adalah kebakaran dan banjir. Bencana sosial dalam hal ini kejadian Kebakaran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 16 kejadian, sedangkan bencana alam banjir terjadi sebanyak 4 kali.

Pada Tahun 2016 terjadi Bencana Kebakaran rumah di beberapa desa dan Kelurahan yakni 1 kali di Desa Runtu, 2 kali di Kelurahan Mendawai, 1 kali di Kelurahan Baru, 4 kali di Kelurahan Raja, 1 kali di Kelurahan Sidorejo dan 2 kali di Kelurahan Madurejo dan 1 kali di Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan, 1 kali di Kelurahan Kumai hulu Kecamatan Kumai, 1 kali di Desa Simpang Berambai dan 1 kali di Desa Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng.

Kejadian bencana alam banjir pada tahun 2016 terjadi pada 4 wilayah. Kejadian banjir terjadi 1 kali di RT. 06 dan RT.07 Desa Sei Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng, 1 kali di Desa Panahan dan Riam Kecamatan, 1 kali di RT. 01 Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara, dan 1 kali di RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan.

Data terkait bencana sosial (kebakaran) dan bencana alam (banjir) yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 disajikan pada tabel 6.3 dan 6.4.

Tabel 6.3
Data Bencana Kebakaran Kab. Kobar Tahun 2016

NO	Alamat	Tanggal	Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan					Tafsiran Kerugian dan Korban	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	RMH	Tempat Usaha	Fasum	Tafsiran Kerugian (Rp/Jt)	KK/ Jiwa
1.	JL P. Antasari RT. 18 Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan	01/01/2016	1		1			Tidak diketahui	1/5
2.	JL. Pelita Gg. Sawit RT. 05 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	04/01/2016	1		1			150.000.000	3/9
3.	JL P. Antasari Gg. Seseapat RT. 15 Kel. Raja Kec. Arut Selatan	04/01/2016	5	2	7			2.057.000.000	7/30
4	JL. Jend. Sudirman Gg. Bata RT. 11 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan	05/01/2016		1	1			3.500.000	1/1
5	JL. Maid Badir Gg. Ketapang RT. 10 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan	02/02/2016	1		1			350.000.000	1/3
6	Jl. Raya Runtu RT. 04 Desa Runtu Kec. Arut Selatan	02/02/2016	1		1			100.000.000	1/5
7	JL P. Antasari Gg. Seseapat RT. 15 Kel. Raja Kec. Arut Selatan	18/03/2016	1		1			100.000.000	1/2
8	JL P. Antasari Gg. Seseapat RT. 15 Kel. Raja Kec. Arut Selatan	27/03/2016	2		2			552.000.000	4/11
9	Jl. A. Yani, Jl. Kopong Rt. 31 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan	27/03/2016	1		1			130.000.000	1/1
10	Jl. Pariwisata RT. 003 RW. 001 Desa Simpang Berambai Kec. Pangkalan Banteng	06/04/2016		1		1		Korban Jiwa	1/4
11	Jl. Jend. Sudirman, Jl Sekunder RT. 022 Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan	04/05/2016	1		1			150.000.000	2/10
12	Jl. Prakusumayuda RT. 10 Kel. Raja Kec. Arut Selatan	06/06/2016	3		3			230.000.000	3/9
13	Jl. Lintas P. Bun - Ktw. Lama RT. 05 Kel. Raja Seberang Kec. Arut Selatan	12/09/2016	1		1			100.000.000	1/5
14	Jl. H. Maid Badir RT.10 Kel.Madurejo Kec. Arut Selatan	12/09/2016	1		1			200.000.000	1/4
15	Dusun 1 RT. 009 Desa Natai Kerbau Kec. Pangkalan Banteng	18/09/2016	1		1			150.000.000	1/4

Sumber : Laporan Kepala Desa dan Camat Masing-Masing DesaKelurahan dan Kecamatan Tahun 2016

Tabel 6.4
Data Bencana Alam Banjir
Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Alamat	Tanggal	Jenis dan Kerusakan Bangunan					Tafsiran Kerugian dan Korban	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	Rmh	Tempat Usaha	Kantor/ Fasilitas Umum	Tafsiran Kerugian (Rp/Jt)	KK/Jiwa
1	RT. 06 dan RT. 07 Dusun Catur Tunggal Desa Sei Hijau Kec. Pangkalan Banteng	01/01/2016	-	6	6	-	1	Tidak diketahui	6 / 32
2	Desa Panahan dan Rian Kec. Arut Utara	04/01/2016	-	28	28	-	1	Tidak Diketahui	28 / 120
3	RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan	06/01/2016	-	62	62	-	1	Tidak Diketahui	62 / 248
4	RT. 01 Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara	11/01/2016	-	40	40	-	1	Tidak diketahui	40 160

Sumber : Dinas Sosial, 2017

Untuk penanganan bencana kebakaran sebagaimana yang tersebut dalam tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penanganan bencana yakni dengan segera memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan standarisasi tanggap darurat bencana non-alam dan alam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

6.4.2. Status Bencana

Status bencana dilihat kualitas dan kuantitasnya termasuk kategori kecil dalam skala kabupaten.

6.4.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Bantuan yang disalurkan kepada korban bencana kebakaran dan bencana alam bersumber dari bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan makanan, sandang, perlengkapan keluarga, dan perlengkapan tidur. Bantuan makanan berupa beras 187,4 Kg, mie instan 3.697 bungkus, gula 23 Kg, garam dapur 75 bungkus, dan lauk pauk 67 paket.

Bantuan sandang berupa seragam SD laki-laki 9 stel, Perlengkapan keluarga berupa gelas melamin 75 buah, tempat nasi 16 buah, centong nasi 18 buah, sutil 24 buah, teko 24 buah, family kit 4 tas, foodware 7 tas, rantang 3 susun 24 buah dan kidware 4 tas. Perlengkapan tidur berupa velbet 1 bh, matras 50 lbr, selimut woll 25 bh, dan terpal 25 lembar. Sedangkan dana

bantuan sosial yang telah diberikan kepada korban bencana berjumlah Rp. 320.000.000. yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.

6.4.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

- 1) Penyuluhan penanggulangan bencana oleh Kesbangpolinmas;
- 2) Gelar kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Se Kalimantan Tengah;
- 3) Kegiatan Kemah Bhakti dan Apel Siaga Bencana Provinsi Kalimantan Tengah di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng Kota Palangka Raya;
- 4) Pemantapan Kemampuan Petugas Pendamping Sosial;
- 5) Pemantapan Shelter Korban Bencana Alam di Palangka Raya;
- 6) Kegiatan Pemantapan Petugas Psikososial Korban Bencana Alam di Palangka Raya;
- 7) Pelatihan Potensi SAR *Water Rescue dan Medical First Responder* (MFR) di Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 8) Kegiatan Pemantapan Kemampuan Pengelolaan Logistik Korban Bencana Alam di Palangka Raya, baik kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewajiban pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (*CBDM-Community Based Disaster Management*) yang merupakan serangkaian aktivitas masyarakat (komunitas) pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi untuk mengurangi jumlah korban baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya peri kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Penanggulangan bencana berbasis komunitas juga merupakan upaya mengkolaborasikan penanggulangan bencana sebagai upaya bersama antara masyarakat, LSM, swasta dan Pemerintah. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat pada kawasan rawan bencana agar secara dini menekan bahaya tersebut.

Dari aspek bantuan bencana senantiasa diupayakan barang *buffer stock* di gudang Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggap darurat diberikan bantuan darurat

bencana yaitu upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status keadaan darurat bencana suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Hal yang dilakukan dalam tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Standar bantuan sosial bencana alam: Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Nomor : 03/BJS-BSKBA/2003:

- a. Bantuan pangan dan lauk pauk, dengan indeks minimal:
 - 1) Beras sebanyak 400 gram/orang/hari.
 - 2) Permakanan/lauk pauk sebanyak Rp. 6.000/orang/hari atau dapat diwujudkan dalam bentuk natural seperti:
 - a) Mie instan
 - b) Sarden
 - c) Kecap
 - d) Sambal / Saus
 - e) Minyak goreng
 - f) Gula pasir
 - g) Telor
 - h) Lainnya
- b. Jangka waktu bantuan pangan disesuaikan dengan jenis dan besaran bencana sesuai kebutuhan seperti:
 - 1) Bencana banjir: bantuan diberikan selama 3-7 hari atau dapat diperpanjang hingga 12 hari.
 - 2) Bencana tanah longsor: bantuan diberikan selama 3-7 hari.
 - 3) Bencana alam angin ribut/angin topan/tsunami: bantuan diberikan selama 3 hari.
 - 4) Bencana gempa bumi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
 - 5) Bencana letusan gunung berapi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
 - 6) Bencana kekeringan/kekurangan pangan: bantuan diberikan selama 15-30 hari.
- c. Bantuan sandang diprioritaskan kepada para korban yang tidak mampu dan sangat membutuhkan serta dilaksanakan secara selektif.
 - 1) Kain sarung : 1 potong.
 - 2) Kain panjang : 1 potong.
 - 3) Kaos berkerah : 1 potong.
 - 4) Daster dewasa : 1 potong.
 - 5) Pakaian anak laki-laki : 1 set.

- 6) Pakaian anak wanita : 1 set.
- 7) Seragam SD laki-laki : 1 set.
- 8) Seragam SD wanita : 1 set.
- d. Bantuan peralatan dapur diberikan secara selektif diprioritaskan korban yang tidak mampu memenuhi dan melakukan kegiatan pemenuhan makanan secara mandiri.
 - 1) Kompor minyak tanah : 1 buah.
 - 1) Panci aluminium serba guna : 1 buah.
 - 2) Wajan nomor 16 : 1 buah.
 - 3) Sodet stainless : 1 buah.
 - 4) Tempat nasi aluminium : 1 buah.
 - 5) Sendok nasi stainless : 1 buah.
 - 6) Piring melamin/plastik : - lusin.
 - 7) Gelas melamin/plastik : - lusin.

6.4.5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi antara lain:

- a. Bencana Kebakaran Hutan, Lahan Kering dan Pekarangan yang selalu terjadi disebabkan adanya iklim yang panas/kemarau yang berkepanjangan tanpa adanya hujan, sehingga menimbulkan terjadinya kebakaran hutan, lahan kering yang bukan karena faktor kesengajaan ulah manusia, melainkan terjadi akibat gesekan ranting-ranting kering yang ditiup oleh angin dengan berulang-ulang, maka tidak terbantahkan akan menimbulkan percikan api kemudian membakar lahan disekitarnya yang lama kelamaan akan menjalar ke seluruh area hutan.
- b. Bencana banjir musiman berupa banjir di Daerah Aliran Sungai yang ada di Kotawaringin Barat yang melintasi Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Kumai, yang terjadi apabila setiap musim penghujan tiba dengan curah hujan cukup tinggi sehingga debit air naik di atas normal.
- c. Bencana akibat angin puting beliung kadang bisa terjadi berdasarkan iklim dan potensi cuaca yang berubah.

Yang tidak kalah penting adalah bencana sosial, karena latar belakang kemajemukan penduduk memungkinkan terjadinya konflik antar etnis yang mengarah pada konflik sosial dan berujung pada bencana sosial.

6.5 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**6.5.1. GANGGUAN YANG TERJADI**

Dalam kurun waktu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2016, gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di temukan adalah :

- a. Terdapat beberapa titik lokasi Pedagang Kaki Lima (Bundaran Pancasila, Bundaran Lapangan Tugu, depan Pasar Indra Sari, depan Pangkalan Bun Park, beberapa titik di sepanjang jalan Iskandar, depan TPU MUSLIM) yang masih membandel untuk tidak berjualan di atas trotoar dan/atau tempat yang dilarang dan masih banyak ditemukannya pasangan tidak sah yang menginap di beberapa penginapan, baik di dalam kota maupun luar kota Pangkalan Bun dan indikasi adanya sejumlah warung remang-remang disepanjang Jalan A. Yani mulai dari Km 12 (Arah Luar Kota) yang diindikasikan digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Sering terjadinya kegiatan meminta – minta yang dilakukan oleh pengemis / gelandangan / Tuna Wisma yang mayoritas pelakunya berasal dari luar daerah yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Ditemukannya beberapa lokasi pabrik pembuatan minuman beralkohol jenis arak di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- d. Ditemukan masih banyak pelajar (SD, SMP, SLTA) sedang menghisap jenis LEM yang dapat menghilangkan kesadaran / mabuk;
- e. Ditemukan masih banyak pelajar mengunjungi warnet pada jam-jam sekolah sampai dini hari.

6.5.2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan aparat keamanan daerah dari jajaran Kepolisian Resort Kotawaringin Barat (POLRI), Komando Distrik Militer 1014 Panju Panjung, Pangkalan Udara TNI AU Iskandar, Kompi Senapan B Antang, dan Pos TNI AL Kumai.

6.5.3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Total anggaran untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum pada Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kobar Rp. 1.842.217.700 dialokasikan pada 2 (dua) SKPD yaitu Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dilaksanakan melalui :

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

6.5.4. PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN KENDALANYA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban (kantrantibmas) masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP selalu mengedepankan tindakan preventif terhadap segala bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2016 adalah :

- a. Keterbatasan jumlah personil Satpol PP (kapasitas ideal) di lapangan untuk menertibkan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dengan luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup luas;
- b. Keterbatasan alat, sarana dan prasarana serta personil;
- c. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar;
- d. Lintas koordinasi instansi yang terkadang terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi;
- e. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5.5. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat senantiasa mengikutsertakan SKPD dan personel keamanan dari instansi vertikal dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat. Bentuk pengikutsertaan tersebut antara lain :

- a. Melaksanakan giat operasi bersama dengan jajaran POLRI dan TNI di daerah terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- b. Melaksanakan giat operasi Pengawasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan bersama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Bimbingan dan Penyuluhan Mengenai Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Kegiatan Masyarakat Serta Bimbingan Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kotawaringin Barat dengan Nara Sumber dari Kepolisian Resort Kotawaringin Barat;

- d. Operasi Gabungan bersama Polres Kotawaringin Barat dalam rangka pengamanan pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan dan Tahun Baru.

BAB VII PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2015 menghasilkan keluaran (*output*) berupa hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, yang merupakan wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur Pemerintah Daerah.

Keberhasilan dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil upaya optimal yang mampu diekspresikan oleh seluruh jajaran eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, sehingga semua itu sekaligus dapat mencerminkan tingkat kinerja yang diharapkan.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 diantaranya :

1. Penghargaan Adipura selama 9 tahun berturut-turut dengan kategori Kota kecil terbersih tingkat nasional;
2. BLH melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah untuk menuju Sekolah Adiwiyata, Tahun 2015 ada 4 (empat) sekolah yang berhasil mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional, yaitu SDN 02 Mendawai , SDN 1 Sidorejo, SMPN 7 Arut Selatan, dan SMPN 1 Arut Selatan.
3. Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendapat peringkat hijau tingkat nasional. Adapun Peringkat Hijau pada Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2015 yaitu PT. Gunung Sejahtera Dua Indah, PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona.

Keberhasilan tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas.

Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan jajaran eksekutif tidak akan bermakna dan berguna lebih tanpa dukungan dan kerja sama segenap jajaran legislatif sebagai wakil rakyat maupun dukungan rakyat sendiri. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Semoga hasil pembangunan yang telah dicapai dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai capaian keberhasilan dan permasalahan selama tahun 2015 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, diharapkan akan selalu menjadi kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, berlandaskan prosedur yang berlaku, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sangat disadari, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua. Amiin.

